QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2021

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terjadi perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Kabupaten Aceh Utara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara, maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012- 2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

RPJM Kabupaten Aceh Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX : Penutup

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Juli 2021 M
5 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Juli 2021 M
5 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH : (2/75/2021)

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I.4
1.3. Hubungan Antar Dokumen I.6
1.4. Maksud dan Tujuan..... I.12
1.5. Sistematika Penulisan..... I.13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II.1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... II.1
2.1.1.1 Letak Geografis II.1
2.1.1.2 Topografi dan Morfologi Wilayah II.4
2.1.1.3 Iklim II.7
2.1.1.4 Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah II.8
2.1.1.5 Geologi II.9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah..... II.12
2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi II.12
2.1.2.2 Penetapan Peruntukan Kawasan Penting..... II.13
2.1.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian II.17
2.1.2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan II.18
2.1.2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan II.19
2.1.2.6 Kawasan Peruntukan Industri II.20
2.1.2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata II.20
2.1.2.8 Kawasan Budidaya Lainnya II.22
2.1.2.9 Wilayah Rawan Bencana II.24
2.1.2.10 Pengelolaan DAS..... II.25
2.1.3 Demografi..... II.29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II.31
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.31
2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II.31
2.2.1.2 Laju Inflasi II.34
2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita II.35
2.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan II.36
2.2.1.5 Indeks Gini Ratio II.36
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat..... II.37
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Masyarakat II.37
2.2.2.2 Pendidikan II.38
2.2.2.3 Kesehatan II.42
2.2.2.4 Ketenagakerjaan II.44
2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga..... II.45
2.3 Aspek Pelayanan Umum..... II.49
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib..... II.49
2.3.1.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II.49
2.3.1.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... II.96
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II.121
2.3.3 Fokus Layanan Keistimewaan Aceh II.131
2.4 Aspek Daya Saing..... II.135
2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur..... II.135
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi..... II.136
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia..... II.137
2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... II.148

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... III.1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu..... III.1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK..... III.1
3.1.2. Neraca Daerah..... III.5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... III.10
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran..... III.10
3.2.2. Analisis Pembiayaan..... III.12
3.3. Kerangka Pendanaan..... III.16
3.3.1. Perkiraan Pendapatan dan Belanja..... III.16
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III.19

BAB IV ANALISIS ISI - ISU STRATEGIS..... IV.1
4.1. Permasalahan Dan Tantangan Pembangunan Aceh Utara..... IV.1
4.1.1. Reformasi Birokrasi IV.2
4.1.2. Pendidikan IV.2
4.1.3. Keistimewaan Aceh IV.3
4.1.4. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial IV.3
4.1.5. Infrastruktur Dasar Publik IV.4
4.1.6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang..... IV.4
4.1.7. Penanggulangan Kemiskinan..... IV.4
4.1.8. Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Produk Pertanian, Pengembangan UMKM dan Koperasi..... IV.5
4.1.9. Pengembangan Pariwisata..... IV.5
4.1.10. Perbaikan Iklim Investasi..... IV.5
4.1.11. Pemberdayaan Gampong..... IV.6
4.2. Isu Strategis..... IV.6

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1
5.1. V i s i V.1
5.2. M i s i V.1
5.3. Tujuan dan Sasaran V.2

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... VI.1
6.1. Strategi dan arah kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022..... VI.1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII.1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VIII.1

BAB IX PENUTUP IX.1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar	1.1	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan	I.7
Gambar	2.1	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara.....	II.2
Gambar	2.2	Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara	II.5
Gambar	2.3	Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara.....	II.6
Gambar	2.4	Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara	II.7
Gambar	2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara.....	II.8
Gambar	2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara.....	II.9
Gambar	2.7	Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara.....	II.9
Gambar	2.8	Peta DAS Krueng Jambo Aye.....	II.11
Gambar	2.9	Peta DAS Krueng Peusangan.....	II.12
Gambar	2.10	Peta Areal NKT DAS Krueng Peusangan.....	II.16
Gambar	2.11	Peta Rekomendasi Peruntukan Kawasan Penting Kab.Aceh Utara	II.16
Gambar	2.12	Peta Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara	II.24
Gambar	2.13	Ekosistem DAS.....	II.26
Gambar	2.14	Peta Pos Hujan Kerjasama WS Jambo Aye.....	II.28

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan.....	II.3
Tabel	2.2	Rekomendasi Hasil Analisis untuk Kabupaten Aceh Utara.....	II.14
Tabel	2.3	Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS Kab. Aceh Utara....	II.29
Tabel	2.4	Perkembangan Distribusi Penduduk Kab. Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2015-2019.....	II.30
Tabel	2.5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rupiah) Tahun 2015-2019.....	II.32
Tabel	2.6	Distribusi Persentase PDRB Kab. Aceh Utara atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen).....	II.33
Tabel	2.7	Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015- 2019.....	II.34
Tabel	2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2019.....	II.35
Tabel	2.9	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019	II.36
Tabel	2.10	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2015-2019.....	II.37
Tabel	2.11	Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan Provinsi Aceh Tahun 2015-2019.....	II.37
Tabel	2.12	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.38
Tabel	2.13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.39
Tabel	2.14	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.39
Tabel	2.15	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.40
Tabel	2.16	APT Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.41
Tabel	2.17	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.41
Tabel	2.18	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.43
Tabel	2.19	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.43
Tabel	2.20	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.44
Tabel	2.21	Rasio Penduduk yang Bekerja Selama Periode Tahun 2015-2019.....	II.45
Tabel	2.22	Jumlah Grup Kesenian di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.46
Tabel	2.23	Penggiat Seni dan Budaya Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.47
Tabel	2.24	Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.48

Tabel 2.25 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.50
Tabel 2.26 Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utar Tahun 2015-2019..... II.51
Tabel 2.27 Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.52
Tabel 2.28 Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.52
Tabel 2.29 Angka Melanjutkan Sekolah Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.53
Tabel 2.30 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.53
Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.54
Tabel 2.32 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.55
Tabel 2.33 Rasio Murid dan Guru Perkelas Rata-rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.56
Tabel 2.34 Guru Kualifikasi S1/DIV Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.57
Tabel 2.35 Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.57
Tabel 2.36 Kondisi Prasarana Kesehatan Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.58
Tabel 2.37 Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.59
Tabel 2.38 Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif Terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2015-2019..... II.60
Tabel 2.39 Jumlah Sarana Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2015-2019..... II.61
Tabel 2.40 Cakupan Desa UCI di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.61
Tabel 2.41 Cakupan Balita Gizi Buruk Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.62
Tabel 2.42 Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang diobati di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.63
Tabel 2.43 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.63
Tabel 2.44 Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.65
Tabel 2.45 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.65
Tabel 2.46 Cakupan Kunjungan Bayi di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.66
Tabel 2.47 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.67
Tabel 2.48 Persentase Kondisi Jalan di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.69
Tabel 2.49 Sempadan Jalan yang di pakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.70
Tabel 2.50 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2015-2019..... II.71

Tabel 2.51 Luasan Daerah Irigasi di Kab. Aceh Utara Berdasarkan Kewenangan.... II.72
Tabel 2.52 Rasio Perkembagan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.73
Tabel 2.53 Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.73
Tabel 2.54 Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Mesjid dan Meunasah) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.74
Tabel 2.55 Persentase Rumah Berakses Sanitasi Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.75
Tabel 2.56 Rasio Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.76
Tabel 2.57 Rasio Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.77
Tabel 2.58 Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.78
Tabel 2.59 Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Utara II.80
Tabel 2.60 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.82
Tabel 2.61 Persentase Rumah Layak Huni Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.83
Tabel 2.62 Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.83
Tabel 2.63 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2015-2019..... II.84
Tabel 2.64 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.85
Tabel 2.65 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.86
Tabel 2.66 Jumlah Wilayah Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.89
Tabel 2.67 Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.90
Tabel 2.68 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.91
Tabel 2.69 Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019 ..... II.92
Tabel 2.70 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019 ..... II.92
Tabel 2.71 Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kab.Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.93
Tabel 2.72 Ketersediaan Pangan Utama di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.94
Tabel 2.73 Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.101
Tabel 2.74 Pemantauan Kualitas Air Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.102
Tabel 2.75 Pemantauan Kualitas Udara Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.102

Tabel 2.76 Jumlah Kasus Lingkungan Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.103
Tabel 2.77 Volume dan Produksi Sampah Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.104
Tabel 2.78 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Kab. Aceh Utara Tahun 2019..... II.105
Tabel 2.79 Penghijauan pada Kawasan Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Tahun 2015-2019 ..... II.107
Tabel 2.80 Kepemilikan KTP di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.109
Tabel 2.81 Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.110
Tabel 2.82 Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.111
Tabel 2.83 Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga dan Akseptor KB di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.111
Tabel 2.84 Jumlah arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa) Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.113
Tabel 2.85 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab. A. Utara Tahun 2015-2019..... II.113
Tabel 2.86 Sarana Pendukung Lalu Lintas Jalan Raya Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.114
Tabel 2.87 Persentase Koperasi Aktif di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019 ..... II.115
Tabel 2.88 Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.116
Tabel 2.89 Jumlah Persentase UMKM di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.117
Tabel 2.90 Jumlah Sektor Ekonomi UMKM Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.117
Tabel 2.91 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.119
Tabel 2.92 Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni dan Seni Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.119
Tabel 2.93 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.120
Tabel 2.94 Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.121
Tabel 2.95 Jumlah Produksi Ikan di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.123
Tabel 2.96 Jumlah Konsumsi Ikan di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.124
Tabel 2.97 Jumlah Wisatawan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.125
Tabel 2.98 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.125
Tabel 2.99 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.126
Tabel 2.100 Perkembangan Areal Komoditi Perkebunan Rakyat Kab.Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.127
Tabel 2.101 Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat Kab. Aceh Utara Tahun 2015- 2019..... II.128
Tabel 2.102 Perkembangan Capaian Sektor Perindustrian di Kab. Aceh Utara Tahun 2015- 2019 (Rp. Milyar)..... II.129

Tabel	2.103	Perkembangan Capaian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kab. Aceh Utara Tahun 2015 - 2019 (Rp. Milyar).....	II.130
Tabel	2.104	Perkembangan Nilai Ekspor Impor Melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.131
Tabel	2.105	Persentase Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Kab. Aceh Utara Tahun 2018 - 2020.....	II.133
Tabel	2.106	Perkembangan Dayah dalam Kab. Aceh Utara Tahun 2016-2020....	II.134
Tabel	2.107	Rekapitulasi Penerimaan Zakat Kab. Aceh Utara Thn 2015-2019...	II.135
Tabel	2.108	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019.....	II.137
Tabel	2.109	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2015-2019.....	II.138
Tabel	2.110	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Tehadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Aceh Utara.....	II.139
Tabel	2.111	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kab. Aceh Utara.....	II.149
Tabel	2.112	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kab. Aceh Utara.....	II.150
Tabel	2.113	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara.....	II.154
Tabel	2.114	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.....	II.155
Tabel	2.115	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab.Aceh Utara	II.156
Tabel	2.116	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Aceh Utara	II.157
Tabel	3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Aceh Utara.....	III.4
Tabel	3.2	Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019.....	III.6
Tabel	3.3	Rasio Likuiditas Neraca Kabupaten Aceh Utara.....	III.8
Tabel	3.4	Rasio Solvabilitas Neraca Kab. Aceh Utara Tahun 2016 - 2020.....	III.9
Tabel	3.5	Analisis Porposi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Aceh Utara Tahun 2015 - 2020.....	III.12
Tabel	3.6	Surplus dan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020.....	III.13
Tabel	3.7	Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Aceh Utara Tahun 2016-2020.....	III.14
Tabel	3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Aceh Utara Tahun 2016 - 2020	III.15
Tabel	3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 - 2020	III.15
Tabel	3.10a	Reaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 - 2020.....	III.17
Tabel	3.10b	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022.....	III.18

Tabel	3.11a	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022.....	III.19
Tabel	3.11b	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020.....	III.20
Tabel	3.12a	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020.....	III.21
Tabel	3.12b	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022.....	III.21
Tabel	5.1a	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 - 2002.....	V.4
Tabel	5.1b	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 - 222.....	V.10
Tabel	6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kab. Aceh Utara Tahun 2017 - 2022.....	VI.2
Tabel	6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 - 2022.....	VI.8
Tabel	6.3a	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif.....	VI.11
Tabel	6.3b	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif.....	VI.37
Tabel	7.1a	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kab. Aceh Utara Tahun 2018 - 2020.....	VII.2
Tabel	7.1b	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 - 2022.....	VII.2
Tabel	7.2a	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan	VII.3
Tabel	7.2b	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan	VII.36
Tabel	8.1a	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.....	VIII.2
Tabel	8.1b	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.....	VIII.4
Tabel	8.2a	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	VIII.5
Tabel	8.2b	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	VIII.15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tersebut, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Sehingga saat ini tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan

telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu dikaji kembali penetapan indikator dan target kinerja yang lebih realistis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi indikator capaian;
2. Melakukan perubahan target/menyesuaikan indikator kinerja dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan dengan menentukan target-target indikator. Target tersebut harus berdasarkan data-data kondisi eksisting atau data-data realisasi periode sebelumnya yang akurat sebagai asumsi agar target indikator tidak melebihi batas kemampuan sumber daya OPD (*man, money, method, material, machine*);
3. Perlu penyelarasan dan penambahan arah kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD;
4. Program yang tercantum dalam RPJMD, namun tidak dilaksanakan maka jika dinilai tidak perlu dilaksanakan agar dihapus dari dokumen RPJMD dan jika dinilai perlu untuk dilaksanakan agar diberikan dorongan yang kuat guna mengejar "ketinggalan". Selanjutnya untuk program yang tidak tercantum dalam RPJMD yaitu Program DOKA namun dilaksanakan agar dicantumkan pada dokumen perubahan RPJMD;
5. Melakukan perubahan nama program sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Perlu perubahan arah kebijakan terutama dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 masih menemukan beberapa kelemahan antara lain rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan

kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran dan ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan Bupati Aceh Utara untuk menyempurnakan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil sertaindikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dalam dokumen-dokumen perencanaan.

Mengacu pada aturan Pasal 342 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tidak dapat dilakukan perubahan RPJMD jika sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJM dan adanya perubahan kebijakan maupun regulasi di pemerintah pusat, dan juga masa berlaku RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 tersisa 2 (dua) tahun lagi, maka Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan amanat pada Pasal 344 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 akan melaksanakan perubahan RPJMD dengan mengikuti tahapan penyusunan RPJMD mutatis mutandis sesuai berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

RPJMK selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RPJMK juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

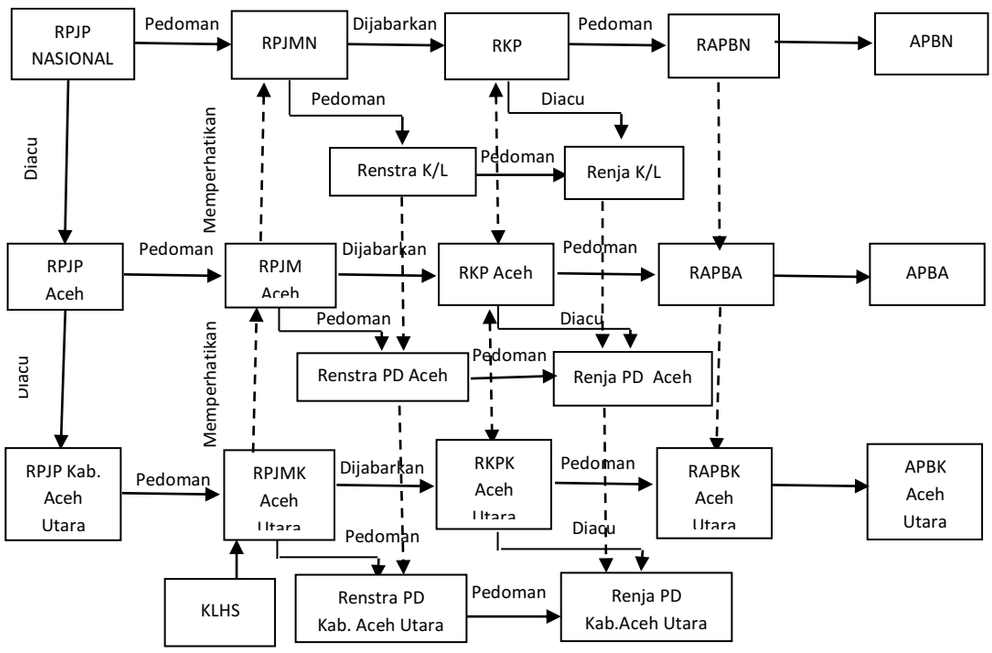
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
28. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
29. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2025;
30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.

1.3 Hubungan Antardokumen

Dalam rangka menjaga sinergitas, keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Utara memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Utara Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selanjutnya Perubahan RPJMK ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Hubungan antara Perubahan RPJMK Aceh Utara dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RPJMK Aceh Utara dengan RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan adalah atas-bawah (*top-down*). Oleh sebab itu, RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022 mengacu RPJMN. Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, 5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing,

6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara, 2) membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,. 4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, 7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik, 8) melakukan revolusi karakter bangsa, dan 9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas Nawa cita menjadi acuan dalam penyusunan RPJMK Aceh Utara.

2. RPJMK Aceh Utara dengan RPJMN 2020-2024

Visi Presiden 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Untuk mencapai visi, telah ditetapkan 9 (Sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita kedua. Misi tersebut antara lain : 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintah yang

Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia, ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi. Kelima arahan tersebut mencakup : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi.

Visi misi RPJMN 2020-2024 selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu ; 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Arahan dan agenda pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022.

3. RPJMK Aceh Utara dengan RPJMA

Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Visi tersebut diurakan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani; 2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan; 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki, 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional, nasional dan internasional; 5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi; 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan; 8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif

yang menghasilkan produk kompetitif; 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan; 10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan. RPJMA juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Utara.

4. RPJMK Aceh Utara dengan RPJPK Aceh Utara

RPJMK Aceh Utara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara 2005-2025 yang saat ini tahap ke-2 (2015-2019) dan tahap ke-3 (2020-2025) yang mempunyai arah kebijakan antara lain: 1) Memantapkan struktur ekonomi daerah dengan dukungan sektor sekunder dan sektor primer serta sektor perdagangan; 2) Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah; 3) Memantapkan daya saing komoditi-komoditi unggulan tanaman bahan makanan, perikanan, perkebunan, dan peternakan; 4) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah; 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; 6) Memelihara kualitas infrastruktur pelayanan publik (infrastruktur dasar); 7) Memelihara pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 8) Mengembangkan syiar Islam yang semarak dan berkualitas ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan arah kebijakan lainnya baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, hukum politik dan pemerintahan serta agama.

5. RPJMK Aceh Utara dengan RTRW Aceh Utara.

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara disusun dengan memperhatikan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032yang saat ini sedang dalam proses revisi. Perubahan RPJMK menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Aceh Utara.

6. Integrasi KLHS dengan RPJMK Aceh Utara

Penyelenggaraan KLHS terhadap Perubahan RPJMK Aceh Utara yaitu dengan tersusunnya laporan KLHS RPJMK Aceh Utara yang memuat pengkajian prakiraan dampak/implikasi KRP perubahan RPJMK Aceh Utara terhadap lingkungan hidup khususnya dan keberlanjutan pembangunan yang bersifat strategis serta rekomendasi alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) termasuk mitigasi yang dapat menjamin kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

Identifikasi isu-isu strategis Pembangunan Berkelanjutan (PB) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam kajian KLHS, isu-isu strategis pembanguan berkelanjutan menggunakan kriteria yaitu : a. Implikasi/dampak yang ditimbulkan menyangkut hajat hidup orang banyak; b. bersifat lintas sektor dan lintas wilayah; c. apabila KRP dilaksanakan akan memberikan dampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan; d. berpotensi menganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan mengancam investasi besar; dan e. berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda. Isu-isu pembangunan berkelanjutan didasarkan pada kesamaan substansi dan kajian sebab akibat menyepakati 6 isu strategis dengan prioritas berikut :

1. Alih Fungsi Hutan dan Lahan
2. Konflik Sosial
3. Pembangunan Cagar Budaya
4. Bencana Hidrometeorologis
5. Pencemaran Lingkungan
6. Penurunan Jasa Lingkungan

Isu-isu strategis ini lebih lanjut diintegrasikan menjadi pertimbangan lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan bersifat strategis yaitu pada arah kebijakan rencana dan program dalam perubahan RPJMK Aceh Utara.

Dalam penetapan Kebijakan, Rencana Dan Program (KRP) prioritas, didasari oleh berbagai pertimbangan teknis maupun non teknis bahwa KRP tersebut berpotensi akan menimbulkan dampak pada Sosial Ekonomi Masyarakat, Lingkungan Hidup serta pada pembangunan berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya dalam dokumen KLHS juga mengkaji beberapa sektor sebagai KRP prioritas dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Utara seperti yang diuraikan berikut ini :

1. KRP-01, Pembangunan Sektor Produksi
   Untuk Pembangunan Sektor Produksi mencakup bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, serta Perikanan.
   Adapun program-program pendukung sektor tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
   b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
   c. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
   d. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
   e. Program peningkatan produksi perikanan
   f. Program pengembangan perikanan tangkap
2. KRP-02, Pembangunan Sektor Infrastuktur
   Untuk program-program pendukung sektor Infrastruktur adalah sebagai berikut :
   a. Program penataan struktur industry
   b. Program pembangunan jalan dan jembatan
   c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. KRP-03, Pembangunan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup
   Untuk program pendukung Pembangunan yang dimaksud adalah Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyakat hukum adat yang terkait dengan PPLH.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pe rubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah penyelarasan program pembangunan sesuai dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

sebagai pedoman pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk sisa waktu Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Periode 2017-2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan umum, kebijakan keuangan daerah dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara dalam sisa waktu Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Organsasi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan, KUA dan PPAS, serta RAPBK untuk sisa waktu Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Periode 2017-2022;
4. Sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk sisa waktu Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Periode 2017-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017- 2022 disusun sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal Perubahan RPJM yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis dan kajian. Informasi gambaran umum kondisi daerah selaras dan mendukung permasalahan pembangunan

daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yaitu terkait Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat informasi Permasalahan Pembangunan, Isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM ini karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan mendatang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Penyajian dalam bab ini menguraikan tentang Visi, Misi kepala daerah tepilih yang telah disepakati, upaya perumusan Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan keterkaitan antar elemen perencanaan dalam satu matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan kemudian menjelaskan hubungannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi , serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini dilakukan Penetapan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengeruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek geografi ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu, hal-hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi (tetumbuhan atau flora, dunia binatang (fauna) dan kajian penduduk, serta membahas berkenaan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi (tata air) baik perairan darat maupun laut dan kondisi iklim dari suatu wilayah.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

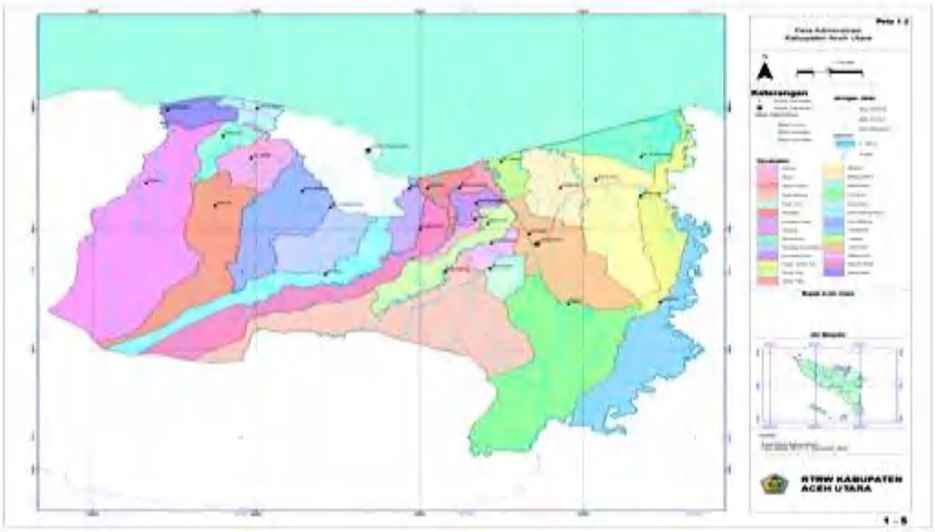
2.1.1.1 Letak Geografis

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang –Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

- Sebelah utara : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah.
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, maka luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km^2 atau 329.686 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km^2 atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan

dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang bertanggung jawab kepada camat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong
di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	%	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Baktiya	158,67	4,81	3	57
2.	Dewantara	39,47	1,20	2	15
3.	Kuta Makmur	151,32	4,59	3	39
4.	Lhoksukon	243,00	7,37	4	75
5.	Matangkuli	78,65	2,39	4	49
6.	Muara Batu	33,34	1,01	2	24
7.	Meurah Mulia	202,57	6,14	3	50
8.	Samudera	43,28	1,31	3	40
9.	Seunuddon	100,63	3,05	3	33
10.	Syamtalira Aron	28,13	0,85	4	34
11.	Syamtalira Bayu	75,36	2,29	4	38
12.	Tanah Luas	30,64	0,93	3	57
13.	Tanah Pasir	20,29	0,62	2	18
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94	4	47
15.	Sawang	384,65	11,67	2	39
16.	Nisam	193,47	5,87	3	29
17.	Cot Girek	189,00	5,73	3	24
18.	Langkahan	150,52	4,57	3	23
19.	Baktiya Barat	83,08	2,52	3	26
20.	Paya Bakong	418,32	12,69	4	39
21.	Nibong	44,91	1,36	2	20
22.	Simpang Keuramat	79,78	2,42	2	16
23.	Lapang	19,36	0,59	2	11
24.	Pirak Timu	45,99	1,39	2	23
25.	Geureudong Pase	271,45	8,23	2	11
26.	Banda Baro	18,00	0,55	2	9
27.	Nisam Antara	30,00	0,91	2	6
TOTAL		3.296,86	100,00	76	852

Sumber: Bagian Pemerintahan Mukim Setdakab Aceh Utara Tahun 2021

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam yang merupakan kecamatan induk.

2.1.1.2 Topografi dan Morfologi Wilayah

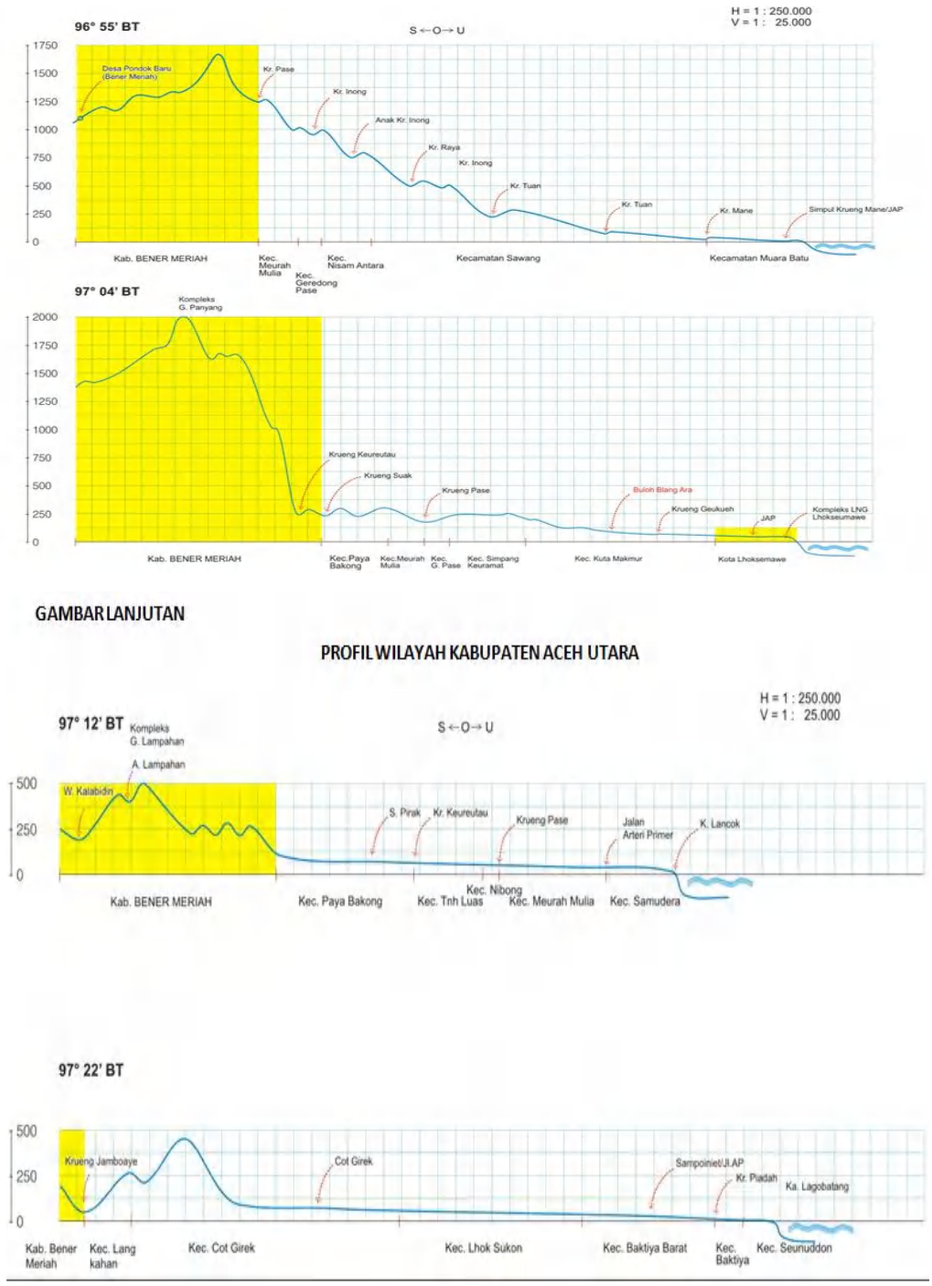
Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan pegunungan.

Selaras dengan geomorfologi tersebut pada Gambar 2.2 diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara–selatan, masing-masing pada garis 96^0 55', 97^0 04', 97^0 12', dan 97^0 22' BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian (Gambar 2.3) yaitu:

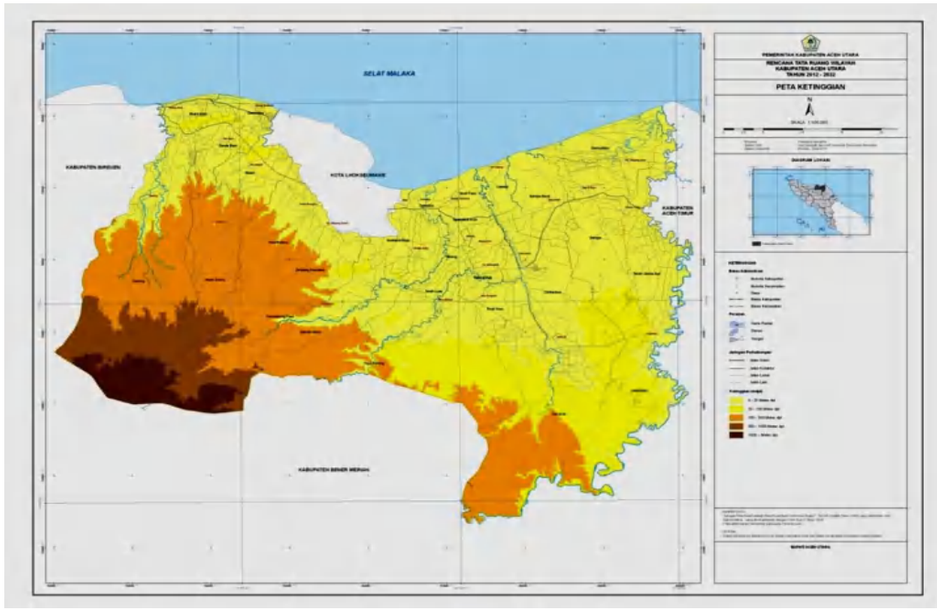
- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%

Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

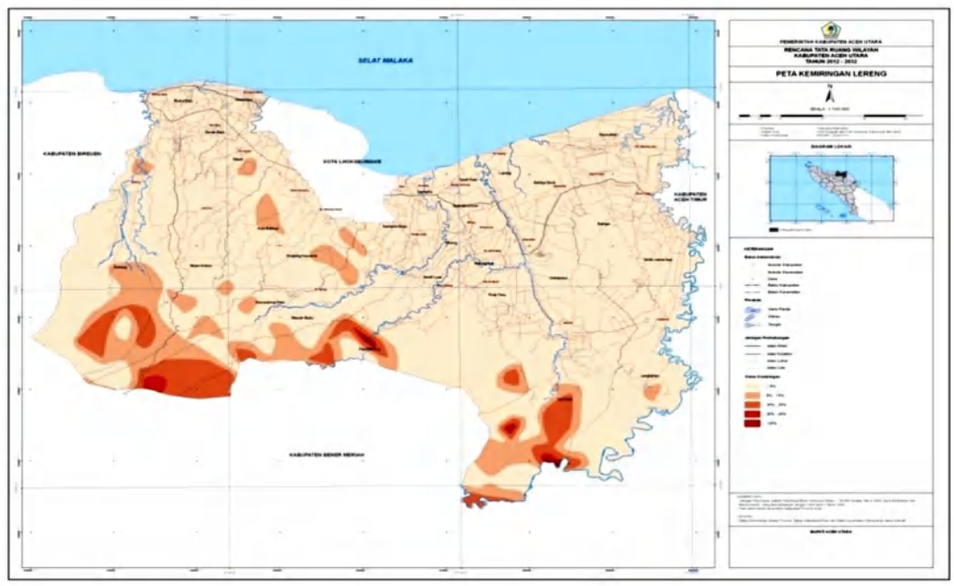


Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara (Gambar 2.4) yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

2.1.1.3 Iklim

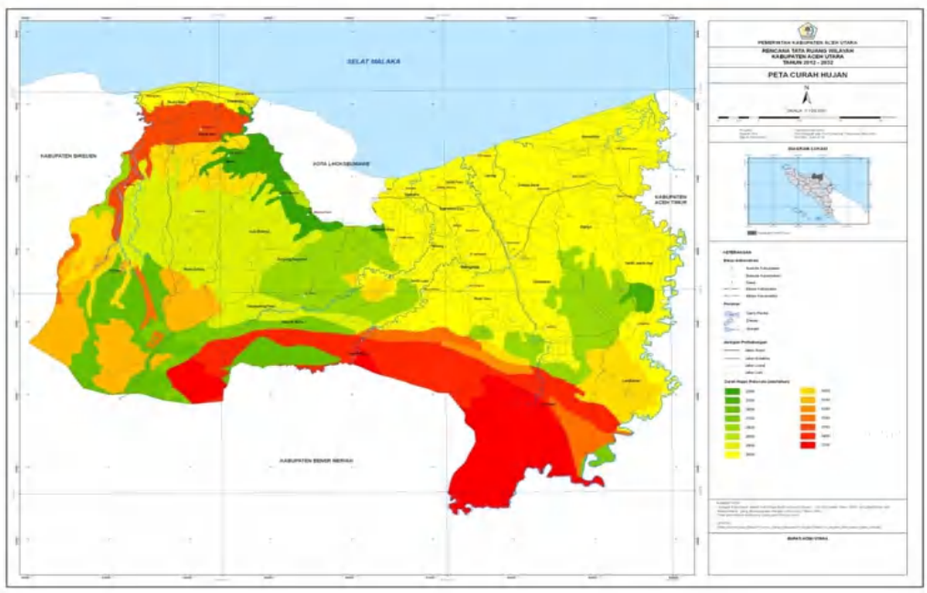
Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid dan Ferguson termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30^0 C, dengan kisaran antara 26^0C sampai 36^0 C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28^0 C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah $32,8^0$ C.

Kelembaban udara berkisar antara 84–89%, dengan rata-rata 86,6 %. Lebih jelasnya sebagaimana tercantum pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara



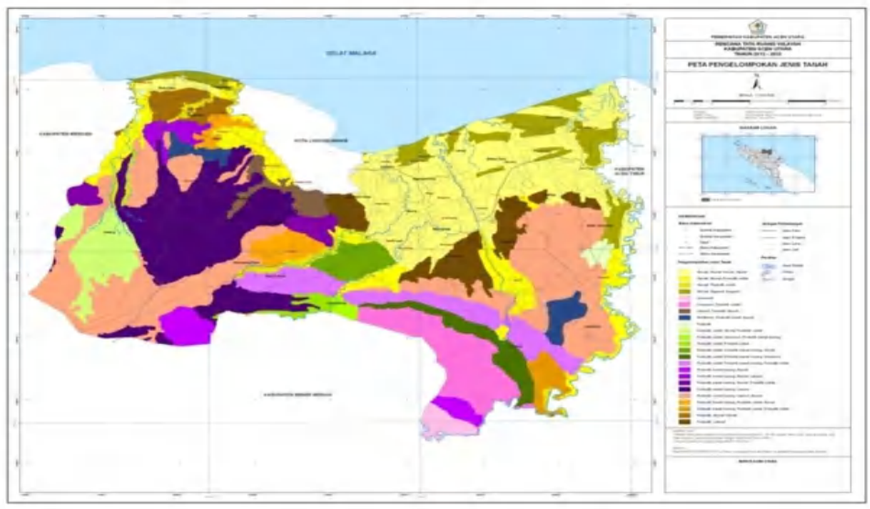
Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

2.1.1.4 Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

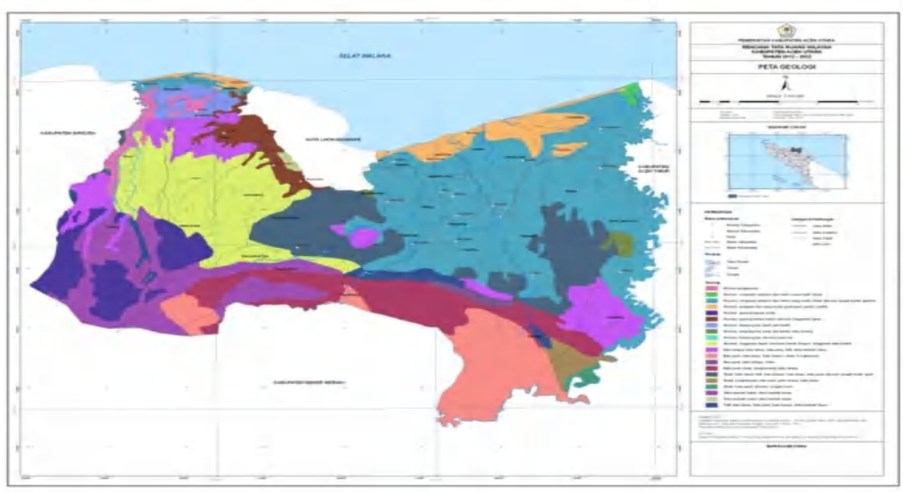


Sumber:Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

2.1.1.5 Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. Adapun Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi Kabupaten Aceh Utara yang dimaksud adalah DAS Krueng Jambo Aye Dan DAS Krueng Peusangan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.7
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

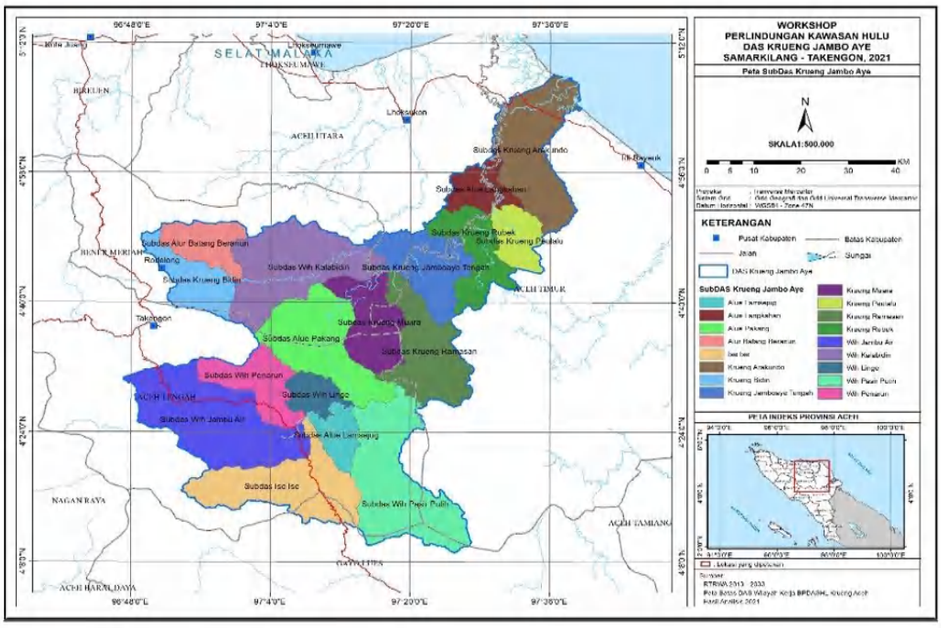
Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

Berdasar Struktur Geologi di atas daerah Kabupaten Aceh Utara dilintasi oleh dua daerah Aliran Sungai yaitu DAS Krueng Jambo Aye dan DAS Krueng Peusangan. Selanjutnya, dengan melihat kondisi sebaran yang ada dan terhadap kondisi DAS yang dimaksud saat ini sangat mempengaruhi berbagai sektor sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Berikut ini adalah gambaran tentang DAS Krueng Jambo Aye dan DAS Krueng Peusangan sebagai berikut:

A. DAS Krueng Jambo Aye

DAS Kreung Jambo Aye adalah daerah aliran sungai (DAS) di Aceh yang melintasi lima Kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Gayo Luwes Serta Aceh Timur. Untuk luas DAS Krueng Jambo Aye saat ini mencapai 462,062 hektare, yang terdiri dari 17 sub DAS dengan rincian sebagai berikut : Subdas Alue Lamsejung 98,45 Ha, Subdas Alue Langkahan 12,75 Ha, Subdas Alue Pakang 38,06 Ha, Subdas Alur Batang Beranun 15,03 Ha, Subdas Ise Ise 39,17 Ha, Subdas Krueng Arakundo 38,9 Ha, Subdas Krueng Bidin 17,57 Ha, Subdas Krueng Jambo Aye Tengah 25,9 Ha, Subdas Krueng Muara 23,14 Ha, Subdas Krueng Peulalu 12,76 Ha , Subdas Krueng Ramasan 31,24 Ha, Subdas Krueng Rubek 21,08 Ha, Subdas Wih Jambu Air 52,73 Subdas Wih Kalabidin 44,76, Subdas Wih Linge 94,02 Ha, Subdas Wih Pasir Putih 49,78 Ha, Subdas Wih Penarun 19,72 Ha. Berikut ini adalah Peta DAS Krueng Jambo Aye, seperti yang ditunjukan gambar di bawah ini :

Gambar 2.8
Peta DAS Krueng Jambo Aye

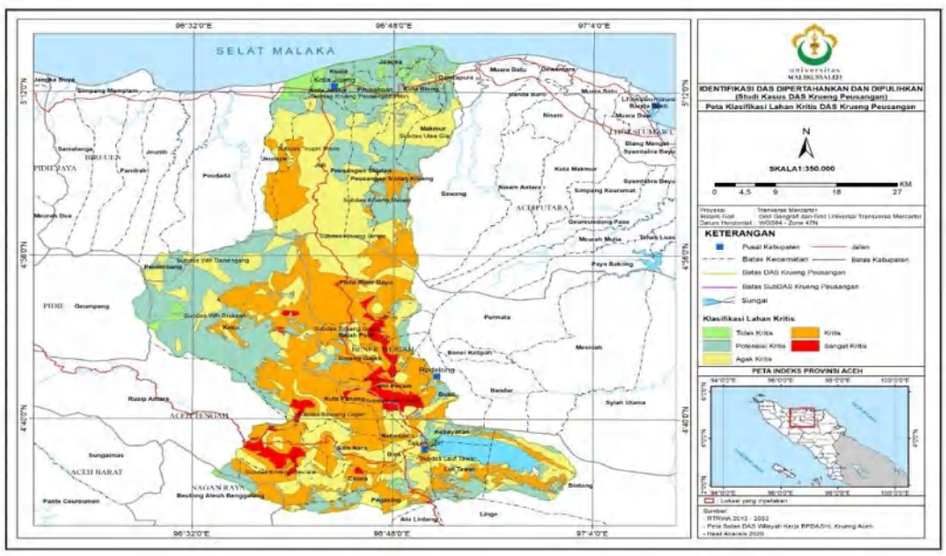


Sumber: BPDASHL Krueng Aceh, 2020

B. DAS Krueng Peusangan

Kreung Peusangan adalah daerah aliran sungai (DAS) di Aceh yang melintasi lima kabupaten/kota. Hulunya berada di Danau Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sementara anak sungainya mengalir lintas batas ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh Utara, Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Luas DAS Krueng Peusangan ini mencapai 249,73696 Hektare, yang panjang sungai utamanya dari pinggir laut Bireuen hingga ke Danau Lut Tawar mencapai 128 kilometer. Sungai-sungai yang bermuara ke Krueng Peusangan sekitar 107 sungai yang terdiri dari 12 sub DAS. Ada Krueng Peusangan Hilir 29,11320 Ha, Ulee Gle 8,92931 Ha, Teupin Mane 18,27631 Ha, Krueng Meueh 12,25548 Ha, Krueng Simpo 17,98225 Ha, Wih Genengan 12,81737 Ha, Timang Gajah 35,85926 Ha, Wih Bruksah 32,56737 Ha, Bawang Gajah 11,53527 Ha, Wih Balek 13,31348 Ha, Krueng Ceulala 23,90905 Ha, dan Laut Tawar 33,17861 Ha. Berikut ini adalah Peta DAS Krueng Peusangan, seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.9
Peta DAS Krueng Peusangan



Sumber: BPDASHL Krueng Aceh, 2020

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan pada pembangunan yang memperhatikan potensi wilayah yaitu melalui pengembangan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012–2032 dan sesuai karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan budidaya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu :

2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Total luas kawasan hutan produksi ini adalah 30.687 Ha.

Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara meliputi : Kecamatan Langkahan 1.341 hektar; Kecamatan Cot Girek

9.502 hektar; Kecamatan Meurah Mulia 4.278 hektar; Kecamatan Geureudong Pase 2.710 hektar; Kecamatan Nisam Antara 2.930 hektar; Kecamatan Sawang 4.952 hektar; dan Kecamatan Paya Bakong 5.000 hektar. Pemanfaatan kawasan hutan produksi yaitu berupa :

a. Eksploitasi hutan, dalam bentuk pengambilan kayu dengan pola tebang pilih dan tanam kembali.
b. Pengambilan hasil hutan non-kayu seperti: rotan, getah, madu lebah, buah-buahan, dan lain-lainnya

2.1.2.2 Penetapan Peruntukan Kawasan Penting

Terkait dengan apa yang diuraikan pada poin 2.1.2.1 tentang kawasan Peruntukan Hutan Produksi, dan berdasarkan sumber data yang dikeluarkan oleh *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia Tahun 2021 bekerjasama dengan Forum terkait lainnya dalam kajian terhadap Peruntukan Kawasan Penting untuk Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa Lanskap kawasan Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu Lanskap yang mempunyai potensi alam yang cukup melimpah. Potensi alam tersebut menjadi tempat yang mempunyai fungsi penting dalam keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, maupun sosial budaya. Potensi alam ini juga menjadi daya tarik bagi pihak-pihak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan.

Pengelolaan dan pamanfaatan sumber daya alam tidak serta merta hanya sebatas pada aktivitas eksploitatif saja, tetapi juga dapat dengan memanfaatkan jasa lingkungan maupun hasil lain yang sifatnya tidak ekstraktif. Pada pengelolaan yang sifatnya eksploitatif dan merubah kondisi tutupan lahan, perlu adanya suatu instrumen untuk mengendalikannya agar masih tetap pada pengelolaan yang lestari. Salah satu intrumen yang dapat digunakan adalah menggunakan kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Selanjutnya, dalam penentuan akhir pada peruntukan kawasan penting dilakukan dengan menggabungkan hasil deliniasi kawasan berdasarkan NKT, Analisis Multi Kriteria, dan Hasil analisis AHP. Hasil kajian NKT yang digunakan sebagai dasar penetapan

keputusan akhir go no go area Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Bireuen adalah hal yang paling penting dan mendasar karena mempertimbangkan keberadaan dari NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5, dan NKT 6. Dalam memberikan rekomendasi pengambilan keputusan akhir juga harus mempertimbangkan kondisi eksisting dan proses penentuan kebijakan antar stakeholder. Maka untuk bisa mengakomodir semua kepentingan yang telah ada di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Bireuen dan mengambil jalan keluar terbik dilakukan analisis yang bertingkat dari berbagai kriteria. Dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan secara bertahap dan menggunakan berbagai macam kriteria pada kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Rekomendasi Hasil Analisis untuk Kabupaten Aceh Utara

Tipe Kawasan	Luas (Ha)	Bobot Analisis Multi kriteria	AHP Preferensi Parapihak	Rekomendasi Keputusan Akhir
NKT	69.434			
Hutan Lindung	7.715			
Tutupan lahan hutan	7.191	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Tutupan Lahan Non Hutan	524	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Hutan Produksi (HP)	21.509			
Tutupan lahan hutan	17.567	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Tutupan Lahan Non Hutan	3.943	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Areal Penggunaan Lain (APL)	38.335			
Tutupan lahan hutan	15.379	90%	Kawasan budidaya Penuh	Kawasan budidaya Penuh
Tutupan Lahan Non Hutan	22.956	90%	Kawasan budidaya penuh	Kawasan Budidaya Terbatas
Sempadan sungai atau tepian badan air	1.875			
Tutupan lahan hutan	95	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
Tutupan Lahan Non Hutan	1.780	90%	Kawasan dilindungi	Kawasan dilindungi
KPNKT	175.047			
Hutan Produksi (HP)	6.248			

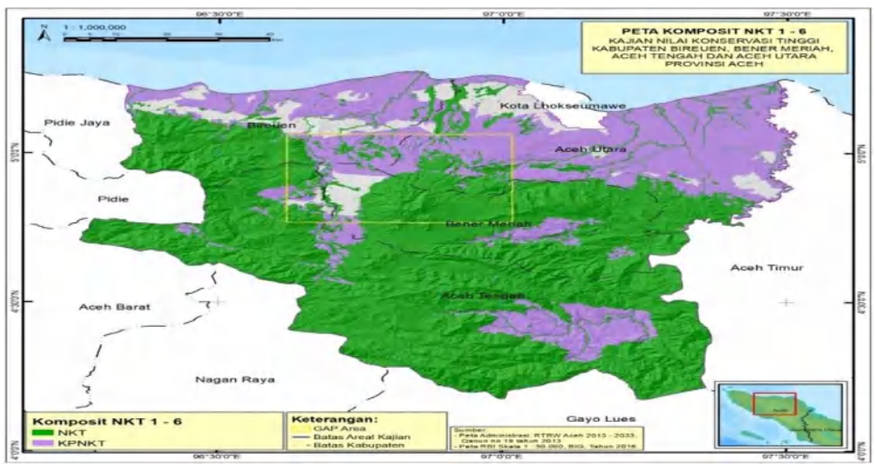
Tutupan lahan hutan	2	57%	Kawasan Budidaya Terbatas	Kawasan Budidaya Terbatas
Tutupan Lahan Non Hutan	6.246	57%	Kawasan Budidaya Penuh	Kawasan Budidaya Penuh
Areal Penggunaan Lain (APL)	168.723			
Tutupan Lahan Non hutan	168.723	57%	Kawasan Budidaya Penuh	Kawasan Budidaya Penuh
Sempadan sungai atau tepian badan air	76			
Tutupan Lahan Non Hutan	76	57%	Kawasan Budidaya Terbatas	Kawasan Budidaya Terbatas

Kabupaten Aceh Utara untuk kawasan terindikasi NKT direkomendasikan untuk dijadikan kawasan lindung. Pada kawasan ini terdapat habitat dan wilayah jelajah species *Capricornis sumatraensis*, harimau sumatera, orangutan sumatera, Gajah (*Elephas maximus*), *Helarctos malayanus*, dan masuk dalam lingkup peta EBA. Pada wilayah Aceh Tengah juga terdapat ekosistem khas berupa hutan dipterocarpa campuran diatas batuan vulkanik, hutan dipterocarpa campuran diatas batuan, hutan dipterocarpa campuran hutan sedimen dan hutan karst. Rekomendasi keputusan ini diperkuat dengan preferensi masyarakat untuk menjadikan kawasan yang terindikasi NKT sebagai kawasan lindung. Namun pada kawasan dengan fungsi APL dapat digunakan untuk budidaya terbatas karena preferensi masyarakat adalah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan budidaya penuh.

Pada kawasan KPNKT walaupun tidak luas namun keberadaannya memberi pengaruh pada keberadaan spesies RTE. Atas kondisi ini dan preferensi yang diberikan oleh para pihak maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah peruntukan kawasan dengan budidaya terbatas pada areal sempadan sungai dan fungsiHP yang masih berpenutupan hutan. Budidaya yang dilakukan dengan tetap mempertahankan kawasan agar tetap berpenutupan hutan atau ditumbuhi oleh tanaman multispesies adalah untuk mendukung keberadaan kawasan terindikasi NKT. Pada areal fungsi HP berpenutyupan non hutan dan APL dijadikan sebagai kawasan budidaya penuh yang bisa ditanami tanaman perkebunan

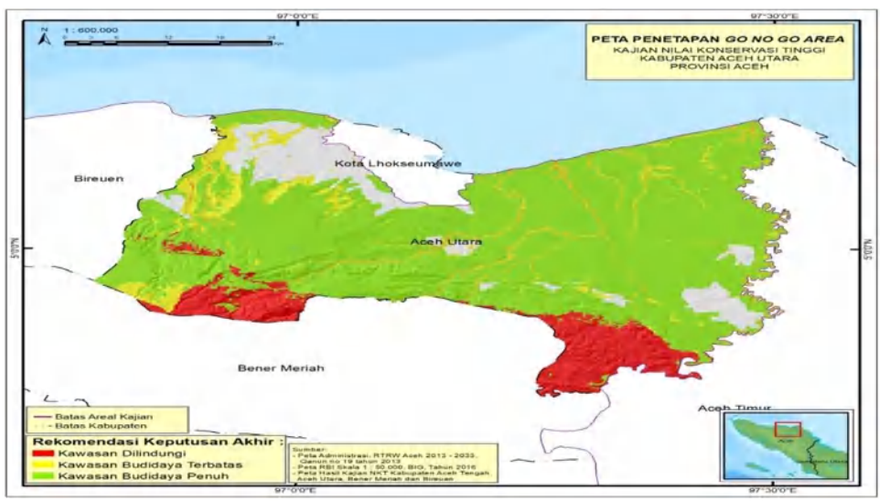
monokultur. Peta areal yang dilindungi dan yang bisa dibudidayakan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.10
Peta Areal NKT DAS Krueng Peusangan



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

Gambar 2.11
Peta Rekomendasi Peruntukan Kawasan Penting
Kabupaten Aceh Utara



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

2.1.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

1. Kawasan Pertanian Lahan Basah

   Kawasan sawah (pertanian lahan basah) merupakan pemantapan dari kawasan sawah yang ada dewasa ini dan direkomendasikan penambahan/perluasannya pada lahan-lahan yang potensial di sekitarnya dan berpeluang untuk dapat dilayani oleh jaringan irigasi/pengairan. Kendati dengan luas yang bervariasi, kawasan sawah terdapat di semua kecamatan. Total luas kawasan sawah ini adalah 46.901 Ha.

   Kegiatan-kegiatan budidaya atau ekonomi produksi lainnya yang potensial tergabung sebagai kegiatan sampingan/diversifikasi antara lain adalah :

   - Perikanan air tawar, dengan pola mina-padi, kolam/tebat, kerambah pada saluran irigasi, dan penangkapan pada perairan tersebut;
   - Peternakan, yang dapat terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas (terutama itik atau bebek);
   - Pertanian palawija/hortikultura, terutama sebagai tanaman selingan dalam kalender tanam, ataupun sebagai tanaman sela.

2. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Kebun Campuran)

   Kawasan kebun campuran tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 44.493 Ha Fungsi kawasan ini adalah sebagai kebun campuran, yang dicirikan oleh variasi tanaman yang beragam dan kegiatan budidaya lainnya meliputi : perumahan perdesaan yang terselip, industri kecil, peternakan, dan lain-lain.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

   Dengan prinsip bahwa hasil kegiatan sawah yaitu padi merupakan bahan pokok strategis bagi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan kawasan sawah ini menjadi sangat penting dan sejauh mungkin dipertahankan luasnya. Apabila masih memungkinkan bagi pencetakan sawah baru pada daerah yang ada dukungan prasarana irigasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kabupaten Aceh

Utara. Luasan lahan pangan berkelanjutan mencapai 39.777 ha dari total luas kawasan untuk sawah.

4. Kawasan Perkebunan

   Kawasan perkebunan sebarannya terletak di bagian pedalaman wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

5. Kawasan Peternakan

   Kawasan peternakan letaknya tersebar di Kabupaten Aceh Utara khususnya di bagian pedalaman wilayah dan tidak terdelineasi serta tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan pengembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau.Jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak besar yang dapat dibudidayakan seperti lembu dan kerbau akan terpusat di Bukit Sentang Kecamatan Lhoksukon, sedangkan ternak kecil adalah kambing dan kelinci. Ternak unggas yang potensial dibudidayakan adalah itik atau bebek.

2.1.2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan tambak merupakan pemantapan dari kawasan tambak yang ada dewasa ini, yang sebarannya adalah di bagian wilayah pesisir, dengan kecenderungan sebaran yang lebih besar di bagian timur. Total luas kawasan tambak adalah 12.174 Ha sedangkan Perikanan tangkap kurang lebih seluas 37.744 Ha. Rencana pengelolaan kawasan tambak adalah pemanfaatan utama untuk kegiatan tambak yang didukung oleh sistem saluran untuk kebutuhan airnya.

Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuala Cangkoy.

2.1.2.5 Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

1. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:
   - Emas, meliputi : Kecamatan Meurah Mulia;
   - Kromium/Emas Putih, meliputi : Kecamatan Geureudong Pase, Meurah Mulia, Paya Bakong, Pirak Timu, Cot Girek; dan
   - Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong.
2. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari :
   - Andesit meliputi : Kecamatan Sawang
   - Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
   - Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas
3. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :
   - Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat, Geureudong Pase.
   - Pasir meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
   - Pasir urug meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
   - Batu Kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.
   - Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu
4. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timu, Lhoksukon, Baktiya, Cot Girek, Langkahan, Tanah Jambo Aye.
5. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara.
6. Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas alam, seperti yang telah dieksploitasi oleh Perusahaan EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang dikenal dengan LNG Arun.

2.1.2.6 Kawasan Peruntukan Industri

1. Kawasan Industri Sedang

   Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keuramat. Kawasan peruntukan industri sedang yang ada di Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

2. Kawasan Industri Kecil

   Kawasan industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan, dan banyak terselip kawasan permukiman. Kawasan industri kecil terdiri dari sentra-sentra industri rumahan (home industry). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

2.1.2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara diklasifikasikan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

1. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya yang dikembangkan adalah objek wisata budaya, yaitu :

- Makam Malikussaleh dan Malikul Dhahir, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk. 44, di Kec. Samudera;
- Makam Naina Husam Al-Din, di Kec. Samudera;
- Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk. Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Sultanah Nahrisyah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk. Batee Bale A, di Kec. Samudera;

- Makam Tgk. Batee Bale B, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk. Saleh Salihin, di Kec. Samudera;
- Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi, di Kec. Samudera;
- Makam Said Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Perdana Menteri M.Yacob, di Kec. Samudera;
- Makam Raja Muhammad Mns. Nibong, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Ratu Al'Ala Binti Malikul Dahir, di Kec. Pirak Timu;
- Makam Tgk Mursalah Ibnu Talabuddin, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk. Meunasah Reulob, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Raja Purupi, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk. Jrat Manyang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk. Di Glumpang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk. Di Padang, di Kec. Baktiya;
- Makam Tgk. Batee Badan, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Glewang Anval, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Tgk. Pantee Keurajen, di Kec. Sawang;
- Rumah Adat Cut Meutia, di Kec. Matangkuli;
- Makam Cut Meutia, di Kec. Cot Girek.

2. Pariwisata Alam

- Objek wisata di pesisir pantai, berupa : Pantai Bantayan di Gampong Bantayan, Pantai Ulee Rubek di Gampong Ulee Rubek Timur dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon, Pantai Sawang di Gampong Sawang Kec. Samudera, Pantai Lancok di Gampong Lancok Kec. Syamtalira Bayu, Pantai Pusong di Gampong Bangka Jaya Kec. Dewantara; Pantai Dakuta Bungkah di Gampong Bungkah Kec. Muara Batu.
- Objek wisata di pedalaman, berupa : Air Terjun Blang Kulam dan Rayap di Gampong Panton Rayoek I, Lhok Seulayang di Gampong Lhok Jok, Krueng Saweuk di Gampong Saweuk Kec. Kuta Makmur, Air Terjun Seumirah di Kd. Seumirah, Wisata Gunung Salak di Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara, Air terjun tujuh bidadari di Kec. Geureudong Pase, Pemandian Krueng Sawang di Gampong Sawang Kec. Sawang, dan Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Kec. Cot Girek.

2.1.2.8 Kawasan Budidaya Lainnya

1. Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara

   Kawasan pelabuhan adalah Pelabuhan Lhokseumawe di Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, dengan luas 166 Ha. Pelabuhan ini dapat melayani kegiatan bongkar muat umum (pelabuhan umum) maupun bongkar muat khusus industri besar (pelabuhan khusus) untuk tujuan luar negeri dan dalam negeri (antar provinsi). Melayani angkutan penyeberangan luar negeri antara Lhokseumawe-Penang/Langkawi (Malaysia). Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Internasional, terkait dengan dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe.
2. Kawasan Bandar Udara adalah kompleks Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu, dengan luas 83 Ha. Bandara udara ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe sehingga diusulkan sebagai bandar udara pengumpan. Bandara ini dikelola oleh pihak Pemda Kabupaten Aceh Utara. Rute penerbangan yang dilayani saat ini yaitu Muara Batu-Medan dan Muara Batu-Banda Aceh.
3. Kawasan Pertanian Terpadu

   Kawasan pengembangan pertanian terpadu terletak di tengah kawasan hutan produksi di Kecamatan Sawang dengan luasan 430 Ha. Berdasarkan karakter lokasinya, maka kegiatan pertanian yang dikembangkan adalah merupakan pertanian pada lahan kering, baik berupa perkebunan atau pertanian lahan kering maupun pertanian ikutan lainnya seperti peternakan, industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya.
4. Wilayah Laut Kewenangan

   Panjang garis pantai mencapai 51 km sehingga berdasarkan kewenangan kabupaten sampai dengan 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan mencapai 37.744 Ha.Pemanfaatan wilayah laut kewenangan saat ini masih terbatas pada bentuk pemanfaatan penangkapan ikan oleh para nelayan di pesisir, dan sebagai alur pelayaran menuju dan dari pelabuhan laut Lhokseumawe di Krueng Geukueh. Peluang pengembangan pemanfaatan selain untuk perikanan tangkap dapat juga untuk

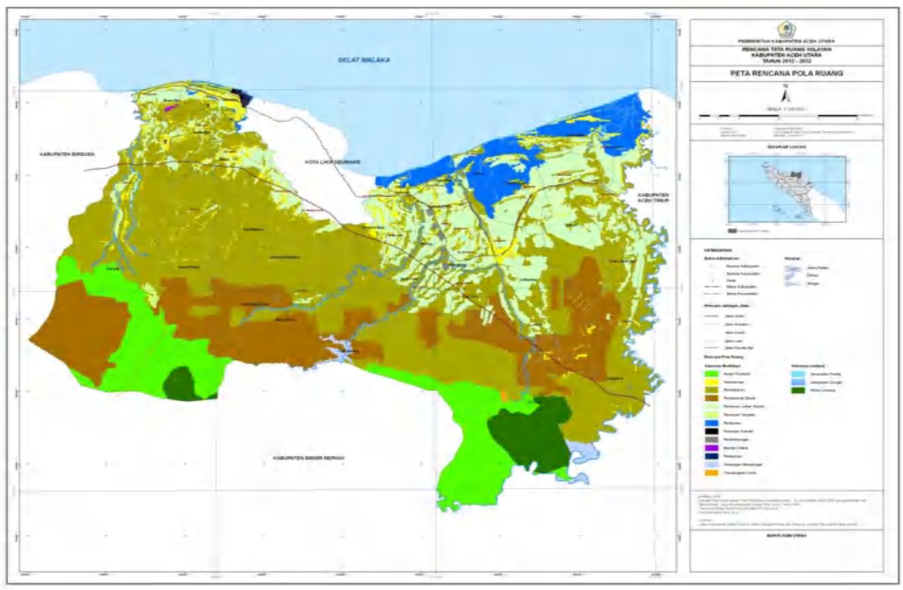
kegiatan wisata bahari, potensi tambang di bawah laut, jalur pelayaran tepi pantai, dan lainnya.

5. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye dan Krueng Keureuto

   Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye terletak di Kecamatan Langkahan yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Jambo Aye. Waduk yang dibangun dengan kapasitas 1,5 milyar m^3 direncanakan digunakan selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah I Aceh dengan kapasitas 235 MW, juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 55.700 Ha lahan persawahan, sebagai sumber air baku dengan debit 11,6 m3/det dan pengendalian banjir (daerah Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya dan Seunuddon), serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 2.745 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

6. Kawasan Waduk Krueng Keureuto terletak di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Luas yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Keureuto. Fungsi waduk ini adalah selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 3,27 MW juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 4.568 Ha lahan persawahan, untuk pengendalian banjir dengan besar kendali 29,94 juta m2 (banjir Paya Bakong, Pirak Timu, Matangkuli, Lhoksukon, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang) serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 710 Ha.

Gambar 2.12
Peta Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

2.1.2.9 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

1. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
2. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);

3. Bencana banjir, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Binjee dan Gampong Blang Crok (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu (Kecamatan Bandar Baro), Gampong Meunasah Glong dan Gampong Keude Bayu (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Matang IX dan Gampong Punti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Tanah Luas), Gampong Blang Peuria (Kecamatan Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan Syamtalira Aron), dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara);
4. Bencana gempa bumi dan Bencana tsunami dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan pinto Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

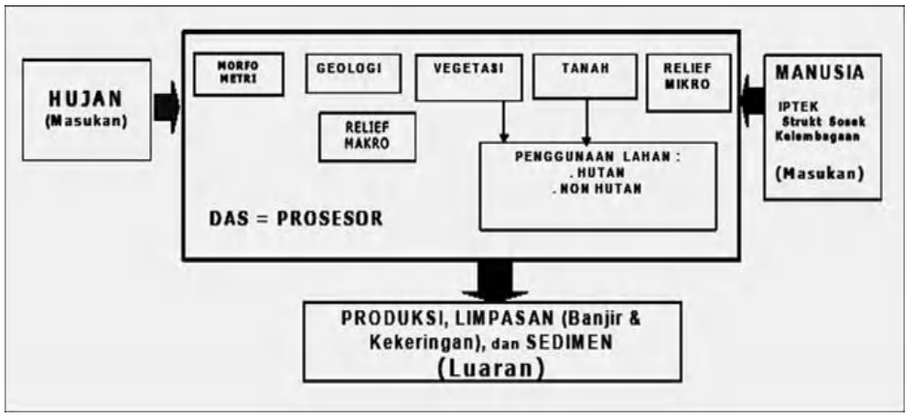
2.1.2.10 Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang di amanatkan dalam PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS yang mengatur tentang kriteria terhadap DAS itu sendiri, antara lain adalah Tentang Das dipulihkan, Meningkatkan Daya Dukung DAS serta Das yang dipertahankan, sedangkan untuk aturan

Pengelolaan DAS ada aturan yang mengikat diantaranya Keputusan Presiden dan 9 (Sembilan) Peraturan Menteri. Adapun tujuan dari Pengelolaan DAS antara lain mencapai masyarakat yang sejahtera (adil, makmur, merdeka dan berdaulat; Mewujudkan kepedulian, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS agar pembangunan dapat berkelanjutan; Daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem DAS meningkat, termasuk terjaganya produktifitas Hutan dan lahan; dan Tata air DAS optimal (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu).

Berikut ini adalah Ekosistem DAS seperti yang diuraikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.13
Ekosistem DAS



Sumber WWF Indonesia, 2021

Untuk ruang lingkup kegiatan Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah searah dengan rencana lingkup Potensi Pengembangan Wilayah yang berkaitan seperti yang diuraikan diatas, yang mengacu pada rencana pola ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012–2032 dengan menyesuaikan karakteristik wilayah yang ada. Selanjutnya, dengan berbagai indikasi Program egiatan yang lahir dari rencana pengembangan wilayah yang di maksud, banyak yang berdampak langsung terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Utara, maka secara tidak langsung sangat mendukung dalam rencana Kegiatan Pengelolaan DAS Krueng Jambo Aye dan DAS Krueng Peusangan secara Terpadu

dan Berarah seperti yang di amanatkan dalam aturan yang dimaksudkan di atas.

Adapun lingkup kegiatan Pengelolaan DAS, seperti yang diuraikan di bawah ini antara lain adalah Penataan ruang (kawasan lindung, budidaya, kawasan khusus, dll); Pengelolaan sumber daya air (kualitas, kuantitas, distribusi dan kontinuitas); Pengelolaan vegetasi (kawasan hutan dan luar kawasan hutan); Pengembangan sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pengairan, dll); Pembinaan/pemberdayaan sumberdaya manusia (penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll); Pengembangan kelembagaan (Forum DAS, Kelompok Tani, LSM, Tim Koordinasi, Jejaring Kerja, dll).

Menelaah terhadap permasalahan utama terhadap DAS adalah terjadinya banjir yang sering melanda lebih dari tujuh kabupaten/kota di wilayah pantai barat-selatan, pantai timur dan wilayah tengah Aceh, diyakini terjadi karena tingkat kerusakan wilayah hulu berbagai daerah aliran sungai di Provinsi Aceh semakin tinggi. Tanpa aksi nyata dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah setempat, diyakini berbagai bencana alam karena kerusakan lingkungan akan semakin sering terjadi di Aceh. Data Wahana Lingkungan Hidup Aceh tahun 2006, kerusakan DAS mencapai 46,40 persen atau 714.724 hektar (ha) dari 1.524.624 ha total luas DAS. Kawasan DAS yang kritis terjadi di pantai timur Aceh, seperti DAS Peusangan, yang merupakan wilayah sumber air lima kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Diperkirakan kerusakan rata-rata di atas 70 persen. Data dari Balai Pengelola DAS Krueng Aceh Departemen Kehutanan, antara tahun 1999-2008, banyak terjadi pengurangan luasan DAS, termasuk didalamnya luasan daerah resapan air karena pembalakan liar. Kerusakan terparah terjadi di DAS Krueng Aceh. Bila pada tahun 1999, luas tutupan lahan DAS tersebut masih sekitar 207.740 hektar, pada tahun 2008, luas tutupan lahan DAS tersebut hanya mencapai 172.370 hektar saja. Kemudian, DAS Krueng Peusangan yang semula luasnya mencapai 297.080 hektar, tahun 2008 ini luasannya hanya mencapai 235.975 hektar saja. Begitu juga dengan

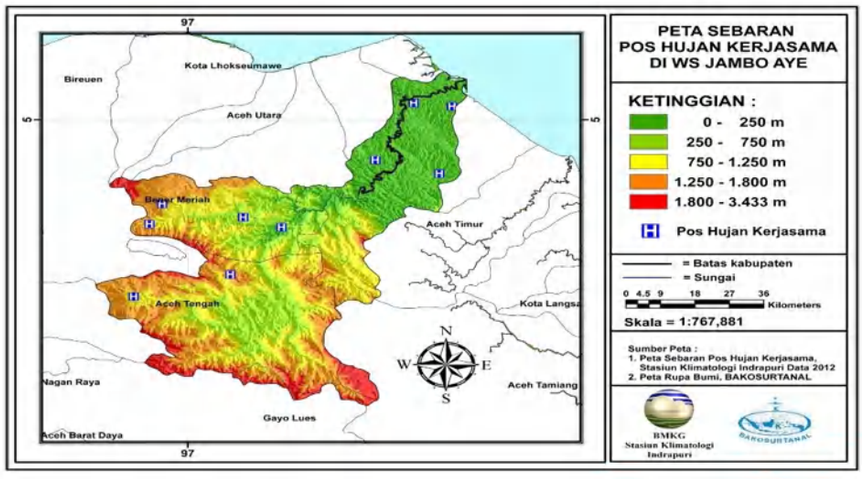
DAS Krueng Jambo Aye (Aceh Utara), semula luasan lahannya mencapai 533.816 hektar, sekarang hanya mencapai 485.955 hektar saja. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan DAS yang mendasar seperti yang tersebut di bawah ini antara lain :

1. Terjadinya banjir pada saat bulan hujan Oktober – Desember – Februari → ekonomi.
2. Terjadinya kekeringan pada bulan kemarau →ekonomi.
3. Penurunan suhu temperatur kawasan.
4. Pergeseran musim tanam dan frekuensi tanam berkurang.
5. Konflik satwa dan manusia.
6. Estetika alam, berkurang/ hilangnya keragaman hayati.

Adapun faktor penyebab secara dampak pada DAS adalah seperti yang diuraikan dibawah ini antara lain Pengalihan fungsi hutan, Ilegal Loging, Kebakaran Hutan, Terlambatnya penindakan kegiatan ilegal, Sebagian Regulasi terkait di Pusat, Relatif lemah penegakan hukum, Pergeseran Pemukiman, Tensitas hujan tinggi.

Untuk faktor penyebab secara alami pada DAS, di antaranya adalah Tingginya curah hujan, banjir, Terjadinya kemarau/ panca roba dan Kebakaran hutan atau lahan.

Gambar 2.14
Peta Pos Hujan Kerjasama WS Jambo Aye



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah perlunya dukungan dari berbagai pihak terkait, baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembagai Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarat lainnya melalui indikasi Program dan Kegiatan yang telah ditetap berdasarkan aturan yang berlaku. Lembaga-lembaga terkait dalam mendukung Pengelolaan DAS Kabupaten Aceh Utara seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS
Kabupaten Aceh Utara

No	Lembaga/Institusi	Tahap Perencanaan	Tahap Perencanaan	Monitoring Dan Evaluasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	√		√
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLHK)	√	√	√
3	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	√	√	√
4	Dinas kehutanan Dan Perkebunan	√	√	√
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	√	√
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat		√	
7	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral	√	√	√
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	√	√	√
9	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	√	√	√
10	Balai Wilayah Sungai	√	√	√
11	KPH	√	√	√
12	PDAM		√	
13	Perusahaan Listrik Negara		√	
14	Lembaga Swadaya Masyarakat		√	

2.1.3. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 tercatat sebanyak 619.407 jiwa. Luas wilayah 3.296,86 km^2 maka kepadatan penduduk mencapai 188 jiwa/km^2 dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut.

Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 51.974 jiwa sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 5**.**202 jiwa. Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

Tabel 2.4
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara
menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sawang	37.198	37.810	38.396	38.769	39.470
2	Nisam	18.571	18.876	19.164	19.350	19.700
3	Nisam Antara	13.229	13.447	13.653	13.786	14.035
4	Banda Baro	7.991	8.122	8.250	8.330	8.481
5	Kuta Makmur	24.072	24.468	24.844	25.085	25.539
6	Simpang Kramat	9.508	9.664	9.809	9.904	10.083
7	Syamtalira Bayu	20.522	20.859	21.175	21.380	21.767
8	Geureudong Pase	4.904	4.985	5.060	5.109	5.202
9	Meurah Mulia	19.269	19.586	19.892	20.085	20.448
10	Matangkuli	18.105	18.403	18.685	18.866	19.208
11	Paya Bakong	13.874	14.102	14.317	14.455	14.717
12	Pirak Timu	8.104	8.237	8.363	8.444	8.597
13	Cot Girek	20.216	20.548	20.859	21.061	21.442
14	Tanah Jambo Aye	43.610	44.327	45.005	45.442	46.264
15	Langkahan	22.866	23.242	23.587	23.816	24.247
16	Seunuddon	25.295	25.711	26.101	26.354	26.831
17	Baktiya	36.113	36.707	37.271	37.632	38.313
18	Baktiya Barat	18.678	18.985	19.274	19.461	19.813
19	Lhoksukon	48.997	49.803	50.560	51.050	51.974
20	Tanah Luas	24.353	24.753	25.130	25.374	25.833
21	Nibong	9.964	10.128	10.285	10.385	10.573
22	Samudera	27.044	27.489	27.907	28.178	28.688
23	Syamtalira Aron	18.138	18.436	18.720	18.902	19.244
24	Tanah Pasir	9.085	9.234	9.378	9.469	9.640
25	Lapang	8.701	8.844	8.980	9.067	9.231
26	Muara Batu	27.131	27.577	27.999	28.270	28.782
27	Dewantara	48.354	49.149	49.890	50.373	51.285
Jumlah		583.892	593.492	602.554	608.397	619.407

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara periode 2015–2019 merupakan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Utara selam 5 (lima) tahun terakhir. Perlu diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2017 dan akan menjadi angka tetap, tahun 2018 masih bersifat sementara dan tahun 2019 masih sangat sementara.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah. Dimana Nilai PDRB ADHK tanpa migas Aceh Utara pada tahun 2015 nilainya sebesar 11,597 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga mencapai 12,951 triliun rupiah pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata 3,13 persen per tahun. Jika dengan memasukkan migas, nilai PDRB Aceh Utara selama periode 2015-2019 yaitu dari 15,184 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 16,922 triliun rupiah di tahun 2019.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK
Menurut Lapangan Usaha (Milliar Rupiah) Tahun 2015-2019

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2015	2016	2017r	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.142,05	4.297,86	4.522,90	4.702,79	4.894,40
B	Pertambangan dan Penggalian	3.773,71	3.542,62	3.754,80	3.965,26	4.162,54
C	Industri Pengolahan	2.429,76	2.176,12	1.683,88	1.883,77	1.769,37
D	Perdagangan Listrik dan Gas	12.44	13.61	15.23	16.25	17.39
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.14	2.30	2.55	2.70	3.38
F	Konstruksi	639.64	712.11	769.88	792.47	832.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.586,81	1.701,24	1.818,17	1.887	1.947,79
H	Transportasi dan Pergudangan	801.62	805.94	840.84	858.16	899.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53.37	58.56	64.18	70.04	75.01
J	Informasi dan Komunikasi	247.20	253.93	259.51	264.89	278.32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	166.50	176.43	193.94	194.83	216.58
L	Real Estate	336.57	363.35	398.28	414.87	440.29
M, N	Jasa Perusahaan	41.15	43.45	45.15	47.14	49,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	355.06	390.51	446.99	469.55	492,60
P	Jasa Pendidikan	189.73	208.95	233.34	252.41	274.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278.39	306.81	339.47	357.62	392.86
R, S, T, U	Jasa Lainnya	128.63	141.80	155.83	163.47	176.89
PDRB		15.184,78	15.184,78	15.544,94	16.343,73	16.922,86
PDRB Tanpa Migas		11.597,42	11.597,42	11.981,81	12.561,40	12.951,90
PDRB Non Pemerintahan		14.829,72	14.829,72	15.097,96	15.874,18	16.430,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

r Angka revisi

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 2.6
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2015	2016	2017r	2018*	2019**
A	Pertanian	31,37	33,11	34,21	33,81	3 4,05
B	Pertambangan dan Penggalian	16,98	15,16	16,74	17,78	-
C	Industri Pengolahan	17,11	13,99	9,73	9,93	8,96
D	Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
F	Konstruksi	4,51	5,22	5,59	5,48	5,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,18	12,36	12,74	12,46	12,31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,79	5,64	5,59	5,05	5,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,48	0,52	0,55	0,59
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,73	1,69	1,59	1,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,36	1,46	1,60	1,54	1,69
L	Real Estate	2,43	2,70	2,86	2,82	2,93
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,30	0,31	0,30	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	2,60	3,02	3,42	3,42	3,55
P	Jasa Pendidikan	1,32	1,53	1,73	1,79	1,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,93	2,15	2,29	2,26	2,47
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,91	1,04	1,13	1,11	1,16
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas		84,34	86,24	84,81	83,36	83,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 2.4. Jika ditinjau PDRB ADHB tanpa migas, kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang meningkat dari 31,37 persen pada tahun 2015 menjadi 34,05 persen pada tahun 2019. Kontribusi besar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar 17,11 persen pada tahun

2015 akan tetapi menurun pada tahun 2019 menjadi 8,96 persen dan selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 11,18 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,31 persen pada tahun 2019. Pada urutan keempat, sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 5,79 persen pada tahun 2015 akan tetapi menurun menjadi 5,03 persen pada tahun 2016.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe selama 3 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2018 realisasi inflasi sebesar 2.05 persen turun menjadi 1,2 persen pada tahun 2019, dan pada 2020 inflasi tersebut cendrung naik kembali menjadi 3,55 persen. Untuk inflasi Aceh juga mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 1,84 persen turun menjadi 1,69 persen pada tahun 2019 dan meningkat kembali sebesar 3,59 persen. Sedangkan inflasi secara nasional terus mengalami ke arah yang lebih baik dan menurun selama 3 tahun terakhir dari 3,13 persen tahun 2018 menjadi 1,68 persen tahun 2020.

Tabel 2.7
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lhokseumawe/ Aceh Utara	2,44	5,60	2,87	2,05	1,2
Aceh	1,53	3,86	4,25	1,84	1,69
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2020 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Utara, pola kecenderungannya mempunyai kesamaan dengan kecenderungan inflasi Aceh sebagaimana tercantum pada tabel diatas.

2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita

Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Pada tahun 2015 PDRB ADHK Aceh Utara adalah Rp15.184,78 milliar rupiah sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp15.195,57 milliar rupiah dan terus naik sampai Rp16.922,86 pada tahun 2019.

Tabel 2.8
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh UtaraTahun 2016-2019

Nilai PDRB (milliar rupiah)				
	2016	2017	2018	2019
ADHB	16.695,69	17.502,34	18.877,46	19.778,01
ADHK	15.195,57	15.544,94	16.343.73	16.922,86
PDRB Perkapita (juta rupiah)				
ADHB	28,15	29,03	30,90	31,95
ADHK	25,62	25.78	26,75	27,34
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	0,07	2,30	5,14	3,54
Jumlah Penduduk (ribu orang)	593	603	611	619
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1.64	1.53	1,65	1,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020

2.2.1.4 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tahun terakhir menurun menjadi 17,39.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan (%)	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	80,80	80,54	80,22	81,73	82,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2.2.1.5 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan nol dan satu. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat namun masih terletak diantara 0,20-0,35 atau berada dalam kategori pemerataan relatif tinggi (merata). Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara dan perbandingannya dengan gini rasio Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Aceh Utara dan
Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Aceh Utara	0,271	0,270	0,266	0,292	0,308
Provinsi Aceh	0,330	0,333	0,329	0,325	0,319

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan sosial masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indexs (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran ril per kapita dalam paritas daya beli masyarakat). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara merupakan indikator tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Aceh Utara sebesar 68,36 dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,22 Perbandingan IPM antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11
Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan
Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Aceh Utara	66,85	67,19	67,67	68,36	69,22
Provinsi Aceh	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tahun 2020

Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

2.2.2.2 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2015-2019, persentase angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari 97,18 persen menjadi 99,10 persen. Kondisi capaian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa Membaca dan Menulis	474.205	478.604	488.404	493.125	497.892
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	487.966	488.122	492.840	497.604	502.414
Persentase dapat baca tulis (AMH)	97,18	98,05	99,10	99,10	99,10

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten

Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
KabupatenAceh Utara	8,07	8,09	8,1	9,01	9,46
Provinsi Aceh	8,77	8,86	8,98	9,09	9,19

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (diolah) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Aceh Utara Tahun 2020

Dari tabel di atas, pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten Aceh Utara adalah 9,46 tahun ini menunjukkan bahwa lama sekolah masyarakat Kabupaten Aceh Utara adalah rata-rata diatas kelas II SLTP dan dibawah kelas III SLTP.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah Aceh Utara sudah berada di atas provinsi.

Tabel 2.14
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Aceh Utara	14.10	14.11	14,42	14,68	14,69
Provinsi Aceh	13.73	13.89	14,13	14,27	14,30

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (diolah) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Aceh Utara Tahun 2020

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Murid SD/MI	72.021	72.461	71.983	72.810	73.091
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	74.438	74.127	74.843	68.820	76.296
APK/SD/MI (%)	96,76	97,75	96,17	105,8	95,80
SMP/MTS					
Jumlah Siswa SMP/MTS	35.838	35.510	33.928	33.708	32.808
Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 tahun	37.075	36.419	36.771	32.393	37.487
APK SMP/MTS (%)	96,61	97,50	92,26	104,06	87,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 & Referensi.data.kemendikbud.go.id

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi,menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
APT Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD	285.635	295.634	307.031	316.757	326.262
APT SD (%)	48.92	49,64	51,06	55.71	56,83
SMP	150.047	160.07	168.882	192.440	200.437
APT SMP (%)	25.70	26,88	28,08	33.85	34,92
SMA	91.411	96.718	101.554	-	-
APT SMA (%)	15.65	16,24	16,89	-	-
Jumlah Penduduk	583.892	593.492	602.554	615.378	633.400

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Tabel menunjukkan *trend* angka siswa menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak 2015-2019. Meningkatnya angka siswa yang menamatkan sekolah pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan terus meningkat.

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	86,66%	83,49%	76,12 %	93,17 %	82,62 %
SMP/MTs	68,19%	67,86%	56,64 %	76,39 %	66,06 %
SMA/SMK/MA	45,92%	42,45%	-	-	49,14 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 &Referensi.data.kemendikbud.go.id

2.2.2.3 Kesehatan

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yangberkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pada bidang kesehatan. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial pada bidang ini pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Kelangsungan hidup bayi sangat ditentukan oleh kondisi pertumbuhan janin di dalam uterus, kualitas pemeriksaan antenatal, penyakit ibu waktu hamil, penanganan persalinan dan perawatan sesudah lahir. Setiap bayi lahir dihadapkan pada kondisi yang berbeda baik secara sosial ekonomi maupun kondisi kesehatan secara umum, sehingga diperkirakan bayi mempunyai umur kelangsungan hidup yang berbeda pula.

Berdasarkan data lima tahun terakhir terlihat adanya *trend* flukstuasi. Data pada 2016 adalah 998,5/1000 KH, artinya probabilitas bayi untuk hidup dalam kurun waktu satu tahun terjadi peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Faktor ini disebabkan oleh karena terjadinya penurunan angka kematian bayi di Aceh Utara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan AKB antara lain : Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan khususnya kepada bidan dan bidan desa secara berkesinambungan dan diikuti dengan proses evaluasi terhadap kegiatan secara langsung, Proses pembelajaran bersama melalui kegiatan AMP (*Audit Maternal Perinatal*), adanya dukungan dana Otsus melalui kegiatan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), ANC (*Ante Natal Care*) terpadu serta perbaikan sistem rujukan dengan peningkatan akses tanggap darurat melalui program *Public Safety Center* (PSC) di tiga wilayah kerja, yaitu Puskesmas Muara Batu, Syamtalira Bayu, Tanah Jambo Aye dan program pemberdayaan masyarakat (Program Desa Siaga).

Tabel. 2.18
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

AKHB/ Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh Utara	993	999,5	999,8	997	996

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectacy at birth*) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Jadi AHH pada periode 2015-2019 terus mangalami peningkatan sebagaimana diperlihatkan pada tabel. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Angka Usia Harapan Hidup	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Aceh Utara	68,48	68,51	68,54	68.61	68,79
Provinsi Aceh	69,50	69,51	69,52	69.64	68,87

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UHH dari tahun 2015 ke tahun 2019, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya akses pelayanan dan perawatan kesehatan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Puskesmas, tingkat ekonomi masyarakat terjadi peningkatan sehingga daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu

mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Berdasarkan data Dinas Kesehatan pada tahun 2016 berjumlah 56 balita gizi buruk, 2017 berjumlah 18balita gizi buruk dan tahun 2018 terdapat 492 balita gizi buruk. Secara menyeluruh data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri), walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi buruk. Pada tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk sejumlah 1.153 kasus atau 2.4 persen dari jumlah balita.

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah balita gizi buruk	104	56	18	492	1.153
Jumlah balita	65.298	52.099	64.763	42.160	48.034
Persentase Balita Gizi Buruk	0,16	0,11	0,027	0,012	2,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2020

Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa program antara lain PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan kepada balita, serta pemantauan tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui penimbangan di posyandu setiap bulannya.

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka atau sering disebut TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan kata lain, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran ini terjadi akibat belum mendapatkan pekerjaan namun telah berusaha maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan/malas bekerja. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah persentase TPT penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi.

Tabel 2.21
Rasio Penduduk yang Bekerja Selama
Periode Tahun 2015–2019

Karakteristik	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Usia Kerja (produktif)	314.807	n/a	378.542	418,034	430.839
Angkatan kerja (orang)	220.640	n/a	235.420	265,708	260.721
Penduduk yang bekerja (orang)	183.025	n/a	209.472	238,670	238.229
Pengangguran Terbuka (orang)	37.615	n/a	25.948	27.038	22.492
Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	82,95	n/a	88,98	89,82	91,75
Rasio TPT (persen)	17,05	n/a	11,02	10,18	8,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Dalam bidang seni dan Budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 121 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurkon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi).

Tabel. 2. 22
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sanggar Seni	71	71	82	121	121
Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0
Jumlah Museum	1	1	1	1	1
Jumlah Pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Dari sejarah tersebut meninggalkan pula berbagai situs peninggalan/makam yang dapat menjadi objek wisata budaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara serta tempat-tempat lain yang dapat singgahi oleh wisatawan.

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2019 ditargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40 persen untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.23
Penggiat Seni dan Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penggiat Seni dan Budaya					
1. Seni Rupa					
Jumlah Kelompok Seni Lukis	1	1	2	2	2
Jumlah Kelompok Seni Kriya	25	30	21	21	21
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	7	10	12	14	14
Jumlah Kelompok Seni Reklame	1	3	6	6	6
2. Seni Tari/gerak					
Tari Klasik					
Jumlah Kelompok	10	10	3	3	3
Jumlah Anggota	120	120	78	78	78
Tari Kreasi Baru					
Jumlah Kelompok	30	45	51	90	90
Jumlah Anggota	600	900	1.007	1.592	1.592
Tari Tradisional					
Jumlah Kelompok	42	47	60	100	100
Jumlah Anggota	336	376	1070	1568	568
3. Seni Suara					
Jumlah Kelompok	10	10	12	14	14
Jumlah Anggota	300	300	370	420	
4. Seni Musik Tradisional					
Jumlah Kelompok	9	9	9	10	10
Jumlah Anggota	138	138	139	148	148
5. Seni Sastra					
Jumlah Kelompok	1	1	2	3	3
Jumlah Anggota	23	23	35	45	45
6.Seni Teater/Drama					
Jumlah Kelompok	1	3	4	4	4
Jumlah Anggota	50	150	160	160	160
7. Pagelaran/ Pameran Seni Budaya					
a. Pagelaran Seni Budaya					
Jumlah Pagelaran	0	0	0	1	1
Jumlah Pengunjung	0	0	0	300	300
b. Pameran Seni Budaya					
Jumlah Pameran	0	0	0	0	0
Jumlah Pengunjung	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

Dari tabel dapat dilihat perkembangan penggiat seni dan budaya di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomianya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2020 ditargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi dan pagelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.24
Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan

No	Objek Wisata Budaya	Kecamatan
1	Pantai Dakuta Bungkah	Muara Batu
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur
4	Air Terjun Seumirah/Lindek	Nisam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera
11	Makam Said Syarif	Samudera
12	Makam Sulthanah Nahrisyah	Samudera
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera
16	Makam Tgk Syaref	Samudera
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi	Samudera
18	Pantai Sawang	Samudera
19	Makam Ratu Al-‘Aqla Binti Malikuldhahir	Matangkuli
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli
22	Pantai Ulee Rubek	Seunuddon
23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang
24	Pantai Lanchok	Syantalira Bayu
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir
26	Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe	Lhoksukon
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulya
29	Makam Tgk. Di Geulanggang	Samudera

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Sementara itu aspek keolahragaan juga perlu upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton dan lainnnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga merupakan dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti sarana prasarana di Kecamatan Lhoksukon terdiri dari fasilitas olahraga indoor dan out door, lapangan sepak bola (stadion) di Kecamatan Baktiya serta kecamatan-kecamatan lainnya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistk, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

2.3.1.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas

berfungsi secara baik dalam berbangsa dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar yang kokoh yang bersinergi untuk menunjang hal dimaksud yaitu perluasan dan pemerataan akses; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; tata kelola dan akuntabilitas publik; dan pendidikan yang bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan.

1. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan masa depan. Misi PAUDNI adalah memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini, penyediaan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan kursus dan pelatihan, penyediaan pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik nonformal, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Perkembangan jumlah pendidikan anak usia dini Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 - 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN/SISWA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	TK/RA/	273	272	269	295	404
2	PAUD Sejenis	249	248	234	222	218
	Jumlah	522	520	503	517	622
3	Jumlah Siswa TK	7.584	8.678	10.102	10.294	10.795
	Jumlah Siswa RA	1.435	1.444	n/a	n/a	1.687
4	Jumlah Siswa PAUD Sejenis	2.098	7.382	7.552	5.796	6.332
	Jumlah	11.117	17.504	17.654	16.090	18.814

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2. Angka Partisipasi Sekolah

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Kenaikan persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar dan menengah (7-15 tahun dan 15-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.26
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	94,26%	83,49%	79,66%	73,64%	82,64%
SMP/MTs	38,64%	67,83%	69,87%	56,44%	66,06%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

3. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan Seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	0,04	0,06	0,14	0,13	0,17
2	SMP/MTs	0,23	0,17	0,47	0,33	0,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel berikut menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun ke tahun dalam periode 2015- 2019.

Tabel 2.28
Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019 (Persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	98,47	94,61	97,80	99,79	99,18
2	SMP/MTs	84,51	87,53	98,00	99,80	92,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

5. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Dari SD/MI ke SMP/MTs	98,82	96,97	84,23	84,80	85,76
2	Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK/MA	92,61	84,44	89,21	86,29	85,75
	Rata-rata	95,72	90,71	86,72	85,55	85,76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

6. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	407	409	412	412	412
2	SMP/MTs	165	173	175	188	188
3	SMA/MA/SMK	95	97	97	99	106
Jumlah		667	667	679	699	706

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasaran tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk

mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

7. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Gedung Sekolah	407	409	409	409	365
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Thn	73,823	74.127	74.813	75,566	76.297
Rasio/10.000	55.13	55,17	48,38	54,12	47.83
SMP/MTs					
Jumlah Gedung Sekolah	165	173	179	179	139
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Thn	36,070	36.419	36.771	37,127	37.485
Rasio/10.000	45.74	47,50	34,53	48,21	37,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh.

8. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar dan per 10.000 untuk tingkat pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid/siswa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.32
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	7,408	9.207	7.035	5.632	5.482
	2. Jumlah Murid	71,725	72.461	71.983	59.912	60.012
	3. Rasio Guru/Murid	9.68	7,87	10,23	10,63	9,13
	4. Rasio guru/murid per 1000	103.28	127,06	97,73	94,00	91,35
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	4,228	4.512	3.968	2.953	2.923
	2. Jumlah Murid	52,662	35.510	33.928	25.184	24.307
	3. Rasio Guru/Murid	12.46	7,87	8,55	8,52	12,03
	4. Rasio guru/murid per 1000	80.29	127,06	116,95	117,25	282,55

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

9. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD/MI jika dibagi rata-rata maka ketersediaan ruang kelas masih kurang terutama dibeberapa sekolah yang siswanya padat. Disamping itu masih terdapat beberapa sekolah terutama SD/MI yang meminjam ruang kelas untuk dipergunakan sebagai ruang guru dan kantor kepala sekolah karena belum tersedia ruang guru dan kantor.

Terhadap sekolah-sekolah tersebut terus dilakukan upaya penyediaan ruang guru dan kepala sekolah yang representative agar dapat dikembalikan fungsi ruang kelas sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.33
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata – rata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	7.408	9.207	7.035	5.632	5.482
	2. Jumlah Murid	71.725	72.461	71.983	59.912	60.012
	3. Jumlah Ruang Kelas	3.062	3.123	3.045	2.759	2.796
	4. Rasio guru per kelas	2,42	2,94	2,31	2,04	1,96
	5. Rasio Murid per kelas	23,42	23,20	23,63	21,71	21,46
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	4.228	4.512	3.986	2.953	2.923
	2. Jumlah Murid	52.662	35.510	33.928	25.184	24.307
	3. Jumlah Ruang Kelas	1.317	1.369	1.209	1.011	1.027
	4. Rasio guru per kelas	3,21	3,29	3,28	2,92	2,85
	5. Rasio Murid per kelas	39,99	25,93	28,06	24,90	23,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Kualifikasi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendongkrak peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D.IV selama periode 2015-2019 sangat dipengaruhi oleh faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan kualifikasi S1/D.IV untuk mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi. Persentase guru yang berpendidikan S1/D.IV selama tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan dasar ternyata lebih sedikit dibandingkan jenjang pendidikan menengah, yaitu pada sekolah SMP yaitu 93,98 persen dan diikuti oleh guru SD/MI yakni sebesar 87,03 persen. Dalam rangka meningkatkan guru yang memenuhi kualifikasi kiranya perlu terus mendorong agar para guru yang belum berkualifikasi berkenan melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasinya.

Tabel 2.34
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Guru SD/MI ≥ S1/D4	4.764	4.955	4.955	4.122	4.771
	Jumlah Guru	7.408	7.007	7.007	4734	5.482
	Persentase SD/MI	64.31	70,71	70,71	87.07	87,03
2	Jumlah Guru SMP/MTs ≥ S1/D4	3.667	4.046	4.046	2.513	2.747
	Jumlah Guru	4.228	4.512	4.512	2691	2.923
	Persentase SMP/MTs	86.73	88,67	88,67	93.39	93,98

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara 2020

B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Fungsi utama Posyandu adalah memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pada Tahun 2019 jumlah posyandu meningkat menjadi 962 unit disertai juga dengan peningktan jumlah balita yang dilayani sebanyak 53.563 balita dengan rasio persatuan balita adalah 18.09.

Tabel 2.35
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu	931	952	952	952	962
Jumlah Balita	65.298	52.099	64.763	42.160	53.563
Rasio Posyandu/ Satuan Balita	14.26	18.27	14.70	22.58	18.09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu persatuan Penduduk

Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan sarana fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.36
Kondisi Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2015-2019

Jumalah Prasarana dan Penduduk	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Puskesmas	31	31	31	32	32
Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-
Jumlah Pustu	86	86	86	86	86
Jumah Penduduk	583.392	593.492	602.554	615.378	633.400
Jumlah Prasarana Kesehatan	117	117	117	118	118
Rasio Prasarana Kesehatan Per satuan Penduduk	0,20055	0,19714	0,19417	0,19175	0,18629

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1 : 30.000 Berdasarkan data dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 1 (satu) puskesmas melayani 19.175 penduduk sedangkan pada tahun 2019 satu puskesmas melayani 18.629 penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih dalam kondisi yang ideal.

3. Rasio Dokter persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai profesi diantaranya dokter. Jumlah dokter pada Puskesmas-Puskesmas dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk Kab. Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Jumlah Dokter dan Penduduk	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokter	63	47	53	54	94
Jumlah Penduduk	583.392	593.492	602.554	615.378	619.407
Rasio Dokter / Satuan Penduduk	0.107	0.079	0.087	0.087	0.015
Rasio (WHO)	1:2500	1:25000	1:25000	1:25000	1:25000

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rasio dokter persatuan penduduk menurut WHO adalah 40/100.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.500 penduduk. Dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Aceh Utara kekurangan jumlah dokter,jumlah penduduk yang dilayani melebihi dari target ideal yang ditetapkan WHO. Berdasarkan data diatas rasio dokter persatuan penduduk jauh kurang dari rasio yang ditetapkan WHO.

4. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan idealnya terjadi pada 20 persen dari total sasaran ibu hamil, sehingga semakin banyak sasaran ibu hamil maka semakin tinggi pula komplikasi kebidanan. Selain itu dari total estimasi ibu yang beresiko komplikasi yang telah dilaporkan tersebut tidak semuanya kasus berakhir dengan komplikasi kebidanan. Target penanganan definitif komplikasi kebidanan adalah 80 persen dari total komplikasi yang ditangani di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif
terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Komplikasi Kebidanan	2.808	2.873	2.919	2.768	2.827
Penanganan Definitif Komplikasi Bidan	2.658	2.037	2.518	2.110	2.261
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)	94,66	70,90	86.25	76.00	79,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Dari data tersebut penanganan Komplikasi kebidanan mencapai 76 persen pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi 79,97 persen pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena ada beberapa komplikasi kebidanan yang ditangani di rumah sakit ataupun di klinik awasta.

5. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu. Sedangkan dalam target MDG's salah satu yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat ini adalah 90% dari total sasaran ibu hamil. Dari data persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 88 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 84%, kondisi tersebut masih berada dibawah target yang ditetapkan. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui Jampersal (Jaminan Persalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan

Ibu dan Anak (PWS KIA).Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Tabel 2.39
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	11.674	11.693	12.339	11.680	11.945
2.	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	13.242	13.894	14.597	13.838	14.134

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

6. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 Desa. Cakupan Desa *Universal Child Immmunization* (UCI) di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Cakupan Desa UCI di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Desa UCI	62	58.3	70.2	45.8	46.1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Target nasional UCI (*Universal Child Immunization*) yaitu 100 persen, atinya semua anak yang menjadi sasaran harus di imunisasi. Berdasarkan data dapat terlihat bahwa terjadi *trend* penurunan cakupan Imunisasi dari tahun ke tahun. Data cakupan imunisasi pada tahun 2019 sebesar 46,1 persen menurun dari tahun 2017. Hal

ini disebabkan oleh karena berbagai faktor baik faktor internal seperti upaya menjalin hubungan dengan lintas sektor terkait, pelibatan tokoh masyarakat dalam program imunisasi belum maksimal dilakukan.

Faktor eksternalnya antara lain adanya isu vaksin haram oleh beberapa tokoh agama sehingga makin mempersulit tenaga kesehatan dalam menjalankan program imunisasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang menyebabkan orang tua enggan mengimunisasi anaknya karena berefek seperti terjadinya bengkak pada bagian yang diimunisasi dan efek demam setelah di imunisasi.

7. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi,seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Jumlah Penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2015-2019 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.41
Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Gizi buruk yang mendapat perawatan	104	56	18	492	362
2	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Berdasarkan data tabel diatas Balita gizi buruk ditahun 2018 terdapat 492 kasus dan menurun pada tahun 2019 menjadi 362 kasus. Kasus Gizi buruk tersebut mendapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang yang mendapat perawatan adaah 100 persen.

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara periode 2015-2019 memperlihatkan trend penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 2718 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 2177 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Penderita TBC	335	350	1807	2718	2177
Penderita TBC diobati	325	281	1259	1247	813
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	97,01	80,29	69,67	45,88	37,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD di Kabupaten Aceh Utara tahun 2016 merupakan kasus tertinggi selama periode 2015-2019. Angka cakupan 100 persen setiap tahunnya, terlihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	38	108	60	43	61
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	38	108	60	43	61
Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2020

Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), *Larvasiding* (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (pemberantasan sarang nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur).

Untuk keberhasilan program penaggulangan DBD perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan sosialisasai dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

Jumlah penderita pada tahun 2018 menurun dilihat dari tahun sebelumnya, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 61 kasus, sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam pencegahan dan penanggulan terhadap kasus DBD. Jumlah kasus penderita DBD di atas masih terjadi karena ada beberapa faktor penyebab yaitu curah hujan yang tidak dapat diprediksi secara tepatdan adanya kasus import dari daerah lain.

10. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Aceh Utara masih terus ditemukan. Pada Tahun 2019 cakupan HIV makin meluas dimana setap orang beresiko HIV.

Tabel 2.44
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penderita HIV	3	3	6	2	5
Jumlah Penderita AIDS	5	8	10	16	6
Kematian akibat AIDS	3	0	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT (*Voluntery Conseling Testing)* terus mencari dan melakukan penjangkauan kasus HIV/AIDS.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah dimana ratio jumlah frekuensi pasien masyarakat miskin yang banyak berkunjung ke sarana kesehatan terendah pada tahun 2016.

Tabel 2.45
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	114.592	60.969	627.686	805.939	545.256
Jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten	114.592	119.18	118.742	511.870	506.256
Rasio	1.00	0.51	5,29	1,57	1,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas tahun 2019 jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh peralihan peserta jamkesmas yang sudah tidak aktif ke peserta JKRA (JKN-KIS) atau banyak masyarakat miskin yang belum mendaftar ke BPJS kesehatan.

Rasio jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar menunjukkan seluruh masyarakat miskin terlayanai pada pelayanan kesehatan dasar, keadaan ini menunjukkan akses pelayanan kesehatan sudah merata. Disisi lain cakupan pelayanan ini belum dianalisa dengan meninjau kepuasan pelayanan yang diberikan apakah sesuai dengan harapan pelanggan.

12. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi bila dilihat pada gambar setiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat diartikan sudah ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan bagi bayi. Data cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 melebihi target karena adanya kunjungan luar wilayah. Pada tahun 2019 cakupan kunjungan bayi sudah mencapai 98,40 persen dan hal ini disebabkan adanya peningkatan dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 2.46
Cakupan Kunjungan Bayi
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	11.537	11.595	12.046	10.688	12.434
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	11.737	11.743	13.270	11.220	12.076
Cakupan	98,30	98,74	90,8	95,23	98,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

13. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.47
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (AKB)	7	8	5	3	4
Angka Kematian Ibu (AKI)	127	221	198	111	207

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program pembangunan kesehatan di Indonesia banyak menitikberatkan pada upaya penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Saat ini AKI Aceh Utara belum memenuhi target SDGs sehingga diperlukan upaya yang sangat serius dalam mengatasi dan menurunkan AKI. Upaya penurunan AKI harus dilakukan diantaranya dengan melakukan screening bagi ibu-ibu hamil yang resiko riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mangatasi kasus-kasus penyebab kematian pada melahirkan.

Untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan AKI dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1/1000 dimana ada 1 bayi yang lahir mati dari 1000 kelahiran hidup. Tingginya AKI pada tahun 2019 paling banyak disebabkan oleh kasus pendarahan pada pasca persalinan normal dan persalinan *section caesaria*/operasi difasilitasi rujukan. Sedangkan tingginya AKB pada tahun 2019 didominiasi oleh kasus Berat Badan Rendah (BBLR)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

1.1 Jalan dan Jembatan Kabupaten Aceh Utara

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

Bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Dan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan jalan itu sendiri meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Penyelenggaraan jalan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat –pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Arah dari penyelenggaraan jalan adalah untuk mewujudkan:

a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

1.1.1. Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga tahun 2019 adalah sepanjang 2.032,80 Km, dengan kondisi sebagai berikut: Kondisi jalan baik sepanjang 619,85 Km atau sekitar 30,49 persen; kondisi jalan sedang mencapai 9,20 Km atau sebesar 0,45 persen; Kondisi rusak ringan sebesar 20 Km atau sekitar 0,98 persen; dan kondisi jalan rusak berat sekitar 1.383,75 Km atau sekitar 68,07 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi Jalan Tahun 2015-2019 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kondisi Jalan Mantap (Baik+Sedang)	65%	72%	72%	29%	31%
Kondisi Jalan Tidak Mantap (rusak ringan+Rusak berat)	35%	28%	28%	71%	69%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2020

Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan kondisi jalan mantap. Penurunan kondisi jalan umumnya disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya : umur konstruksi, cuaca, bencana alam, pemanfaatan melebihi kapasitas jalan, dan sebagainya. Namun, penyebab paling utama penurunan kondisi jalan pada tahun 2018 adalah perubahan metode penilaian.

Jika sejak tahun 2013, penilaian kondisi jalan dibagi menjadi 2 kelompok jenis lapis permukaan, masing – masing untuk lapis permukaan aspal dan untuk lapis permukaan perkerasan berbutir, maka sejak tahun 2018, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara mulai mengadakan penilaian dengan metode yang berbeda. Penilaian kondisi jalan tidak lagi membagijenis lapis permukaan aspal dengan lapis permukaan perkerasan berbutir. Penilaian dengan cara tersebut memiliki konsekwensi semua jalan dengan jenis lapis permukaan perkerasan berbutir secara otomatis masuk kedalam kategori rusak.

1.1.2 Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Penggunaan sempadan jalan dari aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat kecamatan dan tumbuhnya bangunan-bangunan liar di beberapa kawasan kecamatan mengganggu kelancaran lalu lintas kota dan kenyaman pengguna jalan serta keindahan penataan ruang kota, sempadan jalan yang digunakan untuk aktifitas perdagangan ini sulit dilakukan penataan jika kebijakan penindakan aturan memaksa tidak dilakukan. Berbagai upaya persuasif telah dilakukan oleh pemerintdah dalam mengatur kondisi ini, seperti pembenahan pada pusat pasar Lhoksukon, Geudong, Panton Labu, Krueng Geukuh, Krueng Mane dan lainnya. Namun tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat/pedagang untuk bekerjasama terhadap penataan kepentingan umum perlu dimediasikan secara berkerlanjutan, sehingga penataan sempadan jalan dapat dilakukan. Selama ini sempadan jalan yang digunakan pedagang kaki lima dan bangunan liar yang tumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.49
Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau
Bangunan Rumah Liar Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar (Km)	52.34	52,15	51,98	51.73	51,49
Panjang seluruh Sempadan Kabupaten (Km)	223.94	225.18	227,12	228.98	230,11
Persentase	23,37	23,16	22,89	22.59	22,38

Sumber : Dinas PRKP Kab. Aceh Utara 2020

1.1.3 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan dan jembatan, trotoar dan drainase dilakukan melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Peningkatan kualitas prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan drainase lingkungan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan sentra produksi ekonomi masyarakat di perdesaaan.

Tabel 2.50
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan Bertrotoar dan Drainase (Km)	223,94	247,61	253,52	262.19	265,49
Panjang Jalan Lingkungan	1.919,166	2.115,224	2.120,43	2152.43	2155,06
Persentase	11,50	11,71	11,96	12.18	12,32

Sumber : Dinas PRKP Kab. Aceh Utara Tahun 2020

1.2 Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar yang berada dalam wilayah Aceh Utara. Sedangkan selebihnya, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.51
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara
Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luas (Ha)
1	Pemerintah	3	29.059
	a. Lintas Kabupaten/Kota	1	15.993
	b. Utuh Kabupaten	2	13.066
2	Pemerintah Provinsi	4	6.434
	a. Lintas Kabupaten/Kota	-	-
	b. Utuh Kabupaten	4	6.434
3	Pemerintah Kabupaten	118	20.643
Total		125	56.136

Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran yang sangat penting.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perkembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.52
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Saluran (m)	561.666	563.166	564.366	564.366	567.188
Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	47.372	47.372	52.481	52.481	52.481
Rasio Andalan	1:12	1:11	1:11	1:11	1:11

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.53
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kondisi Baik (%)	33,74	34,78	35,27	35,59	35,91
Kondisi Rusak (%)	66,26	65,22	64,73	64,41	64,09

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.3. Tempat Ibadah

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama pembenahan fasilitas infrastruktur sarana yang telah ada. Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.54
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

No.	Prasarana	Tahun (unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Masjid	334	364	345	345	345
2.	Meunasah	852	852	852	852	852
3.	Dayah	182	204	192	199	196
4.	Balai Pengajian	3.911	3.911	3.911	3.911	2.505
5.	TPQ	162	162	162	262	262

Sumber : Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Utara 2020

Verifikasi kelayanakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

1.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Memastikan kawasan lingkungan tempat tinggal selalu terjaga kebersihannya adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai serangan penyakit. Lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan yang disusul oleh perilaku. Sanitasi merupakan salah satu bagian pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasarnya dalam akses sanitasi layak.

Pelayanan rumah tinggal bersanitasi terdiri dari pemenuhan akses sanitasi terhadap MCK, persampahan dan drainase. Selain berkaitan dengan kualitas fisik permukiman, layanan dasar sanitasi berbanding lurus dengan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Komitmen dan peran aktif Pemerintah daerah tercermin melalui pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase baik yang dilaksanakan secara reguler maupun program pemerintah berbasis partisipatif masyarakat serta pemanfaatan dana gampong untuk pembangunan sanitasi, melalui program-program tersebut dan lainnya pemerintah daerah telah berkonstribusi penuh pada upaya *sanitation mapping* dengan tujuan peningkatan pelayanan terhadap pengelolaan sanitasi di Kabupaten Aceh Utara.

Capaian pembangunan rumah tinggal bersanitasi tahun 2019 sebesar 64,25 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,38 persen dan 57,85 persen pada tahun 2017, peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin. Pelaksanaannya dari berbagai program tersebut dilaksanakan kolaboratif yang melibatkan beberapa OPD seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.55
Persentase Rumah Berakses Sanitasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	75.593	77.163	80.895	85.952	91.610
Jumlah seluruh rumah tinggal	135.500	137.644	139.846	140.035	142.587
Persentase	55,75	56,06	57.85	61.38	64,25

Sumber : Dinas PRKP Kab. Aceh Utara Tahun 2020

1.5. Rasio Tempat Pemakaman Umum

Penataan Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang disediakan untuk masyarakat. Penataan fasilitas tempat pemakaman umum dilaksanakan melalui program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan infrastruktur publik *(Public Service)* melalui penyediaan dan penataan tempat-tempat pelayanan umum khususnya penyedian dan penataan pemakaman. Luas daya tampung tempat pemakaman umum setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/2001 tentang Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum. Rasio tempat pemakaman umum penduduk per satuan penduduk menunjukkan pada perbandingan antara tempat pemakaman umum per 1000 penduduk. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dengan ukuran 2,50 x 1,50 (3,75 M2) untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.56
Rasio Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	438.080	456.855	468,076	480,219	494.971
2	Jumlah Penduduk	583.892	593.492	605.554	614,605	633.400
	Rasio	75,03	76,98	77,31	78,13	78,15

Sumber : Dinas PRKP Kab. Aceh Utara 2020

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1000 penduduk mengindikasikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Makin tinggi nilai indikator ini (rasio) semakin mampu suatu daerah menyediakan fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh penduduk daerah tersebut. Rasio Tempat pemakaman Umum dari tahun 2015 pada tahun 2019 cenderung meningkat namun belum tercapai fasilitas sosial per 1.000 penduduk, dalam hal ini masih perlu perhatian Pemerintah terhadap TPU.

1.6. Rasio Permukiman layak huni

Kawasan permukiman layak huni merupakan harapan dan idaman setiap iindividu dan kelompok masyarakat. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Rasio permukiman layak huni menunjukkan pada perbandingan luas permukiman dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Pemukiman Layak Huni (Ha)	61,540	61.750	62.315	62.852	62,977
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	113.451	113.451	113.451	113.451	113,451
Rasio	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Kondisi ini menunjukkan proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas permukiman yang layak huni. Semakin tinggi nilai indikator ini maka semakin mampu suatu daerah tersebut menyediakan permukiman yang layak huni.

1.7. Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar

Bangunan-bangunan liar yang tumbuh di beberapa kawasan kecamatan sepanjang sempadan sungai telah merubah wajah kota menjadi kawasan kumuh yang perlu secara berkelanjutan dilakukan penataan. Selain kumuh, sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan liar ini telah merusak struktur dasar sungai, masalah kesehatan dan lingkungan.

Kawasan Sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan liar terdapat dibeberapa kawasan seperti pada daerah sempadan sungai di wilayah Panton Labu, Lhoksukon, Geudong, Krueng Mane, dan beberapa daerah sempadan sungai lainnya di ibu kota kecamatan. Panjang sempadan sungai yang dipakai untuk bangunan liar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar (Km)	31,20	31,20	30,60	29.8	29,60
Panjang seluruh Sempadan Sungai Kabupaten (Km)	156,00	156,00	156,00	156	156,00
Persentase	20,00	20,00	19,62	19.10	18,91

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

2. Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabuapten Aceh Utara Tahun 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kabupaten yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi dan kedudukan sebagai:

1. Arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan daerah.
2. Penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten
3. Pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Fungsi - fungsi ini menjadi dasar dalam penentuan peruntukan Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Data Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada dalam 2 (dua) hamparan lokasi yaitu : a) bagian barat terletak di Kecamatan Meurah Mulia dan Paya Bakong dan b) bagian timur terletak di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Cot Girek dengan total luas

Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Utara adalah 8.540 ha, atau sekitar 2,59 % dari luas wilayah, keduanya terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Persentase luas ini memang relatif kecil ini, namun cukup logis bila dihubungkan dengan karakter fisik wilayah Kabupaten Aceh Utara (topografi /kemiringan dan ketinggian, curah hujan dan jenis tanah)

Kawasan lindung lainnya seluas lebih kurang 793 ha berupa kawasan sesuai suaka margasatwa sebagai pusat konservasi gajah di Kecamatan Cot Girek. Lokasi ini berada pada daerah sekitar Krueng Peuto dengan Alue Beudari dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung. Rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032 untuk kawasan budidaya diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Dinamika pembangunan nasional dan daerah serta laju pertumbuhan penduduk berkonstribusi terhadap perubahan peruntukan lahan. Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
Kabupaten Aceh Utara

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
Hutan Lindung	8.540	2,59
Pusat Kegiatan Gajah	793	0,24
Kawasan Budi Daya	Luas (Ha)	%
Perumahan Kota	5.620	1.70
Perumahan Desa	8.290	2.51
Kebun Campuran	47.994	14.56
Sawah	46.901	14.23
Tambak	16.712	5.07
Perkebunan	162.423	49.27
Hutan Produksi	27.461	8.33
Industri Besar	263	0.08
Instalasi Tambang	498	0.15
Pelabuhan/Bandara	249	0.08
Pertanian Terpadu	430	0.13
Waduk	3.512	1,07

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2032

Pelaksanaan pembangunan daerah yang kurang memperhatikan pola ruang serta menjaga struktur lingkungan dengan baik, mengakibatkan keseimbangan dan keserasian ruang

terganggu yang pada akhirnya menghambat laju pembangunan seperti terjadi bencana kekeringan, longsor dan banjir yang kerap terjadi hingga akhir tahun 2020 pada kawasan daerah aliran Sungai (DAS) Kreung Keureutoe, krueng jawa, kreung pirak, krueng peutoe, krueng pase yang berdampak hampir di seluruh kecamatan.

Dampak banjir tahun 2020 mengakibatkan ribuan jiwa di sejumlah desa dalam kecamatan tersebut terpaksa mengungsi ke surau (meunasah) dan dataran tinggi di masing-masing desa dan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perumahan, perkantoran, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.

Harapan masyarakat terhadap percepatan penyelesaian pembangunan waduk Krueng Keureuto dan bangunan pengendali banjir lainnya dapat mereduksi banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian diperlukan peningkatan dan langkah kerjasama yang melibatkan pemerintah Provisi Aceh dan daerah (Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur) dalam penyelesaian banjir wilayah utara dan timur Provinsi Aceh.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kebutuhan air yang diperlukan untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih tahun 2019 sebanyak 99.743 rumah

tangga atau 69,95 persen. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	82.342	85.102	88.920	93.845	99.743
2	Jumlah seluruh rumah tangga	135.500	137.644	139.846	140.035	142.587
	Persentase	60,77	61,83	63.58	67.02	69,95

Sumber :Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

2. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak.

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2019 sebesar 64,25 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,38 persen, peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

3. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyedian rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase rumah layak huni sesuai formulasi perhitungan jumlah rumah layak

huni per seluruh rumah tahun 2019 sebesar 86,37 persen atau 123.152 rumah, semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Prasarana	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Layak Huni	112.749	116.997	119.497	121.399	123.152
Jumlah Rumah Tinggal	135.500	137.644	139.846	140.035	142.687
Persentase	83,21	85,00	85,45	86,69	86,37

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan dana otsus dan migas serta dana desa. Perkembangan pembangunan rumah layak huni selama kurun waktu tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.62
Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pembangunan Rumah Layak Huni (Unit)	214	185	1.955	1.902	1.753	6.490

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

4. Infrastruktur Drainase

Fungsi komponen drainase adalah upaya pembuangan air hujan keluar dari lokasi permukiman perumahan, pasar dan fasilitas umum lainnya untuk mengurangi atau menghindari terjadinya genangan air, mengendalikan volume air yang dapat berpotensi menggenangi di lokasi tanpa sumur resapan. Drainase mempunyai beberapa sistem yang terdiri dari drainase Primer, drainase sekunder, dan drainase tersier.

Tabel 2.63
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan bertrotoar dan Drainase (Km)	223,94	247,61	253,54	259.89	265,49
Panjang Saluran Jalan (Km)	5.804,13	5.836,72	5.849,94	5,857.19	5.865,51
Persentase	3,86	4,24	4,33	4.44	4,53

Sumber :Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Pembangunan drainase lingkungan perdesaan, perkotaan dan kawasan pasar dilaksanakan melalui peningkatan program pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong.Peningkatan kualitas saluran drainase yang baik (lancar) harus diupayakan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan dan pusat-pusat aktifitas masyarakat dalam kondisi bersih, sehat dan tertata dengan baik. Gerakan gotong royong untuk menjaga kualitas saluran dalam kondisi lancar perlu di tingkatkan, selain untuk menjaga kondisi lingkungan juga terjalin hubungan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

5. Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas publik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tahun Anggaran 2015-2019 jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.64
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Personil	2015	2016	2017	2018	2019
PNS	108	103	103	101	96
Tenaga Kontrak	134	406	418	406	402
Jumlah	242	509	521	507	498

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Selain PNS dan tenaga kontrak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mempunyai koordinator lapangan yaitu 3 orang terdiri dari TNI, Polri dan Sipil. Untuk Tahun 2015-2019 koordinator lapangan yang bertugas berasal dari TNI, Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe.

7. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada periode tahun 2015 s/d 2019 terdiri dari PNS, Tenaga kontrak di lapangan dan tenaga kontrak administrasi, dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara sebanyak 633.400 jiwa, maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel.2.65
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)	242	509	521	507	498
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk	4.14	8.55	8,57	8,11	7,86

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara kebutuhan personil juga harus ditingkatkan baik dari sisi jumlah, sumber daya manusia maupun sarana prasarananya, ini dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya juga signifikan meningkat. Hal ini juga untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam memaksimalkan perannya memberi layanan permintaan pihak lainnya dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara seperti PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Medco Energi dan perusahaan profit lainnya.

8. Penegakan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015-2019 telah melaksanakan penegakan Perda/Qanun sebanyak 9 jenis yaitu :

1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri;
2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Tempat Usaha;
3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bahan Galian C;
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan HO;

5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);
9. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan Mesum).

Tahun 2015 ada penambahan pelaksanaan 2 (dua) Perda/Qanun yaitu :

1. Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (belum dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan)
2. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dimana Satpol PP dan WH bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam untuk mensosialisasikannya ke kecamatan-kecamatan.

9. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SPM)

Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai standar pelayanan minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilanjutkan dengan peraturan untuk penerapannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana sesuai Pasal 3 ayat (2) jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang pelayanan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yaitu :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Untuk peraturan standar teknis pelayanan dasar tersebut telah diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Nomor 101 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018.

10. Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengamanan Kantor Pemerintah
2. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima
3. Operasi Penegakan Qanun/Perda
4. Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam
5. Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi Terhadap Pelanggaran Qanun

Dalam penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Aceh Utara pada periode Anggaran 2019 telah terealisasi penyelesaian penyelenggaraan K3 rata–rata sebanyak 63 kali dari 44 kali yang ditargetkan atau sebesar 143,19%.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Secara kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial disebabkan oleh adanya jalur tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Fasifik yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang pernah dialami pada tahun 2004, disamping itu wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang

menyebabkan terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta daerah yang merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya. Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan/kencang/puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam. Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian materil dan imateril antara lain korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Untuk Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Aceh Utara, masih memerlukan penambahan sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi dari Dinas terkait, jumlah mobil pemadam yang ada saat ini baru tersedia 10 unit sedangkan kebutuhan yang wajar adalah sebanyak 20 unit dalam menanggulangi terjadinya kebakaran secara mendadak di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, dari tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Daerah layanan wilayah manajemen kebakaran belum memadai dikarenakan kurangnya personil maupun peralatan yang ada.

Pembangunan waduk Krueng Keureuto diharapkan mampu mereduksi banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian tidaklah mudah karena diperlukan berbagai langkah peningkatan dan kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai organisasi-organisasi terkait atau pendukung lainnya. Berikut disampaikan kondisi luas wilayah banjir seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.66
Luas Wilayah Banjir Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

No	Dampak Banjir	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Terkena Dampak Banjir (kawasan)	84	117	397	238	50
2	Jumlah Kecamatan	12	14	26	13	13

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

12. Sosial

Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2018 berkurang 3 (tiga) dari 56 Panti Asuhan menjadi 56 Panti Asuhan ditahun 2019, panti jompo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak bertambah dan juga tidak berkurang yaitu 2 (dua) Panti Jompo. Bantuan makan bagi anak asuh/jompo juga menjadi Rp. 3.000/anak/hari dengan jumlah anak asuh/jompo berjumlah 2.087.

Mengingat tingginya harga kebutuhan pokok pada saat ini, sedangkan dana yang tersedia sangat minim maka anak asuh/jompo yang disantuni terbatas. Sarana dan Prasarana panti asuhan seperti asrama, MCK, dapur dan sebagainya yang harus direhab sementara sangat minim (belum memadai). Sebahagian mobiler panti seperti ranjang, lemari, kasur dan sebagainya tidak layak lagi. Selama ini honor pimpinan pengasuh tidak ada, maka panti tidak dapat meningkatkan kesejahteraan pengasuh.

Tabel 2.67
Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Jumlah Sarana	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Panti Asuhan	57	57	58	56	53
Jumlah Panti jompo	2	2	2	2	2
Jumlah Panti Rehabilitasi	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Singgah	-	-	-	-	-
DLL	-	-	-	-	-

Sumber : Dinsosnakermobduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2.3.1.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan,

komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

A. Tenaga Kerja

Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum maksimalnya fungsi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang putus sekolah, hal tersebut masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Balai Latihan Kerja (BK), seperti peralatan-peratan mesin dan sampai saat ini belum tersedianya asrama tempat penginapan para peserta pelatihan.

Tabel 2.68
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

U R A I A N	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	17,05	-	11,02	10,18	8,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 yang terdaftar sebanyak 912 jiwa, sedikit mengalami penurunan sebanyak 143 jiwa dari tahun 2016 sebanyak 1.055 jiwa. Penurunan tingkat penganguran di Kabupaten Aceh Utara terus menurun hingga tahun 2019.

Tabel 2.69
Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

U R A I A N	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pencari Kerja (org)	519	1.055	912	403	367

Sumber : Dinas Penanaman Modal Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumya. Pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 61,39 turun dari tahun 2018 dengan capaian 63,56 persen. Dengan menurunnya tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, maka dapat mempengaruhi terhadap jumlah tingkat pegangguran.

Tabel 2.70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

U R A I A N	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	55.65	-	57,21	63,56	61,39

Sumber : Dinas Penanaman Modal Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2020

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan belum memadai disebabkan anggapan perempuan masih lebih baik mengurus rumah tangga dari pada bekerja diluar rumah dan adat patriaki masih kental yang mempengaruhi pola pikir sehingga sulit bagi perempuan berkembang. Permasalahan di lapangan :

1. Belum adanya rumah aman yang aman yang menjadi rujukan dalam penanganan kasus
2. Belum adanya pelayanan pengaduan secara online sehingga menyulitkan masyarakat dalam membuat pengaduan
3. Belum adanya transportasi untuk mendampingi korban kekerasan yang perlu rujukan ke rumah sakit maupun ke Polres. Diharapkan dukungan konselor terhadap penanganan kasus dan kerjasama yang baik antar lembaga layanan.

Jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung dibawah koordinator kantor pemberdayaan perempuan dan anak dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab :

1. Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yang sudah menampakkan hasil yang memadai dengan banyak pengaduan yang dibuat masyarakat yang melihat atau mengalami langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi diranah publik maupun domestik
2. Koordinasi dengan unit layanan perempuan dan anak (UUPA) Polres sudah terbangun dengan baik yaitu dengan rujukan kasus dan penanganan kasus bersama-sama
3. Pendamping kasus yang dilatih ditingkat kecamatan sudah bekerja walaupun belum maksimal
4. Unit layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah melakukan kerjasama dengan pekerja sosial di tingkat kecamatan sehingga masyarakat yang mengalami kekerasan lebih mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.
5. Masyarakat khususnya perempuan sudah mengalami kemajuan dengan berani melapor kejadian yang dialami baik ditingkat polres maupun ke Pusat Pelayanan Terpadu.
6.
7.

Tabel 2.71
Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Kasus	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pemerkosaan Anak	27	31	39	24	14
pelecehan	5	9	33	11	9
KDRT	34	35	48	58	75
Pemerkosaan	5	2	6	4	6
Penganiayaan	5	1	4	5	2
Traumatis	50	0	12	0	1
Sodomi	4	0	0	1	0
Incest	0	0	0	0	2

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

Tabel diatas memperlihatkan jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung dibawah koordinator Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2015 ke tahun 2019.

C. Pangan

Pendukung kedaulatan pangan menempatkan individu dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan di tengah pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pangan. Ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik disuatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan.

Tabel dibawah memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 adalah 413,50 kg/jiwa/tahun, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 375,59 kg/jiwa/tahun. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan ketersediaan pangan utama 504,73 kg/jiwa/tahun dan tahun 2019 turun menjadi 475,08 kg/jiwa/tahun.

Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2015-2019

No	KOMODITI	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan Utama per tahun (kg)	413,50	375,59	504,73	379,58	475,08
	Jumlah Penduduk	583.892	593.492	593.492	615.378	633.400

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

D. Pertanahan

Kabupaten Aceh Utara memiliki luas tanah mencapai 329.686 Ha yang dipergunakan sebagai kawasan budidaya dan kasawan hutan. Kawasan budidaya diperuntukan sebagai kawasan permukiman penduduk baik perkotaan maupun perdesaan, kawasan perkebunan, pertanian, perikanan tambak serta kawasan lainnya penunjang kehidupan masyarakat. Sementara kawasan hutan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Dari keseluruhan luas tanah di Aceh Utara sebagian besar belum bersertifikat, terutama tanah yang dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara tercatat baru 88.756,682 hektar tanah yang sudah memiliki sertifikat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksaan pendaftaran/ pensertifikatan tanah di wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah :

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan tanah.
b. Faktor ekonomi masyarakat untuk mengurus biaya persertifikatan tanah.
c. Anggapan/asumsi masyarakat bahwa pengurusan persertifikatan tanah berlangsung lama, berbelilit, birokratis dan biaya mahal.
d. Lemahnya Koordinasi dan sinergitas antar instansi Pertanahan.

Untuk aset pemerintah yang sudah dilakukan pensertifikatan oleh Dinas Pertanahan sejak tahun 2018 sebanyak 96 bidang tanah dari jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 949 bidang tanah. Dinas Pertanahan juga telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah wakaf pada tahun 2019 sebanyak 17 bidang tanah wakaf masjid. Adapun jumlah usulan pensertifikatan tanah wakaf sebanyak kurang lebih 6.900 bidang tanah yang terdiri dari tanah pertapakan masjid serta tanah aset masjid. Untuk mengatasi faktor-faktor di atas, maka diperlukan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi Pertanahan untuk mendukung dan mensosialisasikan pentingnya legalitas kepemilikan tanah antar masyarakat. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat 126 juta bidang tanah

di Indonesia, namun yang sudah bersertifikat baru mencapai 46 juta bidang tanah. Permasalahan lain yang timbul di sektor pertanahan adalah sengketa dan konflik pertanahan di wilayah Kabupaten Aceh Utara mengingat sengketa dan konflik masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Namun hal ini bukan hanya terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara karena masalah sengketa dan konflik pertanahan secara nasional juga tinggi. Data yang dipublikasi oleh Kementerian ATR/Kepala BPN pada tahun 2019 ada 8.959 kasus sengketa tanah di Indonesia yang terdiri dari sengketa antar masyarakat dan sengketa batas, orang dengan dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Aceh Utara hingga 31 Mei 2020 tercatat 9 kasus sengketa pertanahan yang terdapat pada Dinas Pertanahan. Sedangkan proyeksi kasus pertanahan pada tahun 2021 terdapat 6 kasus pertanahan yang dapat dimediasi penyelesaiannya. Pada tahun 2019 Dinas Pertanahan telah melaksanakan fasilitasi pengadaan tanah pada 3 (tiga) SKPK yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sedangkan untuk tahun 2021 diproyeksikan ada 4 (empat) SKPK yang akan melakukan pengadaan tanah.

E. Lingkungan Hidup

Prioritas ke-6 (Enam) untuk pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara mengenai Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022, masuk ke dalam Misi keempat dari 5 (lima) misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan”.

Salah satu tujuan dari misi ke-4 (Empat) pada point 4.3 adalah untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk bidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang masuk kedalam tujuan misi ke-4 (Empat) lainnya pada point 4.1 yaitu Meningkatnya

Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah. Selanjutnya, terhadap kedua tujuan tersebut, sangat berkaitan erat antara satu dengan lainnya dalam pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara. Karena untuk pemenuhan pembuatan dokumen RTRW/Revisi Kabupaten Aceh Utara, sangat ditentukan oleh dokumen Lingkungan Hidup sebagai dokumen pendukung untuk melakukan revisi RTRW yang berguna untuk melaksanakan pembangunan Aceh Utara yang terarah dan berkesinambungan.

Terhadap bahan perencanaan tentang lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara periode 2017-2022 adalah terhadap adanya isu–isu lingkungan hidup beberapa tahun terakhir di Kabupaten Aceh Utara khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya. Adapun isu-isu tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kerusakan lingkungan yaitu: abrasi/ kerusakan pantai/pesisir, kerusakan DAS, Penambangan bahan galian golongan C, kerusakan hutan akibat perambahan dan ilegal loging serta ilegal minning, perubahan iklim, Tata Ruang Wilayah, dan Bencana Alam
b. Pencemaran Lingkungan: pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, limbah padat dan B3 serta non B3,
c. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan external (ALE) dapat dirumuskan isu strategi sebagai berikut:

1. Pencemaran Lingkungan.

Kabupaten Aceh Utara memiliki sungai sebanyak 401 buah diantaranya 162 buah memiliki aliran air yang bagus baik musim hujan maupun kemarau dan memiliki 22 sungai lintas Kabupaten. Kondisi kualitas air saat ini telah mengalami peningkatan diatas baku mutu yang disebabkan oleh buangan limbah domestic maupun komersial sehingga beberapa sungai terutama yang melintasi daerah perkotaan mengalami tekanan yang cukup berat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya kongkrit yang dapat menurun kentingkat pencemaran pada sungai-sungai tersebut.

Kondisi kualitas udara di Kabupaten Aceh Utara terutama di daerah perkotaan telah mengalami tekanan yang berat terutama dari parameter PM 10 (Debu), CO (Carbon Monoksida), CO2 (Carbon Dioksida), dan Pb (Plumbum). Tingginya tingkat pencemaran diperkotaan disebabkan karena pertumbuhan kendaraan cukup besar (rata-rata 14%) terutama di Kota Lhoksukon. Dampak dari kendaraan yang pembakarannya tidak sempurna mengakibatkan tingginya tingkat gas buang (CO) ke udara serta akan berdampak juga terhadap kesehatan manusia terutama adanya pengikatan darah dengan Pb.

Kondisi tanah di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya relative baik, namun pada daerah-daerah pembuangan limbah baik domestik, komersial, maupun limbah B3 kondisinya sudah mengalami tekanan yang mengarah kepada degradasi, disamping itu pula di Kabupaten Aceh Utara terdapat alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh proses pembangunan (rata-rata pertahun 318 Hektar) dan juga terdapat lahan kritis seluas 45.000 Hektar, hal ini berdampak juga terhadap berkurangnya produksi karbon monoksida.

2. Perusakan Lingkungan.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung, maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di samping kerusakan ekosistem juga terjadi kerusakan lahan dan tanah yang disebabkan karena kebakaran hutan, pencurian hutan, perambahan, serta penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis yang berkelebihan, hal ini akan berdampak cukup besar terhadap kelangsungan hidup mikroorganisme di dalam tanah.

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud pelanggaran disini adalah pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang, terhadap pembuangan limbah dan sampah, serta pencurian terhadap keanekaragaman hayati.

Tingkat pelanggaran lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara secara visual sudah menunjukkan tingkat pelanggaran yang tinggi, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan–kegiatan yang berpotensi memanfaatkan daerah–daerah yang sebenarnya berfungsi lindung serta sarana dan prasarana belum memadai. Tingginya tingkat pelanggaran ini dapat dilihat dari beberapa kawasan, seperti sempa dan jurang, sempa dan pantai, sempa dan mata air, sempa dan danau, dan kawasan yang berfungsi lindung lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pemahaman yang baik tentang kondisi lingkungan, terutama tentang isu–isu utama yang sedang berkembang saat ini. Pemahaman tentang isu–isu tersebut akan mengantar kita pada solusi–solusi yang harus di tempuh dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Menelaah terhadap kualitas lingkungan hidup (air dan udara) secara otomatis adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar adanya peningkatan kualitas bidang kesehatan (air dan udara) dan lainnya yaitu dengan adanya kontrol pembangunan bidang infrastruktur dan tutupan lahan untuk menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai efek langsung terhadap kualitas lingkungan hidup melalui dokumen RTRW yang disusun/direvisi oleh Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, adanya pelaksanaan berbagai Program/Kegiatan pendukung yang terkait melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.

Adapun capain kinerja terhadap indikator utama dan pendukung lainnya pada dinas terkait, mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam mendukung aspek pelayanan umum bidang lingkungan hidup terhadap prioritas ke-6 pembangunan ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Dalam menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang terarah dan berkelanjutan, diperlukan berbagai dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan seperti dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai pendukung utama Sasaran Kegiatan dan sekaligus Dokumen acuan untuk membuat RTRW/Revisi RTRW dan juga RPJMD/Revisi RPJMD Kabupaten Aceh Utara periode 2017-2022. Untuk capaian kinerja terhadap hal yang dimaksud, sampai dengan pelaksanaan tahun Tahun 2020 untuk dokumen RPPLH belum berhasil dilaksanakan atau masih 0% (Nol Persen). Dan rencana akan di laksanakan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (RKPD) Tahun Anggaran 2021.

2. Pembinaan dan Pengawasan Serta Pengendalian Terhadap Izin Lingkungan Hidup (PPLH)

Pembangunan dengan prinsip penataan lingkungan hidup yang serasi, dan tidak mengabaikan fungsi dan struktur lingkungan yang telah ada, karena ekploitasi yang berlebihan mempengaruhi keseimbangan fungsinya, seperti pengambilan batu dan pasir untuk kepentingan pembangunan dengan tujuan peningkatan PAD (Galian C) yang terjadi di beberapa tempat penambangan cukup memprihatinkan seperti kondisi galian di aliran sungai krueng sawang di Kecamatan Sawang. Penggalian yang dilakukan semakin meluas sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi Tapak Bendungan Krueng Sawang. Upaya pengawasan juga terus ditingkatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara. Pengawasan aktifitas pembangunan yang berdampak langsung dengan kondisi sekitarnya diperlukan untuk mendeteksi sejak dini informasi dan situas iaktifitas yang dilakukan oleh

industri atau perusahaan. Sejak tahun 2016 hingga 2020 perkembangan perusahaan wajib amdal sebagai berikut:

Tabel 2.73
Jumlah Perusahan Wajib AMDAL Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	*2019*
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	4	4	4	4	*4*
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	4	4	4	4	*4*
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2020

Terhadap capaian kinerja terkait dengan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2018 dengan realisasi 100% (Seratus persen) dari target 100% (Seratus Persen); untuk tahun 2019, realisasi 100% (Seratus persen) dari target 100% (Seratus Persen); dan tahun 2020 realisasi yang dicapai sebesar 99,24% dari target 100 %.

Selanjutnya, untuk keseimbangan kualitas lingkungan hidup harus berjalan harmonis dengan dinamika pembangunan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Seirama dengan halte tersebut pemantauan terhadap kualitas mutu air perlu dijaga guna terbebas dari segala bentuk pencemaran akibat dari berbagai aktifitas industri dan permukiman. Tahun 2015 pencemaran status mutu air di fokuskan pada 5 kawasan dimana di tahun 2014 mencapai 4 kawasan dari 40 kawasan.

Pengambilan batu gunung dan pengerukan gunung/bukit yang tidak memeperhatikan ekosistem secara keseluruhan mengakibatkan terjadinya bahaya banjir dan longsor dibeberapa tempat. Banjir yang terjadi pada akhir 2014 yang melumpuhkan infrastruktur dasar seluruh kecamatan (26 kecamatan) dalam Kabupaten Aceh Utara kiranya menjadi peringatan penting bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan.

Pemantauan kualitas mutu air dalam 5 (Lima) Tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 2.74
Pemantauan Kualitas Air Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutu airnya	4	2	2	2	5
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air	40	40	40	40	40
Persentase	0,10	0,05	0,05	0,05	0,125

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Adapun hasil pemantauan kualitas mutu udara dalam 5 (Lima) Tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.75
Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	39.18	40.29	36.67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

3. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tindaklanjut dalam pengawasan terhadap izin lingkungan hidupdalam kurun waktu tertentu belum dilaksanakan secara maksimal, Maka diperlukan proses lanjutan. Oleh karena itu, dengan kepedulian kita semua menjadi komitmen penting terhadap lingkungan hidup dimana kita berada, sehingga kelestarian bumi terus terjaga *(one place, one earth)*. Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tertangani selama ini sebagai berikut :

Tabel 2.76
Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	3	5	6	7	7
Jumlah kasus lingkungan yang ada	4	5	6	7	7
Persentase	75	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

4. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan sebagaimana di amanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.

Untuk Cakupan pelayanan persampahan meliputi kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100 m^3/hari. Volume dan produksi sampah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.77
Volume dan Produksi Sampah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sampah Yang ditangani (Ton)	291.94	291.94	296.74	301.27	301.27
Jumlah Volume Produksi Sampah (Ton)	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
Persentase	16,96	16,96	16,68	16,43	16,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2020

Sampah banyak terdapat disekitar lingkungan permukiman dan pasar di pusat-pusat ibu kota kecamatan, penataan dan kebersihan lingkungan sekitar pasar perlu pembenahan serta sosialisasi dan rehabilitasi pasar-pasar tradisional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu sampah yang telah terkumpul didalam bak penampung sementara *(countainer)* diangkut oleh 23 unit armada truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon yang beroperasi secara terbuka *(open dumping).*

Master Plan Persampahan TPA teupin keubeu dengan luas 32 ha telah disusun, diharapkan tidak saja menjadi tempat proses akhir, tetapi juga berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA Teupin Keube masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. Beberapa sarana dan prasarana angkut sebagaimana telihat oleh tabel berikut :

Tabel 2.78
Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Truk Compactor	1	-	-	1
Armroll Truck	11	8	1	3
Dump Truck	23	19	1	3
Buldoser	2	1	-	1
Excavator	2	1	-	1
Container	57	10	2	15
Mobil Tinja	2	2	-	-
Mobil sky lift	1	1	-	-
Excavator Mini	1	1	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup

Sesuai dengan arahan fungsi hutan Aceh berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 103/Menhut/II/2013 bahwa kawasan diwilayah daratan Aceh yang luasnya mencapai 562.290,97 Ha merupakan modal pembangunan yang sangat penting dan strategis. Peran hutan ini bukan hanya penting bagi pengembangan sektor Kehutanan sendiri tetapi juga dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan sektor-sektor lain seperti pertanian, perhubungan, pemukiman, dan sebagainya. Selanjutnya, tanpa disadari fungsi hutan sebagai mata rantai kehidupan belum mendapat penilaian yang wajar. Publik pada umumnya masih menilai hutan hanya sebagai penghasil kayu dan penyedia lahan untuk berbagai keperluan. Multifungsi hutan serta *forward* dan *backward linkages* kehutanan yang sangat panjang dan luas belum mendapat tempat yang semestinya. Hal ini misalnya terlihat dari proporsi anggaran pembangunan Kehutanan yang masih sangat terbatas.

Persepsi yang cenderung *undervalued* tersebut telah menyebabkan banyak kawasan hutan yang mengalami degradasi. Oleh karena itu upaya memantapkan batas kawasan hutan, meningkatkan rehabilitasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi lingkungan menjadi sangat penting.Pemantapan batas

kawasan hutan perlu dilakukan karena menjadi titik tolak bagi kepastian hukum berbagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh dunia usaha maupun kegiatan pembangunan pemerintah. Tanpa adanya kepastian batas kawasan hutan pengelolaan hutan secara lestari mustahil dapat diwujudkan. Oleh karena itu upaya melakukan pemeliharaan dan rekonstruksi batas kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan.

Berdasarkan data pada Tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator kawasan hutan yang perlu di rehabilitasi adalah seluas 375.281 Ha dengan rincian lahan kritis di dalam kawasan seluas 226.026 Ha dan di luar kawasan hutan 149.255 Ha. Adapun kerusakan hutan pada tahun 2016 seluas 6.579,9 Ha yang diakibatkan oleh berbagai sebab seperti : perambahan pemukiman seluas 335 Ha, Perladangan liar seluas 5.977 Ha, kebakaran hutan seluas 267,9 Ha.

Degradasi hutan antara lain disebabkan oleh kegiatan *illegal logging*, perambahan kawasan hutan, pemukiman, okupasi oleh berbagai pihak, pemekaran wilayah kabupaten, kebakaran hutan maupun bencana alam. Hal ini juga terkondisikan oleh kurangnya personil pengamanan hutan, terbatasnya sarana pengamanan hutan, anggaran yang minimalis, masih lemahnya koordinasi antar lembaga, kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan, tidak ditaatinya tata ruang yang ada, serta lemahnya penegakan hukum. Semua ini memerlukan penanganan yang sinergis dan berkelanjutan.

6. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Perkotaan

Penataan dan keindahan lingkungan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau, seperti yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 adalah sebesar 30 persen dari luas kawasan permukiman perkotaan, termasuk penataan dan pemeliharan secara berkelanjutan terutama taman-taman kota serta taman-taman sekolah.

Upaya penghijauan secara berkelanjutan terus diupayakan seiring menggugah kepedulian stakeholder dan masyarakat terhadap kondisi lingkungan saat ini, sehingga kata alam tidak bersahabat dengan kita tidak menjadi kambing hitam dalam permasalahan lingkungan. Konsep pembangunan *go green* sudah sepatutnya menjadi kesadaran kolektif kita sehingga upaya ini membantu mempercepat perbaikan fungsi lingkungan yang telah berubah akibat aktifitas pembangunan selama ini. Gambaran aktifitas yang dilakukan terkait penghijauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Penghijauan Pada Kawasan Rawan Longsor dan Sumber Mata Air
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (Ha)	7	68,4	-	2,4	-
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air (Ha)	70	70	70	70	70
Persentase	0,114	0,98	-	34	34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2020

7. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Upaya perbaikan lahan kritis tersebut terus dilakukan yaitu melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, penghijauan dan restorasi, akan tetapi tanpa adanya komitmen dari semua pihak terutama Pemerintah Aceh dalam menyediakan anggaran tidak mungkin dapat terwujud oleh karena itu Pada tahun 2016 DLHK Aceh telah melaksanakan Reboisasi seluas 2.275 Ha dan Penghijauan seluas 1.495 Ha total luas kegiatan yang direhabilitasi seluas 3.770 Ha. Berbagai upaya pembangunan dibidang Kehutanan telah dilaksanakan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk sebagai akibat dari krisis multi dimensi yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Terhadap kondisi tersebut, pada tahun 2017-2022 akan diupayakan dapat ditangani melalui berbagai program dan kegiatan sesuai dengan paradigma baru pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan saat ini dilaksanakan pada tingkat tapak melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh,

sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013. Wilayah kerja pada UPTD Kehutanan Aceh adalah wilayah yang mengelola hutan Aceh pada wilayah I sampai dengan wilayah VI dan UPTD TAHURA Pocut Meurah Intan berdasarkan perpaduan kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), ekosistem wilayah, biofisik dan pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk selanjutnya disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terhadap Capaian Kinerja kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sampai dengan evaluasi tahun 2020 belum ada realisasi atau masih 0 (Nol) persen.

8. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, merupakan salah satu kegiatan penunjang untuk peningkatan dan pemeliharaan Kualitas lingkungan hidup sektor perairan di Kabupaten Aceh Utara. Terhadap Capaian Kinerja kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut sampai tahun 2020 pelaksanaan Renja Dinas terkait belum ada realisasi.

Menelaah terhadap hasil evaluasi yang dimaksud, masih terdapat permasalahan yang mendasar dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. Adapun permasalahan tersebut adalah belum tersedianya dokumen RPPLH *(*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pendukung utama Sasaran Kegiatan dan sekaligus Dokumen acuan untuk membuat RTRW/Revisi RTRW Kabupaten Aceh Utara. Sampai dengan pelaksanaan tahun berjalan Tahun 2020 belum berhasil dilaksanakan. Dan rencana baru akan di laksanakan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (RKPD) Tahun Anggaran 2021.

Terhadap kondisi tersebut, dengan belum tersusunnya dokumen RPPLH sebagai indikator utama Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Aceh Utara, maka akan menjadi salah satu hambatan yang serius untuk tercapainya target indikator prioritas

ke-6 (Enam) seperti yang tersebut di atas. Dan apabila ditinjau dari aspek pelayanan umum, pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu upaya keras untuk memenuhi target kinerja terhadap prioritas ke-6 (Enam) seperti yang termuat dalam dokumen pembangunan Kabupaten Utara. Karena dengan terhambatnya satu pelaksanaan kegiatan, akan mempengaruhi terhadap konsep pembangunan lainnya di Kabupaten Aceh Utara.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tabel ini menyajikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik.

Tabel 2.80
Kepemilikan KTP di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Kepemilikan KTP	69	92	91	91	95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2020

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.

Tabel 2.81
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PKK aktif	698	480	516	526	852
Posyandu Aktif	952	952	894	953	952
Jumlah LPM	2185	2185	2185	2185	2185

Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu- ibu rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, kegiatan PKK setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kwalitas dalam mengayomi keluarga namun ada sebagian kecil yang tidak bergabung. Tim penggerak PKK Kabupaten setiap tahun melakukan pembinaan di kecamatan.

sedangkan untuk kegiatan posyandu bekerjasama dengan dinas kesehatan.

Tabel 2.82
Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	81.92	56.33	55.45	56.23

Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penduduk menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan dimana jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi andalan utama dalam menekan jumlah anak dalam keluarga, hal ini tercermin dari peningkatan peserta KB aktif dancakupan peserta KB aktif yang stabil sehingga angka kelahiran dapat dikendalikan.

Tabel 2.83
Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga dan Akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rata rata jumlah anak per keluarga	3,00	2,78	3,00	3,00	3,0
Cakupan peserta KB aktif	69,26	70,40	70,42	70,52	57,04
Rasio Akseptor KB	69,26	68,72	68,75	68,82	58,28

Sumber : BPMKS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rata-rata jumlah anak per keluarga sebagaimana data tahun 2015–2019 adalah 3 Anak, data ini bersumber dari hasil pendataan keluarga oleh petugas PLKB Kabupaten Aceh Utara.Hasil pendataan setiap tahunnya tidak menunjukkan adanya perubahan statistik, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya di Kabupaten Aceh Utara sudah sangat baik, hampir seluruh keluarga yang dikunjungi oleh PLKB di lapangan mengungkapkan bahwa

keluarga yang baik dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak. Faktor yang menjadi pertimbangan tersebut ternyata tidak terbatas pada keluarga ekonomi menengah kebawah saja, bahkan keluarga yang memiliki taraf ekonomi yang mapan juga menyadari mengenai jumlah anak. Sehingga ini sangat membantu tugas dan misi program KB di Kabupaten Aceh Utara.

1. Cakupan peserta KB aktif

   Data menunjukkan perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Utara cenderung meningkat, dari tahun 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1 persen, data statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta dari tahun 2018 sebesar 70.52 menjadi 57.04 persen pada tahun 2019, Besaran persentase cakupan peserta KB diukur dari banyaknya jumlah permintaan alat kontrasepsi di lapangan dan di klinik yang ada di Aceh Utara.

2. Rasio Akseptor KB

   Perbandingan antara peserta (akseptor) KB dengan jumlah pasangan usia subur yang ada di Aceh Utara dari data 2015 hingga 2019 mengalami angka persentase yang turun, hal ini dikarenakan adanya peningkatan secara signifikan jumlah pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan belum sebanding dengan peningkatan jumlah peserta KB, sehingga sesuai data statistik yang didapat Rasio Akseptor mengalami penurunan secara persentase.

I. Perhubungan

umum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara Fasilitas yang paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti keberadaan pelabuhan umum Krueng Geukueh dan Bandar Udara Malikussaleh yang memiliki rute dan status aktifitas secara internasional dapat dimanfaatkan beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi arus penumpang sebagai berikut :

Tabel 2.84
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)	2015	2016	2017	2018	2019
	879.720	986,720	2.136.072	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020

Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang. Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kenderaan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyaman dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Gedung pengujian kendaraan bermotor serta fasilitas pendukungnya di kecamatan Bayu telah dioperasionalkan sehingga aktifitas pelayanan pengujian kenderaan bermotor lebih optimal dan secara terus menerus ditingkatkan operasionalnya. gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.85
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 -2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4.363	4.401	4.690	4.813	4.676

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Tabel 2.86
Sarana Pendukung Lalu Lintas Jalan Raya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Sarana Pendukung	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rambu- Rambu	170	70	-	-	280
Marka Jalan(m)2	635	600	705	-	1.801
Lampu Isyarat	6	-	1	1	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Sarana pendukung ini sangat berguna bagi keselamatan pengguna jalan, rincian data realisasi rambu lalu lintas, marka dan lampu pemberi isyarat jalan sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif, maka diharapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2019 sebanyak 468 unit yang terdiri dari 124 koperasi aktif dan 324 koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2015 s.d 2019 mengalami penurunan, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.87
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015–2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi	462	462	462	466	468
2	Jumlah Koperasi Aktif	123	129	138	141	144
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	339	333	324	325	324
4	Jumlah Koperasi Yang Dibubarkan	87	-	-	-	-
5	Persentase Koperasi Aktif	26,62	27,92	29,78	30,26	30,77
6	Persentase Koperasi Tidak Aktif	73.38	72.07	70.13	69.74	69.23

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Menurunnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini karena masih menghadapi kendala. Secara umum permasalahan ataupun kendala yang sedang dihadapi oleh Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara adalah menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) manajemen dan pengurus koperasi, sehingga koperasi tidak berjalan dengan baik, bahkan sampai dibubarkan. Persoalan lain juga dihadapi oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan pengurus koperasi. Selain itu juga untuk dapat berjalan koperasi dengan baik, maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara.Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2015 s.d tahun 2018 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.378 UMKM atau mengalami peningkatan sebesar 78,61 persen sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0.95 persen atau menurun 564 UMKM dari tahun 2018. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapikendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.88
Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah UMKM	8.739	9.599	10.899	11.117	10.563

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.76 dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha miko, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih berpotensial di Kabupaten Aceh Utara adalah pada sektor pertanian. Ini menandakan bahwa sektor pertanian sangat baik untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.89
Jumlah Persentase UMKM di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019

No.	**Jumlah Usaha**	**2015 (unit)**	**(%)**	**2016 (unit)**	**(%)**	**2017 (unit)**	**(%)**	**2018 (unit)**	**(%)**	**2019 (unit)**	**(%)**
1	Usaha Mikro	5.123	58,62	5.634	58,70	6.352	58.28	5.635	50.69	5.307	50.24
2	Usaha Kecil	3.536	40,46	3.853	40,13	4.190	38.44	4.915	44.21	4.686	44.36
3	Usaha Menengah	80	0,92	112	1,17	357	3.28	567	5.10	570	5.40
	JUMLAH UMKM	8.739	100	9.599	100	10.899	100	11.117	100	10.653	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Tabel 2.90
Jumlah Sektor Ekonomi UMKM Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

No	Sektor Ekonomi	2015 UMKM (unit)	(%)	2016 UMKM (unit)	(%)	2017 UMKM (unit)	(%)	2018 UMKM (unit)	(%)	2019 UMKM (unit)	(%)
1	Perdagangan/ jasa	2.245	25,69	2.734	28,49	10.191	93.50	10.409	93.63	10.563	93.25
2	Pertanian	4.360	49,89	4.412	45,46	167	1.53	167	1.50	4.412	1.67
3	Pertambangan	82	0,94	85	0,89	12	0.11	12	0,11	85	0,11
4	Industri	1.333	15,25	1.564	16,13	441	4.06	441	397	1.564	4.17
5	Perikanan/ kelautan	127	1,45	163	1,70	98	0.28	28	0.25	163	0.25
6	Peternakan	334	3,82	359	3,73	23	0.21	23	0.21	359	0.23
7	Transportasi	258	2,95	282	2,93	37	0.34	37	0.33	282	0.33
	T ot a l	8.739	100	9.599	100	10.899	100	11.117	100	9.599	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

K. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalan upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini

seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis lapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola (stadion), lapangan Futsal, lapangan Volly dan lain-lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

1. Ruang Lingkup Olahraga

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di kabupaten Aceh Utara dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

L. Kebudayaan

Dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 75 sanggar (group) kesenian pada tahun 2018 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurkon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet,

poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi). Jumlah situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.91
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Benda Cagar Budaya	393	393	433	433	433
- Milik Pemerintahan Daerah	302	302	302	302	302
- Milik swasta	91	91	131	131	131
Jumlah situs cagar budata	100	100	100	100	103
- Miliki Pemerintahan Daerah	95	95	95	97	97
- Milik Sawata	5	5	5	6	6
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	99	99	99	102	102
- Milik Pemerintahan Daerah	94	94	94	96	96
- Milik swasta	5	5	5	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Aceh Utara menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomianya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.92
Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni dan Seni Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah sanggar kesenian	79	82	82	121	121
2.	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	0	0
3.	Jumlah museum	1	1	1	1	1
4.	Jumlah pusat kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

M. Perpustakaan dan Kearsipan

Bila dilihat dari perkembangan yang ada pada saat sekarang ini, perkembangan ataupun pembangunan Perpustakaan di Aceh Utara masih jauh dari yang diharapkan. hal ini dapat dilihat dari rasio antara perpustakaan Kabupaten Uceh Utara yang ada dengan masyarakat Aceh Utara. Pelayanan yang diberikan pun kurang maksimal karena hanya didukung oleh dua perpustakaan yaitu satu perpustakaan induk yang sampai saat ini masih berpusat di kota Lhoksukon dan satu perpustakaan cabang yang berpusat di kota Lhokseumawe.

Tabel 2.93
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun (Orang)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	3.769	10.314	18.215	25.358	3900
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	64.957	50.563	n/a	n/a	430.839

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2020

Selain dari segi perpustakaan keliling, kita juga dapat melihat kegiatan kearsipan. kegiatan dibidang ini terutama sekali melakukan pendataan dan penataan dibidang kearsipan pada setiap SKPK baik itu dinas, badan, kantor maupun kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh Utara. namun, masih terkendala yang disebabkan faktor transportasi. seperti diketahui, bahwa SKPK tersebar di seluruh Aceh Utara dan untuk menjangkaunya dibutuhkan armada yang memadai, namun selama ini penggunaan armada dimaksud terkadang berbenturan dengan kegiatan perpustakaan keliling maupun monitoring perpustakaan.

Tabel 2.94
Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia (Judul)	13.137	15.128	15.882	16.563	18.103
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia (Eks)	41.323	50.563	50.563	50.563	48.800

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2020

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

1. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan

dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tangkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah pengembangan perikanan tangkap meliputi 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, Baktiya Barat dan Tanah Jambo Aye.

2. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada dihulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.174 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

3. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke

daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Banda Baro, dan Nisam Antara.

4. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Tabel 2.95
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Ikan (ton)	26,808,41	28.295,30	28.861,20	31.095,54	31.958,47
Target Daerah yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	27.543,10	30.185,49	33.149,79	35.978,57	28.668,63
Rasio	97,33	93,71	87,06	86,43	111.48

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun produksi ikan mengalami peningkatan, pada tahun 2019 produksi ikan terjadi peningkatan sebesar 862,93 ton bila dibandingkan pada tahun 2018. Walaupun terjadi peningkatan produksi namun belum mencapai sesuai dengan target daerah, ini dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

Tabel 2.96
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	40,68	40,36	40,64	41,23	43,52
Target daerah	38,00	38,00	38,00	42,19	44,02
Rasio	107,05	106,21	106,95	97,72	98,86

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Pada tabel konsumsi ikan tersebut di atas menunjukkan bahwa target daerah pada tahun 2019 sebesar 44,02 kg/kapita/tahun sedangkan jumlah konsumsi perkapita pada tahun 2019 sebesar 43,02 kg/tahun. Ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi ikan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,5 kg dari target yang telah di tentukan.

B. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

Tabel 2.97
Jumlah Wisatawan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Wisatawan	20.811	111.038	90.679	117.786	250.651

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020

C. Pertanian

Pasca migas pembangunan lebih difokuskan pada sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel.2.98
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

No.	Komoditi	Tahun (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	365.618,27	314.168,38	440.738,83	367.519,63	389.076,30
2	Kedelai	9.424,59	10.123,28	358,08	3.804,73	59,75
3	Jagung	8.250,99	15.604,01	14.120,56	10.989,22	14.647,67
4	Kacang Tanah	248,75	248,75	157,14	128,04	110,57
5	Ubi Kayu	69,08	69,08	46,20	45,60	22,77
6	Ubi Jalar	4.552,02	4.552,02	3.625,57	3.613,21	3.115,15
7	Kacang Hijau	416,74	416,74	228,66	187,15	156,96

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2020

Tabel 2.99
Perkembangan Populasi Ternak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

NO	JENIS TERNAK	TAHUN (EKOR)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sapi	96.982	98.238	102.256	104.119	106.201
2	Kerbau	5.426	5.516	5.789	5.589	5.678
3	Kambing	73.621	75.600	78.700	83.334	101.240
4	Domba	13.652	14.024	14.620	14.189	18.243
5	Ayam Buras	265.794	837.256	895.044	762.743	1.036.484
6	Ayam Pedaging	926.996	3.881.396	4.055.433	3.450.332	6.350.579
7	Itik	171.258	359.639	374.749	356.369	685.964

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Dari Tabel di atas terlihat bahwa, secara umum perkembangan populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2015 hingga 2019. Adapun peningkatan populasi ternak besar tahun 2019 sapi sebesar 9.219 ekor dari tahun 2015.

Untuk ternak unggas, berdasarkan Tabel di atas terjadi peningkatan populasi yang cukup tinggi pada ternak ayam buras dan ayam pedaging. Tingkat pertumbuhan populasi ayam buras pada tahun 2015 sebesar 4,68 persen atau 11.880 ekor, sedangkan pertumbuhan populasi ayam pedaging pada tahun 2015 adalah 10,00 persen atau 84.279 ekor.

Sub sektor perkebunan pada hakekatnya memiliki multifungsi dalam mendukung kehidupan masyarakat saat ini diantaranya (1) Fungsi ekonomi yaitu sebagai sumber pendapatan petani, menjamin tersedianya bahan baku industri berbasis produk, serta mendukung pengembangan agrowisata. (2) Fungsi ekologis yaitu mendukung upaya konservasi, produksi oksigen dan reservoir air saat musim kemarau serta (3) Fungsi sosial sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebahagian besar masyarakat pedesaan, sekaligus mencegah terjadinya urbanisasi.

Tabel 2.100
Perkembangan Areal Komoditi Perkebunan Rakyat
Kabupaten Aceh UtaraTahun 2015-2019

NO	KOMODITI	TAHUN (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	9.119	8.810	8.834	8.779	8.728
2	Kelapa Sawit	17.769	17.998	17.764	18.185	18.185
3	Kelapa Dalam	18.088	15.311	15.566	14.933	14.933
4	Kopi	4.985	2.627	2.627	2.426	2.461
5	Cengkeh	190	190	190	95	95
6	Pala	162	163	173	177	472
7	Pinang	12.267	12.275	12.273	12.284	12.884
8	Kapuk Randu	331	331	331	331	331
9	Kakao	7.373	9.216	9.213	9.321	9.321
10	Kemiri	713	715	715	709	709
11	Lada	62.5	55	61	56	66
12	Sagu	687	689	689	690	690
13	Aren	467	467	467	467	467
14	Nilam	72	72	103	5	8
15	Tebu	72	72	39	32	34
16	Tembakau	35	35	35	58	108
17	Serai Wangi	-	-	-	-	2,5

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Bila dilihat dari tabel perkembangan areal komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan kelapa sawit terjadi peningkatan pada tahun 2018. Untuk komoditi karet terjadi penurunan dari 9.119 ha tahun 2015 menjadi 8.810 ha pada tahun 2016. Pada umumnya untuk komoditi perkebunan rakyat rata-rata mengalami peningkatan luasan dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 2.101
Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

NO	KOMODITI	TAHUN (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	4,483	4.485	5.359	5.344	5.077
2	Kelapa Sawit	165,624	166.696	204.113	205.269	209.374
3	Kelapa Dalam	10,294	10.297	9.931	9.917	10.115
4	Kopi	1,042	972	917	915	933
5	Cengkeh	8	8	5	4	4
6	Pala	35	35	36	38	39
7	Pinang	8.239	4.253	4.275	4.264	4.849
8	Kapuk / Randu	210	210	200	200	204
9	Kakao	3,264	3269	3.676	3.671	3.744
10	Kemiri	429	504	509	509	519
11	Lada	6,1	7	6	6	7
12	Sagu	144	175	155	155	158
13	Aren	326	327	311	311	317
14	Nilam	8	8	3	0.4	1.0
15	Tebu	29	29	38	29	30
16	Tembakau	200	200	48	49	50
17	Serai Wangi	-	-	-	-	2.5

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Produksi komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan seperti kelapa sawit mengalami peningkatan. Sedangkan komoditi karet produksi tahun 2018 sebesar 5.344 ton menjadi 5.077 ton pada tahun 2019. Produksi perkebunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di atas. Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara kontinyu dan intensif kepada petani kebun agar produksi perkebunan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

D. Perindustrian dan Perdagangan

1. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan penggerak utama perekonomian, bahkan industri pengolahan memberikan konstribsi besar terhadap perekonomian nasional. Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi

oleh sub sektor industri pegolahan (manufaktur). Peranan sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB cenderug menurun disebabkan tidak maksimalnya produksi PT. Pupuk Iskandar Muda.

Tabel 2.102
Perkembangan Capaian Sektor Perindustrian di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 – 2019 (Rp. Milyar)

No	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tanpa Migas	2.336,5	1.703,3	1.823,60	1.714,5
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	16,23	11,47	11,63	10,43
3	Jumlah PDRB tanpa migas ADHB	14.398,04	14.481,78	15.674,82	16.435,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara, hanya dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan capaian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.103
Perkembangan Capaian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019 (Rp. Milyar)

No	Kontribusi Sektor Perdagangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tanpa Migas	1.586,81	1.701,24	1.818,17	1.887,50	1.947,79
2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	13,00	14,24	14,90	12,46	12,31
3	Jumlah PDRB tanpa migas ADHB	15.184,78	15.195,57	15.544,94	16.343,73	16.922,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Polaper tumbuhan sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan naik untuk tiap tahunnya. Padatahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sektor tersebut tumbuh sebesar 360,98 Milyar atau mengalami peningkatan kontribusi sebesar 81,47 persen, tetapi kalau dilihat dari persentase kontribusi terhadap PDRB tanpa migas ADBH mengalami kondisi yang berfluktuatif, bahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 14,90 persen pada tahun 2017 menjadi 12,46 persen atau turun sebesar 0,84 persen.

3. Ekspor dan Impor

Nilai ekspor dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 cenderung menurun. Nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai USD 370.77.500 dan menurun pada tahun 2018 menjai USD 157.922.174.

Tabel 2.104
Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 - 2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Nilai Ekspor	241.799.192	308.115.425	157.922.174	N/A
Nilai Impor	3.641.503	29.376.324	12.079.693	N/A
Surplus Perdagangan	238.157.688	278.739.100	145.842.481	N/A

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe Tahun 2020

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

1. Pendidikan Islami

Implementasi Pendidikan Islami dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Selain pendidikan umum, juga terdapat pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan, dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga dayah juga dapat dijadikan rujukan masyarakat dan elit sosial karena biasanya kalangan dayah memberikan masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah dalam isu-isu kehidupan sosial masyarakat.

2. Kebudayaan

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara' yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar

kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adatistiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan).

4. Syariat Islam

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah,

tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Kabupaten Aceh Utara telah mensosialisasikan Qanun tersebut ke 27 Kecamatan dengan melibatkan Dinas Syariat Islam dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Adapun tindak pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda atau kurungan.

Tabel 2.105
Persentase Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Jumlah pelanggaran Syariat Islam	30	73	28
2.	Jumlah Penduduk	611.435	619.407	602.793
3.	Per 1000 Penduduk	0,049	0,118	0,046

Sumber : Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

5. Perkembangan Dayah

Dayah adalah sebuah lembaga otonom yang menangani pembelajaran dan pendidikan agama. Dayah didirikan dan dikelola oleh seorang teugku atau biasa dipanggil Abu, Abi atau Walid. Teungku secara otomatis mengatur semua kegiatan baik berupa pengajian maupun pembangunan dayah. Lahan pertapakan pembangunan sebuah dayah adalah pada tanah berstatus wakaf masyarakat umum maupun milik pribadi teungku pimpinan. Masyarakat sekitar dayah biasanya adalah donatur utama sebuah dayah, pembangunan dayah biasanya dilakukan secara gotong royong. Dalam sebuah dayah, baik salafi maupun modern terdapat sebuah balai mushala tempat salat berjama'ah dilaksanakan setiap waktu salat. Terdapat juga deretan bilik bagi santri yang mondok, beberapa unit balai pengajian yang biasanya berkontruksi kayu. Sarana penunjang sebuah dayah adalah dapur umum, sarana

olahraga, tempat wudhu dan sanitasi lainnya. Terkadang ada dayah yang juga mendirikan masjid didalamnya, tetapi ini sangat jarang adanya. Sedangkan khusus untuk dayah modern sarana lainnya adalah berupa unit sekolah yang lengkap meliputi ruang belajar, laboratorium dan perpustakaan, gedungnya pun berkonstruksi permanen.

Penetapan tipe dayah dalam Kabupaten Aceh Utara berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2017, dalam penetapan tipe dayah dilakukan oleh Tim Akreditasi sesuai hasil laporan Tim Monitoring. Dayah pada umumnya memiliki santri mondok/mukim paling sedikit 20 orang. Setiap tahunnya menjalani perubahan jumlah dayah diakibatkan data santri mondok setiap dayah menjalani naik turun sehingga berpengaruh pada penetapan tipe dayah . Sejak tahun 2019 penetapan dayah seluruh Aceh ditetapkan melalui keputusan Gubernur Aceh sehingga terjadinya sinkronisasi data antara Provinsi dengan Kabupaten, sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh.

Tabel 2.106
Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dayah Tipe A+	5	5	7	4	4
Dayah Tipe A	20	20	7	12	12
Dayah Tipe B	38	36	15	25	25
Dayah Tipe C	88	73	61	65	65
Dayah Tipe D	53	58	109	90	91
Total	204	192	199	196	197

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

6. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Kabupaten Aceh Utara mendistribusikan zakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan serta memberi bantuan berupa rumah layak huni kepada kaum dhuafa. Berikut Rekapitulasi Penerimaan Zakat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.107
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	Penerimaan Zakat		
		Zakat Profesi	Zakat Mal	Total
1.	2015	Rp. 9.883.632.251	Rp. 16.400.000	Rp. 9.900.032.251
2.	2016	Rp. 11.557.792.381	Rp. 15.000.000	Rp. 11.572.792.381
3.	2017	Rp. 12.851.939.211	-	Rp. 12.851.939.211
4.	2018	Rp. 13.938.517.485	Rp. 27.638.000	Rp. 13.966.155.485
5.	2019	Rp. 15.040.978.476	Rp.112.9852.000	Rp. 15.153.930.476

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tahun 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km^2, atau 329.686 Ha.Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km^2. Peran fasilitas wilayah/infrastruktur terhadap daya saing Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat dari beberapa hal salah satunya adalah panjang jalan. Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga tahun 2019 adalah sepanjang 2.032,80 Km, dengankondisi sebagai berikut: Kondisi jalan baik sepanjang 619,85 Km atau sekitar 30,49 persen; kondisi jalan sedang mencapai 9,20 Km atau sebesar 0,45 persen;Kondisi rusak ringan sebesar 20 Km

atau sekitar 0,98 persen; dan kondisi jalan rusak berat sekitar 1.383,75 Km atau sekitar 68,07 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti : perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga berupaya meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan aset-aset daerah melalui penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan & penghapusan terhadap aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan aset-aset ini dapat digunakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tingkat pendidikan. Jumlah lulusan S1/S2/S3 terus meningkat dari tahun 2015-2019, Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikali 10.000. Rasio lulusan S1/S2/S3 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.108
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Rasio Lulusan S1/S2/S3
2015	583.892	12.589	216
2016	593.492	12.243	206
2017	602.554	13.081	217
2018	619.407	14.677	237
2019	633.400	14.917	236

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2020

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency Ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang fluktuatif , sebagaiman tabel berikut ;

Tabel 2.109
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ratio Ketergantungan	33,50	32,15	29,30	28,82	28,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Tabel 2.110
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Utara

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1.1.	***Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi***							
1.1.1.	***Otononomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian***							
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB (ADHK) - Pertumbuhan PDRB Migas - Pertumbuhan PDRB Non Migas	 1,59 5,38	 (1,74) 3,30	 (3,47) 4,39	 (11,48) 4,69	 0,89 3,27	 - -	
1.1.1.2.	Laju Inflasi	2,44	5,60	2,87	2,05	1,20	-	
1.1.1.3.	PDRB Perkapita (juta rupiah) - PDRB Perkapita ADHB Migas - PDRB Perkapita ADHB Non Migas	 35,94 20,44	 36,08 21,31	 34,95 22,52	 28,06 23,68	 n/a n/a	 - -	
	- PDRB Perkapita ADHK Migas - PDRB Perkapita ADHK Non Migas	33,04 18,79	32,04 19,16	30,05 19,43	26,10 19,96	n/a n/a	- -	
1.1.1.4.	Indeks Gini	0,270	0,270	0,266	0,292	0,08	-	
1.1.1.5.	Pemerataan Pendapatan							
1.1.1.6.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional							
1.1.1.7.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	78,48	79,66	80,42	80,80	80,54	Persen	**sesuai (=)**
1.1.1.8.	Angka Kriminalitas Tertangani						-	
1.2.	***Fokus Kesejahteraan Masyarakat***							
1.2.1	***Pendidikan***							
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	92.24	98,05	99,10	99,10	99,10	100%	**sesuai (=)**
1.2.1.2	Angka Rata Rata Lama sekolah	8,07	8,09	8,1	9,01	9,46	-	**Belum tercapai (<)**
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar	86,35	97,63	94,22	104,93	91,66	persen	**sesuai (=)**
1.2.1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan	29,84	38,26	39,57	44,78	45,88	Persen	**sesuai (=)**
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni	71,72	75,68	66,38	84,78	74,34	persen	**sesuai (=)**

1.2.2	***Kesehatan***						SPM	
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,70	998,5	999,8	997	996	90%	**Terlampaui (>)**
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	68,48	68,51	68,54	68,61	68,79	72	**Belum tercapai (<)**
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0.012	0.11	0.027	0.012	2.4	<5%	**Terlampaui (>)**
1.3.	***Fokus Seni Budaya dan Olah Raga***							
1.3.1	***Kebudayaan***							
1.3.1.1	Jumlah grup kesenian	75	71	82	121	121	grup	**Sesuai (=)**
1.3.1.2	Jumlah Gedung	1	1	1	1	1	unit	**sesuai (=)**
1.3.2	***Pemuda dan Olah Raga***							
1.3.2.1	Jumlah klub olahraga	32	32	32	32		klub	**sesuai (=)**
1.3.2.2	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1		unit	**sesuai (=)**
2.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
2.1.	***Fokus Layanan Urusan Wajib***							
2.1.1.	***Pendidikan***							
2.1.1.1.	***Pendidikan Dasar***						SPM	
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah	94,26	83,49	79,66	73,64	82,64	90%	**Belum tercapai (<)**
2.1.1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	39,59	40,64	41,32	42,44	55,17	50/10000	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.3.	Rasio guru/murid	11,63	10,98	11,02	11,07	7,87	1 guru / 32 murid	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	9,11	9,11	9,66	9,35	5,41	6 guru / 1 sekolah	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.2.	***Pendidikan Menengah***						SPM	
2.1.1.1.2.1.	Angka Partisipasi Sekolah	67,15	67,83	69,87	56,44	66,06	60%	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	242	230	213	266	270	100%	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	11,95	11,51	10,72	9,81	7,87		**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	2,75	2,69	2,55	3,22	5,58		**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.3.	***Fasilitas Pendidikan***						SPM	
2.1.1.1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	402	406	408	407	409	unit	**sesuai (=)**
2.1.1.1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	224	246	266	260	270	unit	**sesuai (=)**
2.1.1.1.4.	***Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***						SPM	
2.1.1.1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,60	30,18	57,27	63,14		persen	**sesuai (=)**

2.1.1.1.5.	***Angka Putus Sekolah***						SPM	
2.1.1.1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,04	0,09	0,08	0,04	0,06	1% dari jml siswa berseko lah	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	9,01	1,89	0,13	0,23	0,17	1% dari jml siswa berseko lah	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,38	0,39	0,27	0,25	0,39	1% dari jml siswa berseko lah	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.6.	***Angka Kelulusan***						SPM	
2.1.1.1.6.1.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	11.560	12.442	12.462	11.708	94,81	siswa	**sesuai (=)**
2.1.1.1.6.2	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	8.275	8.884	8.174	8.629	87,53	siswa	**sesuai (=)**
2.1.1.1.6.3	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	6.161	5.936	6.785	6.816	73,16	siswa	**sesuai (=)**
2.1.1.1.6.4.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,51	98,79	96,40	98,82	104,99	95%	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.6.5	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,41	85,76	92,30	92,61	75,31	25%	**Terlampaui (>)**
2.1.1.1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	6.524	7.202	8.034	11.207	6,823	guru	**Terlampaui (>)**
2.1.2.	***Kesehatan***						SPM	
2.1.2.1.	Rasio Posyandu per-satuan balita	1/56	1/59	1/58	1/70	1/55	1/60-100 balita	**sesuai (=)**
2.1.2.2	Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,054/ 0,150	0,05/ 0,144	0,196	0,196	0,196	1/30.000 dan 3/30.000	**Belum tercapai (<)**
2.1.2.3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1,90	1,80	1,80	1,80	1,80		
2.1.2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,113	0,090	0,195	0,087	0,015	40/ 100.000 pddk	**Belum tercapai (<)**
2.1.2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,16	0,22	0,167	0,113	0,090	40/ 100.000 pddk	**Belum tercapai (<)**
2.1.2.6.	Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani	95,00	80	71	76	79,97	80%	**Terlampaui (>)**
2.1.2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88,15	84	84,16	82,5	85	90%	**Belum tercapai (<)**
2.1.2.8.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62	60,5	62	45,8	46,1	100%	**Belum tercapai (<)**
2.1.2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100%	**sesuai (=)**
2.1.2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	97	91	80,29	45.88	37.34	100%	**Belum tercapai (<)**

2.1.2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100%	**sesuai (=)**
2.1.2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	N/A	N/A	100%	**sesuai (=)**
2.1.2.13.	Cakupan kunjungan bayi	98,29	98,7	98,74	95,23	98,4	90%	**Terlampaui (>)**
2.1.2.14.	Cakupan puskesmas	115	114,81	122,22	100	100	100%	**Terlampaui (>)**
2.1.2.15.	Cakupan puskesmas pembantu	10,8	10	10,33	30,00	30,00	100%	**Belum tercapai (<)**
2.1.2.16.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7	1	5	3	4	<23%	**Terlampaui (>)**
2.1.2.17.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	127	198	198	111	207	<102	**Belum tercapai (<)**
2.1.3.	***Pekerjaan Umum***							
2.1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	39,12	43,32	52,84	41,00	48,09	60%	**Belum tercapai (<)**
2.1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	1:89	1:86	1:11	1 : 11	1:12		
2.1.3.3	Jumlah tempat ibadah	3.912	3.925	4.089	4.069	4.160		
2.1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	46,96	48,92	51,23	55,75	53,33	100%	**Belum tercapai (<)**
2.1.3.5	Rasio rumah layak huni	0.19	0,19	0,19	0,20	0,20		
2.1.3.6	Panjang jalan di lalui roda 4	61,21	66,83	79,64	77,93	71,69		
2.1.3.7	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	54,29	54,29	54,29	-	-		
2.1.3.8	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	61,21	66,83	79,64	77,93	71,69	60%	**Terlampaui (>)**
2.1.3.9	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	7,54	7,89	8,23	8,57	8,54		
2.1.3.10	Sempadan jalan yang di pakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	24,75	24,69	24,60	23,37	23,16		
2.1.3.11	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	14,3	14,2	20,0	20,1	20		
2.1.3.12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	36,5	39,4	32,5	33,75	34,7	70-79%	**Belum tercapai (<)**
2.1.4.	***Perumahan***							
2.1.4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	56,96	59,85	60,24	60,76	61,82	100%	**Belum tercapai (<)**
2.1.4.3.	Rumah tangga bersanitasi	46,96	48,92	51,23	53,98	55,75		
2.1.4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	2,23	9,58	9,58	9,58	-	<10%	**Terlampaui (>)**
2.1.4.5.	Rumah layak huni	82,25	84,42	83,19	83,21	85,00		
2.1.5.	***Tata Ruang***							
2.1.5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,86	0,30	0,30	0,30	0,30	25%	**Belum tercapai (<)**

2.1.6.	***Perhubungan***							
2.1.6.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.571.152	3.543.121	1.762.450	879.720	-		
2.1.6.2	Rasio ijin trayek							
2.1.6.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	4.547	4.240	4.315	4.363	4401		
2.1.6.4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	5	5	5	5	5		
2.1.6.5	Angkutan darat	1,72	1,72	1,71	1,74	1,74		
2.1.6.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	49,96	51,03	51,20	-	-		
2.1.6.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	20	20	20	20	20		
2.1.6.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	38.222	38.222	38.222	38.222	38.222		
2.1.6.9	Pemasangan rambu-rambu	18,42	22,57	12,24	15,02	-	100%	**Belum tercapai (<)**
2.1.7.	***Lingkungan Hidup***							
2.1.7.1	Persentase penanganan sampah	29,00	34,42	13,48	15,28	21,49	70%	**Belum tercapai (<)**
2.1.7.2	Pencemaran status mutu air	0,20	0,13	0,10	0,10	0,10		
2.1.7.3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100		
2.1.8.	***Kependudukan dan Catatan Sipil***							
2.1.8.1	Kepemilikan KTP	95,68	98,25	98,25	91	95	100%	**Belum tercapai (<)**
2.1.8.2	Rasio bayi berakte kelahiran	21	71	65,22	87	78		
2.1.8.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
2.1.8.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.9.	***Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera***						SPM	
2.1.9.1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	3	3	3	3	3		
2.1.9.2	Rasio Akseptor KB	69,26	68,72	68,72	54,28	57,04		
2.1.9.3	Cakupan peserta KB aktif	69,26	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	80%	**Belum tercapai (<)**
2.1.9.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	63,09	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
2.1.10.	***Ketenagakerjaan***						SPM	
2.1.10.1	Angka partisipasi angkatan kerja	60,20	62,09	55,88	55,65		100%	
2.1.10.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,36	50,36	0	1,6		50%	
2.1.10.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	55,60	-	57,21	63,56	61,39	100%	**Terlampaui (>)**
2.1.10.4	Pencari kerja yang ditempatkan	0,01	0,09	0,01	0,17		70%	**Belum tercapai (<)**

2.1.10.5	Tingkat pengangguran terbuka	17,05	n/a	11,02	10,18	8,63		
2.1.11.	***Koperasi Usaha Kecil dan Menengah***							
2.1.11.1	Persentase koperasi aktif	26,62	27,92	29,87	30,26	30,77		
2.1.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	99,08	98,83	96,72	94,90	94,60		
2.1.12.	***Penanaman Modal***							
2.1.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	33	33	33	-	-	usaha	
2.1.12.2	Rasio daya serap tenaga kerja	84,53	82,03	86,42	82,95	-	persen	
2.1.13.	***Kebudayaan***							
2.1.13.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1	kali	
2.1.13.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	unit	
2.1.13.3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	23	75	75	76	76	persen	
2.1.14.	***Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri***							
2.1.14.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	1	1	-	1	4 kali/ Tahun	
2.1.14.1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1	Kali	
2.1.15.	***Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian***							
2.1.15.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,26	1,26	4,33	4,14			
2.1.15.2	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	-	-	0,2496	0,2496			
2.1.15.3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan							
2.1.15.4	Pertumbuhan ekonomi (Non Migas	5,38	3,30	4,39	4,69			
2.1.15.5	Kemiskinan	21,57	20,34	19,58	19,20			
2.1.15.6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada			
2.1.15.7	Penegakan Perda							
2.1.15.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	15	15					
2.1.15.9	Tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3(Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten						70%	
2.1.15.10	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-	-	2.496	2.496		Petugas	

2.1.15.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	-	-	-				
2.1.15.12	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	-	-	-				
2.1.15.13	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	-	-	-				
2.1.15.14	Sistem informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		**sesuai (=)**
2.1.15.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-				
2.1.16.	***Ketahanan Pangan***							
2.1.16.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		**sesuai (=)**
2.1.16.1.	Ketersediaan pangan utama	488,21	480,80	687,98	458,7			**sesuai (=)**
2.1.17.	***Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***							
2.1.17.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	7,73	8,86	31,74	31,74		persen	**sesuai (=)**
2.1.17.2	PKK Aktif	516	518	499	698		PKK	**sesuai (=)**
2.1.17.3	Posyandu Aktif	481	486	931	952		Posyandu	**sesuai (=)**
2.1.18.	***Statistik***							
2.1.18.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	unit	**sesuai (=)**
2.1.18.2	Buku PDRB Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada	unit	**sesuai (=)**
2.1.19.	***Perpustakaan***							
2.1.19.1	Jumlah perpustakaan	16	16	16	52		unit	**Belum tercapai (<)**
2.1.19.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	100	95,96	100	96		persen	**Terlampaui (>)**
2.1.19.3	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	40,21	49,16	53,12	56,87		persen	**Terlampaui (>)**
2.2.	***Fokus Layanan Urusan Pilihan***							
2.2.1.	***Pertanian***							
2.2.1.1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	19,83	21,25	23,71	31,10		persen	
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	14,06	15,01	17,15	22,34		persen	
2.2.2	***Kehutanan***							
2.2.2.1	Kerusakan kawasan hutan	7,94	14,63	14,74	14,74		persen	
2.2.2.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,30	0,33	0,35	0,43		persen	
2.2.3	***Energi dan Sumberdaya Mineral***							
2.2.3.1	Pertambangan Tanpa izin						persen	

2.2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	43,92	41,11	36,37	24,74		persen	
2.2.4	***Pariwisata***							
2.2.4.1	Kunjungan wisata	15.921	27.152	29.867	20.811			
2.2.5	***Kelautan dan Perikanan***						SPM	
2.2.5.1	Produksi perikanan	20.412	24.203	24.109	27.635		ton	**sesuai (=)**
2.2.5.2	Konsumsi Ikan	99,53	93,57	97,37	106,53		persen	**sesuai (=)**
2.2.5.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	12,14	47,14	45,71	49,29		persen	
2.2.6	***Perdagangan***							
2.2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,00	14,24	14,90	12,46	12,31	Persen	
2.2.7	***Perindustrian***							
2.2.7.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	20,29	16,33	12,11			persen	
3.	**ASPEK DAYA SAING**							
3.1	***Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah***							
3.1.1	***Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian***							
3.1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.2	***Pertanian***							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	***Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah***							
3.2.1	***Perhubungan***							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-				
3.2.1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	-	-	-				
3.2.1.3	jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	-	-	-				
3.2.2.	***Penataan Ruang***							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif	134.965	141.873	141.574	141.130		ha	**Sesuai (=)**
3.2.2.3	Luas Wilayah Industri	263	263	263	263		ha	**Sesuai (=)**
3.2.2.4	Luas wilayah kebanjiran	-	4039,74	31.361	21.489		ha	
3.2.2.5	Luas wilayah kekeringan						ha	

3.2.2.6	Luas wilayah perkotaan	5.620	5.620	5.620	5.620		ha	
3.2.4	***Lingkungan Hidup***							
3.2.4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	56,96	59,85	61,82	62,98		persen	**Belum tercapai (<)**
3.2.5	***Komunikasi dan Informatika***							
3.2.5.1	Rasio Ketersediaan daya listrik							
3.2.5.2	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	92,38	92,38	92,38	92,50		persen	**Belum tercapai (<)**
3.2.5.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon							
3.3	***Fokus Iklim Berinvestasi***							
3.3.1	***Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian***							
3.3.1.1	Angka kriminalitas							
3.3.1.2	Jumlah demo							
3.3.1.3	Lama proses perijinan							
3.3.1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah							
3.3.1.5	Jumlah Perda yang mendukung Iklim usaha							
3.3.1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa							
3.4	***Fokus Sumberdaya Manusia***							
3.4.1	***Ketenagakerjaan***							
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	216	206	217	237	236		
	Rasio ketergantungan	33,50	33,18	29,30	28,82	28,23	persen	

2.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara telah menerapkan keenam SPM tersebut, adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

1. SPM Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Utara memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1) Pendidikan Dasar;
2) Pendidikan Kesetaraan; dan
3) Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Target danPencapaian SPM

Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2020 di bidang pendidikan ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kelulusan, maka Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk capaian SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Capaian
			%	%
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	_
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	_
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	_

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2021

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2019 tidak dimunculkan sebagai pembanding capaian SPM Tahun 2020, karena indikator SPM mengalami perubahan yakni Tahun 2019 terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang dijabarkan dalam 27 Indikator SPM, sedangkan untuk Tahun 2020 SPM yang diampu oleh Kabupaten adalah 3 (tiga) pelayanan dasar dengan 3 indikator capaian SPM. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2. SPM Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan Nomor 4 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 2 Ayat (3) Jenis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) jenis pelayanan, yakni:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

4) Pelayanan Kesehatan Balita;
5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

B. Target danPencapaian SPM

Tabel 2.112
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)			
			Tahun	Target	Tahun 2019		Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil (Bumil) mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	2020	100%	11.845 14.641	81.5	12.073 14.301	84,4
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin (bulin) mendapat layanan persalinan sesuai standard	2020	100%	11.945 14.641	85	12.204 13.656	89,3
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan bayi baru lahir mendapat layanan kesehatan sesuai standar	2020	100%	12.072 13.178	91	11.304 13.005	86,9
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan anak usia 0-59 bulan mendapat layanan kesehatan sesuai standar	2020	100%	42.650 53.563	79,6	42.629 51.909	82,1
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	2020	100%	11.454 14.079	87,5	9.702 10.976	88,39
6	Pelaya nan Kesehatan	Cakupan penduduk usia 15-59 tahun	2020	100%	172.106	45,4	218.412	56,8

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)			
			Tahun	Target	Tahun 2019		Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pada Usia Produktif	yang mendapatakan skrining kesehatan sesuai standar			378.954		384.305	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatakan skrining kesehatan sesuai standar	2020	100%	57.075 124.581	45	42.302 123.697	34,19
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertansi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	100%	19.960 100.389	19,8	19.102 102.026	18,7
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2020	100%	4.630 29.227	15,8	8.804 29.704	29,6
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	2020	100%	1.266 1.301	97,3	1.067 1.317	81
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	2020	100%	3.040 9.783	31,1	1.479 10.036	14,73
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang berisiko terinfeksi mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	2020	100%	8.320 14.641	56,8	7.053 17.550	40,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Pencapaian SPM bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Cakupan pelayanan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal di tahun 2020 belum mencapai 100 % di karena banyak kunjungan pertama ibu hamil tidak di dapat pada trimester pertama dan tidak semua K1 (kunjungan ibu hamil pertama pada trimester pertama) di dapat pada awal tahun sehingga kunjungan ke empat (K4) di dapat pada awal tahun berikutnya.

2) Pada pelayanan Kesehatan balita juga tidak mencapai 100 % disebabkan belum semua anak dilakukan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Interfensi Dini Tumbuh Kembang) karena tidak semua anak di bawa ke posyandu dan Puskesmas.
3) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di tahun 2020 kendala yang hadapi dalam pelaksanaan adalah banyak para lansia tidak berani datang ke posyandu di karena takut terpapar virus COVID-19, sehingga petugas harus melakukan *home visit* ke rumah lansia.
4) Kendala dan permasalahan yang di hadapi dalam Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah :
   - Pelaksanaan posyandu yang belum terintegrasi dengan program HIV-AIDS sehungga penjaringan dan screening HIV-AIDS menurun dan tidak tercapai target.
   - Selama Pandemi Covid-19 kegiatan posyandu kunjungannya menjadi berkurang disebabkan rasa ketakutan masyarakat sehinggga kunjungan bumil ke Puskesmas dan Posyandu ikut menurun (takut dikatakan terinfeksi penyakit COVID-19)
   - Terjadinya mutasi/pengantian petugas HIV-AIDS di beberapa Puskesmas yang menyebabkan penurunan kinerja petugas di beberapa Puskesmas dalam hal pelaksanaan *screening* dan pelaporan sehingga capaian menurun (pelaporan online/SIHA)
   - Kekosongan Rapid 3 bulan disebabkan buffet stok telah dipakai di awal tahun dan stok dari Dinas Kesehatan Provinsi juga tidak ada (kosong) sehingga skrining tidak dapat dilaksanakan.
5) Cakupan Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB di tahun 2020 adalah 14,73% kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di tahun adalah :
   - Masih kurangnya integrasi program dalam pelaksanaan penjaringan sputum bagi terduga (*suspect*) TBC di Masyarakat.
   - Pemahaman yang masih kurang dalam hal pentingnya pemeriksaaan dahak pada masyarakat sehingga petugas kesulitan dalam pengambilan sputum untuk penegakan diagnose TBC, Pot diberikan tetapi dahak tidak di tampung

oleh masyarakat sehingga pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan.

6) *Screening* tidak mencapai 100 % karena tahun 2020 adanya pandemiCOVID-19 anak sekolah tidak secara tatap muka sehingga petugas puskesmas tidak bisa melakukan skrining ke sekolah.
7) Dana APBK yang perolehan dari dana pajak rokok telah di formulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM kesehatan namun jumlahnya belum memadai. Sebagaian besar dana pemenuhan indikator SPM seperti pada cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada DAK Nonfisik (BOK) dan tidak semua pemegang program di Puskesmas mengajukan kegiatan penjaringan kesehatan di sekolah dan bila ada dilakukan, tidak semua sekolah dilakukan penjaringan kesehatan.
8) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di tahun 2020 banyak terkendala karena Pandemi COVID-19, banyak kegiatan dan dana di *refocusing*, dan dialihkan pada kegiatan pencegahan dan penangulangan penyakitmenular COVID-19.

3. SPM Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 adalah menyediakan infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sasaran:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
2) Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. Target danPencapaian SPM

Tabel 2.113
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2020	72,52	
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	100	2020	67,06	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

4. SPM Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.114
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	86,09	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	67,18	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) butir “t” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan yang diamanatkan untuk daerah Kabupaten Aceh Utara, dalam Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

1) Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3) Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4) Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
5) Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.115
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	0.35	0,48
2	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100	100	100	100
4	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
5	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	76.6	76.6

Sumber : Satpol PP dan WH dan BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

6. SPM Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti;
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paksa Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten.

B. Target dan Pencapaian SPM

Tabel 2.116
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial
Kabupaten Aceh Utara

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti		40	14.56	60
		Persentasi (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti		50	22.18	0
		Persentasi (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti		50	20.44	36
		Persentasi (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target (%)		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis diluar panti		45	16.18	96
		Persentasi (%) Gelangangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/ kota		100	100	100
		Persentasi (%) bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota				

Sumber : Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran, terdapat beberapa kendala sehingga capaian sasaran tidak dapat diraih secara optimal. Adapun kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1) Seringnya terjadinya pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga alokasi waktu pelaksanaan kegiatan tidak optimal.
2) Kurang pegawai/personil dalam pelaksanaaan kegiatan.
3) Kurangnya dukungan dari masyarakat yang menerima manfaat/bantuan dalam hal penyampaian atau pengiriman kembali proposal.
4) Kurangnya alat transportasi/kendaraan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
5) *Refocusing* Anggaran untuk mengatasi terjadinya Pandemi Covid-19.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Pelaksanaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBK dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun2015-2019 menunjukkan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk menginformasikan hasil kinerja keuangan dari tahun 2018-2020 sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara. Kinerja keuangan dapat dilihat dari tingkat realisasi pendapatan dengan target yang telah ditetapkan. Adanya perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

A. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal utama yang harus diperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.Pengelompokan masing-masing jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
   b. Penerimaan Pinjaman Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
   b. Pembayaran Pokok Utang

Tabel 3.1 menunjukan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020 sebesar -0.73 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah mencapai -0.76 persendan -0.71 persen untuk rata-rata pertumbuhan pembiayaan. Realisasi rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Aceh Utara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Pertumbuhan
1	**PENDAPATAN**	**2,415,623,274,834.00**	**2,402,604,230,993.04**	**2,252,292,515,267.59**	**2,606,115,300,596.06**	**2,582,873,730,125.36**	**-0.73**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**388,251,800,972.81**	**202,091,566,054.51**	**231,848,856,926.46**	**279,567,720,149.97**	**231,413,091,799.90**	**-0.85**
1.1.1.	Pajak daerah	21,671,743,611.00	26,143,329,652.06	28,092,871,084.00	68,460,898,223.00	28,250,803,137.00	**-0.67**
1.1.2.	Retribusi daerah	5,263,672,340.00	3,036,594,908.00	2,812,264,140.00	3,135,866,893.00	3,358,823,162.00	**-0.84**
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	20,095,166,364.94	19,340,718,610.20	19,374,710,610.00	19,411,334,838.00	19,407,707,182.00	**-0.76**
1.1.4.	Zakat	11,582,792,381.00	12,851,939,211.02	13,966,155,485.00	15,153,930,476.50	15,131,914,818.00	**-0.67**
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	329,638,426,275.87	140,718,983,673.23	167,602,855,607.46	173,405,689,719.47	165,263,843,500.90	**-0.87**
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1,296,652,358,755.00**	**1,328,605,892,782.00**	**1,342,423,755,687.00**	**1,454,869,953,193.00**	**1,373,870,214,618.00**	**-0.74**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak		158,078,907,015.00	137,539,072,059.00	65,597,139,243	100,607,973,825.00	
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		59,324,648,264.00	2,815,200.00	52,137,627,676.00	12,952,981.00	
1.2.3.	Dana Transfer Umum	1,021,636,687,163.00	837,370,118,000.00	835,915,569,772.00	893,015,394,074	897,980,136,000.00	**-0.78**
1.2.4.	Dana alokasi khusus	275,015,671,592.00	273,832,219,503.00	368,966,298,656.00	444,119,792,200	375,269,151,812.00	**-0.66**
1.3	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**-**	**642,814,441,000.00**	**562,234,583,000.00**	**627,307,230,000.00**	**779,724,960,412.00**	
1.3.1.	Dana Penyesuaian		7,500,000,000.00			28,433,901,000.00	
1.3.2	Dana Desa		635,314,441,000.00	562,234,583,000.00	627,307,230,000	626,310,457,736.00	
1.3.3	Dana Otonomi Khusus					124,980,601,676.00	
1.4	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**-**	**229,092,331,156.53**	**48,092,959,654.13**	**177,137,940,852.09**	**55,720,833,568.00**	
1.4.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		50,399,959,891.53	48,092,959,654.13	53,540,408,747.09	55,720,833,568.00	
1.4.2.	Dana Otonomi Khusus		178,692,371,265.00		123,597,532,105.00		
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**729,997,153,804.00**	**-**	**67,692,360,000.00**	**67,232,456,401.00**	**142,144,629,727.46**	
1.3.1	Hibah	-			67,112,456,401.00	104,668,080,000.00	
1.3.2	Pendapatan lainnya					2,476,549,727.46	
1.3.3	Dana darurat	14,000,000,000.00		-	-	-	
1.3.4	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	53,508,440,421.00					
1.3.5	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	532,964,060,000.00					
1.3.6	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	129,524,653,383.00		67,692,360,000.00	120,000,000.00	35,000,000,000.00	
1.3.7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	-	-		-	-	
2	**Belanja**	**1,814,818,306,097.63**	**1,704,640,110,306.14**	**1,547,333,846,783.06**	**1,883,897,843,008.98**	**1,721,942,639,587.00**	**-0.76**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**983,042,492,244.00**	**895,606,719,910.00**	**865,160,880,032**	**895,322,258,201.00**	**886,226,237,735.00**	**-0.77**
2.1.1	Belanja Pegawai	875,799,408,636.00	836,917,755,387.00	839,929,226,531.50	860,324,094,198.00	840,217,979,584.00	**-0.76**
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	**0.00**
2.1.3	Belanja Subsidi	4,431,546,840.00	3,499,932,123.00	2,750,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	**-0.89**
2.1.4	Belanja Hibah	84,952,154,468.00	30,289,558,000.00	11,584,900,000.00	20,497,600,000.00	16,628,700,000.00	**-0.95**
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,696,740,000.00	23,172,847,500.00	10,486,083,500.00	11,489,764,000.00	20,530,911,460.00	**-0.71**
2.1.6	Belanja Bagi Hasil		-			-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan					-	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	162,642,300.00	1,726,626,900.00	410,670,000.00	10,800,003.00	6,848,646,691.00	**9.53**
2.2	**Belanja Langsung**	**831,775,813,853.63**	**809,033,390,396.14**	**682,172,966,751.56**	**988,575,584,808**	**835,716,401,852**	**-0.75**
2.2.1	Belanja Pegawai	78,309,972,239.00	55,694,906,300.00	80,584,038,400.00	89,040,958,474	75,520,430,650.00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	378,371,416,936.00	378,593,099,092.00	378,314,005,946.00	478,846,577,918	436,938,388,221.00	**-0.71**
2.2.3	Belanja Modal	375,094,424,678.63	374,745,385,004.14	223,274,922,405.56	420,688,048,415.98	323,257,582,981.00	**-0.78**
3	**Pembiayaan**	**64,125,252,504.00**	**47,424,043,510.95**	**48,832,253,345.48**	**18,253,163,496.56**	**74,795,182,743.92**	**-0.71**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	67,505,172,557.00	47,424,043,510.95	48,832,253,345.48	18,253,163,496.56	78,795,182,743.92	**-0.71**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	(3,379,920,053.00)	-	-	-	(4,000,000,000.00)	

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

3.1.2 Neraca Daerah

Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, melalui data neraca dapat diketahui tentang jumlah aset, baik aset lancar lancar, kewajiban dan equitas dana. Selama periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan aset pemerintah Kabupaten Aceh Utara menurun 0.72 persen. Sedangkan kewajiban mengalami rata-rata pertumbuhan -0.93 persen dan ekuitas dana mencapai -0.71 persen.

Pada tahun 2020 Kabupaten Aceh Utara melakukan pengalihan asset kepada Kota Lhokseumawe. Kondisi perkembangan neraca dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**ASET**	**4,244,349,319,821.23**	**4,402,649,869,909.62**	**4,706,929,566,141.65**	**4,674,629,568,665.75**	**4,687,612,780,044.49**	**-0.72**
1.1	**ASET LANCAR**	**104,645,271,576.42**	**126,735,373,583.05**	**148,376,164,368.25**	**117,895,918,141.12**	**151,596,329,601.32**	**-0.53**
1.1.1	Kas	44,913,329,436.05	47,854,189,315.95	50,103,781,105.00	18,325,356,547.56	78,796,655,603.92	0.89
1.1.2	Piutang	46,328,674,355.54	47,739,529,575.00	62,801,703,322.32	71,643,234,450.86	40,669,977,947.00	-0.88
1.1.3	Persediaan	13,403,267,784.83	31,141,654,692.10	35,470,679,940.93	27,927,327,142.70	32,129,696,050.40	-0.31
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	190,932,105,436.70	185,753,815,894.63	177,386,689,621.03	176,233,619,595.11	181,256,969,939.59	-0.76
1.2.1	Investasi Non Permanen	12,972,283,883.00	11,243,931,476.90	11,243,931,476.90	10,486,379,719.90	9,868,963,418.90	-0.82
1.2.2	Investasi Permanen	177,959,821,553.70	174,509,884,417.73	166,142,758,144.13	165,747,239,875.21	1,245,248,376.56	
1.2.3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					170,142,758,144.13	0.00
1.2	**ASET TETAP**	**3,901,741,852,187.00**	**3,829,144,073,019.21**	**4,105,069,601,027.37**	**4,265,219,368,176.52**	**4,228,013,071,539.58**	**-0.73**
1.2.1	Tanah	1,590,570,255,185.33	1,522,609,260,024.33	1,702,708,333,672.33	1,671,622,725,582.33	1,674,882,734,582.33	-0.74
1.2.2	Peralatan dan mesin	496,711,059,295.63	531,104,833,594.10	553,456,358,350.66	628,884,884,617.61	717,904,749,738.61	-0.59
1.2.3	Gedung dan bangunan	1,194,723,766,976.15	1,180,884,270,658.00	1,249,598,135,076.00	1,363,408,345,083.00	1,617,315,284,317.46	-0.60
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	2,182,121,111,897.09	2,407,902,229,502.69	2,467,445,065,481.69	2,504,688,541,315.89	2,574,192,482,265.89	-0.70
1.2.5	Aset tetap lainnya	30,776,559,590.00	28,557,215,437.00	35,038,738,749.00	37,159,144,549.00	46,467,114,095.00	-0.53
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	125,046,305,451.37	153,792,226,602.94	152,711,593,768.94	166,380,907,172.94	19,970,763,766.89	-1.00
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(1,718,207,206,208.57)	(1,995,705,962,799.85)	(2,055,888,624,071.25)	(2,106,925,180,144.25)	(2,422,720,057,226.60)	-0.59
1.3	**ASET LAINNYA**	**47,030,090,621.11**	**261,016,607,412.73**	**276,097,111,125.00**	**115,280,662,753.00**	**126,746,408,964.00**	**-0.26**
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	142,497,093.00	366,740,347.00	281,655,809.00	166,412,681.00	41,418,792.00	-0.98
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	3,342,828,000.00	3,342,828,000.00	3,342,828,000.00	3,343,328,000.00	3,343,328,000.00	-0.75
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	
1.3.4	Aset tak berwujud	140,100,000.00	243,637,500.00	97,282,500.00	1,077,893,200.00	1,579,141,100.00	0.00
1.3.5	Aset lain-lain	43,404,665,528.11	257,063,401,565.73	272,375,344,816.00	110,693,028,872.00	121,782,521,072.00	-0.23

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	**KEWAJIBAN**	**162,219,235,252.10**	**229,346,841,409.79**	**70,485,881,616.33**	**67,382,768,241.95**	**54,280,866,576.00**	**-0.93**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**162,219,235,252.10**	**229,346,841,409.79**	**42,847,459,294.33**	**62,095,350,391.95**	**47,415,171,294.00**	**-0.94**
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	-	-	-	
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	98,450,777.00	5,835,068,008.69	3,711,743,412.33	23,025,442,957.95	1,755,086,873.00	-0.66
2.1.4	Utang bunga	-	-	-	-	-	
2.1.5	Utang belanja	140,288,172,952.00	209,186,491,731.10	38,746,826,726.00	32,204,778,323.00	35,259,031,979.00	-0.93
2.1.6	Utang Transfer	-	-	-	-	-	
2.1.7	Utang Jangka pendek lainnya	21,832,611,523.10	14,325,281,670	388,889,156.00	6,865,129,111.00	10,401,052,442.00	-0.82
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**	**27,638,422,322.00**	**5,287,417,850.00**	**6,865,695,282.00**	
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	27,638,422,322.00	5,287,417,850.00	6,865,695,282.00	
3	**EKUITAS DANA**	**4,082,130,084,569.44**	**4,173,303,028,499.83**	**4,636,443,684,525.32**	**4,607,246,800,423.80**	**4,633,331,913,468.49**	**-0.71**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**4,244,349,319,821.54**	**4,402,649,869,909.62**	**4,706,929,566,141.65**	**4,674,629,568,665.75**	**4,687,612,780,044.49**	**-0.72**

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Berdasarkan tabel 3.2 diatas,maka dapat dilakukan analisis kemampuan daerah melalui perhitungan rasio. Rasio yang dianalisis adalah rasio likuidasi dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuidasi yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasiocepat (quick ratio).

Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang quick ratio adalah jumlah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan jumlah kewajiban jangkapendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neracakeuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rasio Likuiditas Neraca Kabupaten Aceh Utara

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	0.65	0.55	3.46	1.90	3.20
2	Rasio Cepat	0.56	0.42	2.64	1.45	2.52

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

A. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar (Current Ratio) menunjukan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek (hutang lancar), semakin besar perbandingan antar aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Apabila rasio lancar (current ratio) 1 : 1 atau setara 100% berarti semua aktiva dapat menutupi hutang. Rasio lancar berada dibawah 1, maka pemerintah daerah tidak lancar dalam menutupi kewajiban jangka pendek (hutang). Dalam sebuah likuidasi neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2016-2020 dapat dijelaskan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik melunasi kewajiban (hutang). Dalam dua tahun, 2016-2017, Kabupaten Aceh Utara mengalami kesulitan untuk membayar semua kewajiban.

B. Quick Ratio (Quick Ratio)

Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain. Quick aset ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisir menjadi uang dalam relatif pendek. Jadi intinya semakin besar rasio ini semakin cepat pemerintah daerah dalam dalam melunasi kewajiban hutang jangka pendek. Dalam sebuah neraca keuangan daerah dapat dilihat

bahwa keuangan daerah Aceh Utara dalam 3 tahun terakhi rsangat baik dan cepat dalam membayar kewajiban yang rata-rata berada diatas angka 1. Sedangkan pada tahun 2016-2017 rasio berada dibawah angka 1, yaitu sebesar 0.56 dan 0.42, yang artinya pada tahun tersebut kondisi keuangan Aceh Utara sangat lemah dalam membayar kewajiban.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Rasio Solvabilitas
Neraca Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0.04	0.05	0.01	0.01	0.01
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0.04	0.05	0.02	0.01	0.01

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset

Rasio kewajiban terhadap asset merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini sangat penting guna melihat solvabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi rasio maka jumlah aset yang dibiayai olehh utang semakin besar dan semakin rendah rasio jumlah aset yang dibiayai oleh hutang semakin kecil.Rasio ini secara langsung membandingkan antara total hutang (kewajiban) dengan total aset dalam melakukan pendanaan pemerintah daerah, sehingga dapat menunjukkan kemampuan modal dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin kecil rasio kewajiban terhadap aset maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi semua hutang (kewajiban) terhadap kreditor, namun demikian jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 1maka kemampuan pemerintah daerah mulai sulit untuk melunasi hutang kepada kreditor. Berdasarkan Tabel 3.4 tentang rasio

kewajiban terhadap aset menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara sangat baik untuk melunasi hutang denganaset modal yang dimiliki, karena semua berada pada kisaran angka dibawah 1.

2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

Rasio ini secara langsung membandingkan antara total hutang (kewajiban)dengan total ekuitas. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang dan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Berdasarkan Tabel 3.4 tentang rasio kewajiban terhadap ekuitas, menunjukkan bahwa kemampuan ekuitas (modal) atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat baik untuk melunasi semua hutang terhadap kreditor. Hal tersebut dapat dilihat pada tersebut, bahwa dari tahun 2016-2020semua berada pada kisaran angka dibawah 1. Jika semakin mendekati pada posisi angka nol, maka rasio tersebut semakin baik.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalampelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanyadisiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakanpendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yangmelandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, KeputusanMenteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaranpemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerahdalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakandesain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalambentuk alokasi dana.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah ataupun melalui pendapatan dana transfer maupun pendapatan lainya yaitu untuk:

1. Meningkatkan pelayanan dasar pada bidang kesehatan:
   - Program upaya kesehatan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatn bagi pasien jaminan kesehatan, baik melalui JKN maupun JKA
   - Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan upaya mengoptimalkan kesehatan untuk mencegah gizi buruk dan stunting
   - Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak melalui penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga fakir miskin
2. Meningkatkan pelayanan dasar pada bidang pendidikan
   - Program pendidikan dan tenaga kependidikan, dengan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
   - Program pengelolaan pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah
3. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
   - Program pelatihan kerjadan produktivitas tenaga kerja yaitu untuk dapat mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Utara.

Analisis proporsi anggaran bertujuan untuk mendapatkan diskripsi tentang kebijakan pembelanjaan dan pembiayaan pengeluaran yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang sebagaimana tercantum pada pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2016	954,109,380,875.00	1,811,438,386,044.63	52.67
2	Tahun 2017	892,612,661,687.00	1,704,640,110,306.14	52.36
3	Tahun 2018	920,513,264,931.50	1,547,333,846,783.06	59.49
4	Tahun 2019	949,365,052,672.00	1,883,897,843,008.98	50.39
5	Tahun 2020	915,738,410,234.00	1,717,942,639,587.00	53.30

Note:Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Proporsi belanja tertinggi untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdapat pada tahun 2018 mencapai 59.49 persen. Sedangkan proporsi belanja terendah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2019 mencapai 50.39 persen.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Aceh Utara terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu,Pencairan dana cadangan,hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dariSiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaanmodal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaranpembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaandaerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Untuk melihat besarnya defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran maka dilakukan analisis pembiayaan daerah.

KabupatenAceh Utara mengalami surplus dari tahun 2016-2020 seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.6:

Tabel 3.6
Surplus dan Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,415,623,274,834.00	2,402,604,230,993.04	2,252,292,515,267.59	2,606,115,300,596.06	2,582,873,730,125.36
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1,814,818,306,097.63	1,704,640,110,306.14	1,547,333,846,783.06	1,883,897,843,008.98	1,721,942,639,587.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	(3,379,920,053.00)	-	-	-	(4,000,000,000.00)
	Surplus/Defisit riil	597,425,048,683.37	697,964,120,686.90	704,958,668,484.53	722,217,457,587.08	856,931,090,538.36

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Kemudian tabel 3.7 dari hasil analisis sumber penutup defisit riil menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menutup defisit riil.Kondisi ini menunjukkan keuangan daerah mampu membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,415,623,274,834.00	2,402,604,230,993.04	2,252,292,515,267.59	2,606,115,300,596.06	2,582,873,730,125.36
	Dikurangi realisasi:	-	-			
2	Belanja Daerah	1,814,818,306,097.63	1,704,640,110,306.14	1,547,333,846,783.06	1,454,869,953,193.00	1,721,942,639,587.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	(3,379,920,053.00)	-	-	-	(4,000,000,000.00)
A	**Defisit Riil**	604,184,888,789.37	697,964,120,686.90	704,958,668,484.53	1,151,245,347,403.06	856,931,090,538.36
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	67,505,172,557.00	47,424,043,510.95	48,832,253,345.48	18,253,163,496.56	78,795,182,743.92
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah					
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
9	Penerimaan Piutang Daerah					
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	67,505,172,557.00	47,424,043,510.95	48,832,253,345.48	18,253,163,496.56	78,795,182,743.92
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	536,679,716,232.37	650,540,077,175.95	656,126,415,139.05	1,132,992,183,906.50	778,135,907,794.44

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Berdasarkan tabel 3.7 maka disusun table analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	11.17	6.79	6.93	1.59	3.53
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-				
6	Penerimaan Piutang Daerah	-				
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	88.83	93.21	93.07	98.41	96.47

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SilPA dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan, seperti yang diperlihatkan pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	67,505,172,557.00	100.00	47,424,043,510.95	100.00	48,832,253,345.48	100.00	18,253,163,496.56	100.00	78,795,182,743.92	100.00
2	Pelampauan penerimaan PAD										
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

3.3. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung total kapasitas riil keuangan daerah yang nantinya akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara umum kebijakan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) kebijakan meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.3.1. Perkiraan Pendapatan dan Belanja

Perkiraan pendapatan daerah selama 2 (dua) tahun ke depan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir. Proyeksi pendapatan dilakukan dengan melihat rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan proyeksi pendapatan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -0.03 persen. Proyeksi pendapatan Aceh Utara tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 2.530.575.690.609 dan ditargetkan menjadi Rp. 2.465.171.383.252 pada tahun 2022.

Perkiraan belanja daerah pada tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 2.545.494.695.530 dan tahun 2022 diproyeksikan belanja daerah mencapai Rp. 2.466.171.383.252 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0.03 persen per tahun. Sedangkan perkiraan pembiayaan, pada tahun 2021 sebesar Rp. 14.919.004.921 dan tahun 2022 sebesar 1.000.000.000 dengan rata-rata pertumbuhan -0.93. Perkiraan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10a
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	**2,252,292,515,267.59**	**2,606,115,300,596.06**	**2,582,873,730,125.36**	**-0.43**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**231,848,856,926.46**	**279,567,720,149.97**	**231,413,091,799.90**	**-0.50**
1.1.1	Pajak daerah	28,092,871,084.00	68,460,898,223.00	28,250,803,137.00	**-0.50**
1.1.2	Retribusi daerah	2,812,264,140.00	3,135,866,893.00	3,358,823,162.00	**-0.40**
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	19,374,710,610.00	19,411,334,838.00	19,407,707,182.00	**-0.50**
1.1.4	Zakat	13,966,155,485.00	15,153,930,476.50	15,131,914,818.00	**-0.46**
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	167,602,855,607.46	173,405,689,719.47	165,263,843,500.90	**-0.51**
1.2	**Dana Perimbangan**	**1,342,423,755,687.00**	**1,454,869,953,193.00**	**1,373,870,214,618.00**	**-0.49**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	137,539,072,059.00	65,597,139,243	100,607,973,825.00	**-0.63**
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,815,200.00	52,137,627,676.00	12,952,981.00	**1.30**
1.2.3	Dana Transfer Umum	835,915,569,772.00	893,015,394,074	897,980,136,000.00	**-0.46**
1.2.4	Dana alokasi khusus	368,966,298,656.00	444,119,792,200	375,269,151,812.00	**-0.49**
1.3	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**562,234,583,000.00**	**627,307,230,000.00**	**779,724,960,412.00**	**-0.31**
1.3.1	Dana Penyesuaian			28,433,901,000.00	
1.3.2	Dana Desa	562,234,583,000.00	627,307,230,000	626,310,457,736.00	**-0.44**
1.3.3	Dana Otonomi Khusus			124,980,601,676.00	
1.4	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**48,092,959,654.13**	**177,137,940,852.09**	**55,720,833,568.00**	**-0.42**
1.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48,092,959,654.13	53,540,408,747.09	55,720,833,568.00	**-0.42**
1.4.2	Dana Otonomi Khusus		123,597,532,105.00	-	
1.5	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**67,692,360,000.00**	**67,232,456,401.00**	**142,144,629,727.46**	**0.00**
1.3.1	Hibah		67,112,456,401.00	104,668,080,000.00	
1.3.2	Pendapatan lainnya			2,476,549,727.46	
1.3.3	Dana darurat	-	-	-	
1.3.4	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)				
1.3.5	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)				
1.3.6	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	67,692,360,000.00	120,000,000.00	35,000,000,000.00	
1.3.7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	
2	**Belanja**	**1,547,333,846,783.06**	**1,883,897,843,008.98**	**1,721,942,639,587.00**	**-0.44**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**865,160,880,032**	**895,322,258,201.00**	**886,226,237,735.00**	**-0.49**
2.1.1	Belanja Pegawai	839,929,226,531.50	860,324,094,198.00	840,217,979,584.00	**-0.50**
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	2,750,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	**-0.64**
2.1.4	Belanja Hibah	11,584,900,000.00	20,497,600,000.00	16,628,700,000.00	**-0.28**
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10,486,083,500.00	11,489,764,000.00	20,530,911,460.00	**-0.02**
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	**0.00**
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		**0.00**
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	410,670,000.00	10,800,003.00	6,848,646,691.00	**7.34**
2.2	**Belanja Langsung**	**682,172,966,751.56**	**988,575,584,808**	**835,716,401,852**	**-0.39**
2.2.1	Belanja Pegawai	80,584,038,400.00	89,040,958,474	75,520,430,650.00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	378,314,005,946.00	478,846,577,918	436,938,388,221.00	**-0.42**
2.2.3	Belanja Modal	223,274,922,405.56	420,688,048,415.98	323,257,582,981.00	**-0.28**
3	**Pembiayaan**	**48,832,253,345.48**	**18,253,163,496.56**	**74,795,182,743.92**	**-0.23**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	48,832,253,345.48	18,253,163,496.56	78,795,182,743.92	**-0.19**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	(4,000,000,000.00)	

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Tabel 3.10b
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022

No	Uraian	Perkiraan Tahun 2021 (Rp)	Target Tahun 2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	**PENDAPATAN**	**2,530,575,690,609.00**	**2,465,171,383,252.00**	**-0.03**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**277,511,184,691.00**	**229,764,364,410.00**	**-0.17**
1.1.1	Pajak daerah	32,099,638,721.00	29,589,400,000.00	-0.08
1.1.2	Retribusi daerah	3,702,039,600.00	3,863,036,400.00	0.04
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	19,374,710,610.00	19,374,710,610.00	0.00
1.1.4	Zakat			
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	222,334,795,760.00	176,937,217,400.00	-0.20
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2,175,759,713,089.00**	**2,158,102,226,013.00**	-0.01
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,134,829,816,992.00	2,125,521,626,784.00	0.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah	40,929,896,097.00	32,580,599,229.00	-0.20
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**77,304,792,829.00**	**77,304,792,829.00**	0.00
1.3.1	Hibah	9,593,232,829.00	9,593,232,829.00	0.00
1.3.2	Dana darurat			
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)			
1.3.4	Pendapatan Lainnya	67,711,560,000.00	67,711,560,000.00	
1.3.5	Bantuan Keuangan			
2	**Belanja**	**2,545,494,695,530.00**	**2,466,171,383,252.00**	**-0.48**
2.1	**Belanja Operasi**	**1,526,449,891,059.00**	**1,427,479,402,286.16**	**-0.44**
2.1.1	Belanja Pegawai	901,943,282,332.00	906,487,641,371.70	-0.48
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	68,238,637,922.00	50,000,000,000.00	-0.11
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27,792,959,032.00	30,000,000,000.00	-0.14
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Barang dan Jasa	528,475,011,773.00	440,991,760,914.46	-0.51
2.2	**Belanja Modal**	**280,385,149,081.00**	**290,000,000,000.00**	**-0.42**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**7,788,245,477.00**	**10,000,000,000.00**	**3.53**
2.4	**Belanja Transfer**	**730,871,409,913.00**	**738,691,980,965.84**	**-0.15**
3	**Pembiayaan**	**14,919,004,921.00**	**1,000,000,000.00**	**-0.88**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	16,919,004,921.00	5,000,000,000.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	(2,000,000,000.00)	(4,000,000,000.00)	

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangandengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, strukturpendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.

Tabel 3.11a
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2,252,292,515,267.59	2,606,115,300,596.06	2,582,873,730,125.36
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya	48,832,253,345.48	18,253,163,496.56	78,795,182,743.92
	Total penerimaan	2,301,124,768,613	2,624,368,464,093	2,661,668,912,869
	Dikurangi:			
4	Belanja Tidak Langsung	865,160,880,031.50	895,322,258,201.00	886,226,237,735.00
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	(4,000,000,000.00)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,435,963,888,581.57	1,729,046,205,891.62	1,771,442,675,134.28

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Tabel 3.11b
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Perkiraan 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1,526,449,891,059.00	1,427,479,402,286.16
2	Belanja Modal	280,385,149,081.00	290,000,000,000.00
3	Pengeluaran Pembiayaan	(2,000,000,000.00)	(4,000,000,000.00)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,804,835,040,140.00	1,713,479,402,286.16

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut (Tabel 3.12) dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2022 berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12a
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,435,963,888,581.57	1,729,046,205,891.62	1,771,442,675,134.28
2	Prioritas I	864,750,210,031.50	895,311,458,198.00	840,217,979,584
3	Prioritas II	339,321,766,502.21	429,670,642,885.00	449,809,629,109
4	Prioritas III	231,891,912,047.86	404,064,104,808.62	481,415,066,441

Note: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum dilakukan audit

Tabel 3.12a
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Proyeksi	
		Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,804,835,040,140.00	1,713,479,402,286.16
1	Prioritas I	901,943,282,332.00	906,487,641,371.70
2	Prioritas II	632,024,230,465.60	564,894,232,640.12
3	Prioritas III	270,867,527,342.40	242,097,528,274.34

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN ACEH UTARA

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini akan terwujud apabila pemerintahan daerah memiliki kemampuan yang handal dan profesional dalam menghasilkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber ekonomi daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah kepada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidak tercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Kabupaten Aceh Utara terus berupaya membangun daerahnya ke arah yang lebih baik. Namun demikian tidak terlepas dihadapkan pada permasalahan yang komplek. Salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah tingginya ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap total pendapatan daerah disparitasnya cukup lebar. Sehingga Pemerintah Daerah berusaha untuk mendayagunakan keuangan daerah secara optimal dan efisien guna menjalankan prioritas pembangunan.

Kondisi ini juga dihadapkan pada upaya pemerintah daerah untuk membangun Kawasan pemerintahan baru di Lhoksukan sebagai pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Sehingga berbagai daya dan upaya difokuskan pada percepatan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

Dampak pandemic virus corona telah merubah dan mengganggu seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berakibat pada melambatnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Pembatasan ruang gerak dan mobilitas menjadi salah satu cara dalam mengantisipasi besarnya dampak buruk virus corona. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan refocusing anggaran dalam melakukan perubahan anggaran pembangunan dalam periode RPJMK berjalan.

Permasalahan dan tantangan baik yang bersifat sektoral, regional maupun global ini terus dikelola dan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menghasilkan berbagai kebijakan unggul dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Beberapa masalah pembangunan Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

4.1.1 Reformasi birokrasi

Beberapa permasalahan terkait Reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. Indeks Daya Saing Daerah masih rendah;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dalam kategori “Cukup”;
3. Minimnya Inovasi dalam proses pembangunan daerah;
4. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih rendah.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah.

4.1.2 Pendidikan

Permasalahan Pendidikan adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional;

2. Angka rata-rata lama Sekolah masih rendah;
3. Kualitas pendidikan Aceh Utara masih rendah untuk semua jenjang;
4. Proses belajar mengajar di sekolah dan dayah tidak optimal selama pandemi Covid 19;
5. Rendahnya kualitas guru untuk semua jenjang pendikan dan distribusi guru yang belum merata;
6. Fasilitas laboratorium untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK belum memenuhi standar pelayanan minimum;
7. Tinggi peredaran dan penggunaan narkoba ditengah masyarakat;
8. Minimnya prestasi olah raga.

4.1.3 Keistimewaan Aceh

Permasalahan yang dihadapi dalam Keistimewaan Aceh adalah:

1. Zakat belum terkumpul sesuai dengan potensi;
2. Pemahaman dan Pengamalan Syariat masih rendah;
3. Kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan berbasis islami belum diterapkan.

4.1.4 Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Beberapa Permasalahan terkait bidang kesehatan adalah :

1. Pandemi Covid-19 masih belum terkendali;
2. Belum semua fasilitas kesehatan tersedia alat kesehatan yang lengkap;
3. Tinggi angka stunting;
4. Jumlah Angka kematian Bayi tinggi;
5. Jumlah kematian ibu masih tinggi setiap tahun akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam persiapan proses persalinan;
6. Rasio Dokter dibawah standar nasional;
7. Perilaku masyarakat belum menerapkan Pola Hdup Bersih dan Sehat (PHBS);
8. Tindak kekerasan terhadap perempuan dann anak masih relatif tinggi.

4.1.5 Infrastuktur Dasar Publik

Beberapa permasalahan terkait pengembangan infrastruktur dasar publik :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan perumahan serta penataan kawasan permukiman masih rendah;
2. Jalan kondisi baik masih rendah;
3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi;
4. Luas sawah yang diairi irigasi masih kurang.

4.1.6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Beberapa permasalahan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumberdaya alam belum sepenuhnya dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Degradasi kawasan hutan dan lingkungan mengakibatkan bencana alam seperti banjir, longsor dan lainnya semakin sering terjadi dan berdampak pada seluruh aktifitas pembangunan daerah;
3. Pengelolaan sampah belum tertangani dengan baik
4. Optimalisasi peran dan fungsi pengendalian dan penataan ruang ruang dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan dengan penambahan tenaga PPNS dan penyediaan berbagai kebutuhannya.

4.1.7 Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan terkait dengan masih tingginya kemiskinan sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan masih belum integratif;
2. Pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan belum tetap sasaran;
3. Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni;
4. Akses air minum dan ketersediaan sarana sanitasi belum memenuhi standar;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka masih relatif tinggi.

4.1.8 Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Produk Pertanian, Pengembangan UMKM dan Koperasi

Permasalahan yang dihadapi dalam Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian adalah:

1. Masih terdapat Daerah rawan pangan;
2. Pembangunan pertanian masih bersifat konvensional;
3. Hasil panen pangan utama masih banyak dijual ke luar daerah;
4. Disparitas harga pangan strategis antara daerah perkotaan dan pedalaman;
5. Pembinaan kelompok tani tidak berkelanjutan;
6. Belum berkembangnya UMKM, koperasi dan industri pengolahan berbasis pertanian, peternakan dan perikanan.
7. Masih banyaknya luas lahan pertanian sawah tadah hujan

4.1.9 Pengembangan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata:

1. Objek wisata situs sejarah Kerajaan Samudera Pasee belum dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan;
2. Belum Optimalnya sinergitas dan kemitraan serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, antara pusat dan propinsi, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
3. Tingkat pemahaman pada praktik pariwisata islami masih pada tahapan sosialisasi sehingga pelaksanaan dan pengembangan sector dimaksud belum mencapai hasil yang maksimal.

4.1.10 Perbaikan iklim Investasi

Ada beberapa Permasalahan yang terkait dengan Iklim Investasi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya promosi tentang sumberdaya/potensi daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
2. Rendahnya realisasi nilai investasi Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing(PMA):
3. Keberadaan KEK Arun belum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

4. Kerjasama daerah yang telah dibangun selama ini masih terkendala terutama dalam pemanfaatan aset-aset daerah yang hendak dikerjasamakan, karena belum terdata dan terdokumentasi dengan baik.

4.1.11 Pemberdayaan Gampong

Permasalahan terkait pemberdayaan gampong antara lain :

1. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam pembangunan belum berperan aktif;
2. Potensi pendapatan gampong secara umum belum tercatat sebagai pendapatan gampong untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat;
3. Kapasitas aparatur gampong masih relatif rendah.

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada isu dan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh, maka isu-isu strategis dalam pembangunan daerah terdiri dari isu strategis nasional, isu strategis Pemerintah Aceh dan isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Utara. Isu-isu strategis nasional dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan isu strategis sebagai berikut :
   - Keberlanjutan sumber daya alam;
   - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
   - Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
   - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan isu strategis sebagai berikut :
   - Masih adanya ketimpangan antarwilayah;
   - Masih adanya ketimpangan pendapatan;
   - Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;

- Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan isu strategis sebagai berikut :
   - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
   - Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
   - Pemenuhan Layanan Dasar;
   - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
   - Pengentasan Kemiskinan;
   - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan dengan isu strategis sebagai berikut :
   - Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
   - Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
   - Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
   - Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
   - Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
   - Belum Optimalnya Peran Keluarga;
   - Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan isu-isu strategis sebagai berikut :
   - Infrastruktur pelayanan dasar melalui a) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, b) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, c) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, d) keselamatan dan keamanan transportasi, e) ketahanan

kebencanaan infrastruktur dan f) waduk multiguna dan modernisasi irigasi;

- Infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut dan udara;
- Infrastruktur perkotaan melalui a) transportasi perkotaan, energi dan ketenagalistrikan perkotaan, b) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, c) penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan dan d) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan;
- Energi dan ketenagalistrikan melalui, a) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan, b) akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, c) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
- Transformasi Digital melalui, a) penuntasan Infrastruktur TIK, b) pemanfaatan Infrastruktur TIK, c) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
   - Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan isu antara lain, a) deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup, b) meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup.
   - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan isu antara lain a) tingginya risiko bencana di indonesia, b) risiko bencana terkait karakteristik geologi, c) peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometereologi akibat perubahan iklim, d) masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah;
   - Pembangunan rendah karbon melalui, a) penurunan emisi dan intensitas emisi grk melalui pembangunan rendah karbon, b) dukungan terhadap pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan isu strategis sebagai berikut :

- Konsolidasi Demokrasi;
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- Penegakan Hukum Nasional;
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Isu-isu strategis pembangunan Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan public;
2. Peningkatan nilai-nilai ke-islaman dan budaya ke-acehan;
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan;
4. Pemenuhan ketahan dan kemandirian pangan;
5. Pengembangan pertanian dan perikanan;
6. Pengembangan industri, koperasi dan UMKM;
7. Pengembangan pariwisata;
8. Ketenagakerjaan;
9. Ketersediaan dan Ketahanan Energi;
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi;
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah;
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni;
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;
15. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses pelayanan kesehatan;
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan dan memperhatikan isu strategis nasional dan Pemerintah Aceh, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. **Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**

   Isu strategis tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dan pengembangan inovasi daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan aset – aset daerah .

2. **Peningkatan kualitas pendidikan dan rendahnya angka rata rata lama sekolah**

   Isu strategis peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan distribusi guru secara merata, implementasi kurikulum pendidikan terintegrasi, meningkatkan pendidikan non formal, pendidikan dayah dan kepemudaan.

3. **Penguatan pelaksanaan syariat Islam dan Keistimewaan Aceh**

   Isu strategis penguatan pelaksanaan syariat islam dan keistimewaan Aceh difokuskan untuk mengoptimalkan nilai-nilai Keislaman dalam Pembangunan Akhlak Masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan mengoptimalkan potensi zakat.

4. **Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

   Isu strategis peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan difokuskan untuk peningkatan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19, perbaikan gizi masyarakat melalui program peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, pelaksanaan Qanun Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) untuk percepatan penanganan terhadap ibu hamil, sehingga diupayakan dapat menekan angka kematian ibu, pencegahan dan penanganan stunting, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dan pencegahan penyakit, meningkatkan kampanye budaya hidup bersih melalui Program pengembangan lingkungan sehat di Kabupaten Aceh Utara terutama dalam pencegahan penyakit menular, memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana kesehatan.

Peningkatan kontrol sosial terhadap remaja dan anak-anak sekolah guna menghentikan peredaran, penggunaan narkoba, tingginya kasus HIV dan PMKS lainnya melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba dan HIV, menyediakan fasilitas umum seperti taman dan sarana olahraga sebagai tempat bagi remaja.

5. **Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Kawasan**

   Isu strategis peningkatan infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur publik, meningkatkan infrastruktur pertanian dengan meningkatkan peran dan fungsi P3A/GP3A dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) serta pengembangan kawasan perdesaan.

6. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

   Isu strategis peningkatan kualitas sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang difokuskan untuk pengendalian banjir, penyediaan dokumen perencanaan lingkungan dan tata ruang (RPPLH dan revisi RTRW), pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana.

7. **Penanggulangan Kemiskinan**

   Isu strategis penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan, menggunakan data BDT sebagai upaya penyaluran bantuan tepat sasaran, peningkatan cakupan rumah layak huni, akses air minum dan sanitasi, meningkatkan kesempatan dan ketrampilan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi untuk mengurangi tingkat pengangguran.

8. **Ketahanan Pangan dan nilai tambah produk pertanian**

   Isu strategis ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian difokuskan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok petani secara berkesinambungan atau berkelanjutan, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, meningkatnya nilai

tambah produk pertanian dan perikanan serta pengembangan industri, koperasi dan UMKM berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan lahan sawah tadah hujan .

9. **Pariwisata Islami**

   Isu strategis pariwisata islami difokuskan untuk mengembangkan objek wisata situs sejarah Kerajaan Samudera Pasee belum dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan, meningkatkan sinergitas dan kemitraan serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, antara pusat dan propinsi, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

10. **Perbaikan Iklim Investasi**

    Isu strategis perbaikan iklim investasi difokuskan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan membangun kerjasama dengan seluruh s*takeholder* untuk melakukan sosialisasi dan promosi produk-produk industri kecil dan menengah melalui publikasi dan teknologi informasi serta mendorong peningkatan kerjasama derah dalam memanfaatkan aset-aset daerah.

11. **Pemberdayaan Gampong**

    Isu strategis pemberdayaan gampong difokuskan untuk meningkatkan kapasitas aparatur gampong, mendorong pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan membina Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

12. **Peningkatan kapasitas fiskal daerah;**

    Isu strategis kapasitas fiskal daerah difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui regulasi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

13. **Penyelesaian aset daerah dan batas wilayah;**

    Isu strategis penyelesaian aset daerah dan batas wilayah difokuskan untuk penyelesaian pengalihan kepemilikan atau penjualan aset daerah yang berada di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Kota Lhokseumawe atau ke pihak lainnya, melakukan inventarisir aset daerah dan identifikasi batas

wilayah serta menyelesaikan konflik batas wilayah (gampong, kecamatan dan kabupaten).

14. **Penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;**

    Isu strategis penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak difokuskan untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan mengalami tidak kekerasan, penanganan kasus dan pendampingan korban tindak kekerasan, mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak anak.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

" Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)".

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan visi:

Penjelasan Visi:

Kata kata yang dirangkai didalam kalimat visi di atas mengandung arti atau makna sebagai berikut :

Berbudaya artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: *Adat bak Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara.*

Sejahtera artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir bathin.

Mandiri artinya masyarakat yang mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain.

Islami artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berprilaku, berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syari'at Islam

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima butir misi sebagai berikut :

1) Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA;

2) Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam;
3) Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;
4) Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan; dan
5) Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Perubahan RPJMK Aceh Utara Tahun 2017-2022 tidak merubah visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMK Aceh Utara 2017-2022, sesuai dengan yang telah disampaikan waktu suksesi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan memperhatikan kajian RPJMN Tahun 2015-2019, RPJP Aceh Tahun 2012-2032 dan RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2015.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel berikut. Tabel 5.1a memuat tujuan, sasaran, indikator beserta target capaian tahun 2018-2020 dan realisasi capaian tahun 2018-2019. Selanjutnya sesuai hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 masih menemukan beberapa kelemahan antara lain rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran dan ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan Bupati Aceh Utara untuk menyempurnakan tujuan dan sasaran strategis

yang berorientasi hasil serta indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dalam dokumen-dokumen perencanaan. Penyempurnaan tujuan, sasaran, indikator serta target tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1b.

Tabel 5.1a
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2020

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian			Realisasi Capaian	
						2018	2019	2020	2018	2019
I.	Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B	B	B	CC	CC
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	n/a	2	3	3	2+	2+
			Meningkatnya maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	n/a	3	3	3	3	3
			Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	86.63%
		Meningkatkan pelayanan publik	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat	75	75,9	76	76,95	81.41	86.8

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian			Realisasi Capaian	
						2018	2019	2020	2018	2019
			Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a	60%	62%	64%	66.67%	65.83%
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan mukim dan pemerintah gampong	Meningkatnya kapasitas aparatur gampong	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	45%	50%	55%	60%	-	4.69
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Persentase Majelis Taklim aktif	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
			Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Syariat Islam	n/a	0,138	0,129	0,121	0.045	0.053
II.	Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional,	Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing	Meningkatnya partisipasi sekolah	APM	75,67%	77,50%	82,50%	88,50%	80.7%	84.04%
			Meningkatnya kualitas SDM	Angka rata-rata lama sekolah	8,15	9	9,5	10	8.11	8,46

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian			Realisasi Capaian	
						2018	2019	2020	2018	2019
	berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam		Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum terintegrasi	-	-	10%	20%	-	-
			Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	19,00%	23,00%	30,00%	40,00%	39%	38.37%
		Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15%	20%	22%	25%	n/a	n/a
		Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	n/a	80	60	55	103	118
III	Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,51	71	71,5	71,6	68.61	68,79

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian			Realisasi Capaian	
						2018	2019	2020	2018	2019
	kesehatan yang bermutu		Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu	139	123	105	93	13	25
			Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	Angka Kematian Bayi	5	4	4	4	3	3
IV	Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan	Meningkatkan Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	47,7	52,3	57,8	62,6	75.93	77.73
			Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi	34,7	39,1	44,3	48,5	35.59	38.59
			Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Persentase akses air bersih	63,58	65,56	67,61	69,78	67.02	69.95
			Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	57,85	60,67	63,82	67,09	61.38	64.25
			Meningkatnya infrastruktur perumahan	Persentase rumah layak huni	84,72	86,24	87,81	89,43	85.46	85.47

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian			Realisasi Capaian	
						2018	2019	2020	2018	2019
			Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Ibukota Kabupaten	34,37	40,62	46,87	53,12	34.37	34.37
		Meningkatkan kesiagaan dan Kewaspadaan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam	Tingkat Resiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	n/a	n/a
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas Lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	n/a	55	60	65	n/a	n/a
V	Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	4,5	4,6	4,7	5.14	3,54
			Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,269	0,265	0,262	0,259	0.292	0.308
		Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	19,46	17,25	16,45	15,55	17.25	17.39
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	11,02	10	8,5	8	10.14	8.65

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian			Realisasi Capaian	
						2018	2019	2020	2018	2019
		Mengendalikan Inflasi Daerah	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	2,87	3,5	3	3	2.05	1.2
		Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,77	5	5,25	5,4	3.98	4,07
		Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	-10,23	3,25	4	5,2	11,87	-6,07
		Meningkatkan Kapasitas Fiskal	Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	Kontribusi PAD terhadap APBD	10 %	15-20	15-20	15-20	10.62	9.39

Tabel 5.1b
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian		Kondisi akhir
						2021	2022	
I.	Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	40,40	51	55	55
			Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B	B	B
			Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatkan pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat	70,07	77,5	80	80
		Meningkatkan pengamalan syariat Islam oleh masyarakat		Indeks Pembangunan Syariat Islam	NA	60	65	65
			Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Persentase penurunan kasus pelanggaran syari'at Islam	17,65 %	15 %	14%	14%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian		Kondisi akhir
						2021	2022	
II.	Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam	Meningkatkan Mutu pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia	69,33	70.89	71.79	71,79
			Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	8,15	10,5	11	11
			Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan	96,26	100	100	100
		Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	50,65	55,70	58,10	58,10
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15%	28%	30%	30%
			Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13,56%	14%	13%	13%
III	Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu	Meningkatkan Kesehatan masyarakat yang Bermutu		Indeks Pembangunan Manusia	69,33	70.89	71.79	71,79
			Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,80	71,7	71,9	71,9
IV	Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung	Meningkatkan aksesibilitas Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah		Kategori kinerja infrastruktur dasar dan publik	Cukup	Baik	Baik	Baik
			Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan	47,7	67,1	72,1	72,1

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian		Kondisi akhir
						2021	2022	
	pertanian berkelanjutan			sedang (mantap)				
			Meningkatnya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	34,7	53,8	61,1	61,1
			Meningkatnya kualitas aksebilitas air bersih terhadap masyarakat	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69,78	72,03	74,43	74,43
			Meningkatnya kualitas aksesibilitas sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	67,09	70,43	73,95	73,95
			Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	87,17	88,25	89,12	89,12
V	Misi V : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	0,97	4,5	5,0	5,0
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3,11	4,5	5,0	5,0

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian		Kondisi akhir
						2021	2022	
	gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	-6,79	6	6,7	6,7
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	-5,01	3,5	4,3	4,3
			Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,261	0,255	0,251	0,251
			Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	2,87	3	3	3
		Menurunkan tingkat kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	17.02	16,00	14,90	14,90
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	8,56	7,5	6,9	6,9
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	33,12 Jt	33,46 Jt	33,85 Jt	33,85 Jt

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat diimplementasikan. Segala sesuatu yang secara langsung bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap sebagai strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain strategi, hal lainnya yang penting adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Beberapa strategi pembangunan dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022

Visi : Melanjutkan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA		
1.1 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	1.1.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	1.1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik yang Responsif, transparan dan akuntabel 1.1.1.2 Perencanaan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan penganggaran
	1.1.2 Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1 Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah 1.1.2.2 Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.1.2.3 Pemindahtanganan aset daerah yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Kota Lhokseumawe
	1.1.3 Meningkatkan pelayanan publik	1.1.3.1 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah 1.1.3.2 Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam	1.2.1 Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	1.2.1.1 Menghidupkan majelis taklim di Kecamatan dan gampong 1.2.1.2 Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
		1.2.1.3 Peningkatan pengawasan pelaksanaan syariat Islam 1.2.1.4 Sosialisasi pola hidup sesuai syariat 1.2.1.5 Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 1.2.1.6 Pembinaan generasi penghafal Al-Quran 1.2.1.7 Peningkatan peran serta ulama dalam pembangunan
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam		
2.1 Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, terintegrasi dan berbasis islami	2.1.1 Meningkatnya rata-rata lama sekolah	2.1.1.1 Peningkatan akses pendidikan 2.1.1.2 Revitalisasi gerakan kembali ke sekolah untuk anak putus sekolah
	2.1.2 Meningkatnya mutu pendidikan	2.1.2.1 Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2.1.2.2 Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 2.1.2.3 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan 2.1.2.4 Peningkatan minat baca dan penumbuhan budaya literasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2.1.3 Meningkatnya pendidikan yang terintegrasi yang berbasis Islami	2.1.3.1 Penetapan kurikulum berbasis islami dan keraifan lokal 2.1.3.2 Sosialisasi penerapan kurikulum berbasis islami dan kearifan lokal 2.1.3.3 Peningkatan sarana dan prasarana dayah
2.2 Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	2.2.1 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	2.2.1.1 Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan
2.3 Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	2.3.1 Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.3.1.1 Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 2.3.1.2 Perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan 2.3.1.3 Penanganan kasus dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan 2.3.1.4 Pemenuhan Hak Anak
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu		
3.1 Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu.	3.1.1 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	3.1.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata , terjangkau dan berkeadilan, serta upaya promotif – preventif 3.1.1.2 Peningkatan ketahanan kesehatan menghadapi pandemi 3.1.1.3 Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3.1.1.4 Penanganan stunting terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3.1.2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	3.1.2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 3.1.2.2 Peningkatan pelayanan maternal secara berkesinambungan 3.1.2.3 Peningkatan ketahanan keluarga
	3.1.3 Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	3.1.3.1 Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal 3.1.3.2 Pemenuhan gizi bayi dan anak untuk pencegahan gizi buruk dan stunting
Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan		
4.1 Meningkatkan Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah	4.1.1 Tersedianya konektivitas wilayah	4.1.1.1 Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
	4.1.2 Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	4.1.2.1 Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian 4.1.2.2 Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi melalui sumber dana APBN dan APBA 4.1.2.3 Peningkatan peran serta P3A dalam program pengembangan sistem irigasi
	4.1.3 Meningkatnya kualitas layanan air bersih terhadap masyarakat	4.1.3.1 Pemenuhan infrastruktur penyediaan air bersih 4.1.3.2 Penyediaan air minum berbasis masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4.1.4 Meningkatnya kualitas layanan sanitasi	4.1.4.1 Pemenuhan infrastruktur penyediaan sanitasi dan air limbah
	4.1.5 Meningkatnya layanan dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	4.1.5.1 Pembangunan dan rehab rumah 4.1.5.2 Pemanfaatan dana desa dan ZIS untuk pembangunan dan rehab rumah layak huni
Misi 5 : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan		
5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	5.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	5.1.1.1 Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan 5.1.1.2 Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta pengembangan industri
	5.1.2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	5.1.2.1 Perbaikan iklim investasi 5.1.2.2 Pengembangan UMKM dan koperasi berbasis pertanian dan perikanan 5.1.2.3 Peningkatan koordinasi dengan industri skala besar
	5.1.3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	5.1.3.1 Peningkatan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh
	5.1.4 Menurunnya ketimpangan pendapatan	5.1.4.1 Peningkatan ketahanan pangan dengan menjamin ketersediaan, distribusi dan pengendalian harga 5.1.4.2 Penataan dan pengembangan kawasan
	5.1.5 Terkendalinya tingkat inflasi daerah	5.1.5.1 Peningkatan peran pemerintah daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Tujuan	Sasaran	Strategi
5.2 Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	5.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan	5.2.1.1 Peningkatan cakupan rumah layak huni beserta akses air minum dan sanitasi 5.2.1.2 Peningkatan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan 5.2.1.3 Penggunaan data BDT sebagai upaya penyaluran bantuan tepat sasaran 5.2.1.4 Pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat rentan
	5.2.2 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	5.2.2.1 Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 5.2.2.2 Pengembangan potensi wisata 5.2.2.3 Peningkatan kompetensi tenaga kerja

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
- Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	- Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan tanaman bahan makanan, perikanan, perkebunan, dan peternakan	- Meningkatkan daya saing komoditi-komoditi unggulan	- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendukung/penunjang di kawasan sentra-sentra produksi	- Mengembangkan industri pengolahan produk-produk pertanian.	- Memantapkan industri pengolahan produk-produk pertanian
- Menyusun kebijakan pengembangan pariwisata islami	- Mengembangkan potensi pariwisata islami	- Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	- Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana pariwisata	- Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana pariwisata
- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.	- Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas SDM dengan membuat kebijakan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi	- Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang terintegrasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertanian berkelanjutan	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat pengurangan ketimpangan wilayah	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat pengembangan ekonomi dan perdagangan	- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat pengembangan ekonomi dan perdagangan
- Memelihara kualitas sarana peribadatan agar terus meningkat fungsinya sebagai pusat pengembangan syariat Islam	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.	- Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dari hasil telaahan visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
2. Pendidikan dan Budaya
3. Keistimewaan Aceh
4. Kesehatan dan Kesejahteraan
5. Infrastruktur
6. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Ketahanan Pangan dan nilai tambah produk pertanian
9. Pariwisata Islami
10. Perbaikan Iklim Investasi
11. Pemberdayaan Gampong

Tabel 6.3a

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Visi : Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)											
1	**Misi 1 :Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA**											
	Tujuan :											
1.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a					64		66		
	Sasaran :											
1.1.1	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B		B		B		B		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya Administrasi Pengendalian dan Program Kegiatan Pembangunan	100%	70,70%	49.909.000	98,92%	84.502.200	100%	67.875.000	100%	202.286.200	SETDAKAB
	Program Pengembangan Zona Integritas	Persentase SKPK yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan		0%	-	100,00%	100.558.110	100%	65.258.500	100%	165.816.610	Inspektorat
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%	26,67%	227.159.998	100%	246.231.432	0%	-	0%	473.391.430	SETDAKAB
	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%		-		-	100%	91.877.500	100%	91.877.500	SETDAKAB
1.1.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	n/a	2		3		3		3		
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	45,45%	51.100.000	100,00%	192.838.300	100%	31.300.000	100%	275.238.300	Inspektorat
1.1.3	Maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	n/a	3		3		3		3		
	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Pemahaman terhadap SOP dan SPIP	-	100%	202.224.135	91,67%	567.658.865	100%	225.596.500	100%	995.479.500	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
1.1.4	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi laporan keuanngan	99%	0%	83.708.200	100%	239.722.375	100%	203.240.250	100%	526.670.825	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan	100%	0%	2.411.464.059	93,56%	4.316.451.516	100%	4.281.286.253	100%	11.009.201.828	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	76%	86%	1.326.651.740	85%	1.833.528.125	100%	1.354.194.557	100%	4.514.374.422	Inspektorat
1.1.5	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.314.691.695	100%	1.251.530.000	100%	1.376.683.000	100%	3.942.904.695	Bappeda
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesesuaian program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	190.031.250	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	615.031.250	Bappeda
	Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian program bidang prasarana wilayah dan SDA dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	89.775.100	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	392.775.100	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	115.006.000	100%	204.250.000	100%	250.000.000	100%	569.256.000	Bappeda
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah	100%	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	600.000.000	Bappeda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana OPD yang terlatih	n/a	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	812.080.000	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	862.344.000	100%	1.006.570.000	100%	1.026.701.000	100%	2.895.615.000	Semua PD yang membidangi sosial budaya
	Program Perencanaan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	510.000.000	100%	579.340.000	100%	608.307.000	100%	1.697.647.000	Semua PD yang membidangi ekonomi
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	58%	1.294.400.200	100%	623.606.200	98%	137.720.850	85%	2.055.727.250	Semua PD yang membidangi prasarana wilayah dan SDA
1.1.6	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	100%		100%		100%		100%		
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	98%	136.546.100	100%	439.380.874	99%	263.167.900	99%	839.094.874	Bappeda
	Tujuan :											
1.2	Meningkatkan pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat										
	Sasaran :											
1.2.1	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat		75,9		76		76,95		80		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	21.617.233.753	100%	24.748.333.690	100%	40.257.758.322	100%	86.623.325.765	Semua OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70,00%	75,00%	4.928.773.850	80,00%	3.523.547.566	82%	5.994.105.313	79%	14.446.426.729	Semua OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100%	100%	7.241.645.000	100%	495.810.000	100%	7.747.463.200	100%	15.484.918.200	Semua OPD
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Pelayanan Kependudukan	n/a	99%	1.129.813.000	99%	2.466.854.000	100%	1.811.349.300	100%	5.408.016.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	100%	-	84.673.000	-	514.177.000	100%	129.930.000	100%	728.780.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Gampong	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	n/a	-	-	87,09%	3.689.475.200	100%	1.412.223.562	100%	5.101.698.762	Kecamatan
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Tingkat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100%	-	-	64,18%	587.179.200	100%	190.551.700	100%	777.730.900	Kecamatan
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	99%	1.624.692.065	77%	15.675.837.712	100%	5.247.874.597	100%	22.548.404.374	Sekretariat DPRK
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%	0%	-	125%	124.103.000	100%	87.025.750	125%	211.128.750	SETDAKAB
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Pendataan Wilayah	100%	0%	-	100%	221.883.600	100%	52.933.550	100%	274.817.150	SETDAKAB
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	0%	-	100%	741.014.809	100%	523.626.625	100%	1.264.641.434	SETDAKAB
	Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Persentase Pelayanan Masyarakat	100%	0%	-	100%	1.874.361.700	100%	1.572.604.400	100%	3.446.966.100	SETDAKAB
	Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Persentase kasus yang diselesaikan	100%	0%	-	0%	-	100%	158.078.950	100%	158.078.950	SETDAKAB
	Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami HAM	100%	0%	-	100%	29.469.250	100%	20.856.000	100%	50.325.250	SETDAKAB
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penerima Akses	100%	0%	576.105.000	0%	656.104.000	100%	565.374.775	100%	1.797.583.775	SETDAKAB
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terciptanya kemitraan yang baik dalam penyebaran informasi	100%	0%	1.539.067.000	0%	1.390.769.600	100%	1.808.212.400	100%	4.738.049.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan,Sekretariat DPRK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Pengendalian Pengelolaan Keuangan	100%	0%	20.600.000	0%	33.219.400	100%	30.000.000	100%	83.819.400	SETDAKAB
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	0%	2.606.185.500	0%	2.646.333.150	100%	2.404.979.750	100%	7.657.498.400	SETDAKAB
	Program Peringatan Hari-hari Besar	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan per hari-hari besar yang wajib dilaksanakan	100%	0%	-	0%	-	100%	933.197.400	100%	933.197.400	Semua PD yang menyelenggarakan peringatan hari-hari besar
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan Pelayanan Jamaah Haji	100%	85%	670.941.850	100%	901.425.650	100%	563.793.000	100%	2.136.160.500	SETDAKAB
	Program Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Pengembangan Usaha Produksi Sumber Daya Alam	100%	0%	-	0%	66.125.000	100%	90.903.500	100%	157.028.500	SETDAKAB
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pelayanan Informasi	100%	0%	95.477.000	0%	296.130.700	100%	128.277.304	100%	519.885.004	SETDAKAB
	Program Penguatan Tata Laksana	Persentase peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	0%	-	0%	84.555.000	100%	104.625.625	100%	189.180.625	SETDAKAB
	Program Penguatan Kelembagaan	Capaian peningkatan kinerja perangkat daerah	100%	0%	-	0%	-	100%	185.456.000	100%	185.456.000	SETDAKAB
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase terselesaikannya persertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	90%		-	99%	383.649.000	100%	113.974.660	100%	497.623.660	Dinas Pertanahan
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	n/a		-	96%	1.140.059.000	100%	31.761.372	100%	1.171.820.372	Dinas Pertanahan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya aplikasi SIMPAT	n/a	100%	144.000.000		-		-		144.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya aplikasi SIMPAT	n/a	0%	-		-		-	0%	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	35.687.000	100%	68.551.100	100%	97.518.876	100%	201.756.976	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	50%	55%	155.500.000	60%	181.280.500	100%	120.000.000	100%	456.780.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	0%	-	0%	-	100%	45.579.000	100%	45.579.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelola arsip yang mengikuti pelatihan kearsipan	n/a	0%	155.500.000	50%	47.631.809	100%	47.775.000	100%	250.906.809	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2.2	Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a			60%		62%		70%		
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15%	0%	-	100%	2.019.789.000	100%	84.250.000	100%	2.104.039.000	BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n/a	100%	2.416.447.000	92,02%	1.597.247.000	100%	2.212.704.700	100%	6.226.398.700	BKPSDM
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	n/a	60%	799.750.000	70,00%	863.000.000	80%	978.860.000	70%	2.641.610.000	Semua OPD
1.2.3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat											
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaaian konflik	15,00%	0,00%	143.732.000	0,00%	451.520.000	100%	442.863.550	100%	1.038.115.550	Kesbangpol, SatpolPP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Tingkat penurunan kasus penyalahgunaan narkotika pertahun	1,00%	0,00%	295.664.000	0,00%	173.430.400	100%	65.830.988	100%	534.925.388	Kesbangpol
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Qanun	100%	100%	2.822.255.000	100%	1.882.624.500	100%	2.209.401.000	100%	6.914.280.500	SATPOL PP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	n/a	0,00%	-	100%	-	0%	-	0%	-	SATPOL PP
1.2.4	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat											
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Persentase yang memilih pada PEMILU	66,40%	0%	-	0,00%	173.886.400	0,00%	-	0%	173.886.400	Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat penurunan kasus demonstrasi/kerusuhan yang berlatarbelakang ideologi per tahun	n/a	0%	-	75,00%	79.410.700	0,00%	-	0%	79.410.700	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pembinaan parpol, OKP, Ormas, LSM dan WNA	100%	0%	40.162.000	0%	1.004.660.902	100%	134.173.050	100%	1.178.995.952	Kesbangpol
	Tujuan :											
1.3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan mukim dan pemerintah gampong											
	Sasaran :											
1.3.1	Meningkatnya kapasitas aparatur gampong	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a			50%		55%		75%		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persetase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a	0%	-	5%	231.204.000	0%	-	0%	231.204.000	DPMP2KB
1.3.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong	Tingkat peran gampong dalam pembangunan	n/a			100%		100%		100%		
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah gampong yang berkembang	n/a	74 Gampong	9.243.070.000	74 Gampong	142.329.100	100%	104.633.000	100%	9.490.032.100	DPMP2KB
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan gampong	100%	0%	-	100%	69.494.700	100%	12.128.000	100%	81.622.700	DPMP2KB
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BUMG yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Gampong (PAG)	n/a	0,00%	176.136.000	12,00%	891.475.100	100%	514.548.500	100%	1.582.159.600	DPMP2KB
	Tujuan :											

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
1.4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan syariat Islam											
	Sasaran :											
1.4.1	Meningkatnya pengamalan syariat islam	Persentase Majelis Taklim aktif	100%	100%		100%		100%		100%		
	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Persentase Layanan Kehidupan Beragama	100%	100%	243.000.000	100%	234.000.000	100%	6.981.371.135	100%	7.458.371.135	BAITUL MAAL, MPU dan DSI
	Program Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Persentase sarana dan prasarana keagamaan kondisi baik	60%		-	100%	750.000.000	100%	1.377.406.000	100%	2.127.406.000	Dinas Syariat Islam
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase lembaga yang dibina	40%	100%	3.113.331.531	100%	3.688.601.815	100%	3.586.200.000	100%	10.388.133.346	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Kehidupan Beragama	Persentase Pembinaan Kehidupan Beragama	60%	0%	-	0%		0%		0%	-	Dinas Syariat Islam
	Pengembangan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an	Persentase Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an	n/a	0%	-	0%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Dakwah dan syi'ar Islam	Persentase Syi'ar		0%	-	0%	-	100%		100%	-	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%	20%		41,14%	1.802.577	-		41%	1.802.577	MPU
	Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi Antara Umara dan Ulama	Persentase peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah	100%	100%	0%	100%	78.965.000	-	-	100%	78.965.000	MPU
	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	0%	0%	-	0%	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	MPU
1.4.2	Meningkatnya Penegakan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam	0,148	0,138		0,129		0,121		0.099		
	Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam	0,148	0,05%	3.334.182.000	0,05%	3.320.593.500	100%	4.340.920.373	100%	10.995.695.873	Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH
2	**Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam**											
	Tujuan :											

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
2.1	Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing											
	Sasaran :											
2.1.1	Meningkatnya partisipasi sekolah	APM	75,67%	77,50%	15.748.800.000	82,50%	18.061.400.000	88,50%	18.272.214.000	95%		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	48%	45%	4.724.250.000	47%	7.480.215.687	100%	7.980.135.000	100%	20.184.600.687	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM SD dan SMP		72%	66.918.475.000	74,35%	135.400.578.114	100%	187.634.497.000	100%	389.953.550.114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.2	Meningkatnya kualitas SDM	Angka rata-rata lama sekolah		9%		9,5%		10%		11%		
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf	95%	95%	27.000.000	96%	367.298.800	100%	560.400.000	100%	954.698.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	10314 org	0,21%	591.211.503	0,21%	2.352.394.622	100%	746.090.000	100%	3.689.696.125	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	70%	0%	-	0%	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengembangan Sumber daya Aparatur Perpustakaan	Persentase aparatur perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	0%	-	0%	-	100%	46.817.000	100%	46.817.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MPD	100%	0%	482.000.000	37,50%	489.000.000	0%	-	0%	971.000.000	MPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan DSI		0%	-	0,00%	-	100%	27.000.000	100%	27.000.000	DSI
2.1.3	Terlaksananya pendidikan yang berbasis islami dan kearifan lokal	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	n/a	-		10%		20%		40%		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	-	100%	1.529.524.000	67%	1.327.188.500	100%	874.021.300	100%	3.730.733.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi Pendidikan	-	-	2.250.000	39,65%	109.629.600	100%	65.634.950	100%	177.514.550	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase dayah yang mandiri	0%	0%	-	39,65%	222.573.000	100%	682.694.500	100%	905.267.500	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dalam kondisi baik	81%	8%	-	47%	9.784.534.000	100%	6.331.200.000	100%	16.115.734.000	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase dayah yang dibina	46%	0%	7.499.670.000	115,56%	7.419.466.000	100%	7.562.630.800	100%	22.481.766.800	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase mutu pendidik pada Dayah	97,33%	0%	-	100%	500.000.000	0%	-	0%	500.000.000	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pemberdayaan Santri	Persentase Kemandirian Santri	15,00%	0%	-	0	-	0%	-	0%	-	Dinas Pendidikan Dayah
2.1.4	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	19%	23%		30%		40%		60%		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	19%	39%	7.144.000	38%	6.140.209.965	100%	8.946.328.951	100%	15.093.682.916	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Perencanaan Dan Pengawasan/Monitoring Dan Evaluasi	Tingkat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Pendidikan	100%	0%	9.284.000	100%	60.655.000	100%	36.981.876	100%	106.920.876	MPD
	Tujuan :											
2.2	Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan											
	Sasaran											
2.2.1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15,00%	20%		22,00%		25,00%		30%		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang	75%	0%	75.756.000	0%	198.938.000	100%	134.992.433	100%	409.686.433	Dinas Sosial dan P3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100,00%	100,00%	290.037.000	100,00%	471.843.000	100%	353.582.000	100%	1.115.462.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	75,00%	100,00%	44.512.000	100,00%	71.809.000	100%	84.692.000	100%	201.013.000	Dinas Sosial dan P3A
	Tujuan :											
2.3	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak											
	Sasaran :											
2.3.1	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak		80 kasus		60 kasus		55 kasus		30 kasus		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan	75%	0%	75.756.000	0%	198.938.000	100%	134.992.433	100%	409.686.433	Dinas Sosial dan P3A
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100,00%	100,00%	290.037.000	100,00%	471.843.000	100%	353.582.000	100%	1.115.462.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	75,00%	100,00%	44.512.000	100,00%	71.809.000	100%	84.692.000	100%	201.013.000	Dinas Sosial dan P3A
	Tujuan :											
2.4	Meningkatkan prestasi olahraga dan kemandirian pemuda											
	Sasaran :											
2..4.1	Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase atlit berprestasi	25,00%	25,00%		25,00%		30%		40%		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60,00%	0,00%	1.510.183.000	100,00%	1.761.734.000	100%	818.771.000	100%	4.090.688.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	65,00%	0,00%	-	100,00%	1.959.624.000	100%	1.582.245.000	100%	3.541.869.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase atlit berprestasi	25,00%	0,00%	-	0,00%	-	100%	61.600.000	100%	61.600.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.4.2	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase wirausaha muda	15%	20%		23%		30%		50%		
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peran Pemuda dalam Pembangunan	15%	0%	-	100%	631.682.000	100%	607.950.000	100%	1.239.632.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	n/a	0,00%	-	0,00%	-	100%	18.725.000	100%	18.725.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	n/a	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Tujuan :											
2.5	Menguatkan tatanan budaya dan adat istiadat											
	Sasaran :											
2.5.1	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Persentase kekayaan dan keragaman budaya yang terkelola	40%	50%		60%		70%		85%		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival budaya	40%	51%	394.481.863	63%	803.789.480	100%	1.560.850.000	100%	2.759.121.343	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Situs Sejarah kekayaan budaya dan adat istiadat yang dipelihara/dilestarikan	0%	51%	-	63%	145.790.968	100%	523.000	100%	146.313.968	MAA
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase keragaman budaya yang terkelola	40%	0%	212.458.200	20%	233.120.000	100%	262.921.000	100%	708.499.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang berkembang	40%	0	500.000.000	51%	95.800.105	100%	20.000.000	100%	615.800.105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Hukum Adat	Persentase Gampong yang menerapkan administrasi peradilan adat	0,70%	1,20%	116.914.000	5%	59.618.700	100%	12.750.000	100%	189.282.700	MAA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MAA	100%	100%	-	100%	382.953.000	100%	410.978.750	100%	793.931.750	MAA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan dan Pelestarian Adat	Jumlah Keputusan, Seruan, Himbauan, Naskah hasil kajian adat istiadat yang diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat	2 Dokumen	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	MAA
3	**Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu**											
	Tujuan :											
3.1	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Bermutu											
	Sasaran :											
3.1.1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,51	71		71,5		71,6		71,9		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	87%	98%	68.839.862.000	98%	7.417.891.206	100%	47.652.726.638	100%	123.910.479.844	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang direhabilitasi	38%	56%	38.616.047.000	59%	1.442.780.991	100%	35.135.617.023	100%	75.194.445.014	Dinas Kesehatan
	Program Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	10	50%	1.983.969.000	61%	1.579.357.000	100%	3.184.247.000	100%	6.747.573.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase Alkes yang memadai di faskes	n/a	15%	-	18%	420.831.460	100%	231.901.500	100%	652.732.960	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Puskesmas yang di Akreditasi	n/a	0	-	0	-	0%	-	0%	-	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial							100%	265.112.255	100%	265.112.255	Dinas Kesehatan
3.1.2	Meningkatnya mutu layanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu										
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,16%	84,00%	235.164.000	85,00%	558.925.000	100%	320.900.000	100%	1.114.989.000	Dinas Kesehatan
3.1.3	Meningkatnya mutu layanan kesehatan Bayi	Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	4/1000 KH		4/1000 KH		4/1000 KH		3/1000 KH		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program peningkatan kesehatan anak balita dan Gizi	Angka Kematian Bayi	5/1000 KH	3/1000 KH	73.561.000	3/1000 KH	85.305.000	100%	325.882.850	100%	484.748.850	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Imunisasi dan pencegahan penyakit	Persentase kegiatan Imunisasi	70%	70%	341.909.000	55%	445.466.000	100%	276.689.550	100%	1.064.064.550	Dinas Kesehatan
3.1.4	Meningkatnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)											
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/penyuluhan kesehatan yang dilakukan	84,24	87%	1.510.200.000	89%	276.025.000	100%	97.402.500	100%	1.883.627.500	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	65%	35.36%	187.330.339	37%	277.504.000	100%	167.339.000	100%	632.173.339	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Kasus PTM yang tertangani	100%	100%	528.344.000	100%	626.916.000	100%	289.082.000	100%	1.444.342.000	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani	100%	100%	-	100%	-	100%	1.508.903.682	100%	1.508.903.682	Dinas Kesehatan
3.1.5	Meningkatnya kinerja rumah sakit	Indek kepuasan pasien		80%		82%		83%		85%		
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS) penduduk miskin	83%	83%	166.200.000	84%	178.840.000	100%	178.880.000	100%	523.920.000	RSUCM
	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	85%	85,29%	103.306.519.000	86%	114.322.063.839	0%	-	0%	217.628.582.839	RSUCM
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	80%	92,00%	-	101%	-	100%	-	100%	-	RSUCM
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	0%	0%	-	0%	-	100%	267.900.000	100%	267.900.000	RSUCM
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani	0	0%	-	0%	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	RSUCM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
3.1.6	Meningkatnya Fasilitas kesehatan sesuai standar	Menurunnya angka rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi		4194		4000		3900		3700		
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan Fasilitas yang terstandar sesuai dengan tipe rumah sakit	75%	90%	3.745.412.110	90%	6.736.735.513	100%	13.846.426.188	100%	24.328.573.811	RSUCM
3.1.7	Meningkatnya pengembangan dan kualitas Sumber Daya Manusia	Anka pegawai yang melanjutkan pendidikan sesuai kompetensi		35		15		15		#REF!		
	Program Peningkatan Sumber daya kesehatan	Cakupan Tenaga terampil sesuai kompetensi di bidangnya	39%	12%	-	14%	-	0%	-	0%	-	RSUCM
3.1.8	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	2,04%	1,93%		1,82%		1,71%		1,60%		
	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	68,72%	54%	9.617.509.000	54,00%	11.150.097.708	100%	12.139.114.500	100%	32.906.721.208	DPMP2KB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	n/a	0%	-	6,00%	48.418.800	0%	-	0%	48.418.800	DPMP2KB
	Program Persediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	Persentase Capaian Jumlah TK/RA	-	0%	-	0%	-	100%	26.655.000	100%	26.655.000	DPMP2KB
4	**Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan**											
	Tujuan :											
4.1	Meningkatkan Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah											
	Sasaran :											
4.1.1	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	72,57%	66,663%	38.817.706.100	100,00%	38.661.701.578	86,88%	76.915.273.770	84,51%	154.394.681.448	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)	100,00%	0,00%	-	100,00%	38.049.736.196	66,38%	47.413.868.770	55,46%	85.463.604.966	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	47,70%	99,99%	38.648.561.400	99,99%	75.321.882	94,26%	29.232.193.000	98,08%	67.956.076.282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	70,00%	100,00%	169.144.700	100,00%	536.643.500	100%	269.212.000	100,00%	975.000.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.2	Meningkatnya infrastruktur pendukung pertanian	Persentase Luasan pertanian terairi	45,57%	33,33%	11.084.657.003	97,22%	13.880.528.633	65,57%	20.498.880.400	65,37%	45.464.066.036	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase perkembangan jaringan pengairan	34,70%	99,99%	11.084.657.003	92%	12.163.558.633	96,72%	20.293.347.400	96,12%	43.541.563.036	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pemanfaatan sumber air alami	2,00%	0%	-	100%	900.649.000	0%	-	33,33%	900.649.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	100,00%	0%	-	100%	816.321.000	100%	205.533.000	66,67%	1.021.854.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan data base infrastruktur	90,31%	0,00%	-	75,00%	7.651.369.723	74,23%	7.859.602.391	49,74%	15.510.972.114	
	Program Survey Investigasi dan Pemutakhiran data base	Persentase jalan,jembatan dan bangunan air yang diinspeksi dan disurvey	100%	0%	-	100%	396.235.500	97,34%	373.358.000	65,78%	769.593.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase Tingkat Ketersediaan Dokumen	100%	0,00%	-	100%	6.475.587.223	99,57%	6.904.624.391	66,52%	13.380.211.614	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Sistim Informasi Keciptakaryaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi keciptakaryaan	61,25%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Ketersediaan Dokumen	100,00%	0,00%		100,00%	779.547.000	100%	581.620.000	66,67%	1.361.167.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan akses air bersih	Persentase akses air bersih	60,70%	100,00%	10.872.210.000	67,61%	18.394.307.000	69,78%	16.559.720.950	74,43%	45.826.237.950	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum	60,70%	100,00%	10.872.210.000	100,00%	18.394.307.000	100%	16.559.720.950	100,00%	45.826.237.950	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.5	Meningkatnya prasarana lingkungan pemukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	57,85%	79,25%	4.437.446.000	80,00%	6.194.788.000	73,86%	24.446.636.100	77,70%	35.078.870.100	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	57,85%	61,00%	194.120.000	64,00%	109.200.000	0,00%	-	41,67%	303.320.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SETDAKAB
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	56,15%	100,00%	58.329.000	100,00%	2.363.079.000	100%	1.878.329.500	100,00%	4.299.737.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Luas areal Pemakaman terkelola	n/a	90,00%	48.634.000	90,00%	506.689.000	95,45%	49.278.000	91,82%	604.601.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase gampong dengan infrastruktur baik	n/a	66,00%	4.136.363.000	66,00%	3.215.820.000	100%	22.519.028.600	77,33%	29.871.211.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.6	Meningkatnya infrastruktur perumahan	Persentase rumah layak huni	84,72%	86,24%		87,81%		89,43%		92,82%		
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85,45%	85,46%	982.889.000	85,47%	2.343.340.000	99,98%	10.314.142.600	90,30%	13.640.371.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.7	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	37,31%	74.928.831.000	40,44%	19.319.993.000	76,55%	21.229.255.500	60,81%	115.478.079.500	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	34,00%	74.728.831.000	34,00%	19.107.993.000	99,98%	21.013.015.500	55,99%	114.849.839.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Ibukota Kabupaten	Persentase Pemindahan SKPK	34,37%	40,62%	200.000.000	46,87%	212.000.000	53,12%	216.240.000	65,62%	628.240.000	SETDAKAB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
4.1.8	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	n/a	50,00%	13.850.000	100,00%	862.641.500	50,00%	995.228.700	66,67%	1.871.720.200	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	n/a	0	-	100%	765.388.400	100%	995.228.700	66,67%	1.760.617.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Dokumen tata ruang	n/a	100%	13.850.000	100%	97.253.100	0,00%	-	66,67%	111.103.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Setdakab
4.1.9	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan	90%	70%	2.223.069.000	59%	2.968.534.000	80%	1.855.873.093	70%	7.047.476.093	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi prasarana	79%	100%	42.669.000	100%	435.433.000	100%	79.407.000	100,00%	557.509.000	Dinas Perhubungan
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan angkutan darat	100%	100%	1.255.020.000	94%	1.524.414.000	100%	802.304.093	98,00%	3.581.738.093	Dinas Perhubungan
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tingkat keselamatan berlalu lintas	n/a	0%	-	51%	889.307.000	98%	803.732.000	49,58%	1.693.039.000	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	51%	104.360.000	50%	119.380.000	100%	170.430.000	67,00%	394.170.000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Tingkat Pelayanan Angkutan Udara	n/a	100%	821.020.000	0%	-	0%	-	33,33%	821.020.000	Dinas Perhubungan
4.1.10	Meningkatnya pelayanan pertanahan	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat	n/a	0%	-	25%	99.703.000	25%	58.484.900	17%	158.187.900	
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a	0	-	0%	-	100%	41.884.700	33,33%	41.884.700	Dinas Pertanahan
	Program Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a	0	-	98%	99.703.000	0%	-	32,67%	99.703.000	Dinas Pertanahan
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	n/a	0	-	0%	-	0%	16.600.200	0,00%	16.600.200	Dinas Pertanahan
4.1.11	Terpenuhinya operasional lampu jalan	Cakupan pelayanan operasional lampu jalan	100%	100%	10.819.136.000	100%	28.165.437.000	100%	8.139.104.000	100%	47.123.677.000	
	Program Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Cakupan pelayanan operasional lampu jalan	100%	100%	10.819.136.000	100%	28.165.437.000	100%	8.139.104.000	100%	47.123.677.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Tujuan:											
4.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dalam Penanggulangan Bencana											
	Sasaran:											
4.2.1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tingkat Resiko Bencana	Tinggi	Tinggi	3.436.585.000	Tinggi	10.486.431.100	Sedang	9.222.608.342	Sedang	23.145.624.442	
	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengurangan area genangan banjir	3,00%	0,00%	-	100,00%	3.036.882.100	100%	3.097.619.742	66,67%	6.134.501.842	Dinas Pekerjaan Umum dan
	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase tingkat pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi	65%	0,00%	-	88,00%	368.200.000	100%	106.681.300	62,67%	474.881.300	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase tingkat pelayanan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	65%	65,00%	77.459.000	70,00%	216.846.000	100%	81.003.200	78,33%	375.308.200	BPBD
	Program Forum Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pengurangan resiko bencana	65%	65,00%	18.418.000	80,00%	135.970.000	30%	5.245.000	58,33%	159.633.000	BPBD
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	75%	75,00%	482.415.000	78,00%	2.357.514.000	100%	3.058.941.350	84,33%	5.898.870.350	BPBD
	Program Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Kebencanaan	waktu persiapan penanggulangan bencana	60 menit	60 Menit	460.840.000	60 Menit	762.690.000	60 Menit	716.424.700	60 Menit	1.939.954.700	BPBD
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	100,00%	2.397.453.000	100,00%	3.608.329.000	100%	2.156.693.050	100,00%	8.162.475.050	BPBD
	Tujuan:											
4.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup											
	Sasaran:											
4.3.1	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	n/a	52%	6.458.050.000	71%	10.506.969.000	85%	10.312.793.227	69%	27.277.812.227	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	n/a	25%	131.520.000	60,00%	1.001.782.000	108%	268.881.227	64,33%	1.402.183.227	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	100%	78%	20.188.000	100%	77.440.000	31%	7.821.100	69,67%	105.449.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,49%	23,99%	6.228.481.000	27%	9.240.081.000	100%	8.727.817.100	50,33%	24.196.379.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Persentase taman kota yang tertata	100%	83%	77.861.000	95%	187.666.000	100%	1.308.273.800	92,67%	1.573.800.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya konservasi SDA	25%	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	25%	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	**Misi V: Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan**											
	Tujuan:											
5.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata											
	Sasaran:											
5.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	4,5		4,6		4,7		5,25		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	8,2 T	384 T	37.838.000	269 T	148.230.000	100%	93.909.000	100%	279.977.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	69,61 Rp (milyar)	62,46%	31.661.300	50,39%	50.161.000	100%	7.680.000	100%	89.502.300	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	1,50%	267.652.000	1,60%	545.721.000	100%	137.171.448	100%	950.544.448	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	1,18%	-	1,68%	-	100%	312.245.000	100%	312.245.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Kemitraan dengan Dunia Usaha	n/a	0	-	0	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
5.1.2	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,269	0,265		0,262		0,259		0,251		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani yang dibina	25%		-	77%	10.264.500	-	-	-	10.264.500	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10%	12%	11.665.000	15%	51.382.000	100%	38.953.750	100%	102.000.750	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tujuan:											
5.2	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran											
	Sasaran:											
5.2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	19,46%	17,25%		16,45%		15,55%		14,05%		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00%	54,00%	144.357.000	53,00%	1.948.693.000	100%	1.976.870.000	100%	4.069.920.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20,00%	19,00%	-	27,00%	94.269.000	100%	299.200.000	100%	393.469.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase Pembinaan Kelembagaan Sosial	35,00%	0,00%	524.270.000	0,00%	617.914.000	100%	397.760.000	100%	1.539.944.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Persentase penerima manfaat Program keluarga harapan	20,00%	45,00%	528.811.000	44,00%	332.938.000	100%	200.350.000	100%	1.062.099.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan/pati jompo yang dibina	30,00%	0,00%	-	40,00%	50.000.000	100%	270.000.000	100%	320.000.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Gepeng yang mendapat bantuan	30,00%	11,00%	27.177.000	15,00%	25.527.000	100%	665.285.000	100%	717.989.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	Meningkatnya persentase Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	29,00%	0,00%	-	51,00%	246.525.000	100%	208.800.000	100%	455.325.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100%	37.740.000	100%	37.740.000	Dinas Sosial dan P3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
5.2.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	11,02%	10,00%		8,50%		8%		6,90%		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan	20%	-	88.347.000	-	1.814.550.000	100%	51.160.000	100%	1.954.057.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	-	136.747.000	97%	151.090.000	100%	115.029.800	100%	402.866.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	-	13.950.000	-	99.800.000	0%	-	0%	113.750.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi		96,10%	32.435.000	98,00%	1.006.362.200	100%	2.529.146.600	100%	3.567.943.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Tujuan:											
5.3	Mengendalikan Inflasi Daerah											
	Sasaran:											
5.3.1	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	4%	4%		4%		3%		3%		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Inflasi	4%	3,51%	23.800.000	3,61%	784.300.800	100%	1.536.775.805	100%	2.344.876.605	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Tingkat Pelanggaran Terhadap Konsumen	n/a	30,00%	1.419.500.000	-	1.401.528.000	100%	35.055.000	100%	2.856.083.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Tujuan:											
5.4	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan											
	Sasaran:											
5.4.1	Meningkatnya produksi hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,77	5		5,25		5,4		5,6		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5,28 ton/ha	545.470.000	-	869.075.500	100%	2.462.334.375	100%	3.876.879.875	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai ekspor pertanian			103.485.000	100%	230.710.000	100%	30.574.000	100%	364.769.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	5,03 ton/ha	5%	501.669.500	5%	10.671.438.400	100%	2.636.389.062,5	100%	13.809.496.963	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah produksi padi	440.738,83 ton	3.360 ton	339.375.000	3.400 ton	840.215.600	100%	2.168.212.830	100%	3.347.803.430	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas perkebunan unggulan	n/a	5,28 ton	340.001.000	77,78%	1.794.645.000	100%	1.446.474.783	100%	3.581.120.783	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi perkebunan unggulan (kakao)	3.270 ton	3.382 ton	204.620.000	3.421 ton	1.539.171.100	100%	1.479.910.800	100%	3.223.701.900	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kestabilan harga daging di hari-hari besar	90%	95%	87.660.000	100%	182.480.200	100%	89.471.700	100%	359.611.900	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak besar	108.045 ekor	111.599 ekor	409.428.700	111.537 ekor	964.197.700	100%	1.288.541.510	100%	2.662.167.910	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan kasus penyakit ternak	n/a	5%	123.355.000	4,38%	1.597.572	100%	2.334.766.940	100%	2.459.719.512	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	307.760.000	100%	1.476.977.000	100%	1.151.540.000	100%	2.936.277.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pelestrasian Sumber Daya Perikanan	Persentase tingkat kelestarian sumber daya perikanan	n/a		-			100%	17.150.000	100%	17.150.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Revitalisasi Penyuluh Perikanan	Persentase daya guna penyuluh perikanan	14%		-		-					Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Penurunan Jumlah kasus ilegal fishing	5%	5%		5%		100%	109.237.500	100%		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budi daya	5%	11.303,93 Ton	1.484.326.100	12.671,79 Ton%	4.801.523.400	100%	7.853.040.300	100%	14.138.889.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan tangkap	5%	17.557 Ton	167.042.000	19.536 Ton	19.379.495.100	100%	3.008.884.200	100%	22.555.421.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	41%	50,50%	201.539.500	56,89%	102.146.100	-	-	-	303.685.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	5%	5%	51.446.700	5%	43.692.000	100%	9.000.000	100%	104.138.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan per kapita pertahun	40,36 kg perkapita/thn		-	43,02 kg perkapita/thn		100%	15.280.000	100%	15.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Lingkungan Sosial	Meningkatnya prasarana usaha tani tembakau	n/a	3,75%	-	0%	-					Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya produksi perkebunan tembakau	200 ton	-	-	20%	329.226.500	100%	265.112.255	100%	594.338.755	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tujuan:											
5.5	Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri											
	Sasaran:											
5.5.1	Meningkatnya pembangunan berbasis industri, koperasi dan UMKM	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	-10,23	3,25		4		5,2		6,7		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	441 IKM	143.078.800	472 IKM	1.840.523.800	100%	150.339.380	100,00%	2.133.941.980	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan industri pangan	Persentase industri pangan terhadap industri pengolahan	38,83%		-	-	292.332.000	100%	92.000.000	100,00%	384.332.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	441 IKM	295.759.600	472 IKM	959.300.100	100%	289.444.750	100%	1.544.504.450	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial	11 centra	11 centra	-	12 centra	97.187.000	100%	1.400.000.000	100%	1.497.187.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang mendapat akses modal	51,78%	5,00%	49.500.000	5,00%	143.490.100	100%	32.571.000	100%	225.561.100	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,83%	95,00%	48.960.000	95,00%	152.509.000	100%	44.810.000	100%	246.279.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	27,92%	31,00%	33.117.000	69,00%	321.056.000	100%	17.282.000	100%	371.455.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase wirausaha yang memahami wawasan dan etika berbisnis dan manajemen yang profesional	10,00%	9,00%				100%	201.310.000	100%	201.310.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Data Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan data koperasi dan UKM	n/a	100,00%	-		-		-		-	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan koperasi dan UKM	n/a						-		-	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Tujuan:											
5.6	Meningkatkan Kapasitas Fiskal											
	Sasaran:											
5.6.1	Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD	Kontribusi PAD terhadap APBD										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar kondisi baik	62,00%	78,00%	199.671.000	83,90%	3.271.218.600	100%	518.995.150	100%	3.989.884.750	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja sampai dengan 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53 perusahaan	78 perusahaan	45.975.000	99 perusahaan	154.996.000	-		-	200.971.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Meningkatnya jumlah Muzakki			3.706.656.000		3.914.176.000		3.992.459.520		11.613.291.520	Baitul Mal

Tabel 6.3b
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)										
1	Misi 1 :Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA									
	Tujuan :									
1.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	40,40	51		55		55		
	Sasaran :									
1.1.1	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	CC	B		B		B		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	100%	100%	1.476.509.600	100%	2.418.182.920	100%	3.894.692.520	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	282.256.200	100%	406.256.200	100%	688.512.400	Inspektorat
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	1.041.726.700	100%	1.180.000.000	100%	2.221.726.700	Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program RPJMD	100%	100%	1.307.625.700	100%	709.000.000	100%	2.016.625.700	Bappeda
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	100%	100%	439.111.600	100%	450.000.000	100%	889.111.600	Bappeda
1.1.2	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	742.430.016.490	WTP	730.714.042.547	WTP	1.473.144.059.037	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Solvabilitas jangka panjang	615,95 kali	646,76 kali	1.195.847.700	679,09 kali	1.311.640.085	679,09 kali	2.507.487.785	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,96%	11,10%	1.510.906.600	9,30%	1.829.451.930	9,30%	3.340.358.530	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.1.3	Meningkatkan pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat	70,07	77,5		80		80		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.648.289.330	100%	2.812.988.419	100%	5.461.277.749	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.332.942.460	100%	1.134.077.417	100%	2.467.019.877	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	518.094.930.816	100%	524.736.637.953	100%	1.042.831.568.769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	145.687.260.688	100%	140.805.770.589	100%	286.493.031.277	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	183.176.363.591	100%	130.954.494.955	100%	314.130.858.546	Rumah Sakit Umum Cut Meutia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	15.009.941.649	100%	16.644.179.306	100%	31.654.120.955	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.238.533.646	100%	4.308.905.320	100%	6.547.438.966	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4.470.811.046	100%	4.580.030.024	100%	9.050.841.070	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	11.651.188.565	100%	11.310.710.654	100%	22.961.899.219	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	4.670.386.026	100%	4.600.440.617	100%	9.434.180.026	Dinas Sosial dan P3A
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.829.284.501	100%	2.529.450.021	100%	5.358.734.522	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3.749.712.657	100%	3.627.387.979	100%	7.377.100.636	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3.543.605.304	100%	3.605.605.304	100%	7.149.210.608	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	4.202.343.619	100%	4.277.343.619	100%	8.479.687.238	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3.911.292.037	100%	3.947.201.829	100%	7.858.493.866	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	5.903.732.300	100%	5.834.399.302	100%	11.738.131.602	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.672.098.876	100%	2.835.430.061	100%	5.507.528.937	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1.103.952.652	100%	1.138.225.393	100%	2.242.178.045	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.664.139.043	100%	3.479.173.397	100%	6.143.312.440	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4.204.819.211	100%	4.474.523.389	100%	8.679.342.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	7.997.025.433	100%	7.971.384.213	100%	15.968.409.646	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	21.052.084.285	100%	20.285.974.915	100%	41.338.059.200	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	6.769.245.747	100%	6.328.438.553	100%	14.215.415.747	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	32.267.198.867	100%	31.943.803.122	100%	64.211.001.989	SETDAKAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	34.443.647.941	100%	39.638.124.000	100%	74.081.771.941	Sekretariat DPRK
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5.950.696.677	100%	5.820.698.145	100%	11.771.394.822	Bappeda
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	12.020.431.515	100%	11.232.919.327	100%	23.253.350.842	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	7.725.324.281	100%	7.834.125.916	100%	15.559.450.197	BKPSDM
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5.816.597.978	100%	6.544.276.107	100%	12.360.874.085	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.770.049.766	100%	1.906.469.083	100%	3.676.518.849	Kecamatan Langkahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.609.639.184	100%	2.598.585.237	100%	5.208.224.421	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.070.921.383	100%	2.266.296.875	100%	4.337.218.258	Kecamatan Seunuddon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3.385.069.553	100%	3.513.249.819	100%	6.898.319.372	Kecamatan Baktiya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.645.281.646	100%	1.676.137.778	100%	3.321.419.424	Kecamatan Cot Girek
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.035.247.385	100%	2.227.803.483	100%	4.263.050.868	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.337.367.160	100%	1.466.756.525	100%	2.804.123.685	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.016.296.735	100%	2.120.328.944	100%	4.136.625.679	Kecamatan Matangkuli
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.639.362.679	100%	2.679.126.038	100%	5.318.488.717	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.432.102.524	100%	1.481.569.272	100%	2.913.671.796	Kecamatan Nibong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.480.530.657	100%	1.600.219.617	100%	3.080.750.274	Kecamatan Lapang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.752.482.979	100%	1.860.444.831	100%	3.612.927.810	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.840.572.822	100%	2.060.722.104	100%	3.901.294.926	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.218.036.038	100%	2.177.212.909	100%	4.395.248.947	Kecamatan Samudera

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.984.717.468	100%	1.934.946.386	100%	3.919.663.854	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.449.361.919	100%	2.599.104.127	100%	5.048.466.046	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.410.628.072	100%	1.834.791.020	100%	3.245.419.092	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.640.276.628	100%	1.386.356.520	100%	3.026.633.148	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.361.731.156	100%	2.130.674.981	100%	4.492.406.137	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.617.431.832	100%	2.814.031.838	100%	5.431.463.670	Kecamatan Dewantara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.296.245.280	100%	1.429.416.521	100%	2.725.661.801	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.761.314.538	100%	1.882.503.713	100%	3.643.818.251	Kecamatan Nisam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.299.183.017	100%	1.495.295.759	100%	2.794.478.776	Kecamatan Banda Baro
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.368.918.977	100%	2.442.908.799	100%	4.811.827.776	Kecamatan Muara Batu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.218.479.071	100%	2.198.616.388	100%	4.417.095.459	Kecamatan Sawang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.868.189.433	100%	2.781.623.796	100%	5.649.813.229	Kesbangpol
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.700.537.960	100%	3.080.646.026	100%	5.781.183.986	Dinas Syariat Islam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1.256.633.667	100%	1.313.364.421	100%	2.569.998.088	MPU

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1.371.012.211	100%	1.389.355.596	100%	2.760.367.807	Baitul Mal
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70%	70%	71.444.750	70%	276.947.500	70%	348.392.250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	70%	70%	-	70%	12.375.000	70%	12.375.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	95%	4.223.900	98%	8.397.000	98%	12.620.900	Kecamatan Langkahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	70%	83%	5.916.800	91%	5.916.800	91%	11.833.600	Kecamatan Langkahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	7%	45.000.000	5%	45.000.000	5%	90.000.000	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	71%	75%	37.000.000	80%	37.000.000	80%	74.000.000	Kecamatan Langkahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	43%	48%	15.343.600	83%	15.795.000	83%	31.138.600	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%	5.040.800	85%	5.700.000	85%	10.740.800	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	67%	70%	6.634.900	75%	7.000.000	75%	13.634.900	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	45.000.000	55%	50.000.000	55%	95.000.000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	67%	85%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	57%	70%	22.515.400	67%	26.000.000	67%	48.515.400	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	3.786.100	85%	2.600.000	85%	6.386.100	Kecamatan Seunuddon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	70%	73%	3.502.300	77%	4.000.000	77%	7.502.300	Kecamatan Seunuddon

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	65%	70%	45.000.000	50%	45.000.000	50%	90.000.000	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	60%	80%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Seunuddon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	75%	16.592.400	69%	15.000.000	69%	31.592.400	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	8.379.000	90%	8.795.000	90%	17.174.000	Kecamatan Baktiya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	61,55%	72,67%	4.924.600	72,67%	4.924.600	72,67%	9.849.200	Kecamatan Baktiya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	35%	36,33%	35.000.000	36,33%	35.000.000	36,33%	70.000.000	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	62%	37.000.000	65%	37.000.000	65%	74.000.000	Kecamatan Baktiya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	81%	98%	22.879.800	100%	34.729.800	100%	57.609.600	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	2.165.300	85%	8.024.785	85%	10.190.085	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	70%	73%	2.946.200	77%	5.100.000	77%	8.046.200	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	65%	70%	40.000.000	50%	72.000.000	50%	112.000.000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	60%	80%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	75%	18.650.000	69%	38.555.301	69%	57.205.301	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	3.000.000	85%	10.514.351	85%	13.514.351	Kecamatan Lhoksukon

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	69%	70%	5.000.000	80%	7.500.000	80%	12.500.000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	50.000.000	56%	90.000.000	56%	140.000.000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	67%	85%	37.000.000	89%	15.000.000	89%	52.000.000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	59%	70%	25.285.100	60%	45.055.301	60%	70.340.401	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	5.687.500	83%	7.000.000	83%	12.687.500	Kecamatan Cot Girek
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	78%	80%	5.040.500	81%	4.500.000	81%	9.540.500	Kecamatan Cot Girek
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	82%	84%	50.000.000	86%	70.000.000	86%	120.000.000	Kecamatan Cot Girek
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	75,00%	78%	37.000.000	79%	37.000.000	79%	74.000.000	Kecamatan Cot Girek
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	80%	82%	18.841.300	85%	33.500.000	85%	52.341.300	Kecamatan Cot Girek
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	4.093.500	95%	3.500.000	95%	7.593.500	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	2.028.400	84%	4.500.000	84%	6.528.400	Kecamatan Paya Bakong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	45.000.000	5%	55.000.000	5%	100.000.000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	76%	37.000.000	82%	37.000.000	82%	74.000.000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	18.497.700	84,33%	20.600.000	84,33%	39.097.700	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	11.518.800	90%	12.000.000	90%	23.518.800	Kecamatan Pirak Timu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	61,55%	72,67%	8.900.700	72,67%	8.000.000	72,67%	16.900.700	Kecamatan Pirak Timu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	35%	36,33%	35.000.000	36,33%	45.000.000	36,33%	80.000.000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	62%	47.000.000	65%	52.000.000	65%	99.000.000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	81%	98%	28.696.500	100%	40.500.000	100%	69.196.500	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	73%	79%	4.906.700	84%	4.906.700	84%	9.813.400	Kecamatan Matangkuli
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	60%	55%	5.349.700	78%	5.349.700	77%	10.699.400	Kecamatan Matangkuli
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	65%	70%	50.000.000	55%	50.000.000	55%	100.000.000	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	65%	80%	37.000.000	84%	65.000.000	83%	102.000.000	Kecamatan Matangkuli
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	80%	21.094.800	100%	21.094.800	72%	42.189.600	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	80%	5.219.300	83%	5.219.300	83%	10.438.600	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	70%	156.095.300	76%	7.600.000	76%	163.695.300	Kecamatan Tanah Luas
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	72.000.000	45%	82.000.000	45%	154.000.000	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	65%	85%	10.000.000	86%	10.000.000	86%	20.000.000	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	54%	70%	28.309.200	58%	28.309.200	58%	56.618.400	Kecamatan Tanah Luas

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	6.067.100	87%	6.067.100	87%	12.134.200	Kecamatan Nibong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	4.889.400	73%	4.889.400	73%	9.778.800	Kecamatan Nibong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	50.000.000	4%	50.000.000	4%	100.000.000	Kecamatan Nibong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	50.000.000	79%	50.000.000	79%	100.000.000	Kecamatan Nibong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	34,33%	27.913.000	82,33%	27.913.000	82,33%	55.826.000	Kecamatan Nibong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	65%	70%	7.781.500	80%	7.781.500	80%	15.563.000	Kecamatan Lapang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	65%	75%	8.391.400	77%	16.390.000	77%	24.781.400	Kecamatan Lapang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	67%	72%	35.000.000	60%	35.000.000	60%	70.000.000	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	60%	75%	35.000.000	55%	35.000.000	55%	70.000.000	Kecamatan Lapang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	58%	60%	30.570.000	62%	30.570.000	62%	61.140.000	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	4.792.000	85%	10.514.351	85%	15.306.351	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	65%	70%	3.679.800	80%	7.500.000	80%	11.179.800	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	68%	75%	45.000.000	66%	72.000.000	66%	117.000.000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	65%	80%	37.000.000	85%	10.000.000	85%	47.000.000	Kecamatan Tanah Pasir

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	60%	70%	20.694.400	60%	50.515.000	60%	71.209.400	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	90%	6.504.600	89%	8.000.000	89%	14.504.600	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	76%	5.660.000	79%	6.500.000	79%	12.160.000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	40.000.000	52%	50.000.000	52%	90.000.000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	68%	88%	37.000.000	88%	37.000.000	88%	74.000.000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	90%	79%	20.717.500	69%	22.700.000	69%	43.417.500	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	89%	9.695.500	97%	9.695.500	97%	19.391.000	Kecamatan Samudera
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	64%	7.595.000	85%	15.194.250	85%	22.789.250	Kecamatan Samudera
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	5%	45.000.000	6%	55.000.000	6%	100.000.000	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	77%	37.000.000	83,00%	37.000.000	83,00%	74.000.000	Kecamatan Samudera
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	34,33%	22.316.750	84,35%	24.290.271	84,35%	46.607.021	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77%	89%	2.950.000	89%	12.000.000	89%	14.950.000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	75%	3.931.500	78%	5.000.000	78%	8.931.500	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	40.000.000	50%	50.000.000	50%	90.000.000	Kecamatan Meurah Mulia

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	68%	88%	37.000.000	88%	37.000.000	88%	74.000.000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	85%	79%	19.069.000	68%	31.000.000	68%	50.069.000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	89%	2.006.900	97%	22.034.047	97%	24.040.947	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	65%	1.638.700	86%	9.185.900	86%	10.824.600	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	6%	40.000.000	7%	70.000.000	7%	110.000.000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	77%	37.000.000	84%	37.000.000	84%	74.000.000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	34,33%	15.480.000	84,35%	18.000.000	84,35%	33.480.000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	4.551.000	95%	5.500.000	95%	10.051.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	1.760.000	83%	4.500.000	83%	6.260.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	27.500.000	4%	55.000.000	4%	82.500.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	37.000.000	80%	37.000.000	80%	74.000.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	16.756.000	83,33%	20.700.000	83,33%	37.456.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%	6.116.300	85%	8.800.000	85%	14.916.300	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	32%	53%	3.660.800	83%	9.000.000	83%	12.660.800	Kecamatan Simpang Keuramat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	7%	4%	35.000.000	4%	55.000.000	4%	90.000.000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	70%	75%	47.000.000	80%	47.000.000	80%	94.000.000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	15%	30%	19.230.200	80%	26.755.487	80%	45.985.687	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	5.549.800	90%	25.900.000	90%	31.449.800	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	58,55%	72,67%	2.218.900	72,67%	12.373.506	72,67%	14.592.406	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	35%	36,33%	40.000.000	36,33%	75.000.000	36,33%	115.000.000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	62%	40.000.000	65%	45.000.000	65%	85.000.000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	81%	98%	17.994.600	100%	23.950.000	100%	41.944.600	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00%	88%	10.000.000	95%	22.500.000	95%	32.500.000	Kecamatan Dewantara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	5.000.000	83%	5.000.000	83%	10.000.000	Kecamatan Dewantara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	40.000.000	4%	40.000.000	4%	80.000.000	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	70%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Dewantara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	22.423.100	83.33%	22.423.100	83,33%	44.846.200	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00%	88%	4.181.800	95%	6.500.000	95%	10.681.800	Kecamatan Nisam Antara

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	12.544.700	83%	21.000.000	83%	33.544.700	Kecamatan Nisam Antara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	30.000.000	4%	55.000.000	4%	85.000.000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	78%	47.000.000	80%	52.000.000	80%	99.000.000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	17.864.300	83,33%	33.500.000	83,33%	51.364.300	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00%	88%	4.181.800	95%	6.500.000	95%	10.681.800	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	12.544.700	83%	21.000.000	83%	33.544.700	Kecamatan Nisam
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	30.000.000	4%	55.000.000	4%	85.000.000	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	78%	47.000.000	80%	52.000.000	80%	99.000.000	Kecamatan Nisam
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	17.864.300	83,33%	33.500.000	83,33%	51.364.300	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00%	85%	3.038.000	90%	13.753.480	90%	16.791.480	Kecamatan Banda Baro
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	55,56%	66,67%	4.496.500	66,67%	4.500.000	66,67%	8.996.500	Kecamatan Banda Baro
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	25%	33,33%	40.000.000	33,33%	75.000.000	33,33%	115.000.000	Kecamatan Banda Baro
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	60%	37.000.000	65%	40.000.000	65%	77.000.000	Kecamatan Banda Baro
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	78%	100%	15.822.200	100%	17.186.600	100%	33.008.800	Kecamatan Banda Baro
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	4.227.700	95%	4.700.000	95%	8.927.700	Kecamatan Muara Batu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	3.905.500	83%	5.659.800	83%	9.565.300	Kecamatan Muara Batu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	35.000.000	4%	67.000.000	4%	102.000.000	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	37.000.000	80%	37.000.000	80%	74.000.000	Kecamatan Muara Batu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	18.775.700	83,33%	20.440.000	83,33%	39.215.700	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	80%	6.547.300	84%	9.547.300	84%	16.094.600	Kecamatan Sawang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	40%	60%	8.823.000	80%	4.625.000	80%	13.448.000	Kecamatan Sawang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	6%	3%	35.000.000	3%	35.000.000	3%	70.000.000	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	47.000.000	80%	47.000.000	80%	94.000.000	Kecamatan Sawang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	26.337.000	83,33%	32.337.000	83,33%	58.674.000	Kecamatan Sawang
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			2.357.862.575	90%	2.600.725.800	90%	4.958.588.375	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	70%	70%	2.209.408.100	80%	1.998.000.000	80%	4.207.408.100	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber-KTP elektronik	96%	100%	1.132.155.500	100%	1.149.743.100	100%	2.281.898.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran	85%	92%	307.111.800	95%	349.942.498	95%	657.054.298	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12%	21%	697.771.700	36%	758.853.402	36%	1.456.625.102	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	2,34%	2,40%	2.192.208.600	2,46%	704.747.500	7,20%	2.896.956.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Retribusi Perizinan	-2,71%	0,63%	153.390.500	0,83%	197.581.200	0,83%	350.971.700	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53 investor	62 investor	176.345.800	65 investor	326.122.000	75 investor	502.467.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Data dan Informasi	100%	100%	198.905.900	100%	25.100.000	100%	224.005.900	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12%	50%	1.545.446.000		1.125.450.700	50%	2.670.896.700	SETDAKAB
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78%	78%	469.219.600	83%	205.942.915	83%	675.162.515	SETDAKAB
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh kominfo	67%	67%	47.885.100	67%	26.754.200	67%	74.639.300	SETDAKAB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	2.283.734.540	100%	2.003.930.568	100%	4.287.665.108	SETDAKAB
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1.235.821.350	100%	1.123.821.350	100%	2.359.642.700	SETDAKAB
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	100%	8.197.918.000	100%	15.361.876.000	100%	23.559.794.000	Sekretariat DPRK
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan kepegawaian	100%	100%	1.935.426.600	100%	1.957.893.348	100%	3.893.319.948	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	66,09%	68%	839.880.500	70%	995.000.000	70%	1.834.880.500	BKPSDM
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase koordinasi Pengadaan Tanah	100%	100%	100.604.800	100%	120.000.000	100%	220.604.800	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	100%		-	100%	270.000.000	100%	270.000.000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase tanah Pemda yang terinventarisir dan bersertifikat	n/a	50%	257.580.000	75%	371.500.000	75%	629.080.000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	100%	50%	100.000.000	75%	110.929.000	63%	210.929.000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian sengketa tanah yang ditangani pertahun	100%	100%	100.000.000	100%	113.500.280	100%	213.500.280	Dinas Pertanahan Kabupaten
1.1.4	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%		100%		100%		
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati	100%	100%	1.127.351.100	100%	1.149.150.700	100%	2.276.501.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan/konflik sosial	100%	100%	207.696.200	100%	218.081.010	100%	425.777.210	Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi gangguan/konflik ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	170.376.800	100%	178.895.640	100%	349.272.440	Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	1.138.264.200	100%	1.195.177.410	100%	2.333.441.610	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	n/a	40%	252.089.200	45%	264.693.660	85%	516.782.860	Kesbangpol
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase potensi gangguan/konflik berlatar ideologi	100%	100%	58.337.100	100%	61.253.955	100%	119.591.055	Kesbangpol
	Tujuan :									
1,2	Meningkatkan pengamalan syariat Islam oleh masyarakat	Indeks Pembangunan Syariat Islam	n/a	60		65		65		
	Sasaran :									
1.2.1	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Persentase penurunan kasus pelanggaran syari'at Islam	17,65%	15%		14%		14%		
	Program Syari'at Islam	Persentase Tingkat Pemahaman, Pengamalan dan Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam	40%	70%	15.578.779.064	80%	17.710.506.909	80%	33.289.285.973	Dinas Syariat Islam
	Program Permusyawaratan Ulama	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%	75%	2.669.029.200	80%	2.793.869.200	80%	5.462.898.400	MPU

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam									
	Tujuan :									
2.1	Meningkatkan Mutu pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	69,33	70,89%		71,79%		71,79%		
	Sasaran :									
2.1.1	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	8,15 tahun	10,5 tahun		11 tahun		11 tahun		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,70 tahun	14,71 tahun	168.458.277.672	14,72 tahun	173.782.673.728	14,72 tahun	342.240.951.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	40,00%	41,00%	2.315.914.171	45,00%	1.636.177.000	45,00%	3.952.091.171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan	100%	100%		100%		100%		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	40,58%		2.315.914.171		1.636.177.000	60,00%	3.952.091.171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Tersedianya pelayanan MPD	100%	100%	2.035.897.100	100%	1.959.907.918	100%	3.995.805.018	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
2.1.3	Meningkatnya pendidikan berbasis Islami	Persentase dayah yang mandiri	n/a	30%		40%		40%		
	Program Pendidikan Dayah	Persentase dayah yang dibina	70%	70%	15.849.944.425	80%	18.206.787.265	100%	34.056.731.690	Dinas Pendidikan Dayah
2.1.4	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,22							
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	80%	80%	357.750.000	85%	1.120.510.000	83%	1.478.260.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan :									
2.2	Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	50,65	55,70		58,10		58,10		
	Sasaran									
2.2.1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15%	28%		30%		30%		
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	n/a		567.820.200		890.000.000		1.457.820.200	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100%	100%	30.831.700	100%	50.000.000	100%	80.831.700	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK aktif	100%	100%	407.031.800	100%	580.000.000	100%	987.031.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2.2	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	13,56%	14%		13%		13%		
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	26,49	24,97	1.242.219.502	22,86	479.855.000	22,86	1.722.074.502	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak			543.422.000		50.000.000		593.422.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani di instansi terkait kabupaten	100%	100%	56.525.000	100%	237.240.000	100%	293.765.000	Dinas Sosial dan P3A
	Tujuan :									
2,3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	40%	55%		70%		70%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran :									
2.3.1	Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase atlit dan pelatih berprestasi	65%	70%		80%		80%		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan	Persentase pembibitan atlit unggulan	60%	75%	7.273.127.000	80%	2.887.500.000	80%	10.160.627.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
2.3.2	Meningkatnya kemandirian pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15%	40%		60%		60%		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda pemula	n/a	3%	749.999.600	5%	250.000.000	5%	999.999.600	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	n/a	40%	250.000.000	60%	200.000.000	60%	450.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Tujuan :									
2,4	Menguatkan tatanan budaya dan adat istiadat									
	Sasaran :									
2.4.1	Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Persentase kekayaan dan keragaman budaya yang terkelola	40%	80%		85%		85%		
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Keragaman Budaya yang terkelola	40%	80%	158.198.300	85%	250.000.000	85%	408.198.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase kekayaan budaya yang terkelola	40%	80%	262.005.400	85%	370.000.000	85%	632.005.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase nilai budaya yang berkembang	100%	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase Gampong yang menerapkan administrasi peradilan adat	100%	100%	565.619.700	100%	825.210.200	100%	1.390.829.900	Sekretariat Majelis Adat Aceh
3	Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu									
	Tujuan :									
3.1	Meningkatkan Kesehatan masyarakat yang Bermutu	Indeks Pembangunan Manusia	69,33	70,89		71,79		71,79		
	Sasaran :									
3.1.1	Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,80 tahun	71,7 tahun		71,9 tahun		71,9 tahun		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,80 thn	71,7 thn	71.977.569.136	71,9 thn	113.265.512.900	71,9 thn	185.243.082.036	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	30,00%	50,00%	706.525.500	60,00%	704.945.143	60,00%	1.411.470.643	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	100,00%	100,00%	167.467.000	100,00%	167.467.000	100,00%	334.934.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS	45,00%	50,00%	686.657.900	60%	686.657.900	60%	1.373.315.800	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS)	83%	85%	13.758.734.902	85%	10.384.966.100	85%	24.143.701.002	Rumah Sakit Umum Cut Meutia

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	48,4%	50%	6.659.268.500	52,00%	6.655.131.000	52,00%	13.314.399.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	9,62%	12,79%	4.369.600.000	15,96%	4.419.600.000	15,96%	8.789.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan									
	Tujuan :									
4.1	Meningkatkan aksesibilitas Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah	Kategori kinerja infrastruktur dasar dan publik	Cukup	Baik		Baik		Baik		
	Sasaran :									
4.1.1	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (mantap)	42,09%	45,05%		50,00%		50,00%		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (mantap)	42,09%	45,05%	91.308.384.773	50,00%	89.057.575.749	50,00%	180.365.960.522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU	100%	100%	21.804.290.731	100%	5.482.356.971	100%	27.286.647.702	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tingkat Penyediaan PSU Yang Baik di Kab.Aceh Utara	100%	100%	29.917.260.831	100%	15.700.000.000	100%	45.617.260.831	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4.1.2	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	34,70%	53,80%		61,10%		61,10%		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	34,70%	40,00%	29.240.329.475	45,00%	13.832.794.127	45,00%	43.073.123.602	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.3	Meningkatnya kualitas aksebilitas air bersih terhadap masyarakat	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69,78%	72,03%		74,43%		74,43%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	69,78%	72,03%	8.266.301.500	74,43%	15.436.710.500	74,43%	23.703.012.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.4	Meningkatnya kualitas aksesibilitas sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	67,09%	70,43%		73,95%		73,95%		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Kondisi Baik	56,15%	68,15%	1.045.494.672	71,15%	1.045.494.672	69,65%	2.090.989.344	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67,09%	70,43%	2.379.032.000	73,95%	900.000.000	73,95%	3.279.032.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.5	Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,17%	88,25%		89,12%		89,12%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,17%	88,25%	4.503.113.613	89,12%	4.503.113.613	89,12%	9.006.227.226	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.6	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	24,24%	42,42%		42,42%		42,42%		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	24,24%	42,42%	13.842.208.744	42,42%	13.842.208.744	42,42%	27.684.417.488	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1.7	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	n/a	100%		100%		100%		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100%	100%	587.830.000	100%	1.146.656.671	100%	1.734.486.671	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.8	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan	90%	100%		100%		100%		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan	90%	100%	2.465.585.514	100%	1.773.545.514	100%	4.239.131.028	Dinas Perhubungan
	Tujuan:									
4,2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	73,88	77,28		80,68		80,68		
	Sasaran:									
4.2.1	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	73,88	77,28		80,68		80,68		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketersediaan Dokumen RPPLH Dan KLHS Kab.Aceh Utara	N/A	100%	396.417.300	100%	415.000.000	100%	811.417.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pengendalian/Pencegahan Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	50%	70%	110.000.000	75%	110.000.000	73%	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman kota yang tertata	93%	100%	324.996.356	100%	835.000.000	100%	1.159.996.356	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Pengawasan Yang Baik Terhadap Penerbitan Ijin Usaha Pemerintah	N/A	100%	27.359.200	100%	27.359.200	100%	54.718.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	N/A	100%	115.430.000	100%	135.430.000	100%	250.860.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terhadap lingkungan Hidup	N/A	100%	118.110.000	100%	142.310.000	100%	260.420.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah Yang Baik di kabupaten Aceh Utara	27%	32%	8.367.844.730	35%	7.342.643.895	34%	15.710.488.625	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	Misi V: Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan									

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan:									
5.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	0,97%	4,5%		5%		5%		
	Sasaran:									
5.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3,11%	4,5%		5%		5%		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5,00%	5,00%	3.776.011.675	5,00%	2.980.000.000	15,00%	6.756.011.675	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5,00%	5,00%	4.274.723.824	5,00%	6.550.460.000	15,00%	10.825.183.824	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Jumlah kasus ilegal fishing	5,00%	5,00%	111.624.200	5,00%	148.000.000	15,00%	259.624.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	41,43%	65,98%	133.877.100	74,80%	167.164.000	74,80%	301.041.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10,00%	23,00%	3.147.538.748	30,00%	3.297.489.000	30,00%	6.358.028.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Perkebunan Unggulan (sawit)	11.28 ton/ha	11.51 ton/ha	2.323.494.912	11,74 ton/ha	1.600.000.000	0,05	4.693.459.912	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Kasus Penyakit Ternak	n/a	5,00%	307.208.410	5,00%	865.000.000	25,00%	620.561.410	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kasus organisme pengganggu tanaman	n/a	5,00%	171.000.000	5,00%	568.600.000	10,00%	345.420.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyuluhan Pertanian	Populasi Ternak Besar	108.045 ekor	121000	33.632.600	125000	78.000.000	125000	67.937.600	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	350 Kg/kapita/tahun	350 Kg/kapita/tahun	999.984.000	350 Kg/kapita/tahun	1.100.000.000	350 Kg/kapita/tahun	2.099.984.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	350 Kg/kapita/tahun	350 Kg/kapita/tahun	909.824.968	350 Kg/kapita/tahun	361.762.600	350 Kg/kapita/tahun	1.271.587.568	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	350 Kg/kapita/tahun		-	350 Kg/kapita/tahun	63.318.620	350 Kg/kapita/tahun	63.318.620	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5,45	915.923.933	5,5	825.000.000	5,5	1.740.923.933	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi	388200 ton	419256	6.437.894.925	440218,8	10.021.000.000	5,5	16.458.894.925	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kasus organisme pengganggu tanaman			583.673.559		150.000.000	300 Ha	733.673.559	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang dibina	25,00%	50,00%	3.966.517.780	60,00%	3.543.999.660	60,00%	7.510.517.440	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi	100%	100%	127.180.000	100%	899.480.000	100%	1.026.660.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi	350 Meter	350 Meter	209.303.020	350 Meter	300.600.000	350 Meter	509.903.020	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	6,79%	6,00%		6,70%		6,70%		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Tingkat Pembangunan dan Pembinaan Industri	100%	100%	5.280.389.048	100%	1.185.000.000	100%	6.465.389.048	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,40%	96,85%	72.123.300	97,05%	75.123.300	97,05%	147.246.600	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
5.1.3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	-5,01%	3,50%		4,30%		4,30%		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6,83%	6,90%	66.295.400	6,70%	98.602.200		164.897.600	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	60%	60,25%	19.868.500	60,50%	20.868.500	60,50%	40.737.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan retribusi pasar	8%	10%	490.388.700	12%	1.746.695.840	12%	2.237.084.540	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	85,12%	85,12%	60.429.400	85,20%	89.429.400	85,20%	149.858.800	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	52,77%	54,40%	48.447.000	56,40%	75.447.000	56,40%	123.894.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
5.1.4	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	2,87%	3%		3%		3%		
	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	0,55%	0,55%	194.610.550	0,56%	213.626.450	0,56%	408.237.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tujuan:									
5.2	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	17,02%	16%		14,9%		14,9%		
	Sasaran:									
5.2.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	8,56%	7,5%		6,9%		6,9%		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai	20%	20%	1.489.787.700	20%	1.635.000.000	60%	3.124.787.700	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	20%	69.000.000	20%	69.000.000	60%	138.000.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%		-	100%	81.000.000	100%	81.000.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.2.2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	33,12 Jt	33,46 Jt		33,85 Jt		33,85 Jt		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	65%	209.784.000	70%	63.000.000	55%	423.764.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20%	40%	1.004.846.180	50%	1.090.000.000	50%	2.029.789.180	Dinas Sosial dan P3A
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial			7.529.276.800		2.910.000.000		15.209.138.800	Dinas Sosial dan P3A
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	390.809.700	100%	307.588.144	100%	789.435.700	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya daya tarik destinasi wisata	n/a	66,67%	138.531.500	75%	300.000.000	75%	438.531.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	12,58%	258.266.950	15%	150.372.840	15%	408.639.790	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	n/a	3,38%	46.317.600	4%	600.000.000	4%	646.317.600	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Baitul Mal	Persentase peningkatan ZIS	-0,28%	6,37%	17.439.225.952	41%	25.454.385.974	16%	42.893.611.926	Baitul Mal

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas memuat program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJM telah dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya program prioritas sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahunnya dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara.

Kerangka pendanaan merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBK Aceh Utara. Kerangka pendanaan dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas pada masing-masing urusan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program prioritas, capaian kinerja dan kerangka pendanaan menjadi pedoman bagi SKPK Aceh Utara untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan prioritas selama lima tahun mendatang. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 - 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1a
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020
1	**Kapasitas Riil**	**1,431,805,290,460.14**	**1,758,227,885,959.01**	**1,748,528,675,426.36**
2	**Belanja**	**2,250,884,305,483.06**	**2,636,894,390,444.98**	**2,518,460,034,046.00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1,568,711,338,732**	**1,648,318,805,637.00**	**1,682,715,309,026.00**
2.1.1	Belanja Pegawai	839,929,226,531.50	860,324,094,198.00	840,217,979,584.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	2,750,000,000.00	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	11,584,900,000.00	20,497,600,000.00	16,628,700,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10,486,083,500.00	11,489,764,000.00	20,530,911,460.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	703,550,458,700.00	752,996,547,436.00	796,489,071,291.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	410,670,000.00	10,800,003.00	6,848,646,691.00
2.2	**Belanja Langsung**	**682,172,966,751.56**	**988,575,584,808**	**835,744,725,020**
2.2.1	Belanja Pegawai	80,584,038,400.00	89,040,958,474	75,520,430,650.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	378,314,005,946.00	478,846,577,918	436,966,711,389.00
2.2.3	Belanja Modal	223,274,922,405.56	420,688,048,415.98	323,257,582,981.00

Tabel 7.1b
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	**Kapasitas Riil**	**1,866,683,177,794.92**	**1,689,893,733,981.16**
2	**Belanja**	**2,545,494,695,530.00**	**2,451,007,342,174.00**
2.1	**Belanja Operasi**	**1,526,449,891,059.00**	**1,452,315,361,208.16**
2.1.1	Belanja Pegawai	901,943,282,332.00	916,487,641,371.70
2.1.2	Belanja Bunga		
2.1.3	Belanja Subsidi		
2.1.4	Belanja Hibah	68,238,637,922.00	50,000,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27,792,959,032.00	30,000,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		
2.1.8	Belanja Barang dan Jasa	528,475,011,773.00	455,827,719,836.46
2.2	**Belanja Modal**	**280,385,149,081.00**	**250,000,000,000.00**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**7,788,245,477.00**	**10,000,000,000.00**
2.4	**Belanja Transfer**	**730,871,409,913.00**	**738,691,980,965.84**

Tabel 7.2a
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(15)	(16)	(17)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**452.460.648.552**		**437.914.068.511**		**512.480.472.987**		**1.402.855.190.050**	
1.1	**Pendidikan**				**73.206.393.000**		**150.715.491.066**		**205.995.382.251**		**429.917.266.317**	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	48,00%	45%	4.724.250.000	47%	7.480.215.687	100%	7.980.135.000	100%	20.184.600.687	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata APM SD dan SMP		72%	66.918.475.000	74,35%	135.400.578.114	100%	187.634.497.000	100%	389.953.550.114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf	95,39%	95%	27.000.000	96%	367.298.800	100%	560.400.000	100%	954.698.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	19,00%	39%	7.144.000	38%	6.140.209.965	100%	8.946.328.951	100%	15.093.682.916	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	100%	100%	1.529.524.000	67%	1.327.188.500	100%	874.021.300	100%	3.730.733.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	**Kesehatan**				**219.534.517.449**		**134.368.641.009**		**103.481.110.186**		**457.384.268.644**	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	87,00%	98%	68.839.862.000	98%	7.417.891.206	100%	47.652.726.638	100%	123.910.479.844	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang direhabilitasi	38%	56%	38.616.047.000	59%	1.442.780.991	100%	35.135.617.023	100%	75.194.445.014	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84%	84,00%	235.164.000	85,00%	558.925.000	100%	320.900.000	100%	1.114.989.000	Dinas Kesehatan

	Program peningkatan kesehatan anak balita dan Gizi	Angka Kematian Bayi	7/1000 KH	3/1000 KH	73.561.000	3/1000 KH	85.305.000	100%	325.882.850	100%	484.748.850	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi/penyuluhan kesehatan yang dilakukan	84,24	87%	1.510.200.000	89%	276.025.000	100%	97.402.500	100%	1.883.627.500	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	65	35.36%	187.330.339	37%	277.504.000	100%	167.339.000	100%	632.173.339	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani	100	100%	-	100%	-	100%	1.508.903.682	100%	1.508.903.682	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Kasus PTM yang tertangani	100	100%	528.344.000	100%	626.916.000	100%	289.082.000	100%	1.444.342.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Imunisasi dan pencegahan penyakit	Persentase kegiatan Imunisasi	70	70%	341.909.000	55%	445.466.000	100%	276.689.550	100%	1.064.064.550	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Persentase Alkes yang memadai di faskes	n/a	15%	-	18%	420.831.460	100%	231.901.500	100%	652.732.960	Dinas Kesehatan
	Program Pembangunan Sarana Prasarana kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	10	50%	1.983.969.000	61%	1.579.357.000	100%	3.184.247.000	100%	6.747.573.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Puskesmas yang di Akreditasi	n/a		-		-	0%	-	0%	-	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial							100%	265.112.255	100%	265.112.255	Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS) penduduk miskin	83%	83%	166.200.000	84%	178.840.000	100%	178.880.000	100%	523.920.000	RSUCM
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan Fasilitas yang terstandar sesuai dengan tipe rumah sakit	75%	90%	3.745.412.110	90%	6.736.735.513	100%	13.846.426.188	100%	24.328.573.811	RSUCM

	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	85%	85,29%	103.306.519.000	86%	114.322.063.839	0%	-	0%	217.628.582.839	RSUCM
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	80%	92,00%	-	101%	-	0%	-	0%	-	RSUCM
	Program Peningkatan Sumber daya kesehatan	Cakupan Tenaga terampil sesuai kompetensi di bidangnya	39%	12%	-	14%	-	0%	-	0%	-	RSUCM
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase KLB yang tertangani	0	0%	-	0%	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	RSUCM
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kondisi baik	0%	0%	-	0%	-	100%	267.900.000	100%	267.900.000	RSUCM
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			35,586%	**64.983.115.103**	74,536%	**87.286.782.534**	70,143%	**149.797.188.262**	60,088%	**302.067.085.899**	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)	100,00%	0,00%	-	100,00%	38.049.736.196	66,38%	47.413.868.770	55,46%	85.463.604.966	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	47,70%	99,99%	38.648.561.400	99,99%	75.321.882	94,26%	29.232.193.000	98,08%	67.956.076.282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	70,00%	100,00%	169.144.700	100,00%	536.643.500	100,00%	269.212.000	100,00%	975.000.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase perkembangan jaringan pengairan	34,70%	34,70%	11.084.657.003	44,30%	12.163.558.633	48,50%	20.293.347.400	42,50%	43.541.563.036	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pemanfaatan sumber air alami	2,00%	0,00%	-	2,00%	900.649.000	2,00%	-	1,33%	900.649.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengurangan area genangan banjir	3,00%	0,00%	-	100,00%	3.036.882.100	100,00%	3.097.619.742	66,67%	6.134.501.842	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	n/a	0	-	100%	765.388.400	100%	995.228.700	66,67%	1.760.617.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Dokumen tata ruang	n/a	50%	13.850.000	50%	97.253.100	50%	55.124.209	50%	166.227.309	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Setdakab
	PUPR		n/a	100%	13.850.000	100%	97.253.100	0,00%	-		111.103.100	
	SETDAKAB				-		-	100,00%	55.124.209	100%	55.124.209	SETDAKAB
	Program Survey Investigasi dan Pemutakhiran data base	Persentase jalan,jembatan dan bangunan air yang diinspeksi dan disurvey	100%	0%	-	100%	396.235.500	97,34%	373.358.000	65,78%	769.593.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase Tingkat Ketersediaan Dokumen	100%	0%	-	100%	6.475.587.223	99,57%	6.904.624.391	66,52%	13.380.211.614	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	100%	0%	-	100%	816.321.000	100,00%	205.533.000	66,67%	1.021.854.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	56,15%	100,00%	58.329.000	100,00%	2.363.079.000	100,00%	1.878.329.500	100,00%	4.299.737.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase gampong dengan infrastruktur baik	n/a	66,00%	4.136.363.000	66,00%	3.215.820.000	100,00%	22.519.028.600	77,33%	29.871.211.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Persentase penduduk berakses air minum	60,70%	100,00%	10.872.210.000	100,00%	18.394.307.000	100,00%	16.559.720.950	100,00%	45.826.237.950	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**87.812.742.000**		**54.853.426.000**		**44.179.565.650**		**186.845.733.650**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	34,00%	74.728.831.000	34,00%	19.107.993.000	99,98%	21.013.015.500	55,99%	114.849.839.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85,45%	85,46%	982.889.000	85,47%	2.343.340.000	99,98%	10.314.142.600	90,30%	13.640.371.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Sistim Informasi Keciptakaryaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi keciptakaryaan	61,25%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	28,93%	30,50%	194.120.000	32,00%	109.200.000	50,00%	114.110.000	37,50%	417.430.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan SETDAKAB
	SETDAKAB			0	-	0	-	100,00%	114.110.000	33,33%	114.110.000	SETDAKAB
	PRKP		57,85%	61,00%	194.120.000	64,00%	109.200.000	0,00%	-	41,67%		
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Luas areal Pemakaman terkelola	n/a	90,00%	48.634.000	90,00%	506.689.000	95,45%	49.278.000	91,82%	604.601.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Ketersediaan Dokumen	100,00%	0,00%	-	100,00%	779.547.000	100,00%	581.620.000	66,67%	1.361.167.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase tingkat pelayanan rehabilitasi dan rekontruksi	65,00%	0,00%	-	88,00%	368.200.000	100,00%	106.681.300	62,67%	474.881.300	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase tingkat pelayanan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	65,00%	65,00%	77.459.000	70,00%	216.846.000	100,00%	81.003.200	78,33%	375.308.200	BPBD
	Program Forum Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pengurangan resiko bencana	65,00%	65,00%	18.418.000	80,00%	135.970.000	30,00%	5.245.000	58,33%	159.633.000	BPBD

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	75,00%	75,00%	482.415.000	78,00%	2.357.514.000	100,00%	3.058.941.350	84,33%	5.898.870.350	BPBD
	Program Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Kebencanaan	waktu persiapan penanggulangan bencana	60 menit	60 menit	460.840.000	60 menit	762.690.000	60 menit	716.424.700	60 menit	1.939.954.700	BPBD
	Program Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persentase lampu jalan dalam kondisi baik	100%	100%	10.819.136.000	100%	28.165.437.000	100%	8.139.104.000	100,00%	47.123.677.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				**5.699.266.000**		**7.373.861.902**		**5.008.961.638**		**18.082.089.540**	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam penyelesaaian konflik	15,00%	0,00%	143.732.000	0,00%	451.520.000	100,00%	442.863.550	100%	1.038.115.550	Kesbangpol, Satpol PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Tingkat penurunan kasus penyalahgunaan narkotika pertahun	1,00%	0,00%	295.664.000	0,00%	173.430.400	100,00%	65.830.988	100%	534.925.388	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pembinaan parpol, OKP, Ormas, LSM dan WNA	100%	0%	40.162.000	0%	1.004.660.902	100,00%	134.173.050	100%	1.178.995.952	Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat penurunan kasus demonstrasi/kerusuhan yang berlatarbelakang ideologi per tahun	n/a	0%	-	75,00%	79.410.700	0,00%	-	0%	79.410.700	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Persentase yang memilih pada PEMILU	66,40%	0%	-	0,00%	173.886.400	0,00%	-	0%	173.886.400	Kesbangpol
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Qanun	100%	100%	2.822.255.000	100%	1.882.624.500	100%	2.209.401.000	100%	6.914.280.500	Satpol PP

	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	n/a	0,00%	-	100%	-	0%	-	0%	-	Satpol PP
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	100%	2.397.453.000	100%	3.608.329.000	100%	2.156.693.050	100,00%	8.162.475.050	BPBD
1.6	**Sosial**				**1.224.615.000**		**3.315.866.000**		**4.018.265.000**		**8.558.746.000**	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00%	54,00%	144.357.000	53,00%	1.948.693.000	100,00%	1.976.870.000	100%	4.069.920.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20,00%	19,00%	-	27,00%	94.269.000	100,00%	299.200.000	100%	393.469.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase Pembinaan Kelembagaan Sosial	35,00%	0,00%	524.270.000	0,00%	617.914.000	100,00%	397.760.000	100%	1.539.944.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Persentase penerima manfaat Program keluarga harapan	20,00%	45,00%	528.811.000	44,00%	332.938.000	100,00%	200.350.000	100%	1.062.099.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase panti asuhan/pati jompo yang dibina	30,00%	0,00%	-	40,00%	50.000.000	100,00%	270.000.000	100%	320.000.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Gepeng yang mendapat bantuan	30,00%	11,00%	27.177.000	15,00%	25.527.000	100,00%	665.285.000	100%	717.989.000	Dinas Sosial dan P3A

	Program Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	Meningkatnya persentase Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT	29,00%	0,00%	-	51,00%	246.525.000	100,00%	208.800.000	100%	455.325.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	37.740.000	100%	37.740.000	Dinas Sosial dan P3A
2.	**Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**37.031.240.379**		**46.750.047.549**		**40.238.664.439**		**124.019.952.367**	
2.1	**Tenaga Kerja**				**239.044.000**		**2.065.440.000**		**166.189.800**		**2.470.673.800**	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan	20%	-	88.347.000	-	1.814.550.000	100,00%	51.160.000	100%	1.954.057.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	-	136.747.000	97%	151.090.000	100,00%	115.029.800	100%	402.866.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	-	13.950.000	-	99.800.000	0%	-	0%	113.750.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**580.411.000**		**1.248.418.200**		**1.418.266.433**		**3.247.095.633**	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan	75,00%	0%	75.756.000	0%	198.938.000	100%	134.992.433	100%	409.686.433	Dinas Sosial dan P3A

	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100,00%	290.037.000	100,00%	471.843.000	100%	353.582.000	100%	1.115.462.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	75,00%	100,00%	44.512.000	100,00%	71.809.000	100%	84.692.000	100%	201.013.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15,00%	0%	170.106.000	0,00%	505.828.200	100%	845.000.000	100%	1.520.934.200	Dinas Sosial dan P3A
2.3	**Pangan**				**307.760.000**		**1.476.977.000**		**1.151.540.000**		**2.936.277.000**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%	307.760.000	100%	1.476.977.000	100,00%	1.151.540.000	100%	2.936.277.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.4	**Pertanahan**				**-**		**1.623.411.000**		**204.220.932**		**1.827.631.932**	
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase terselesaikannya persertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	90%	0%	-	99%	383.649.000	100%	113.974.660	66,33%	497.623.660	Dinas Pertanahan
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a	0%	-	0%	-	100%	41.884.700	33,33%	41.884.700	Dinas Pertanahan
	Program Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Persentase fasilitasi pengadaan tanah	n/a	0%	-	98%	99.703.000	0%	-	32,67%	99.703.000	Dinas Pertanahan
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	n/a	0%	-	96%	1.140.059.000	100%	31.761.372	65,33%	1.171.820.372	Dinas Pertanahan

	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	n/a	0%	-	0%	-	0%	16.600.200	0,00%	16.600.200	Dinas Pertanahan
2.5	**Lingkungan Hidup**		n/a	52%	**6.458.050.000**	71%	**10.506.969.000**	85%	**10.312.793.227**	69%	**27.277.812.227**	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	n/a	25%	131.520.000	60%	1.001.782.000	108%	268.881.227	64,33%	1.402.183.227	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	100%	78%	20.188.000	100%	77.440.000	31%	7.821.100	69,67%	105.449.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,49%	23,99%	6.228.481.000	27,00%	9.240.081.000	100,00%	8.727.817.100	50,33%	24.196.379.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Persentase taman kota yang tertata	100%	83%	77.861.000	95%	187.666.000	100%	1.308.273.800	92,67%	1.573.800.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya konservasi SDA	25%	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	25%	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.6	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				**1.129.813.000**		**2.466.854.000**		**1.811.349.300**		**5.408.016.300**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Pelayanan Kependudukan		99%	1.129.813.000	99%	2.466.854.000	100%	1.811.349.300	100%	5.408.016.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**9.731.517.000**		**1.653.958.725**		**924.069.000**		**12.309.544.725**	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah gampong yang berkembang	n/a	74 Gampong	9.243.070.000	74 Gampong	142.329.100	100%	104.633.000	100%	9.490.032.100	DPMP2KB

	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan gampong	100%	0%	-	100%	69.494.700	100%	12.128.000	100%	81.622.700	DPMP2KB
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase kelompok binaan PKK	56,34%	0,00%	312.311.000	0,00%	319.455.825	100%	292.759.500	100%	924.526.325	DPMP2KB
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BUMG yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Gampong (PAG)	n/a	0,00%	176.136.000	12,00%	891.475.100	100%	514.548.500	100%	1.582.159.600	DPMP2KB
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persetase aparatur gampong yang mengikuti diklat	n/a	0%	-	5%	231.204.000	0%	-	0%	231.204.000	DPMP2KB
2.8	**Pengendalian Penduduk dan**				**9.617.509.000**		**11.198.516.508**		**12.165.769.500**		**32.981.795.008**	
	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	68,72%	54%	9.617.509.000	54,00%	11.150.097.708	100%	12.139.114.500	100%	32.906.721.208	DPMP2KB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	n/a	0%	-	6,00%	48.418.800	0%	-	0%	48.418.800	DPMP2KB
	Program Persediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	Persentase Capaian Jumlah TK/RA	-	0%	-	0%	-	100%	26.655.000	100%	26.655.000	DPMP2KB
2.9	**Perhubungan**				**2.923.370.000**		**2.548.277.100**		**2.902.747.642**		**8.374.394.742**	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi prasarana	n/a		90.000.000		43.500.000		44.370.000		177.870.000	Dinas Perhubungan
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan angkutan darat	100%	100%	1.382.870.000	100%	1.299.615.410	100%	1.325.607.718	100%	4.008.093.128	Dinas Perhubungan
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah Kasus kecelakaan lalu lintas	n/a		300.500.000		-		303.505.000		604.005.000	Dinas Perhubungan

	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	51,45	160.000.000	51,75	225.525.000	52,05	230.035.500	52,6	615.560.500	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Tingkat Pelayanan Angkutan Udara	n/a		990.000.000		979.636.690		999.229.424		2.968.866.114	Dinas Perhubungan
2.10	**Komunikasi dan Informatika**				**2.210.649.000**		**2.343.004.300**		**2.501.864.479**		**7.055.517.779**	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penerima Akses	100%	0%	576.105.000	0%	656.104.000	100%	565.374.775	100%	1.797.583.775	SETDAKAB
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pelayanan Informasi	100%	0%	95.477.000	0%	296.130.700	100%	128.277.304	100%	519.885.004	SETDAKAB
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terciptanya kemitraan yang baik dalam penyebaran informasi	100%	0%	1.539.067.000	0%	1.390.769.600	100%	1.808.212.400	100%	4.738.049.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Sekretariat DPRK
	SETDAKAB				1.680.682.000		1.091.427.000		1.143.855.540			
	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				50.000.000		30.000.000					
	Sekretariat DPRK	Ketersediannya media informasi publik	100%	100%	331.549.600	100%	602.000.000	100%	614.040.000	100%	1.547.589.600	Sekretariat DPRK
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**131.577.000**		**617.055.100**		**295.973.000**		**1.044.605.100**	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang mendapat akses modal	51,78%	5,00%	49.500.000	5,00%	143.490.100	100,00%	32.571.000	100,00%	225.561.100	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,83%	95,00%	48.960.000	95,00%	152.509.000	100,00%	44.810.000	100,00%	246.279.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	27,92%	31,00%	33.117.000	69,00%	321.056.000	100,00%	17.282.000	100,00%	371.455.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM

	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentasewirausaha yang memahami wawasan dan etika berbisnis dan manajemen yang profesional	10,00%	9,00%				100,00%	201.310.000	100,00%	201.310.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Data Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan data koperasi dan UKM	n/a	100,00%	-		-		-		-	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi dan UKM	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan koperasi dan UKM	n/a						-		-	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
2.12	**Penanaman Modal**				**146.518.813**		**865.559.000**		**337.039.250**		**1.349.117.063**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	8,2 T	384 T	37.838.000	269 T	148.230.000	0%	-	-	186.068.000	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				255.000.000		149.330.000	100%	72.321.500	100,00%	476.651.500	Dinas Penanaman Modal
	SETDAKAB				-		-	100%	300.000.000	100%	300.000.000	SETDAKAB
	Program Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan tepat waktu	100%	-	84.673.000	-	514.177.000	100%	129.930.000	100%	728.780.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53 perusahaan	78 perusahaan	24.007.813	99 perusahaan	203.152.000	99 perusahaan	207.109.250	99 perusahaan	434.269.063	SETDAKAB, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Dinas Penanaman Modal						75.000.000		76.500.000		151.500.000	Dinas Penanaman Modal
	SETDAKAB				24.007.813		128.152.000	75%	130.609.250	75%	282.769.063	SETDAKAB
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**				**1.510.183.000**		**4.353.040.000**		**3.089.291.000**		**8.952.514.000**	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60,00%	0%	1.510.183.000	100%	1.761.734.000	100%	818.771.000	100%	4.090.688.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata

	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peran Pemuda dalam Pembangunan	15,00%	0%	-	100%	631.682.000	100%	607.950.000	100%	1.239.632.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	n/a	0%	-	0%	-	100%	18.725.000	100%	18.725.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	n/a	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	60,00%	0%	-	100%	1.959.624.000	100%	1.582.245.000	100%	3.541.869.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Atlis Berprestasi	25,00%	0%	-	0%	-	100%	61.600.000	100%	61.600.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
2.14	**Kebudayaan**				**1.106.940.063**		**1.132.709.585**		**1.843.771.000**		**4.083.420.648**	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival budaya	40%	51%	394.481.863	63%	803.789.480	100%	1.560.850.000	100%	2.759.121.343	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Keragaman Budaya yang terkelola	40%	0%	212.458.200	20%	233.120.000	100%	262.921.000	100%	708.499.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai Budaya yang berkembang	40%	0	500.000.000	51%	95.800.105	100%	20.000.000	100%	615.800.105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.15	**Perpustakaan**				**591.211.503**		**2.352.394.622**		**802.907.000**		**3.746.513.125**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	300 Orang	0,21%	591.211.503	0,21%	2.352.394.622	100%	746.090.000	100%	3.689.696.125	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Pelayanan Perpustakaan	Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	70%	0%	-	0%	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Program Pengembangan Sumber daya Aparatur Perpustakaan	Persentase aparatur perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	0%	-	0%	-	100%	46.817.000	100%	46.817.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16	**Kearsipan**				**346.687.000**		**297.463.409**		**310.872.876**		**955.023.285**	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	35.687.000	100%	68.551.100	100%	97.518.876	100%	201.756.976	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	50%	55%	155.500.000	60%	181.280.500	100%	120.000.000	100%	456.780.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	0%	-	0%	-	100%	45.579.000	100%	45.579.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelola arsip yang mengikuti pelatihan kearsipan	n/a	0%	155.500.000	50%	47.631.809	100%	47.775.000	100%	250.906.809	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Urusan Pilihan**				**6.984.641.200**		**52.059.895.172**		**32.762.187.139**		**91.697.486.011**	
3.1	**Pariwisata**				**267.652.000**		**545.721.000**		**949.416.448**		**1.762.789.448**	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	1,50%	267.652.000	1,60%	545.721.000	100%	137.171.448	100%	950.544.448	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	1,18%	-	1,68%	-	100%	312.245.000	100%	312.245.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Kemitraan dengan Dunia Usaha	n/a	0	-	0	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata

3.2	**Pertanian**				**2.666.729.200**		**17.484.404.072**		**14.240.742.006**		**34.391.875.278**	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5,28 ton/ha	545.470.000	-	869.075.500	100%	2.462.334.375	100%	3.876.879.875	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani yang dibina	25%		-	77%	10.264.500	0%	-	0%	10.264.500	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Nilai ekspor pertanian			103.485.000	100%	230.710.000	100%	30.574.000	100%	364.769.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	5,03 ton/ha	5%	501.669.500	5%	10.671.438.400	100%	2.636.389.062,5	100%	13.809.496.963	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah produksi padi	40.738,83 to	3.360 ton	339.375.000	3.400 ton	840.215.600	100%	2.168.212.830	100%	3.347.803.430	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10%	12%	11.665.000	15%	51.382.000	100%	38.953.750	100%	102.000.750	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Produktivitas perkebunan unggulan	n/a	5,28 ton	340.001.000	77,78%	1.794.645.000	100%	1.446.474.783	100%	3.581.120.783	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi perkebunan unggulan (kakao)	3.270 ton	3.382 ton	204.620.000	3.421 ton	1.539.171.100	100%	1.479.910.800	100%	3.223.701.900	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kestabilan harga daging di hari-hari besar	90%	95%	87.660.000	100%	182.480.200	100%	89.471.700	100%	359.611.900	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak besar	108.045 ekor	111.599 ekor	409.428.700	111.537 ekor	964.197.700	100%	1.288.541.510	100%	2.662.167.910	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan kasus penyakit ternak	n/a	5%	123.355.000	4,38%	1.597.572	100%	2.334.766.940	100%	2.459.719.512	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengembangan Lingkungan Sosial	Meningkatnya prasarana usaha tani tembakau	n/a	3,75%	-	0%	-					Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya produksi perkebunan tembakau	200 ton	-	-	20%	329.226.500	100%	265.112.255	100%	594.338.755	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.3	**Perdagangan**				**1.674.632.300**		**5.507.208.400**		**2.098.505.955**		**9.280.346.655**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	69,61 Rp (milyar)	62,46%	31.661.300	50,39%	50.161.000	100%	7.680.000	100%	89.502.300	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Inflasi	4%	3,51%	23.800.000	3,61%	784.300.800	100%	1.536.775.805	100%	2.344.876.605	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase sarana dan prasarana pasar kondisi baik	62,00%	78,00%	199.671.000	83,90%	3.271.218.600	100%	518.995.150	100%	3.989.884.750	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Tingkat Pelanggaran Terhadap Konsumen	n/a	30,00%	1.419.500.000	-	1.401.528.000	100%	35.055.000	100%	2.856.083.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
3.4	**Perindustrian**				**438.838.400**		**3.189.342.900**		**1.931.784.130**		**5.559.965.430**	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	441 IKM	143.078.800	472 IKM	1.840.523.800	100,00%	150.339.380	100,00%	2.133.941.980	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan industri pangan	Persentase industri pangan terhadap industri pengolahan	38,83%		-	-	292.332.000	100,00%	92.000.000	100,00%	384.332.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	4404 IKM	441 IKM	295.759.600	472 IKM	959.300.100	100%	289.444.750	100%	1.544.504.450	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial	11 centra	11 centra	-	12 centra	97.187.000	100%	1.400.000.000	100%	1.497.187.000	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
3.5	**Transmigrasi**				**32.435.000**		**1.006.362.200**		**2.529.146.600**		**3.567.943.800**	
	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi		96,10%	32.435.000	98,00%	1.006.362.200	100%	2.529.146.600	100%	3.567.943.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

3.6	**Kelautan dan Perikanan**				**1.904.354.300**		**24.326.856.600**		**11.012.592.000**		**37.134.565.400**	
	Program Pelestrasian Sumber Daya Perikanan	Persentase tingkat kelestarian sumber daya perikanan	n/a		-			100%	17.150.000	100%	17.150.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Revitalisasi Penyuluh Perikanan	Persentase daya guna penyuluh perikanan	14%		-		-	-		-		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Penurunan Jumlah kasus ilegal fishing	5%	5%		5%		100%	109.237.500	100%		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budi daya	5%	11.303,93 Ton	1.484.326.100	12.671,79 Ton%	4.801.523.400	100%	7.853.040.300	100%	14.138.889.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah produksi perikanan tangkap	5%	17.557 Ton	167.042.000	19.536 Ton	19.379.495.100	100%	3.008.884.200	100%	22.555.421.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	41,43%	50,50%	201.539.500	56,89%	102.146.100	-	-	-	303.685.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan	5%	5%	51.446.700	5%	43.692.000	100%	9.000.000	100%	104.138.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan per kapita pertahun	40,36 kg perkapita/thn		-	43,02 kg perkapita/th		100%	15.280.000	100%	15.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	**Fungsi Penunjang Urusan**				**49.998.088.895**		**71.472.441.024**		**79.870.632.292**		**201.341.162.211**	
4.1	**Perencanaan**				**3.719.602.745**		**3.510.859.300**		**3.859.209.188**		**11.089.671.233**	
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan dokumen data/informasi pembangunan daerah	50%	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	600.000.000	Bappeda

	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana OPD yang terlatih	n/a	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.314.691.695	100%	1.251.530.000	100%	1.376.683.000	100%	3.942.904.695	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	115.006.000	100%	204.250.000	100%	250.000.000	100%	569.256.000	Bappeda
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesesuaian program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	190.031.250	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	615.031.250	Bappeda
	Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian program bidang prasarana wilayah dan SDA dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	100%	100%	89.775.100	100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	392.775.100	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	5.698.500	100%	192.133.100	100%	960.670.338	100%	1.158.501.938	Semua PD yang membidangi sosial budaya
	PK							100%	171.250.000	100%	171.250.000	
	MPD							100%	14.291.000	100%	14.291.000	MPD
	DINKES							100%	172.577.500	100%	172.577.500	
	RSUCM							100%	6.187.500	100%	6.187.500	
	KESBANGPOL							100%	23.500.000	100%	23.500.000	KESBANGPOL
	SATPOLPP							100%	10.556.250	100%	10.556.250	
	DINSOS							100%	33.850.000	100%	33.850.000	
	CAPIL							100%	-	100%	-	

	DPMP2KB							100%	29.283.620	100%	29.283.620	
	DISPORAPAR							100%	7.699.600	100%	7.699.600	
	PUSTAKA DAN ARSIP							100%	17.600.000	100%	17.600.000	
	SETDAKAB							100%	329.982.500	100%	329.982.500	SETDAKAB
	Sekretariat DPRK	persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	100%	5.698.500	80%	192.133.100	100%	43.180.600	100%	241.012.200	Sekretariat DPRK
	DISDIKDAYAH							100%	45.311.768	100%	45.311.768	
	DSI							100%	11.400.000	100%	11.400.000	
	BAITUL MAL							100%	3.000.000	100%	3.000.000	Baitul Mal
	MPU							100%	17.200.000	100%	17.200.000	MPU
	MAA							100%	1.900.000	100%	1.900.000	MAA
	INSPEKTORAT							100%	7.600.000	100%	7.600.000	
	BKPSDM							100%	14.300.000	100%	14.300.000	BKPSDM
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	510.000.000	100%	579.340.000	100%	266.135.000	100%	1.355.475.000	Semua PD yang membidangi ekonomi
	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				50.000.000		30.000.000	100,00%	20.410.000	100,00%	100.410.000	
	DKP				130.000.000		161.890.000	100,00%	85.523.500	100,00%	377.413.500	
	Dinas Pertanian dan Pangan				100.000.000		147.300.000	100,00%	82.017.250	100,00%	329.317.250	
	Dinas Perkebunan. Peternakan dan Kesehatan Hewan				100.000.000		50.000.000	100,00%	32.899.250	100,00%	182.899.250	
	Ddinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM				100.000.000		181.150.000	100,00%	37.585.000	100,00%	318.735.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				30.000.000		9.000.000	100%	7.700.000	100%	46.700.000	
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	58%	1.294.400.200	100%	623.606.200	98%	137.720.850	85%	2.055.727.250	Semua PD yang membidangi prasarana wilayah dan SDA
	PUPR		100,00%	99,84%	593.301.200	100,00%	520.737.000	89,08%	58.498.500	96,31%	1.172.536.700	

	PRKP		100,00%	100,00%	638.640.000	100,00%	27.640.000	100,00%	20.150.400	100,00%	686.430.400	
	DLHK		100,00%	50,00%	15.659.000	100,00%	19.370.000	100,00%	25.516.200	83,33%	60.545.200	
	PERHUBUNGAN		100,00%	100,00%	46.800.000	100,00%	20.369.200	100,00%	3.402.500	100,00%	70.571.700	
	BPBD		100,00%	0,00%	-	100,00%	23.350.000	100,00%	19.775.000	66,67%	43.125.000	
	PERTANAHAN		100,00%	0,00%	-	100,00%	12.140.000	100,00%	10.378.250	66,67%	22.518.250	
4.2	**Keuangan**				**2.495.172.259**		**4.556.173.891**		**4.484.526.503**		**11.535.872.653**	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi laporan keuanngan	99%	0%	83.708.200	100%	239.722.375	100%	203.240.250	100%	526.670.825	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan	100%	0%	2.411.464.059	93,56%	4.316.451.516	100%	4.281.286.253	100%	11.009.201.828	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya aplikasi SIMPAT	n/a	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.3	**Kepegawaian**				**2.416.447.000**		**3.617.036.000**		**2.296.954.700**		**8.330.437.700**	
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15%	0%	-	100%	2.019.789.000	100%	84.250.000	100%	2.104.039.000	BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	81%	100%	2.416.447.000	92,02%	1.597.247.000	100%	2.212.704.700	100%	6.226.398.700	BKPSDM
4.4	**Penelitian dan Pengembangan**				**-**		**439.380.874**		**-**		**439.380.874**	
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	n/a	0%	-	100%	439.380.874	0%	-	0%	439.380.874	Bappeda

4.5	**Pengawasan**				**1.629.884.875**		**2.779.085.600**		**1.744.224.557**		**6.153.195.032**	
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	76%	86%	1.326.651.740	85%	1.833.528.125	100%	1.354.194.557	100%	4.514.374.422	Inspektorat
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	45,45%	51.100.000	100,00%	192.838.300	100%	31.300.000	100%	275.238.300	Inspektorat
	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Pemahaman terhadap SOP dan SPIP	-	100%	202.224.135	91,67%	567.658.865	100%	225.596.500	100%	995.479.500	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya Administrasi Pengendalian dan Program Kegiatan Pembangunan	100%	70,70%	49.909.000	98,92%	84.502.200	100%	67.875.000	100%	202.286.200	SETDAKAB
	Program Pengembangan Zona Integritas	Persentase SKPK yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani		0%	-	100,00%	100.558.110	100%	65.258.500	100%	165.816.610	Inspektorat
4.6	**Administrasi Pemerintahan**				**39.736.982.016**		**56.569.905.359**		**67.485.717.344**		**163.792.604.719**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	21.617.233.753	100%	24.748.333.690	100%	40.257.758.322	100%	86.623.325.765	Semua OPD
1	Sekretariat DPRK		100%	96,24%	7.566.311.044	115%	10.762.704.874	100%	7.153.375.602	100%	25.482.391.520	
2	Dinas pendidikan							100%	2.624.826.172	100%	2.624.826.172	
3	MPD							100%	177.269.974	100%	177.269.974	
4	Dinas Kesehatan							100%	4.105.517.557	100%	4.105.517.557	
5	RSUD Cut Meutia							100%	170.504.400	100%	170.504.400	

6	KESBANGPOL							100%	500.767.912	100%	500.767.912	
7	SATPOLPP							100%	631.995.100	100%	631.995.100	
8	DINSOS							100%	583.944.160	100%	583.944.160	
9	CAPIL							100%	345.028.531	100%	345.028.531	
10	DPMP2KB							100%	530.753.710	100%	530.753.710	
11	DISPORAPAR							100%	406.119.288	100%	406.119.288	
12	PUSTAKA DAN ARSIP							100%	527.775.800	100%	527.775.800	
13	SETDAKAB							100%	5.473.121.739	100%	5.473.121.739	
14	DISDIKDAYAH							100%	756.041.801	100%	756.041.801	
15	DSI							100%	601.034.960	100%	601.034.960	
16	BAITUL MAL							100%	309.864.800	100%	309.864.800	
17	MPU							100%	319.746.085	100%	319.746.085	
18	MAA							100%	248.714.400	100%	248.714.400	
19	INSPEKTORAT							100%	761.515.268	100%	761.515.268	
20	BKPSDM							100%	645.013.099	100%	645.013.099	
21	PUPR		100,00%	100,00%	773.121.229	99,28%	802.129.950	88,94%	780.148.421	96,07%	2.355.399.600	
22	PRKP		100,00%	100,00%	1.272.671.000	100,00%	1.268.507.000	99,81%	2.550.196.463	99,94%	5.091.374.463	
23	DLHK		100,00%	100,00%	663.426.214	100,00%	523.253.310	100,00%	517.038.565	100,00%	1.703.718.089	
24	PERHUBUNGAN		100,00%	100,00%	552.226.000	100,00%	571.188.000	100,00%	505.439.442	100,00%	1.628.853.442	
25	BPBD		100,00%	100,00%	867.246.620	100,00%	771.790.887	100,00%	714.934.611	100,00%	2.353.972.118	
26	BAPPEDA				1.042.525.646		1.172.527.669		1.200.989.702		3.416.043.017	
27	Dinas pertanahan		100,00%	100,00%	377.216.000	100,00%	463.192.000	98,60%	344.424.519	99,53%	1.184.832.519	
28	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				601.800.000		611.730.000	100,00%	387.972.000	100,00%	1.601.502.000	
29	DKP				788.580.000		825.850.000	100,00%	671.473.500	100,00%	2.285.903.500	
30	Dinas Pertanian dan Pangan				775.300.000		740.600.000	100,00%	698.293.022	100,00%	2.214.193.022	
31	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				678.260.000		708.120.000	100,00%	581.884.100	100,00%	1.968.264.100	
32	Ddinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM				761.160.000		683.770.000	100,00%	632.506.215	100,00%	2.077.436.215	
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah							100%	1.397.920.000	100%	1.397.920.000	
34	Kecamatan				4.897.390.000		4.842.970.000	100,00%	2.401.607.404	1	12.141.967.404	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70,00%	75,00%	4.928.773.850	80,00%	3.523.547.566	82,00%	5.994.105.313	87%	14.446.426.729	Semua OPD
1	Sekretariat DPRK			81,82%	647.565.850	80,00%	715.157.829	100%	295.831.160	100%	1.658.554.839	
2	Dinas Pendidikan							100%	200.000.000	100%	200.000.000	
3	MPD							100%	63.066.000	100%	63.066.000	
4	DINKES							100%	90.000.000	100%	90.000.000	
5	KESBANGPOL							100%	21.129.000	100%	21.129.000	
6	SATPOLPP							100%	74.550.000	100%	74.550.000	
7	DINSOS							100%	456.300.000	100%	456.300.000	
8	CAPIL							100%	107.927.100	100%	107.927.100	
9	DPMP2KB							100%	88.800.000	100%	88.800.000	
10	DISPORAPAR							100%	102.408.956	100%	102.408.956	
11	PUSTAKADAN ARSIP							100%	83.744.600	100%	83.744.600	
12	SETDAKAB							100%	887.700.000	100%	887.700.000	
13	DISDIKDAYAH							100%	273.965.500	100%	273.965.500	
14	DSI							100%	95.739.960	100%	95.739.960	
15	BAITUL MAL							100%	29.250.000	100%	29.250.000	
16	MPU							100%	50.025.000	100%	50.025.000	
17	MAA							100%	84.750.000	100%	84.750.000	
18	INSPEKTORAT							100%	232.420.220	100%	232.420.220	
19	BKPSDM							100%	267.666.000	100%	267.666.000	
20	PUPR			100,00%	268.215.000	100,00%	658.995	92,57%	385.180.000	97,52%	654.053.995	
21	PRKP			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
22	DLHK			100,00%	13.400.000	100,00%	291.709	100,00%	271.172.744	100,00%	284.864.453	
23	PERHUBUNGAN			100,00%	36.000.000	100,00%	40.290	100,00%	91.454.000	100,00%	127.494.290	
24	BPBD			100,00%	69.504.750	100,00%	75.816	100,00%	63.460.000	100,00%	133.040.566	
25	Dinas Pertanahan			100,00%	483.308.250	100,00%	312.927	100,00%	85.542.300	100,00%	569.163.477	
26	BAPPEDA				59.250.000		179.250.000		150.000.000		388.500.000	
27	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				350.000.000		92.810.000	100,00%	94.141.803	100,00%	536.951.803	
28	DKP				22.570.000		13.670.000	100,00%	147.150.000	100,00%	183.390.000	
29	Dinas Pertanian dan Pangan				181.000.000		139.350.000	100,00%	146.950.000	100,00%	467.300.000	
30	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				20.000.000		52.750.000	100,00%	56.017.000	100,00%	128.767.000	
31	Ddinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM				32.020.000		34.870.000	100,00%	188.933.470	100,00%	255.823.470	

32	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah							100%	107.500.000	100%	107.500.000	
33	RSUD Cut Meutia							100%	97.125.000	100%	97.125.000	
34	Kecamatan				2.745.940.000		2.294.310.000		604.205.500		5.644.455.500	
1	Sawang											
2	Muara Batu											
3	Nisam Antara											
4	Nisam											
5	Banda Baro											
6	Dewantara											
7	Simpang Keuramat											
8	Kuta Makmur											
9	Syamtalira Bayu											
10	Geureudong Pase											
11	Samudera											
12	Meurah Mulia											
13	Tanah Pasir											
14	Lapang											
15	Tanah Luas											
16	Nibong											
17	Matangkuli											
18	Paya Bakong											
19	Pirak Timu											
20	Syamtalira Aron											
21	Lhoksukon											
22	Cot Girek											
23	Baktiya Barat											
24	Baktiya											
25	Seunuddon				64.600.000		84.150.000		66.750.000			
26	Tanah Jambo Aye				27.000.000		87.080.000		66.750.000			
27	Langkahan				55.720.000		92.750.000		72.750.000			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam penggunaan atribut pegawai	100%	100%	7.241.645.000	100%	495.810.000	100%	7.747.463.200	100%	15.484.918.200	Semua OPD
1	Sekretariat DPRK			65	50.003.000		495.810.000		549.865.200		1.095.678.200	
2	Dinas pendidikan			4974	3.569.358.000				3.586.254.000		7.155.612.000	
3	MPD			12	8.604.000				8.652.000		17.256.000	
4	Dians Kesehatan			2308	1.654.836.000				1.664.068.000		3.318.904.000	
5	RSUD Cut Meutia			427	306.159.000				307.867.000		614.026.000	

6	KESBANGPOL			27	19.359.000				19.467.000		38.826.000	
7	SATPOLPP			97	69.549.000				69.937.000		139.486.000	
8	DINSOS			45	32.265.000				32.445.000		64.710.000	
9	CAPIL			27	19.359.000				19.467.000		38.826.000	
10	DPMP2KB			51	36.567.000				36.771.000		73.338.000	
11	DISPORAPAR			30	21.510.000				21.630.000		43.140.000	
12	PUSTAKA DAN ARSIP			30	21.510.000				21.630.000		43.140.000	
13	SETDAKAB			159	114.003.000				114.639.000		228.642.000	
14	DISDIKDAYAH			22	15.774.000				15.862.000		31.636.000	
15	DSI			26	18.642.000				18.746.000		37.388.000	
16	BAITUL MAL			11	7.887.000				7.931.000		15.818.000	
17	MPU			12	8.604.000				8.652.000		17.256.000	
18	MAA			12	8.604.000				8.652.000		17.256.000	
19	INSPEKTORAT			53	38.001.000				38.213.000		76.214.000	
20	BKPSDM			95	68.115.000				68.495.000		136.610.000	
21	PUPR			0	-				-	0	-	
22	PRKP			38	27.246.000				-	38	27.246.000	
23	DLHK			0	-				-	0	-	
24	PERHUBUNGAN			52	37.284.000			52	50.325.000	104	87.609.000	
25	BPBD			0	-				-	0	-	
26	BAPPEDA			58	41.586.000				41.818.000		83.404.000	
27	Dinas pertanahan			23	16.491.000				-	23	16.491.000	
28	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			65	46.605.000				46.865.000		93.470.000	
29	DKP			48	34.416.000				34.608.000		69.024.000	
30	Dinas Pertanian dan Pangan			218	156.306.000				157.178.000		313.484.000	
31	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			103	73.851.000				74.263.000		148.114.000	
32	Ddinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM			77	55.209.000				55.517.000		110.726.000	
33	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			110	78.870.000				79.310.000		158.180.000	
34	Kecamatan			816	585.072.000				588.336.000		1.173.408.000	
1	Sawang			36	25.812.000				25.956.000		51.768.000	
2	Muara Batu			33	23.661.000				23.793.000		47.454.000	
3	Nisam Antara			16	11.472.000				11.536.000		23.008.000	
4	Nisam			26	18.642.000				18.746.000		37.388.000	
5	Banda Baro			16	11.472.000				11.536.000		23.008.000	

6	Dewantara			39	27.963.000				28.119.000		56.082.000	
7	Simpang Keuramat			23	16.491.000				16.583.000		33.074.000	
8	Kuta Makmur			33	23.661.000				23.793.000		47.454.000	
9	Syamtalira Bayu			41	29.397.000				29.561.000		58.958.000	
10	Geureudong Pase			22	15.774.000				15.862.000		31.636.000	
11	Samudera			38	27.246.000				27.398.000		54.644.000	
12	Meurah Mulia			32	22.944.000				23.072.000		46.016.000	
13	Tanah Pasir			27	19.359.000				19.467.000		38.826.000	
14	Lapang			21	15.057.000				15.141.000		30.198.000	
15	Tanah Luas			42	30.114.000				30.282.000		60.396.000	
16	Nibong			19	13.623.000				13.699.000		27.322.000	
17	Matangkuli			28	20.076.000				20.188.000		40.264.000	
18	Paya Bakong			34	24.378.000				24.514.000		48.892.000	
19	Pirak Timu			19	13.623.000				13.699.000		27.322.000	
20	Syamtalira Aron			27	19.359.000				19.467.000		38.826.000	
21	Lhoksukon			45	32.265.000				32.445.000		64.710.000	
22	Cot Girek			20	14.340.000				14.420.000		28.760.000	
23	Baktiya Barat			28	20.076.000				20.188.000		40.264.000	
24	Baktiya			60	43.020.000				43.260.000		86.280.000	
25	Seunuddon			28	20.076.000				20.188.000		40.264.000	
26	Tanah Jambo Aye			37	26.529.000				26.677.000		53.206.000	
27	Langkahan			26	18.642.000				18.746.000		37.388.000	
									1.131.860.000			
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	n/a	60,00%	799.750.000	70,00%	863.000.000	80,00%	978.860.000		2.641.610.000	Semua OPD
	Dinas Kesehatan				310.000.000		140.000.000		200.000.000		650.000.000	
	SATPOLPP				150.000.000		68.000.000		60.000.000		278.000.000	
	DSI				50.000.000		32.000.000		27.000.000		109.000.000	
	MPU				60.000.000		30.000.000		60.000.000		150.000.000	
	Dinas Pertanahan				-		-		-		-	
	Sekretariat DPRK				133.750.000		443.000.000		451.860.000		1.028.610.000	
	Dinas Perhubungan				-		-		-		-	
	Bappeda				96.000.000		150.000.000		150.000.000		396.000.000	
	BPBD				-		-		-		-	
	DINSOS				-		-		30.000.000		30.000.000	
	DLHK				-		-		-		-	
	Disperindagkop				-		-		-		-	
	Distan				-		-		-		-	

	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Pengendalian Pengelolaan Keuangan	100%	0%	20.600.000	0%	33.219.400	100%	30.000.000	100%	83.819.400	SETDAKAB
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	0%	2.606.185.500	0%	2.646.333.150	100%	2.404.979.750	100%	7.657.498.400	SETDAKAB
	Program Peringatan Hari-hari Besar	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan per hari-hari besar yang wajib dilaksanakan	100%	100%	188.911.500	77%	2.316.361.400	100%	1.236.509.400	100%	3.741.782.300	Semua PD yang menyelenggarakan peringatan hari-hari besar
	DINSOS				31.200.000				-		31.200.000	
	SETDAKAB				1.670.950.000		2.761.780.400		2.817.016.000		7.249.746.400	
	BKPSDM				290.000.000		200.000.000		204.000.000		694.000.000	
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%	26,67%	227.159.998	100%	246.231.432	0%	-	0%	473.391.430	SETDAKAB
	Program Penguatan Tata Laksana	Persentase peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	0%	-	0%	84.555.000	100%	104.625.625	100%	189.180.625	SETDAKAB
	Program Penguatan Kelembagaan	Capaian peningkatan kinerja perangkat daerah	100%	0%	-	0%	-	100%	185.456.000	100%	185.456.000	SETDAKAB
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan Pelayanan Jamaah Haji	100%	85%	670.941.850	100%	901.425.650	100%	563.793.000	100%	2.136.160.500	SETDAKAB
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang - Undangan	100%	0%	-	125%	124.103.000	100%	87.025.750	100%	211.128.750	SETDAKAB

	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Pendataan Wilayah	100%	0%	-	100%	221.883.600	100%	52.933.550	100%	274.817.150	SETDAKAB
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	0%	-	100%	741.014.809	100%	523.626.625	100%	1.264.641.434	SETDAKAB
	Program Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Persentase Pelayanan Masyarakat	100%	0%	-	100%	1.874.361.700	100%	1.572.604.400	100%	3.446.966.100	SETDAKAB
	Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Persentase kasus yang diselesaikan	100%	0%	-	0%	-	100%	158.078.950	100%	158.078.950	SETDAKAB
	Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Persentase Masyarakat yang memahami HAM	100%	0%	-	100%	29.469.250	100%	20.856.000	100%	50.325.250	SETDAKAB
	Program Pengembangan Ibukota Kabupaten	Persentase Pemindahan SKPK	34%	34,37%	-	34,37%	18.000.000	100%	69.240.000	100%	87.240.000	SETDAKAB
	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Lakip perangkat daerah yang baik dan tepat waktu	23,00%		-		-	100%	91.877.500	100%	91.877.500	SETDAKAB
	Program Pembinaan Usaha-Usaha Peningkatan Produksi Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Pengembangan Usaha Produksi Sumber Daya Alam	100%	0%	-	0%	66.125.000	100%	90.903.500	100%	157.028.500	SETDAKAB
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Gampong	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	n/a	-	-	87,09%	3.689.475.200	100%	1.134.723.562	100%	4.824.198.762	Kecamatan
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											

	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Tingkat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100,00%	-	-	64,18%	587.179.200	100%	168.931.700	100%	756.110.900	Kecamatan
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											
	Kecamatan											

	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	100%	99%	1.624.692.065	77%	15.675.837.712	100%	5.247.874.597	100%	22.548.404.374	Sekretariat DPRK
5.	**Keistimewaan**				**13.211.300.000**		**23.687.733.345**		**53.706.445.744**		**90.605.479.089**	
5.1	**Pendidikan**				**7.993.204.000**		**18.585.857.600**		**14.679.142.126**		**41.258.203.726**	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MPD	100%	0%	482.000.000	37,50%	489.000.000	0%	-	0%	971.000.000	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi Pendidikan	100%	-	2.250.000	39,65%	109.629.600	100%	65.634.950	100%	177.514.550	MPD
	Program Perencanaan Dan Pengawasan/Monitoring Dan Evaluasi	Tingkat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Pendidikan	100%	0%	9.284.000	100%	60.655.000	100%	36.981.876	100%	106.920.876	MPD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase dayah yang mandiri	0%	0%	-	39,65%	222.573.000	100%	682.694.500	100%	905.267.500	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dalam kondisi baik	81%	8%	-	46,53%	9.784.534.000	100%	6.331.200.000	100%	16.115.734.000	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase dayah yang dibina	46,43%	0%	7.499.670.000	115,56%	7.419.466.000	100%	7.562.630.800	100%	22.481.766.800	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase mutu pendidik pada Dayah	97,33%	0%	-	100%	500.000.000	100%	-	100%	500.000.000	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pemberdayaan Santri	Persentase Kemandirian Santri	15,00%		-		-	30%	-	30%	-	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan DSI		0%	-	0,00%	-	100%	27.000.000	100%	27.000.000	DSI

5.2	**Kebudayaan**				**116.914.000**		**588.362.668**		**424.251.750**		**1.129.528.418**	
	Program Pengembangan Hukum Adat	Persentase Gampong yang menerapkan administrasi peradilan adat	0,70%	1,20%	116.914.000	5%	59.618.700	100%	12.750.000	100%	189.282.700	MAA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pelayanan MAA	100%	100%	-	100%	382.953.000	100%	410.978.750	100%	793.931.750	MAA
	Program Pengembangan dan Pelestarian Adat	Jumlah Keputusan, Seruan, Himbauan, Naskah hasil kajian adat istiadat yang diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat	2 Dokumen	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	MAA
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Situs Sejarah kekayaan budaya dan adat istiadat yang dipelihara/ dilestarikan	0%	51%	-	63%	145.790.968	100%	523.000	100%	146.313.968	MAA
5.3	**Keagamaan**				**5.101.182.000**		**4.513.513.077**		**38.603.051.868**		**48.217.746.945**	
	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Persentase Layanan Kehidupan Beragama	100%	100%	243.000.000	100%	234.000.000	100%	6.981.371.135	100%	7.458.371.135	Baitul Mal, MPU dan DSI
	BAITUL MAL	Meningkatnya disiplin aparatur non PNS (dewan pengawas dan karyawan amil)		100%	243.000.000		234.000.000	100%	234.000.000		711.000.000	Baitul Mal
	MPU		100%	0%	-	0%	-	100%	2.160.517.835	100%	2.160.517.835	MPU
	DSI		100%	0%	-	0%	-	100%	4.586.853.300	100%	4.586.853.300	DSI
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Meningkatnya jumlah Muzakki		100,00%	1.524.000.000	100,00%	128.152.000	100%	24.403.354.360	100%	26.055.506.360	Baitul Mal

	Program Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan	Persentase sarana dan prasarana keagamaan kondisi baik	60%		-	100%	750.000.000	100%	1.377.406.000	100%	2.127.406.000	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam	0,148	0,05%	3.334.182.000	0,05%	3.320.593.500	100%	4.340.920.373	100%	10.995.695.873	DSI, Satpol PP dan WH
	Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Pengembangan Syariat Islam	Persentase lembaga yang dibina	40%	100%	3.113.331.531	100%	3.688.601.815	100%	3.586.200.000	100%	10.388.133.346	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Kehidupan Beragama	Persentase Pembinaan Kehidupan Beragama	60%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Syariat Islam
	Pengembangan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an	Persentase Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an	0%	0%	-	0%	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas Syariat Islam
	Pembinaan Dakwah dan syi'ar Islam	Persentase Syi'ar	0%	0%	-	0%	-	100%	-	100%	-	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%		-	41,14%	1.802.577	0%	-	0%	1.802.577	MPU
	Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi Antara Umara dan Ulama	Persentase peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah	100%	0%	-	100%	78.965.000	0%	-	0%	78.965.000	MPU
	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	0%	0%	-	0%	-	100%	500.000.000	100%	500.000.000	MPU

Tabel 7.2b
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.362.564.234.078**		**1.309.634.944.880**		**2.672.199.178.958**	
1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				**688.869.122.659**		**700.155.488.681**		**1.389.024.611.340**	
	Program Pendidikan Dayah	Persentase dayah yang dibina	70%	70%	15.849.944.425	80%	18.206.787.265	100%	34.056.731.690	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,70 tahun	14,71 tahun	60.500.000		-	14,72 tahun	60.500.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Tersedianya pelayanan MPD	100%	100%	2.035.897.100	100%	1.959.907.918	100%	3.995.805.018	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	518.094.930.816	100%	524.736.637.953	100%	1.042.831.568.769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,70 tahun	14,71 tahun	168.458.277.672	14,72 tahun	173.782.673.728	14,72 tahun	342.240.951.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang lulus UKG	40,00%	41,00%	2.315.914.171	45,00%	1.636.177.000	45,00%	3.952.091.171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				**416.160.578.717**		**396.969.814.587**		**813.130.393.304**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	145.687.260.688	100%	140.805.770.589	100%	286.493.031.277	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,80 thn	71,7 thn	71.977.569.136	71,9 thn	113.265.512.900	71,9 thn	185.243.082.036	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	30,00%	50,00%	706.525.500	60,00%	704.945.143	60,00%	1.411.470.643	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Sertifikat izin produksi makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga	100,00%	100,00%	167.467.000	100,00%	167.467.000	100,00%	334.934.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS	45,00%	50,00%	686.657.900	60%	686.657.900	60%	1.373.315.800	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	183.176.363.591	100%	130.954.494.955	100%	314.130.858.546	Rumah Sakit Umum Cut Meutia
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupancy Rate (Tingkat Hunian RS)	83%	85%	13.758.734.902	85%	10.384.966.100	85%	24.143.701.002	Rumah Sakit Umum Cut Meutia
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**161.679.522.813**		**151.905.619.769**		**313.585.142.582**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	15.009.941.649	100%	16.644.179.306	100%	31.654.120.955	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	34,70%	40,00%	29.240.329.475	45,00%	13.832.794.127	45,00%	43.073.123.602	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang (mantap)	42,09%	45,05%	91.308.384.773	50,00%	89.057.575.749	50,00%	180.365.960.522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100%	100%	587.830.000	100%	1.146.656.671	100%	1.734.486.671	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69,78%	72,03%	8.266.301.500	74,43%	15.436.710.500	74,43%	23.703.012.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67,09%	70,43%	2.379.032.000	73,95%	900.000.000	73,95%	3.279.032.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Kondisi Baik	56,15%	68,15%	1.045.494.672	71,15%	1.045.494.672	69,65%	2.090.989.344	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	34,37%	59,57%	13.842.208.744	65,62%	13.842.208.744	62,60%	27.684.417.488	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**60.233.285.797**		**29.994.375.904**		**90.227.661.701**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	4.008.620.622	100%	4.308.905.320	100%	8.317.525.942	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,17%	88,25%	4.503.113.613	89,12%	4.503.113.613	89,12%	9.006.227.226	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU	24,88%	29,34%	21.804.290.731	35,21%	5.482.356.971	35,21%	27.286.647.702	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan layanan penerangan jalan umum	100%	100%	29.917.260.831	100%	15.700.000.000	100%	45.617.260.831	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				**21.816.621.386**		**21.638.617.178**		**43.455.238.564**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4.470.811.046	100%	4.580.030.024	100%	9.050.841.070	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	60%	70%	2.357.862.575	90%	2.600.725.800	90%	4.958.588.375	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	70%	70%	2.209.408.100	80%	1.998.000.000	80%	4.207.408.100	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	11.651.188.565	100%	11.310.710.654	100%	22.961.899.219	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati	100%	100%	1.127.351.100	100%	1.149.150.700	100%	2.276.501.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				**13.805.102.706**		**8.971.028.761**		**22.776.131.467**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	4.670.386.026	100%	4.600.440.617	100%	9.270.826.643	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			209.784.000		63.000.000		272.784.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas dan eks trauma yang mendapat bantuan	20%	40%	1.004.846.180	50%	1.090.000.000	50%	2.094.846.180	Dinas Sosial dan P3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penerima manfaat perlindungan dan jaminan sosial			7.529.276.800		2.910.000.000		10.439.276.800	Dinas Sosial dan P3A
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	390.809.700	100%	307.588.144	100%	698.397.844	Dinas Sosial dan P3A
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**83.530.577.704**		**77.626.611.146**		**161.157.188.850**	
2.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**				**7.462.520.000**		**7.619.399.302**		**15.081.919.302**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	5.903.732.300	100%	5.834.399.302	100%	11.738.131.602	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai	20%	20%	1.489.787.700	20%	1.635.000.000	60%	3.124.787.700	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	20%	69.000.000	20%	69.000.000	60%	138.000.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	-	100%	81.000.000	100%	81.000.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**2.440.818.402**		**1.707.095.000**		**4.147.913.402**	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada APBD	n/a		567.820.200		890.000.000		1.457.820.200	Dinas Sosial dan P3A
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	26,49	24,97	1.242.219.502	22,86	479.855.000	22,86	1.722.074.502	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100%	100%	30.831.700	100%	50.000.000	100%	80.831.700	Dinas Sosial dan P3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak			543.422.000		50.000.000		593.422.000	Dinas Sosial dan P3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani di instansi terkait kabupaten	100%	100%	56.525.000	100%	237.240.000	100%	293.765.000	Dinas Sosial dan P3A
2.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				**1.909.808.968**		**1.525.081.220**		**3.434.890.188**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	350 Kg/kapita/ tahun	350 Kg/ kapita/ tahun	999.984.000	350 Kg/ kapita/ tahun	1.100.000.000	350 Kg/ kapita/ tahun	2.099.984.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stunting	17%	16%	909.824.968	15%	361.762.600	15%	1.271.587.568	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya jumlah desa rawan pangan	8 desa		-	8 desa	63.318.620	16 desa	63.318.620	Dinas Pertanian dan Pangan
2.04	**Pertanahan**				**3.387.469.301**		**3.815.040.263**		**7.202.509.564**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.829.284.501	100%	2.829.110.983	100%	5.658.395.484	Dinas Pertanahan Kabupaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah	100%	100%	100.604.800	100%	120.000.000	100%	220.604.800	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	100%		-	100%	270.000.000	100%	270.000.000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase tanah Pemda yang terinventarisir dan bersertifikat	n/a	50%	257.580.000	75%	371.500.000	75%	629.080.000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan data dan informasi pertanahan	100%	50%	100.000.000	75%	110.929.000	63%	210.929.000	Dinas Pertanahan Kabupaten
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian sengketa tanah yang ditangani pertahun	100%	100%	100.000.000	100%	113.500.280	100%	213.500.280	Dinas Pertanahan Kabupaten
2.05	**Lingkungan Hidup**				**13.209.870.243**		**12.903.401.400**		**26.113.271.643**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3.749.712.657	100%	3.895.658.305	100%	7.645.370.962	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen RPPLH Dan KLHS Kab.Aceh Utara	0	100%	396.417.300	100%	415.000.000	100%	811.417.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,85	69,10	110.000.000	69,59	110.000.000	69,59	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman kota yang tertata	93%	100%	324.996.356	100%	835.000.000	100%	1.159.996.356	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	100%	100%	27.359.200	100%	27.359.200	100%	54.718.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	N/A		115.430.000		135.430.000		250.860.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terhadap lingkungan Hidup	100%	100%	118.110.000	100%	142.310.000	100%	260.420.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	27%	32%	8.367.844.730	35%	7.342.643.895	35%	15.710.488.625	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				**5.680.644.304**		**5.724.426.188**		**11.405.070.492**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3.543.605.304	100%	3.465.887.188	100%	7.009.492.492	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber-KTP elektronik	96%	100%	1.132.155.500	100%	1.149.743.100	100%	2.281.898.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran	85%	92%	307.111.800	95%	349.942.498	95%	657.054.298	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12%	21%	697.771.700	36%	758.853.402	36%	1.456.625.102	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**8.347.030.019**		**6.931.002.504**		**15.278.032.523**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	4.202.343.619	100%	4.520.804.304	100%	8.723.147.923	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	2,34%	2,40%	2.192.208.600	2,46%	704.747.500	7,20%	2.896.956.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK aktif	100%	100%	407.031.800	100%	580.000.000	100%	987.031.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12%	50%	1.545.446.000	50%	1.125.450.700	50%	2.670.896.700	SETDAKAB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				**11.028.868.500**		**11.074.731.000**		**22.103.599.500**	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	48,4%	50%	6.659.268.500	52,00%	6.655.131.000	52,00%	13.314.399.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	9,62%	12,79%	4.369.600.000	15,96%	4.419.600.000	15,96%	8.789.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**Perhubungan**				**6.376.877.551**		**5.720.747.343**		**12.097.624.894**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	3.911.292.037	100%	3.947.201.829	100%	7.858.493.866	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan	90%	100%	2.465.585.514	100%	1.773.545.514	100%	4.239.131.028	Dinas Perhubungan
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				**517.104.700**		**232.697.115**		**749.801.815**	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78%	78%	469.219.600	83%	205.942.915	83%	675.162.515	SETDAKAB
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh kominfo	67%	67%	47.885.100	67%	26.754.200	67%	74.639.300	SETDAKAB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**6.950.245.447**		**6.568.438.253**		**13.518.683.700**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	6.769.245.747	100%	6.328.438.553	100%	13.097.684.300	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	85,12%	85,12%	60.429.400	85,20%	89.429.400	85,20%	149.858.800	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	52,77%	54,40%	48.447.000	56,40%	75.447.000	56,40%	123.894.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,40%	96,85%	72.123.300	97,05%	75.123.300	97,05%	147.246.600	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				**594.937.600**		**647.405.400**		**1.242.343.000**	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6,83%	6,90%	66.295.400	6,70%	98.602.200	20,43%	164.897.600	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Retribusi Perizinan	-2,71%	0,63%	153.390.500	0,83%	197.581.200	0,83%	350.971.700	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53 investor	62 investor	176.345.800	65 investor	326.122.000	75 investor	502.467.800	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Data dan Informasi	100%	100%	198.905.900	100%	25.100.000	100%	224.005.900	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				**10.945.225.476**		**6.172.930.061**		**17.118.155.537**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.672.098.876	100%	2.835.430.061	100%	5.507.528.937	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda pemula	n/a	3%	749.999.600	5%	250.000.000	5%	999.999.600	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	n/a	40%	250.000.000	60%	200.000.000	60%	450.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan	Persentase pembibitan atlit unggulan	60%	75%	7.273.127.000	80%	2.887.500.000	80%	10.160.627.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				**1.585.823.400**		**2.095.210.200**		**3.681.033.600**	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Keragaman Budaya yang terkelola	40%	80%	158.198.300	85%	250.000.000	85%	408.198.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase kekayaan budaya yang terkelola	40%	80%	262.005.400	85%	370.000.000	85%	632.005.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan meseum	100%	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Kualitas pelaksanaan kegiatan MAA	baik	baik	565.619.700	baik	825.210.200	baik	1.390.829.900	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				**3.021.889.043**		**4.599.683.397**		**7.621.572.440**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.664.139.043	100%	3.479.173.397	100%	6.143.312.440	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	80%	80%	357.750.000	85%	1.120.510.000	83%	1.478.260.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**				**71.444.750**		**289.322.500**		**360.767.250**	
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	70%	70%	71.444.750	70%	276.947.500	70%	348.392.250	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	70%	70%	-	70%	12.375.000	70%	12.375.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**66.201.906.463**		**68.943.238.807**		**134.838.588.522**	
3.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				**12.501.056.010**		**14.320.147.389**		**26.821.203.399**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	4.204.819.211	100%	4.474.523.389	100%	8.679.342.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5,00%	5,00%	3.776.011.675	5,00%	2.980.000.000	15,00%	6.756.011.675	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5,00%	5,00%	4.274.723.824	5,00%	6.550.460.000	15,00%	10.825.183.824	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Jumlah kasus ilegal fishing	5,00%	5,00%	111.624.200	5,00%	148.000.000	15,00%	259.624.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	41,43%	65,98%	133.877.100	74,80%	167.164.000	74,80%	301.041.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				**443.116.050**		**1.050.372.840**		**1.493.488.890**	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya daya tarik destinasi wisata	n/a	66,67%	138.531.500	75%	300.000.000	75%	438.531.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya jumlah Kunjungan wisata	n/a	12,58%	258.266.950	15%	150.372.840	15%	408.639.790	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peran masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	n/a	3,38%	46.317.600	4%	600.000.000	4%	646.317.600	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parisiwisata
3.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				**46.935.994.585**		**49.206.447.788**		**95.835.885.625**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	7.997.025.433	100%	7.971.384.213	100%	15.968.409.646	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan kelompok tani (perkebunan) yang dibina	10,00%	23,00%	3.147.538.748	30,00%	3.297.489.000	30,00%	6.358.028.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Perkebunan Unggulan (sawit)	11.28 ton/ha	11.51 ton/ha	2.323.494.912	11,74 ton/ha	1.600.000.000	11,74 ton/ha	4.693.459.912	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penurunan Kasus Penyakit Ternak	n/a	5,00%	307.208.410	5,00%	865.000.000	10,00%	620.561.410	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kasus organisme pengganggu tanaman	n/a	5,00%	171.000.000	5,00%	568.600.000	10,00%	345.420.000	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyuluhan Pertanian	Populasi Ternak Besar	108.045 ekor	113445	33.632.600	118700	78.000.000	118700	67.937.600	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	21.052.084.285	100%	20.285.974.915	100%	41.338.059.200	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pangan Utama	5,03 ton/ha	5,45	915.923.933	5,5	825.000.000	5,5	1.740.923.933	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi	388200 ton	419256	6.437.894.925	440219	10.021.000.000	440219	16.458.894.925	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan kasus organisme pengganggu tanaman	n/a	5,00%	583.673.559	5,00%	150.000.000	10,00%	733.673.559	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang dibina	25,00%	50,00%	3.966.517.780	60,00%	3.543.999.660	60,00%	7.510.517.440	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				**704.867.750**		**1.981.190.790**		**2.686.058.540**	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	60%	60,25%	19.868.500	60,50%	20.868.500	60,50%	40.737.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan retribusi pasar	8%	10%	490.388.700	12%	1.746.695.840	92%	2.237.084.540	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	0,55%	1%	194.610.550	1%	213.626.450	1%	408.237.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				**5.280.389.048**		**1.185.000.000**		**6.465.389.048**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tingkat pembangunan dan pembinaan Industri	100%	100%	5.280.389.048	100%	1.185.000.000	100%	6.465.389.048	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM
3.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				**336.483.020**		**1.200.080.000**		**1.536.563.020**	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi	100%	100%	127.180.000	100%	899.480.000	100%	1.026.660.000	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan sarana Pemukiman Transmigrasi	350 Meter	350 Meter	209.303.020	350 Meter	300.600.000	350 Meter	509.903.020	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**78.428.320.698**		**90.071.555.040**		**168.499.875.738**	
4.01	**Sekretariat Daerah**				**35.786.754.757**		**35.071.555.040**		**70.858.309.797**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	32.267.198.867	100%	31.943.803.122	100%	64.211.001.989	SETDAKAB
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	2.283.734.540	100%	2.003.930.568	100%	4.287.665.108	SETDAKAB
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1.235.821.350	100%	1.123.821.350	100%	2.359.642.700	SETDAKAB
4.02	**Sekretariat DPRD**				**42.641.565.941**		**55.000.000.000**		**97.641.565.941**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	34.443.647.941	100%	39.638.124.000	100%	74.081.771.941	Sekretariat DPRK
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRK	100%	100%	8.197.918.000	100%	15.361.876.000	100%	23.559.794.000	Sekretariat DPRK
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**776.396.994.363**		**764.034.771.298**		**1.540.431.765.661**	
5.01	**Perencanaan**				**8.300.049.077**		**7.709.698.145**		**16.009.747.222**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5.950.696.677	100%	5.820.698.145	100%	11.771.394.822	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	1.041.726.700	100%	1.180.000.000	100%	2.221.726.700	Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program RPJMD	100%	100%	1.307.625.700	100%	709.000.000	100%	2.016.625.700	Bappeda
5.02	**Keuangan**				**757.157.202.305**		**745.088.053.889**		**1.502.245.256.194**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	12.020.431.515	100%	11.232.919.327	100%	23.253.350.842	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	742.430.016.490	WTP	730.714.042.547	WTP	1.473.144.059.037	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Solvabilitas jangka panjang	615,95 kali	646,76 kali	1.195.847.700	679,09 kali	1.311.640.085	679,09 kali	2.507.487.785	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,96%	11,10%	1.510.906.600	9,30%	1.829.451.930	9,30%	3.340.358.530	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.03	**Kepegawaian**				**9.660.750.881**		**9.792.019.264**		**19.452.770.145**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	7.725.324.281	100%	7.834.125.916	100%	15.559.450.197	BKPSDM
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan kepegawaian	100%	100%	1.935.426.600	100%	1.957.893.348	100%	3.893.319.948	BKPSDM
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**				**839.880.500**		**995.000.000**		**1.834.880.500**	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	66,09%	68%	839.880.500	70%	995.000.000	70%	1.834.880.500	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**				**439.111.600**		**450.000.000**		**889.111.600**	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil penelitian dan inovasi pembangunan daerah	100%	100%	439.111.600	100%	450.000.000	100%	889.111.600	Bappeda
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**7.575.363.778**		**9.368.715.227**		**16.944.079.005**	
6.01	**Inspektorat Daerah**				**7.575.363.778**		**9.368.715.227**		**16.944.079.005**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	5.816.597.978	100%	6.544.276.107	100%	12.360.874.085	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	100%	100%	1.476.509.600	100%	2.418.182.920	100%	3.894.692.520	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase tenaga pemeriksa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	282.256.200	100%	406.256.200	100%	688.512.400	Inspektorat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**57.612.596.984**		**60.495.652.307**		**118.108.249.291**	
7.1	**KECAMATAN**				**57.612.596.984**		**60.495.652.307**		**118.108.249.291**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.770.049.766	100%	1.906.469.083	100%	3.676.518.849	Kecamatan Langkahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	95%	4.223.900	98%	8.397.000	98%	12.620.900	Kecamatan Langkahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	70%	83%	5.916.800	91%	5.916.800	91%	11.833.600	Kecamatan Langkahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	7%	45.000.000	5%	45.000.000	5%	90.000.000	Kecamatan Langkahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	71%	75%	37.000.000	80%	37.000.000	80%	74.000.000	Kecamatan Langkahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	43%	48%	15.343.600	83%	15.795.000	83%	31.138.600	Kecamatan Langkahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.609.639.184	100%	2.598.585.237	100%	5.208.224.421	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%	5.040.800	85%	5.700.000	85%	10.740.800	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	67%	70%	6.634.900	75%	7.000.000	75%	13.634.900	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	45.000.000	55%	50.000.000	55%	95.000.000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	67%	85%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	57%	70%	22.515.400	67%	26.000.000	67%	48.515.400	Kecamatan Tanah Jambo Aye
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.070.921.383	100%	2.266.296.875	100%	4.337.218.258	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	3.786.100	85%	2.600.000	85%	6.386.100	Kecamatan Seunuddon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	70%	73%	3.502.300	77%	4.000.000	77%	7.502.300	Kecamatan Seunuddon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	65%	70%	45.000.000	50%	45.000.000	50%	90.000.000	Kecamatan Seunuddon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	60%	80%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Seunuddon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	75%	16.592.400	69%	15.000.000	69%	31.592.400	Kecamatan Seunuddon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	3.385.069.553	100%	3.513.249.819	100%	6.898.319.372	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	8.379.000	90%	8.795.000	90%	17.174.000	Kecamatan Baktiya
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	61,55%	72,67%	4.924.600	72,67%	4.924.600	72,67%	9.849.200	Kecamatan Baktiya
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	35%	36,33%	35.000.000	36,33%	35.000.000	36,33%	70.000.000	Kecamatan Baktiya
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	62%	37.000.000	65%	37.000.000	65%	74.000.000	Kecamatan Baktiya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	81%	98%	22.879.800	100%	34.729.800	100%	57.609.600	Kecamatan Baktiya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.014.058.160	100%	2.027.338.063	100%	4.041.396.223	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	2.165.300	85%	8.024.785	85%	10.190.085	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	70%	73%	2.946.200	77%	5.100.000	77%	8.046.200	Kecamatan Baktiya Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	65%	70%	40.000.000	50%	72.000.000	50%	112.000.000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	60%	80%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	75%	18.650.000	69%	38.555.301	69%	57.205.301	Kecamatan Baktiya Barat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.791.965.005	100%	2.885.666.447	100%	5.677.631.452	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	3.000.000	85%	10.514.351	85%	13.514.351	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	69%	70%	5.000.000	80%	7.500.000	80%	12.500.000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	50.000.000	56%	90.000.000	56%	140.000.000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	67%	85%	37.000.000	89%	15.000.000	89%	52.000.000	Kecamatan Lhoksukon
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	59%	70%	25.285.100	60%	45.055.301	60%	70.340.401	Kecamatan Lhoksukon
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.645.281.646	100%	1.676.137.778	100%	3.321.419.424	Kecamatan Cot Girek
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	5.687.500	83%	7.000.000	83%	12.687.500	Kecamatan Cot Girek

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	78%	80%	5.040.500	81%	4.500.000	81%	9.540.500	Kecamatan Cot Girek
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	82%	84%	50.000.000	86%	70.000.000	86%	120.000.000	Kecamatan Cot Girek
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	75,00%	78%	37.000.000	79%	37.000.000	79%	74.000.000	Kecamatan Cot Girek
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	80%	82%	18.841.300	85%	33.500.000	85%	52.341.300	Kecamatan Cot Girek
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.035.247.385	100%	2.227.803.483	100%	4.263.050.868	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	4.093.500	95%	3.500.000	95%	7.593.500	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	2.028.400	84%	4.500.000	84%	6.528.400	Kecamatan Paya Bakong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	45.000.000	5%	55.000.000	5%	100.000.000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	76%	37.000.000	82%	37.000.000	82%	74.000.000	Kecamatan Paya Bakong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	18.497.700	84,33%	20.600.000	84,33%	39.097.700	Kecamatan Paya Bakong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.337.367.160	100%	1.466.756.525	100%	2.804.123.685	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	11.518.800	90%	12.000.000	90%	23.518.800	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	61,55%	72,67%	8.900.700	72,67%	8.000.000	72,67%	16.900.700	Kecamatan Pirak Timu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	35%	36,33%	35.000.000	36,33%	45.000.000	36,33%	80.000.000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	62%	47.000.000	65%	52.000.000	65%	99.000.000	Kecamatan Pirak Timu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	81%	98%	28.696.500	100%	40.500.000	100%	69.196.500	Kecamatan Pirak Timu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.016.296.735	100%	2.120.328.944	100%	4.136.625.679	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	73%	79%	4.906.700	84%	4.906.700	84%	9.813.400	Kecamatan Matangkuli
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	60%	55%	5.349.700	78%	5.349.700	77%	10.699.400	Kecamatan Matangkuli
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	65%	70%	50.000.000	55%	50.000.000	55%	100.000.000	Kecamatan Matangkuli
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	65%	80%	37.000.000	84%	65.000.000	83%	102.000.000	Kecamatan Matangkuli
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	70%	80%	21.094.800	100%	21.094.800	72%	42.189.600	Kecamatan Matangkuli
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.639.362.679	100%	2.679.126.038	100%	5.318.488.717	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	80%	5.219.300	83%	5.219.300	83%	10.438.600	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	70%	156.095.300	76%	7.600.000	76%	163.695.300	Kecamatan Tanah Luas
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	72.000.000	45%	82.000.000	45%	154.000.000	Kecamatan Tanah Luas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	65%	85%	10.000.000	86%	10.000.000	86%	20.000.000	Kecamatan Tanah Luas
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	54%	70%	28.309.200	58%	28.309.200	58%	56.618.400	Kecamatan Tanah Luas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.432.102.524	100%	1.481.569.272	100%	2.913.671.796	Kecamatan Nibong
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	6.067.100	87%	6.067.100	87%	12.134.200	Kecamatan Nibong
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	4.889.400	73%	4.889.400	73%	9.778.800	Kecamatan Nibong
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	50.000.000	4%	50.000.000	4%	100.000.000	Kecamatan Nibong
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	50.000.000	79%	50.000.000	79%	100.000.000	Kecamatan Nibong
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	34,33%	27.913.000	82,33%	27.913.000	82,33%	55.826.000	Kecamatan Nibong
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.480.530.657	100%	1.600.219.617	100%	3.080.750.274	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	65%	70%	7.781.500	80%	7.781.500	80%	15.563.000	Kecamatan Lapang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	65%	75%	8.391.400	77%	16.390.000	77%	24.781.400	Kecamatan Lapang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	67%	72%	35.000.000	60%	35.000.000	60%	70.000.000	Kecamatan Lapang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	60%	75%	35.000.000	55%	35.000.000	55%	70.000.000	Kecamatan Lapang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	58%	60%	30.570.000	62%	30.570.000	62%	61.140.000	Kecamatan Lapang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.752.482.979	100%	1.860.444.831	100%	3.612.927.810	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	4.792.000	85%	10.514.351	85%	15.306.351	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	65%	70%	3.679.800	80%	7.500.000	80%	11.179.800	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	68%	75%	45.000.000	66%	72.000.000	66%	117.000.000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	65%	80%	37.000.000	85%	10.000.000	85%	47.000.000	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	60%	70%	20.694.400	60%	50.515.000	60%	71.209.400	Kecamatan Tanah Pasir
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.840.572.822	100%	2.060.722.104	100%	3.901.294.926	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	90%	6.504.600	89%	8.000.000	89%	14.504.600	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	76%	5.660.000	79%	6.500.000	79%	12.160.000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	40.000.000	52%	50.000.000	52%	90.000.000	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	68%	88%	37.000.000	88%	37.000.000	88%	74.000.000	Kecamatan Syamtalira Aron

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	90%	79%	20.717.500	69%	22.700.000	69%	43.417.500	Kecamatan Syamtalira Aron
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.218.036.038	100%	2.177.212.909	100%	4.395.248.947	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	89%	9.695.500	97%	9.695.500	97%	19.391.000	Kecamatan Samudera
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	64%	7.595.000	85%	15.194.250	85%	22.789.250	Kecamatan Samudera
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	5%	45.000.000	6%	55.000.000	6%	100.000.000	Kecamatan Samudera
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	77%	37.000.000	83,00%	37.000.000	83,00%	74.000.000	Kecamatan Samudera
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	34,33%	22.316.750	84,35%	24.290.271	84,35%	46.607.021	Kecamatan Samudera
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.984.717.468	100%	1.934.946.386	100%	3.919.663.854	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77%	89%	2.950.000	89%	12.000.000	89%	14.950.000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	68%	75%	3.931.500	78%	5.000.000	78%	8.931.500	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	60%	75%	40.000.000	50%	50.000.000	50%	90.000.000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	68%	88%	37.000.000	88%	37.000.000	88%	74.000.000	Kecamatan Meurah Mulia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	85%	79%	19.069.000	68%	31.000.000	68%	50.069.000	Kecamatan Meurah Mulia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.449.361.919	100%	2.599.104.127	100%	5.048.466.046	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	89%	2.006.900	97%	22.034.047	97%	24.040.947	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	65%	1.638.700	86%	9.185.900	86%	10.824.600	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	6%	40.000.000	7%	70.000.000	7%	110.000.000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	77%	37.000.000	84%	37.000.000	84%	74.000.000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	34,33%	15.480.000	84,35%	18.000.000	84,35%	33.480.000	Kecamatan Syamtalira Bayu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.410.628.072	100%	1.834.791.020	100%	3.245.419.092	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	4.551.000	95%	5.500.000	95%	10.051.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	1.760.000	83%	4.500.000	83%	6.260.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	27.500.000	4%	55.000.000	4%	82.500.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	37.000.000	80%	37.000.000	80%	74.000.000	Kecamatan Geureudong Pase
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	16.756.000	83,33%	20.700.000	83,33%	37.456.000	Kecamatan Geureudong Pase

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.640.276.628	100%	1.386.356.520	100%	3.026.633.148	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%	6.116.300	85%	8.800.000	85%	14.916.300	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	32%	53%	3.660.800	83%	9.000.000	83%	12.660.800	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	7%	4%	35.000.000	4%	55.000.000	4%	90.000.000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	70%	75%	47.000.000	80%	47.000.000	80%	94.000.000	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	15%	30%	19.230.200	80%	26.755.487	80%	45.985.687	Kecamatan Simpang Keuramat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.361.731.156	100%	2.130.674.981	100%	4.492.406.137	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	90%	5.549.800	90%	25.900.000	90%	31.449.800	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	58,55%	72,67%	2.218.900	72,67%	12.373.506	72,67%	14.592.406	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	35%	36,33%	40.000.000	36,33%	75.000.000	36,33%	115.000.000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	62%	40.000.000	65%	45.000.000	65%	85.000.000	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	81%	98%	17.994.600	100%	23.950.000	100%	41.944.600	Kecamatan Kuta Makmur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.617.431.832	100%	2.814.031.838	100%	5.431.463.670	Kecamatan Dewantara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00%	88%	10.000.000	95%	22.500.000	95%	32.500.000	Kecamatan Dewantara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	5.000.000	83%	5.000.000	83%	10.000.000	Kecamatan Dewantara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	40.000.000	4%	40.000.000	4%	80.000.000	Kecamatan Dewantara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	70%	37.000.000	85%	37.000.000	85%	74.000.000	Kecamatan Dewantara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	22.423.100	83.33%	22.423.100	83,33%	44.846.200	Kecamatan Dewantara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.296.245.280	100%	1.429.416.521	100%	2.725.661.801	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00%	88%	4.181.800	95%	6.500.000	95%	10.681.800	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	12.544.700	83%	21.000.000	83%	33.544.700	Kecamatan Nisam Antara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	30.000.000	4%	55.000.000	4%	85.000.000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	78%	47.000.000	80%	52.000.000	80%	99.000.000	Kecamatan Nisam Antara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	17.864.300	83,33%	33.500.000	83,33%	51.364.300	Kecamatan Nisam Antara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.761.314.538	100%	1.882.503.713	100%	3.643.818.251	Kecamatan Nisam
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00%	88%	4.181.800	95%	6.500.000	95%	10.681.800	Kecamatan Nisam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	12.544.700	83%	21.000.000	83%	33.544.700	Kecamatan Nisam
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	30.000.000	4%	55.000.000	4%	85.000.000	Kecamatan Nisam
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	78%	47.000.000	80%	52.000.000	80%	99.000.000	Kecamatan Nisam
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	17.864.300	83,33%	33.500.000	83,33%	51.364.300	Kecamatan Nisam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.299.183.017	100%	1.495.295.759	100%	2.794.478.776	Kecamatan Banda Baro
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00%	85%	3.038.000	90%	13.753.480	90%	16.791.480	Kecamatan Banda Baro
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	55,56%	66,67%	4.496.500	66,67%	4.500.000	66,67%	8.996.500	Kecamatan Banda Baro
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	25%	33,33%	40.000.000	33,33%	75.000.000	33,33%	115.000.000	Kecamatan Banda Baro
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	n/A	60%	37.000.000	65%	40.000.000	65%	77.000.000	Kecamatan Banda Baro
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	78%	100%	15.822.200	100%	17.186.600	100%	33.008.800	Kecamatan Banda Baro
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.368.918.977	100%	2.442.908.799	100%	4.811.827.776	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	88%	4.227.700	95%	4.700.000	95%	8.927.700	Kecamatan Muara Batu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	42%	63%	3.905.500	83%	5.659.800	83%	9.565.300	Kecamatan Muara Batu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8%	4%	35.000.000	4%	67.000.000	4%	102.000.000	Kecamatan Muara Batu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	37.000.000	80%	37.000.000	80%	74.000.000	Kecamatan Muara Batu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	18.775.700	83,33%	20.440.000	83,33%	39.215.700	Kecamatan Muara Batu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	2.218.479.071	100%	2.198.616.388	100%	4.417.095.459	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	80%	6.547.300	84%	9.547.300	84%	16.094.600	Kecamatan Sawang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong Status Berkembang	40%	60%	8.823.000	80%	4.625.000	80%	13.448.000	Kecamatan Sawang
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	6%	3%	35.000.000	3%	35.000.000	3%	70.000.000	Kecamatan Sawang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP	69,79%	75%	47.000.000	80%	47.000.000	80%	94.000.000	Kecamatan Sawang
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Gampong yang Menyelesaikan APBG tepat waktu	16,67%	33,33%	26.337.000	83,33%	32.337.000	83,33%	58.674.000	Kecamatan Sawang
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**4.694.952.933**		**4.699.725.471**		**9.394.678.404**	
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				**4.694.952.933**		**4.699.725.471**		**9.394.678.404**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.868.189.433	100%	2.781.623.796	100%	5.649.813.229	Kesbangpol
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi gangguan/konflik berlatar ideologi	100%	100%	58.337.100	100%	61.253.955	100%	119.591.055	Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	1.138.264.200	100%	1.195.177.410	100%	2.333.441.610	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	n/a	40%	252.089.200	45%	264.693.660	85%	516.782.860	Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi gangguan/konflik ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	170.376.800	100%	178.895.640	100%	349.272.440	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan/konflik sosial	100%	100%	207.696.200	100%	218.081.010	100%	425.777.210	Kesbangpol
9	**UNSUR KEKHUSUSAN**				**41.015.218.054**		**51.742.128.126**		**92.757.346.180**	
9.01	**Kekhususan Aceh******)**				**41.015.218.054**		**51.742.128.126**		**92.757.346.180**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.648.289.330	100%	2.812.988.419	100%	5.461.277.749	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	1.332.942.460	100%	1.134.077.417	100%	2.467.019.877	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1.103.952.652	100%	1.138.225.393	100%	2.242.178.045	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	2.700.537.960	100%	3.080.646.026	100%	5.781.183.986	Dinas Syariat Islam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Syari'at Islam	Persentase Tingkat Pemahaman, Pengamalan dan Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam	40%	70%	15.578.779.064	80%	17.710.506.909	80%	33.289.285.973	Dinas Syariat Islam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1.256.633.667	100%	1.313.364.421	100%	2.569.998.088	MPU
	Program Permusyawaratan Ulama	Persentase peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat	20%	75%	2.669.029.200	80%	2.793.869.200	80%	5.462.898.400	MPU
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	1.371.012.211	100%	1.389.355.596	100%	2.760.367.807	Baitul Mal
	Program Baitul Mal	Persentase peningkatan ZIS	-0,28%	6,37%	17.439.225.952	41%	25.454.385.974	16%	42.893.611.926	Baitul Mal

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2017 – 2022. Secara rinci dijelaskan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 8.1a
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Aceh Utara 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	B	B	B	CC	CC	CC
2	Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	2+	2+	3
3	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
4	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam RPJMD	%	100	100	100	100	86,63	100
6	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	75,9	76	76,95	81,41	86,8	70,07
7	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	60	62	64	66,67	65,83	n/a
8	Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat	%	50	55	60		4,69	n/a
9	Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Majelis Taklim aktif	%	100	100	100	n/a	n/a	n/a
11	Angka pelanggaran terhadap syariat Islam	Per 1000 penduduk	0,138	0,129	0,121	0,045	0,053	n/a
12	APM SD/MI	%	85	90	95	98,05	97,95	98,05
13	APM SMP	%	70	75	82	86,39	85,68	86,34
14	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9	9,5	10	8,11	8,46	8,63
15	Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan	%	-	10	20	-	-	-
16	Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	23	30	40	39%	38,37%	20%
17	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	80	60	55	103	118	127
18	Angka Harapan Hidup	tahun	71	71,5	71,6	68,61	68,79	68,80
19	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	123	105	93	13	25	138
20	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	4	4	4	3	3	5
21	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	52,3	57,8	62,6	75,93	77,73	n/a
22	Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi	%	39,1	44,3	48,5	35,59	38,59	32
23	Persentase akses air bersih	%	65,56	67,61	69,78	67,02	69,95	72,27
24	Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi	%	60,67	63,82	67,09	61,38	64,25	66,98
25	Persentase rumah layak huni	%	86,24	87,81	89,43	85,46	85,47	87,17

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
26	Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara	%	40,62	46,87	53,12	34,37	34,37	42,00
27	Tingkat Resiko Bencana	rendah/ sedang/ tinggi	tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
28	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)	Indeks	55	60	65	32,84	68,84	73,88
29	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	4,6	4,7	5,14	3,54	0,97
30	Gini Rasio	indeks	0,265	0,262	0,259	0,292	0,308	0,261
31	Persentase tingkat kemiskinan	%	17,25	16,45	15,55	17,25	17,39	17,02
32	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	10	8,5	8	10,14	8,65	8,56
33	Tingkat inflasi	%	4	3,5	3	2,05	1,2	2,87
34	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	5	5,25	5,4	3,98	4,07	3,11
35	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,25	4	5,2	8,94	-7,21	-6,79
36	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15-20	15-20	15-20	10,62	9,39	9,21

Tabel 8.1b
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Aceh Utara 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Target	
			2021	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51	55
2	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	B	B
3	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP
4	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	77,5	80
5	Indeks Pembangunan Syari'at Islam	%	60	65
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,89	71,79
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,5	11
8	Angka Kelulusan	%	100	100
9	Persentase Lembaga Pendidikan yang Terintegrasi	%	30	40
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	55,7	58,1
11	Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	%	28	30
12	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	14%	13%
13	Angka Harapan Hidup	tahun	71,7	71,9
14	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	81	68
15	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	3	3
16	Kategori kinerja infrastruktur dasar dan publik	Absolut	Baik	Baik
17	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan mantap	%	67,1	72,1
18	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	%	53,8	61,1
19	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	%	72,03	74,43
20	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	%	70,43	73,95
21	Persentase rumah layak huni	%	88,25	89,12
22	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	5,0
23	Gini Rasio	indeks	0,255	0,251
24	Persentase tingkat kemiskinan	%	16,00	14,90
25	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	7,56	6,96
26	Tingkat inflasi	%	3,00	3,00
27	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	4,5	5
28	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	6	6,7
29	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	3,5	4,3
30	Pendapatan Perkapita	Rupiah	33,46 Jt	33,85 Jt

Tabel 8.2a
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	3,27	%	4,5	4,6	4,7	5,14	3,54	0,97
2	Laju inflasi	5,6	%	4	3,5	3	2,05	1,2	2,87
3	PDRB per kapita								
	- PDRB Tanpa Migas	24,40	Rp. Juta	25,50	26,40	27,20	28,50	29,40	29,40
	- PDRB Dengan Migas	28,19	Rp. Juta	28,19	27,29	26,49	30,60	31,95	33,12
4	Indeks Gini	0,27	indeks	0,265	0,262	0,259	0,255	0,251	0,251
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	80,54	%	82,75	83,55	84,45	81,73	82,61	82,98
6	Rasio kesenjangan	0,269	indeks	0,265	0,262	0,259	0,292	0,308	0,261
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,19	indeks	68,09	69,09	69,89	68,36	69,22	69,89
8	Angka melek huruf	95,39	%	96	97	98	98,44	99,1	99,03
9	Angka rata-rata lama sekolah	8,09	tahun	9	9,5	10	10,5	8,46	8.63
10	Angka usia harapan hidup	68,51	tahun	71	71,5	71,6	68,61	68,79	68,8
11	Persentase balita gizi buruk	0,11	%	0,1	0,1	0,09	0,07	2,4	0,05
12	Angka partisipasi angkatan kerja	55,65	%	59,65	62,65	65,65	69,65	72,65	72,65
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	55,65	%	59,65	62,65	65,65	69,65	72,65	72,65
14	Tingkat pengangguran terbuka	11,02	%	10	8,5	8	10,18	8,63	8,56
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	indeks	75,9	76	76,95	81,41	86,8	70,7
16	Persentase PAD terhadap pendapatan	15-20	%	15-20	15-20	15-20	10,62	9,39	9,21
17	Opini BPK	WTP	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	32,75	%	32,94	34,15	35,46	33,92	34,11	36,38
19	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian/ terhadap PDRB	22,34	%	23	24	25	-	-	-

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
21	Produksi sektor pertanian (padi)	314168	ton	335.626	355.626	377.084	367.519	389.062	393.477
22	Produksi sektor perkebunan (sawit)	166.689	ton	170.023	173.423	176.892	205.269	205.269	205.145
23	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,43	%	0,44	0,45	0,46	0,48	0,5	0,5
24	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	16,9	%	16,8	16,7	16	15,7	15	15
25	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,42	%	0,44	0,46	0,5	0,55	0,6	0,6
26	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	8,33	%	9,5	9,7	10	10,3	10,5	10,5
27	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,33	%	12,34	12,35	12,37	12,74	12,5	12,34
28	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14,3	%	14,5	14,7	14,8	9,69	8,71	8,45
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio ketergantungan	32,18	%	32	31,8	31,6	31,3	31	31
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	**Pendidikan**								
1.1	Angka partisipasi Kasar								
1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	97,75	%	98	98	98,5	98,75	107,78	107,88
1.1.2	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	97,5	%	97,75	98	98	105,8	104,18	102,45
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan								
1.2.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD	49,64	%	50	51	52	81,58	83,83	86,31
1.2.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP	26,88	%	27	27,5	28	49,61	54,55	57,3
1.3	Angka Partisipasi Murni								
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83,49	%	85	90	95	98,05	97,95	98,05
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	67,86	%	70	75	82	86,39	85,68	86,34

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.4	Angka partisipasi sekolah :								
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	83,49	%	97,92	98,32	98,52	99,64	99,75	99,99
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	67,83	%	70,83	73,83	76,83	97,6	97,99	98,38
1.5	Angka Putus Sekolah:								
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	%	0,06	0,055	0,05	0,36	0,25	0,01
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,17	%	0,145	0,12	0,095	2,4	2,01	1,62
1.6	Angka Kelulusan:								
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	94,61	%	95,91	97,21	98,51	100	100	n/a
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	87,53	%	89,38	91,24	93,1	100	100	n/a
1.7	Angka Melanjutkan (AM):								
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,97	%	97,5	98,04	98,59	98.82	104,99	n/a
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,44	%	87,08	89,7	92,31	92,61	75,31	n/a
1.8	Fasilitas Pendidikan:								
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	51,33		51,33	51,335	51,34	52,17	44,3	51,33
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	0,127		0,127	0,127	0,127	0,101	0,0996	0,0871
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,138		0,138	0,138	0,138	9,35	5,41	
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	5,58		5,58	5,58	5,58	3,22	5,58	
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	11909	%	12028	12148	12270	12393	12516	12642
2	**Kesehatan**								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	Per 1000 KH	4	4	4	3	4	5
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	99,8		99,83	99,85	99,88	99,70	99,60	-
2.3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	139	Per 100.000 KH	123	105	93	111	207	138

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
2.4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,196		0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,227
2.5	Rasio dokter per satuan penduduk	0,195		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,159
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	71	%	100	100	100	100	100	95
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,16	%	86,86	89,57	92,28	94	95	90
2.8	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	62	%	100	100	100	100	100	35,3
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	%	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80,29	%	85,22	90,22	95,22	96,00	100	39,84
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	100	100	100	100	100
2.12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0018	%	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0038
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	51	%	80	90	95	98	100	100
2.14	Cakupan kunjungan bayi	98,74	%	99,04	99,34	99,64	99,94	99,95	99,95
2.15	Cakupan puskesmas	122,22	%	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22
2.16	Cakupan pembantu puskesmas	10,33	%	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Pekerjaan Umum:								
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	47,7	%	52,3	57,8	62,6	41,0	48,09	28,7
3.1.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase /saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	8,54	%	8,8	9,2	9,7	8,57	8,54	12,45
3.1.3	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	23,16	23,09	23,05	22,99	22,95	23,37	23,16	22,19

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
3.1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	57,85	%	60,67	63,82	67,09	55,75	53,33	66,98
3.1.5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	20	%	19,75	19,6	19,55	20,1	20	22,19
3.1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4,25	%	4,55	4,8	5,2	4,55	4,58	4,57
3.1.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	34,7	%	39,1	44,3	48,5	53,8	61,1	32
3.1.8	Persentase penduduk berakses air minum	60,7	%	62,7	64,7	66,7	68,7	70,7	72,27
3.1.9	Persentase areal kawasan kumuh	9,58	%	9,57	9,55	9,53	9,5	9,47	9,58
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
4.1	Rasio rumah layak huni	84,72	%	86,24	87,81	89,43	83,21	85,0	87,17
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	9,58	%	9,57	9,55	9,53	9,58	9,58	9,58
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	%	85,00	85,00	85,00	90,00	90	90
6	**Sosial**								
6.1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	57,21	%	59,00	62,00	63,00	55,65	57,48	60,31
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	75	%	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
3	**Pangan**								
3.1	Ketersediaan pangan utama	375,59	Rata-rata kg/thn	413,15	433,81	455,50	478,27	494,55	494,55
4	**Pertanahan**								
4.1	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat	n/a	%	0,00	10,00	25,00	50,00	75,00	75,00
5	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Tidak
5.2	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	%	100	100	100	100	100	100
5.3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	%	100	100	100	100	100	100
5.4	Timbulan sampah yang ditangani	100	%	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase cakupan area pelayanan	78	%	80	80	80	80	80	80
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,49	%	23,99	26,75	29,25	32,25	35,05	35,05
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	63	%	70	77	85	91	95	96
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	65,22	%	69,22	73,22	77,22	87	78	-
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Persentase PKK aktif	56,34	%	59,74	63,14	66,54	69,94	70	70
7.2	Persentase Posyandu aktif	100	%	100	100	100	100	100	100
7.3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42,73	%	47,72	52,72	57,72	62,72	67,72	67,72

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,04	%	1,93	1,82	1,71	1,60	1,60	1,60
8.2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,78	%	2,71	2,64	2,57	3	3	-
8.3	Ratio Akseptor KB	68,72	%	69,97	71,22	72,47	54,28	57,04	-
9	**Perhubungan**								
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	879.720	orang	880.470	881.670	882.870	879.720		879.720
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	4401	Buku	4486	4583	4695	4363	4401	4401
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	Unit	5	5	5	5	5	5
9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	%	51,45	51,75	52,05			51,2
9.5	Pemasangan Rambu-rambu	51,2	%	51,45	51,75	52,05	15,02	40	51,2
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	%	-	-	-	-	-	-
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	%	-	-	-	-	-	-
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	%	-	-	-	-	-	-
10	**Komunikasi dan Informatika**								
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	n/a	%	100	100	100	100	100	100
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
11.1	Persentase koperasi aktif	27,92	%	30,16	33,87	40,12	30,26	30,77	32,48
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif								
11.3	Persentase BPR/LKM aktif								
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,83	%	98,83	98,83	98,83	94,90	94,6	96,40
12	**Penanaman Modal**								
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	53	investor	54	57	59	53	53	53

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
13	**Kepemudaan dan Olahraga**								
13.1	Jumlah organisasi kepemudaan	n/a	organisasi	32	34	34	-	-	-
13.2	Jumlah wirausaha pemuda	n/a	orang	440	480	520	-	-	-
13.3	Jumlah atlit olahraga berprestasi	n/a	orang	27	35	40	-	-	-
14	**Statistik**								
14.1	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku ”PDRB”	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**Kebudayaan**								
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	festival	3	3	3	1	-	-
16	**Perpustakaan**								
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,20		0,21	0,21	0,22	96,00		0,00
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30		0,31	0,31	0,32	56,87		0,00
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	10314	org	10520	10731	10945			0
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15128	buku	15431	15739	16054			0
Layanan Urusan Pilihan									
1	**Pertanian**								
1.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	32,75	%	32,94	34,15	35,46	33,92	34,11	36,78
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,03	ton	5,10	5,23	5,34	5,2	5,49	5,34
2	**Perdagangan**								
2.1	Ekspor Bersih Perdagangan	2.581.576.169	Rp	2.633.207.693	2.685.871.847	2.739.589.284		-	266.220.569.860

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
3	**Kelautan dan Perikanan**								
3.1	Produksi perikanan	28.295	ton	28.525	28.902	29.075	28.861	31.958	27.597
3.2	Konsumsi ikan	40	kg/kapita/	41	41	41	41,23	43,52	43,82
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	41,43	%	50,51	56,89	63,24	44,29	44,29	58,57
Penunjang Urusan									
1	**Perencanaan Pembangunan**								
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	%	100	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	%	100	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	%	100	100	100	100	100	100
2	**Keuangan**								
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
3.1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	n/a	%	60	62	64	68	70	70
4	**Penelitian dan pengembangan**								
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	%	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	%	100	100	100	100	100	100
4.3	Penerapan SIDa:								

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	n/a	%	100	100	100	100	100	100
5	**Pengawasan**								
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	76	%	80	85	88	92	95	95
6	**Sekretariat Dewan**								
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Keistimewaan dan Kekhususan									
1	**Pendidikan**								
1.1	Jumlah dayah yang memenuhi standarisasi pendidian dayah (dayah tipe A plus, A, B, C, D)	199	Unit	199	203	207	207	208	208
2	**Keagamaan**								
2.1	Terbentuknya badan kesejahteraan mesjid	n/a	unit	4	5	8	8	8	8
2.2	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	100	rasio	100	100	100	100	100	100

Tabel 8.2b
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB	0,97	%	4,5	5
2	Laju inflasi	1,27	%	3,00	3,00
3	PDRB per kapita	33,12	Rp. Juta	33,46	33,85
4	Indeks Gini	0,261	indeks	0,255	0,251
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	82,98	%	84,00	85,10
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,261	indeks	0,255	0,251
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,33	indeks	70,90	71,79
8	Angka melek huruf	95,39	%	99	99,5
9	Angka rata-rata lama sekolah	8,63	tahun	10,5	11
10	Angka usia harapan hidup	68,80	tahun	71,7	71,9
11	Persentase balita gizi buruk	0,11	%	0,07	0,05
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,39	%	62,53	64,00
13	Tingkat pengangguran terbuka	8,56	%	7,5	6,9
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,07	indeks	77,5	80
15	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,95	%	10,94	11
16	Opini BPK	WTP	WTP/WDP	WTP	WTP
17	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	36,38	%	36,75	37,3
18	Produktivitas padi	5,34	ton/ha	5,35	5,40
19	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,42	%	0,55	0,6
20	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	8,33	%	10,3	10,5
21	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-5,01	%	3,19	3,50
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Rasio ketergantungan	56,16	%	55,96	55,75
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	**Pendidikan**				
1.1	Angka partisipasi Kasar				
1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107,88	%	100	100
1.1.2	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	102,45	%	100	100
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan				
1.2.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD	86,31	%	90	95
1.2.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP	57,3	%	61	66
1.3	Angka Partisipasi Murni				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,05	%	98,5	99

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86,34	%	88	90
1.4	Angka partisipasi sekolah :				
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,99	%	100	100
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98,38	%	100	100
1.5	Angka Putus Sekolah:				
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	%	0	0
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,62	%	0,08	0,07
1.6	Angka Kelulusan:				
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	%	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	%	100	100
1.7	Angka Melanjutkan (AM):				
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,97	%	99,15	99,2
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,44	%	94,81	95
1.8	Fasilitas Pendidikan:				
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	51,33	%	54,12	55
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	0,0871	%	0,127	0,127
1.11	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,138	%	0,138	0,138
1.12	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	5,58	%	5,58	5,58
1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	11909	%	12393	12517
2	**Kesehatan**				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	Per 1000 KH	4	3
2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	138	Per 100.000 KH	120	110
2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,227	1:30.000 Penduduk	0,227	0,232
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,159	40/100.000 Penduduk	0,164	0,161
2.5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95	%	100	100
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	%	100	100
2.7	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	35,3	%	50	60
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	%	100	100
2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	39,84	%	45,00	48
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
2.11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0038	%	0,0037	0,0037
2.12	Cakupan kunjungan bayi	88	%	90	100
2.13	Cakupan puskesmas	118,52	%	118,52	118,52
2.14	Cakupan puskesmas pembantu	10,09	%	10,09	10,45
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Pekerjaan Umum:				
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	28,7	%	29	30
3.1.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	12,45	%	12,63	12,81
3.1.3	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	22,19	%	21,95	21,7
3.1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	66,98	%	70,43	73,95
3.1.5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	18,68	%	18,35	18,00
3.1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4,57	%	4,65	4,74
3.1.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	32	%	33	34
3.1.8	Persentase penduduk berakses air minum	72,27	%	73,04	74,43
3.1.9	Persentase areal kawasan kumuh	9,58	%	9,5	9,47
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
4.1	Rasio rumah layak huni	87,17	%	88,25	89,12
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	9,58	%	9,5	9,47
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	70	%	70	80
5.2	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	60	%	70	90
6	**Sosial**				
6.1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	100	100
6.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	%	65	70
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	**Tenaga Kerja**				
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,31	%	62,53	64,00

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	%	100	100
3	**Pangan**				
3.1	Ketersediaan pangan utama	469,70	Rata-rata kg/thn	481,44	493,47
4	**Pertanahan**				
4.1	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat	n/a	%	50,00	75,00
5	**Lingkungan Hidup**				
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada
5.2	Indeks Kualitas Air	0,2			
5.3	Indeks Kualitas Udara				
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	%	100	100
5.5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	%	100	100
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	17,09	%		
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
6.1	Persentase penduduk ber-KTP elektronik	96	%	100	100
6.2	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13,28	%	18,21	20,64
6,3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	85	%	92	95
6,4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12,12	%	21,21	36,36
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	2,34	%	2,40	2,46
7.2	Persentase peningkatan desa mandiri	0	%	0,00	0,23
7.3	Persentase PKK aktif	100	%	100	100
7.4	Persentase Posyandu aktif	100	%	100	100
7.5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42,72	%	42,72	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,04	%	1,60	1,60
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,46		2,46	2,465
8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	51	%	52	55
8.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	0	%	0	0
9	**Perhubungan**				
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	879.720	orang	884.370	884.120
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	4401	Buku	4810	4810
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	Unit	5	5
9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	%	52,35	52,6
9.5	Pemasangan Rambu-rambu	51,2	%	52,35	52,6
10	**Komunikasi dan Informatika**				
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	%	100	100
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**				
11.1	Persentase koperasi aktif	32,48	%	35,86	40,35
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,40	%	96,85	97,05
12	**Penanaman Modal**				
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53	investor	62	65
12.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6,83	%	6,90	6,97
12.3	Persentase Peningkatan Retribusi Perizinan	-2,71	%	0,63	0,83
13	**Kepemudaan dan Olahraga**				
13.1	Jumlah organisasi kepemudaan		organisasi	36	36
13.2	Jumlah wirausaha pemuda		orang	560	600
13.3	Jumlah atlit olahraga berprestasi		orang	46	50
14	**Statistik**				
14.1	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada
14.2	Buku ”PDRB”	Ada	Ada/Tidak	Ada	Ada
15	**Kebudayaan**				
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	festival	3	3
16	**Perpustakaan**				
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,20		0,22	0,22
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30		0,23	0,23

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	10314	org	11164	11387
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15128	buku	16375	16703
Layanan Urusan Pilihan					
1	**Pertanian**				
1.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	32,75	%	36,78	37,30
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,3	ton	5,47	5,50
1.3	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kelapa Sawit	11,28	ton/ha	11,51	11,74
1.4	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kakao	0,40	ton/ha	0,44	0,48
1.5	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kelapa Dalam	0,70	ton/ha	0,77	0,85
1.6	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Pinang	0,40	ton/ha	0,44	0,48
1.7	Produksi Daging Ternak Sapi	8020	Ton	8.341	8.758
1.8	Produksi Ayam Pedaging	12.955	Ton	13.214	13.611
2	**Perdagangan**				
2.1	Ekspor Bersih Perdagangan	19.015.754,99	USD	22.190.354,45	25.479.178,57
2.3	Persentase Peningkatan Retribusi Pasar	8,04	%	10,00	12
3	**Perindustrian**				
3.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		%		
3	**Kelautan dan Perikanan**				
3.1	Produksi perikanan	27.597	ton	29.718	30.244
3.2	Konsumsi ikan	43,82	kg/kapita/ tahun	47,68	49,51
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	58,57	%	69,29	78,57
Penunjang Urusan					
1	**Perencanaan Pembangunan**				
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	%	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	%	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	%	100	100
2	**Keuangan**				
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP/WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				
3.1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	68	%	68	70
4	**Penelitian dan pengembangan**				
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	%	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	%	100	100
4.3	Penerapan SIDa:				
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100	%	100	100
5	**Pengawasan**				
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	76	%	92	95
6	**Sekretariat Dewan**				
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	Ada / Tidak	ada	ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	Ada / Tidak	ada	ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	Ada / Tidak	ada	ada
7	**Kewilayahan**				
1	**Kecamatan**				
1.1	Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	70,07	indeks	77,5	80
1.2	Persentase gampong tertinggal	73,36	%	58,69	41,08
1.3	Persentase gampong dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik		%		

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Target Tahun	
				2021	2022
Keistimewaan dan Kekhususan					
1	**Pendidikan**				
1.1	Jumlah dayah yang memenuhi standarisasi pendidian dayah (dayah tipe A plus, A, B, C, D)	199	Unit	207	208
2	**Keagamaan**				
2.1	Terbentuknya badan kesejahteraan mesjid	n/a	unit	8	8
2.2	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	100	rasio	100	100

BAB IX
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 344 menyebutkan bahwa Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD dan Berdasarkan Evaluasi RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penetapan indikator dan target kinerja yang lebih realistis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi indikator capaian. Perubahan RPJM dilakukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (Bersemi) perlu didukung oleh konsistensi kebijakan pemerintah, keberpihakan kepada rakyat, dan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050/826/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Perubahan RPJM" dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan RPJM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pembina
   1. Mengkoordinasi jadwal kegiatan dan penyusunan rancangan perubahan RPJM;
   2. Memberikan arahan serta masukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan perubahan RPJM.
b. Tim Penyusun
   1. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan;
   2. Melaksanakan konsultasi publik
   3. Menyusun rancangan perubahan RPJM;
   4. Menyempurnakan rancangan perubahan RPJM;
   5. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan RPJM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Desember 2020 M
8 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050/826/2020
TANGGAL 23 DESEMBER 2020 M
8 JUMADIL AWAL 1442 H

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	**Tim Pembina**	
1	Bupati Aceh Utara	Ketua
2	Wakil Bupati Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Penanggung Jawab
4	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
II	**Tim Penyusun**	
5	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Ketua
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Wakil Ketua
7	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota
8	Kabid. Penelitian,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kab. Aceh Utara	Anggota
III	**Kelompok Kerja**	
	KELOMPOK KERJA (POKJA I) INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Aceh Utara	Ketua
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara	Anggota
13	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Utara	Anggota
14	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
15	Kasubbid. Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
16	Kasubbid. Prasarana Wilayah dan Perumahan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
17	Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
18	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
	KELOMPOK KERJA (POKJA II) PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
19	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Aceh Utara	Ketua
20	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	Anggota

1	2	3
21	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
22	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Utara	Anggota
23	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
24	Kasubbid. Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
25	Kasubbid. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
26	Kasubbid. Pemerintahan dan Kelembagaan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
27	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
KELOMPOK KERJA (POKJA III) PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM		
28	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Aceh Utara	Ketua
29	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
30	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
31	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
32	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota
33	Kasubbid. Pengembangan Usaha dan Investasi Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
34	Kasubbid. Ketahanan Pangan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
35	Kasubbid. Industri dan Perdagangan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
36	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
37	Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
KELOMPOK KERJA (POKJA IV) PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN		
38	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Ketua
39	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara	Anggota
40	Kasubbid. Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
41	Kasubbid. Data dan Publikasi Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
42	Kasubbid. Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
43	Kasubbid. Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
44	Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
45	Kasubbid. Inovasi dan Teknologi Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota

1	2	3
46	Kasubbag. Penyusunan Program Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
47	Staf Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
48	Staf Subbag. Penyusunan Program Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB